

352.13

WIA

E e.1

**EKSTENSIFIKASI  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN  
KOTA MATARAM**

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota

Oleh :

**I NENGAH WIARNANTA**  
L4D 002 019



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2003**

**[UPT-PUSTAK-INDIP]**

**EKSTENSIFIKASI  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN  
KOTA MATARAM**

Tesis diajukan Kepada  
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

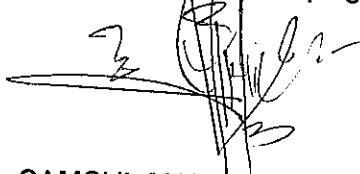
**I NENGAH WIARNANTA**  
L4D 002 019

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis  
Tanggal 23 September 2003

Dinyatakan Lulus  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

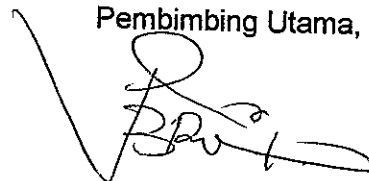
Semarang, September 2003

Pembimbing Pendamping,



SAMSUL MA'RIF, SP, MT.

Pembimbing Utama,



PM. BROTOSUNARYO, SE, MSP.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Teknik Pembangunan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro



  
Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA.

UPT-PUSTAK-UNDIP

No. Daft.: 33.27/T/MTPK/C  
Tgl. : 25 Feb '04

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, 23 September 2003



**INENGAH WIARNANTA**

L4D 002 019

---

*Antusiasme dan ketekunan  
Dapat membuat seorang yang rata-rata  
Menjadi unggul;  
Kecerobohan dan kemalasan  
Dapat membuat seorang yang unggul  
Menjadi rata-rata.*

*William Ward*

---



*Tesis ini kupersembahkan untuk :  
Istriku tercinta "Wini" dan jagoanku tersayang "Rio"  
Trimakasih atas kerelaannya  
kehilangan waktu untuk berkumpul bersama*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur dihadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa), atas segala anugrah-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini.

Tesis yang berjudul **“Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan Kota Mataram”** ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan guna memenuhi persyaratan mencapai gelar Magister Teknik (MT) pada Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Kota (MTPK) Universitas Diponegoro Semarang.

Secara substansial Tesis ini bertujuan untuk menggali dan menemukan jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah apa saja yang dapat diterapkan di Kota Mataram, sebagai upaya ekstensifikasi PAD khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini dipandang cukup aktual, mengingat dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, maka Pemerintah Kota Mataram dihadapkan pada tantangan agar secara proaktif melakukan peningkatan penerimaan PAD yang sangat diperlukan guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah secara mandiri dan berkelanjutan.

Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu proses penyusunan Tesis ini hingga penulis berhasil menyelesaikan studi di MTPK UNDIP. Terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA, selaku Ketua Program Studi MTPK UNDIP sekaligus dosen pengajar, yang telah membuka wawasan penulis tentang Perencanaan Pembangunan Kota.
2. Bapak PM. Brotosunaryo, SE, MSP. selaku Mentor, atas masukan, arahan, bimbingan dan dorongannya kepada penulis untuk segera merampungkan Tesis ini.
3. Bapak Samsul Ma'rif, SP, MT selaku Co-Mentor, dosen, “*kakak*” sekaligus “*orang tua*” penulis selama di Semarang, yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan dan motivasi sejak proses awal penyusunan Pra-Tesis hingga selesainya Tesis ini.
4. Bapak R. Mulyo Hendarto, SE, MSP. selaku pembahas yang telah memberikan koreksi dan saran-saran untuk penyempurnaan Tesis ini.
5. Bapak Nugroho SBM, SE, MSP. selaku penguji yang telah memberikan saran untuk penyempurnaan Tesis ini.
6. Ketua CPCO-CBUIM serta seluruh Pengelola Proyek CBUIM Loan ADB No. 1572-INO yang telah memberikan kesempatan mengikuti tugas belajar dan bea siswa.
7. Bapak Drs. M. Nasrun, selaku Kepala Dinas Pendapatan Kota Mataram yang telah mengizinkan penulis meninggalkan pekerjaan di kantor untuk mengikuti tugas belajar di MTPK-Undip.

8. Ibu Dra. B. Evi Ganevia, MSi., dan Bapak Drs. I Made Putra Wardaya di Dinas Pendapatan Kota Mataram atas diskusi dan masukannya tentang perpajakan dan retribusi daerah.
9. Seluruh rekan kerja di Dinas Pendapatan, serta di unit kerja lainnya lingkup Pemerintah Kota Mataram, atas bantuan dan kerjasamanya selama proses pengumpulan data.
10. Seluruh narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjawab kuesioner, berdiskusi serta memberikan data lainnya yang diperlukan dalam penyusunan Tesis ini.
11. Rekan-rekan di bagian administrasi Program Pascasarjana MTPK UNDIP yang telah mempersiapkan pelaksanaan sidang Tesis ini, serta selalu membantu dan mempermudah segala proses administrasi penulis mulai dari awal penerimaan mahasiswa sampai berakhirnya masa perkuliahan, tanpa harus berbelit-belit.
12. Rekan-rekan mahasiswa MTPK Undip, khususnya angkatan CBUIM V atas kritik, saran dan kerjasamanya.
13. Istri dan buah hatiku tercinta, atas doa, cinta, pengertian dan motivasinya.
14. Ibu dan Bapak di Mataram, yang selalu mendampingi dengan doa.
15. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian Tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Akhir kata, semoga kebaikan berdatangan dari segala arah dan kita semua selalu dilimpahkan kemuliaan dan kebahagiaan. Segala kesalahan dan perbedaan persepsi yang mungkin terjadi dalam substansi penulisan Tesis ini, adalah semata-mata karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Untuk itu mohon koreksi dan masukannya demi penyempurnaan lebih lanjut.

Semarang, September 2003

I Nengah Wiarnanta

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT .....	xviii
 <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan dan Sasaran Studi .....	10
1.3.1. Tujuan Studi .....	10
1.3.2. Sasaran Studi .....	11
1.4. Ruang Lingkup Studi .....	12
1.4.1. Ruang Lingkup Substansial .....	12
1.4.2. Ruang Lingkup Spasial .....	13
1.5. Kerangka Pemikiran .....	15
1.6. Pendekatan dan Metoda Pelaksanaan Studi .....	20
1.6.1. Pendekatan Studi .....	20
1.6.2. Metoda Pelaksanaan Studi .....	22
1.7. Sistematika Penulisan .....	45
 <b>BAB II EKSTENSIFIKASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KOTA .....</b>	 <b>47</b>
2.1. Sumber-sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah .....	47
2.2. Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan Daerah .....	58
2.3. Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	59
2.3.1. Pengertian Pajak Daerah .....	59
2.3.2. Pengertian Retribusi Daerah .....	61
2.3.3. Dasar Hukum Pajak Daerah .....	64
2.3.4. Dasar Hukum Retribusi Daerah .....	65
2.4. Teori Ekstensifikasi dalam Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	65
2.5. Kriteria-kriteria Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru .....	67
2.5.1. Kriteria-kriteria Penetapan Pajak Daerah baru .....	67
2.5.2. Kriteria-kriteria Penetapan Retribusi Daerah baru .....	70
2.6. Prinsip-prinsip Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	72

2.6.1.	Prinsip-prinsip Pemungutan Pajak Daerah.....	72
2.6.2.	Prinsip-prinsip Pemungutan Retribusi Daerah .....	74
2.7.	Fungsi Pemerintah Kota dalam Melaksanakan Ektensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	75
2.8.	Sintesa Kajian Pustaka .....	77

### **BAB III KAJIAN UMUM PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM .....**

3.1.	Gambaran Keruangan Kota Mataram .....	79
3.1.1.	Terbentuknya Kota Mataram .....	79
3.1.2.	Letak Geografis Kota Mataram .....	81
3.1.3.	Potensi Khusus .....	84
3.1.4.	Kondisi Khusus Mengenai Perencanaan .....	87
3.2.	Sosial Kependudukan Kota Mataram.....	92
3.3.	Potensi Perekonomian dan Variabel Makro Perekonomian Kota Mataram .....	94
3.3.1.	Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB .....	94
3.3.2.	Struktur Perekonomian .....	96
3.3.3.	Pertumbuhan Ekonomi Sektoral .....	97
3.3.4.	Pendapatan Per Kapita .....	98
3.3.5.	Tingkat Inflasi Kota Mataram .....	99
3.3.6.	Perkembangan Aktivitas Ekonomi .....	100
3.4.	Keuangan Pemerintah Kota Mataram .....	100
3.4.1.	Masalah Keuangan Pemerintah Kota Mataram .....	100
3.4.2.	Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram .....	101
3.4.3.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram .....	104
3.4.4.	Tinjauan Penerimaan Pajak Daerah Kota Mataram .....	106
3.4.5.	Tinjauan Penerimaan Retribusi Daerah Kota Mataram .....	107
3.4.6.	Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD dan APBD Kota Mataram .....	110

### **BAB IV IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM .....**

4.1.	Identifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Mataram .....	112
4.1.1.	Identifikasi Jenis-Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Mataram .....	112
4.1.1.1.	Identifikasi Jenis-Jenis Pajak Daerah di Kota Mataram .....	115
4.1.1.2.	Identifikasi Jenis-jenis Retribusi Daerah di Kota Mataram .....	120

4.1.1.3.	Rekapitulasi Hasil Identifikasi Jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Mataram .....	129
4.1.2.	Identifikasi Besaran Potensi Aktual Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Mataram.....	133
4.1.2.1.	Identifikasi Besaran Potensi Aktual Pajak Daerah di Kota Mataram .....	133
4.1.2.2.	Identifikasi Besaran Potensi Aktual Retribusi Daerah di Kota Mataram .....	145
4.1.2.3.	Rekapitulasi Hasil Identifikasi Besaran Potensi Aktual Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Mataram .....	164
4.2.	Analisis Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan Kota Mataram .....	165
4.2.1.	Analisis Kelayakan Normatif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Mataram .....	165
4.2.1.1.	Analisis Kelayakan Normatif Pajak Daerah .....	165
4.2.1.2.	Analisis Kelayakan Normatif Retribusi Daerah .....	167
4.2.2.	Analisis Efisiensi Ekonomi (Rasio Efisiensi) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Mataram .....	169
4.2.2.1.	Analisis Efisiensi Ekonomi Pajak Daerah .....	169
4.2.2.2.	Analisis Efisiensi Ekonomi Retribusi Daerah .....	173
4.2.2.3.	Rekapitulasi Hasil Analisis Efisiensi Ekonomi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	182
4.2.3.	Analisis Proses Hierarki Analitik (PHA) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Mataram .....	183
4.2.3.1.	Analisis Proses Hierarki Analitik (PHA) Pajak Daerah .....	183
4.2.3.2.	Analisis Proses Hierarki Analitik (PHA) Retribusi Daerah .....	187
4.3.	Analisis Variabel Ekonomi Makro Kota Mataram .....	195
4.4.	Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan Kota Mataram .....	203
4.4.1.	Matrik Silang Tipologi antara Kelayakan Normatif dan PHA .....	203
4.4.2.	Proyeksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Kontribusinya Dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan Kota Mataram .....	205

4.4.2.1.	Proyeksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Mataram .....	205
4.4.2.2.	Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan Kota Mataram .....	213
4.5.	Program Rencana Tindak Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan Kota Mataram .....	218
<b>BAB V</b>	<b>Kesimpulan dan Rekomendasi .....</b>	<b>225</b>
5.1.	Kesimpulan .....	225
5.2.	Rekomendasi .....	226
DAFTAR PUSTAKA .....		230
LAMPIRAN .....		236

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2001 dan 2002 .....	4
Tabel I.2.	Ikhtisar Anggaran Belanja Kota Mataram Tahun Anggaran 1998/1999 s/d 2002 .....	6
Tabel I.3.	Kebutuhan Data Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan Kota Mataram .....	24
Tabel I.4.	Komposisi Narasumber Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Mataram .....	27
Tabel I.5.	Analisis Skoring Kelayakan Normatif Pajak Daerah Baru di Kota Mataram .....	33
Tabel I.6.	Analisis Skoring Kelayakan Normatif Retribusi Jasa Umum Baru di Kota Mataram .....	33
Tabel I.7.	Analisis Skoring Kelayakan Normatif Retribusi Jasa Usaha Baru di Kota Mataram .....	34
Tabel I.8.	Analisis Skoring Kelayakan Normatif Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Mataram .....	34
Tabel I.9.	Skala Banding Secara Berpasangan dalam Model PHA .....	37
Tabel II.1.	Sumber-sumber Pembiayaan Nonkonvensional .....	58
Tabel II.2.	Kriteria Penetapan Pajak Daerah Baru .....	69
Tabel III.1.	Peruntukan Lahan dan Penggunaan Lahan Kota Mataram Tahun 2000 .....	85
Tabel III.2.	Jumlah dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kota Mataram Tahun 1998-2002 .....	92
Tabel III.3.	Komposisi Mata Pencarian Penduduk Kota Mataram Tahun 2001 .....	94
Tabel III.4.	Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Kota Mataram Tahun 1998-2002 .....	95

Tabel III.5.	Distribusi Persentase PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kota Mataram Tahun 1998 – 2002 (Persen) .....	96
Tabel III.6.	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Mataram Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1998 – 2002 (Persen) .....	97
Tabel III.7.	Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Mataram Tahun 1998 – 2002 .....	98
Tabel III.8.	Tingkat Inflasi Kota Mataram dan Nasional Tahun 1998-2002 .....	99
Tabel III.9.	Realisasi Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2000 – 2001 .....	103
Tabel III.10.	Kontribusi Pendapatan Masing-masing Pos PAD Terhadap Total PAD Kota Mataram Tahun 2001-2002 .....	105
Tabel III.11.	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Mataram Tahun 2001-2002 .....	107
Tabel III.12.	Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Mataram Tahun 2001-2002 .....	108
Tabel IV.1.	Usulan Jenis-Jenis Pajak Daerah Baru dari Dinas / Instansi Pengelola PAD di Kota Mataram .....	116
Tabel IV.2.	Pajak Daerah yang Berlaku di Daerah Lain .....	118
Tabel IV.3.	Usulan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Baru dari Dinas/Instansi Pengelola PAD di Kota Mataram .....	121
Tabel IV.4.	Retribusi Daerah yang Berlaku di Daerah Lain .....	125
Tabel IV.5.	Jenis-Jenis Retribusi Daerah Baru dari Kajian Literatur/Teoritis dan Yuridis .....	128
Tabel IV.6.	Rekapitulasi Hasil Identifikasi Jenis-Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Baru di Kota Mataram .....	129
Tabel IV.7.	Perkembangan dan Pertumbuhan Jumlah serta Jenis Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Mataram Tahun 2001-2002 .....	136
Tabel IV.8.	Potensi Aktual Usulan Pajak Parkir di Kota Mataram .....	137



Tabel IV.9.	Besaran Potensi Aktual Pajak Sarang Burung Walet .....	140
Tabel IV.10.	Potensi Aktual Retribusi Izin Usaha Pariwisata di Kota Mataram .....	152
Tabel IV.11.	Potensi Aktual Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta di Kota Mataram .....	156
Tabel IV.12.	Jenis dan Jumlah Populasi Ternak serta Jumlah Usaha Peternakan di Kota Mataram Tahun 2000 .....	162
Tabel IV.13.	Rekapitulasi Hasil Identifikasi Besaran Potensi Aktual Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Baru di Kota Mataram ..	164
Tabel IV.14.	Analisis Skoring Kelayakan Normatif Pajak Daerah Baru di Kota Mataram .....	166
Tabel IV.15.	Analisis Skoring Kelayakan Normatif Retribusi Jasa Umum Baru di Kota Mataram .....	168
Tabel IV.16.	Analisis Skoring Kelayakan Normatif Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Mataram .....	169
Tabel IV.17.	Rekapitulasi Hasil Analisis Efisiensi Ekonomi (Rasio Efisiensi) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Baru di Kota Mataram .....	182
Tabel IV.18.	Nilai Prioritas Kriteria Pemilihan Pajak Daerah .....	186
Tabel IV.19.	Nilai Prioritas Alternatif Pajak Daerah .....	187
Tabel IV.20.	Nilai Prioritas Kriteria Pemilihan Retribusi Jasa Umum .....	190
Tabel IV.21.	Nilai Prioritas Alternatif Retribusi Jasa Umum .....	191
Tabel IV.22.	Nilai Prioritas Kriteria Pemilihan Retribusi Perizinan Tertentu .....	194
Tabel IV.23.	Nilai Prioritas Alternatif Retribusi Perizinan Tertentu .....	194
Tabel IV.24.	Perkembangan Unit-Unit Usaha di Kota Mataram Tahun 1998-2002 .....	199
Tabel IV.25.	Proyeksi Perkembangan Potensi Aktual Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Baru Kota Mataram Tahun Kedua Hingga Tahun Kelima Rencana Penerapannya .....	208

Tabel IV.26.	Proyeksi Perkembangan Biaya Pungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Baru Kota Mataram Tahun Kedua Hingga Tahun Kelima Rencana Penerapannya .....	210
Tabel IV.27.	Proyeksi Perkembangan Rasio Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Baru Kota Mataram Tahun Kedua Hingga Tahun Kelima Rencana Penerapannya .....	211
Tabel IV.28.	Perbandingan PAD Kota Mataram Tahun 2002 Sebelum dan Setelah Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	217
Tabel IV.29.	Analisis SWOT Pelaksanaan Ektensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Mataram .....	221
Tabel IV.30.	Program Rencana Tindak Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Mataram .....	222
Tabel IV.31.	Jadwal Waktu Pelaksanaan Program Rencana Tindak Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Mataram .....	224

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Grafik Perkembangan Anggaran Belanja Kota Mataram Tahun Anggaran 1998/1999 s/d 2002 .....	6
Gambar 1.2.	Peta Administrasi Kota Mataram .....	14
Gambar 1.3.	Kerangka Pemikiran Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan Kota Mataram .....	19
Gambar 1.4.	Kerangka Analisis Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan Kota Mataram .....	29
Gambar 1.5.	Model Hierarki dalam Metode PHA .....	38
Gambar 1.6.	Matrik Silang Tipologi Kelayakan Normatif dan PHA .....	42
Gambar 3.1.	Peta Propinsi Nusa Tenggara Barat .....	82
Gambar 3.2.	Grafik Persentase Luas Wilayah Kota Mataram Menurut Kecamatan .....	83
Gambar 3.3.	Grafik Penggunaan Lahan Kota Mataram Tahun 2000 .....	85
Gambar 3.4.	Peta Tata Guna Lahan Kota Mataram Tahun 2002 .....	86
Gambar 3.5.	Peta Bagian Wilayah Kota (BWK) Kota Mataram .....	89
Gambar 3.6.	Peta Penyebaran Penduduk Kota Mataram .....	93
Gambar 3.7.	Grafik Perkembangan PDRB Kota Mataram atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku Tahun 1998-2002 .....	95
Gambar 3.8.	Grafik Komposisi Penerimaan APBD Kota Mataram Tahun 2001 dan Tahun 2002 .....	104
Gambar 4.1.	Usaha Sarang Burung Walet di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Ampenan Kota Mataram .....	117
Gambar 4.2.	Peta Sebaran Beberapa Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Mataram .....	132
Gambar 4.3.	Peta Sebaran Lokasi Potensi Pajak Parkir Kota Mataram .....	138

Gambar 4.4.	Peta Sebaran Lokasi Usaha Sarang Burung Walet Kota Mataram .....	144
Gambar 4.5.	Wujud Alat Angkutan Tradisional Cidomo .....	147
Gambar 4.6.	Peta Sebaran Potensi Retribusi Izin Usaha Pariwisata di Kota Mataram .....	154
Gambar 4.7.	Peta Sebaran Potensi Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta di Kota Mataram .....	157
Gambar 4.8.	Struktur Hierarki Usaha Ekstensifikasi Pajak Daerah Kota Mataram .....	184
Gambar 4.9.	Grafik Nilai Prioritas Alternatif Pajak Daerah .....	187
Gambar 4.10.	Struktur Hierarki Usaha Ekstensifikasi Retribusi Jasa Umum Kota Mataram .....	188
Gambar 4.11.	Grafik Nilai Prioritas Alternatif Retribusi Jasa Umum .....	191
Gambar 4.12.	Struktur Hierarki Usaha Ekstensifikasi Retribusi Perizinan Tertentu Kota Mataram .....	192
Gambar 4.13.	Grafik Nilai Prioritas Alternatif Retribusi Perizinan Tertentu .....	195
Gambar 4.14.	Grafik Perkembangan Pendapatan per Kapita Kota Mataram Tahun 1998-2002 .....	197
Gambar 4.15.	Grafik Tingkat Inflasi Kota Mataram Tahun 1998-2002 .....	198
Gambar 4.16.	Grafik Perkembangan Unit-Unit Usaha di Kota Mataram Tahun 1998-2002 .....	199
Gambar 4.17.	Peta Tata Guna Lahan Kota Mataram Tahun 1994 .....	202
Gambar 4.18.	Matrik Silang Tipologi Kelayakan Normatif dan PHA .....	204
Gambar 4.19.	Grafik Batang Rasio Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Baru Kota Mataram Tahun Pertama Hingga Tahun Kelima Rencananya .....	212

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A : Kuesioner Usulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Baru dari Dinas/Instansi .....	236
Lampiran B : Kuesioner PHA .....	237
• Kuesioner Pajak Daerah .....	237
• Kuesioner Retribusi Jasa Umum .....	244
• Kuesioner Retribusi Perizinan Tertentu .....	252
Lampiran C : Rekapitulasi Perda yang Dipertimbangkan untuk dibatalan Beserta Alasan Pembatalannya .....	265
Lampiran D : Kompilasi Jawaban Narasumber atas Kuesioner PHA .....	287
• Jawaban Kuesioner Pajak Daerah .....	287
• Jawaban Kuesioner Retribusi Jasa Umum .....	288
• Jawaban Kuesioner Retribusi Perizinan Tertentu .....	289
Lampiran E : Printout Expert Choice .....	297
Lampiran F : Daftar Nama Narasumber untuk Proses Hierarki Analitik (PHA) .....	306

## ABSTRAK

*Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 merupakan awal pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang lebih luas nyata dan bertanggung jawab. Konsekuensi dari otonomi daerah adalah adanya tuntutan kemandirian daerah. Daerah harus lebih mandiri, terutama dalam hal pembiayaan pembangunannya. Ketergantungan pendanaan dari pemerintah pusat harus dapat dikurangi. Untuk dapat mengurangi ketergantungan tersebut, daerah harus menggali sumber-sumber pendapatannya sendiri (PAD).*

*Secara umum, kontribusi PAD kabupaten/kota di Indonesia terhadap APBD-nya masih relatif kecil. Demikian pula halnya dengan Kota Mataram. Pada tahun 2002 kontribusi PAD terhadap APBD Kota Mataram hanya sebesar 8,01%. Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan Pemerintah Kota Mataram terhadap bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat. Dengan berlakunya otonomi daerah, maka Pemerintah Kota Mataram harus berusaha mengurangi ketergantungan tersebut.*

*Upaya peningkatan PAD yang antara lain bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah yang telah dilakukan oleh Kota Mataram selama ini adalah melakukan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. Pelaksanaan intensifikasi ini telah dilaksanakan secara optimal dengan melibatkan suatu tim khusus, yaitu Tim Peningkatan PAD. Sementara itu upaya ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah belum dilakukan secara optimal.*

*Dari proses identifikasi yang dilakukan, ditemukan dua belas jenis pajak daerah dan retribusi daerah baru, yang terdiri dari dua jenis pajak daerah dan sepuluh jenis retribusi daerah baru. Setelah dilakukan serangkaian analisis atas jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah hasil identifikasi tersebut, ditemukan tiga jenis pajak daerah dan retribusi daerah baru, yang layak diberlakukan di Kota Mataram. Alat analisis yang digunakan antara lain analisis normatif dan Proses Hierarki Analitik.*

*Ketiga jenis pajak daerah dan retribusi daerah tersebut adalah Pajak Parkir, Retribusi Jasa Atas Pekerjaan dan Retribusi Izin Usaha Pariwisata. Ketiga jenis pajak daerah dan retribusi daerah ini merupakan prioritas pertama untuk dapat diberlakukan di Kota Mataram.*

*Pajak Parkir, Retribusi Jasa Atas Pekerjaan dan Retribusi Izin Usaha Pariwisata apabila diberlakukan di Kota Mataram, mampu memberikan kontribusi sebesar 8,93% terhadap PAD. Untuk itu Pemerintah Kota Mataram perlu mempertimbangkan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memberlakukan ketiga jenis pajak daerah dan retribusi daerah tersebut.*

## **ABSTRACT**

*The enactment of Law No. 22/1999 and Law No. 25/1999 constitute the beginning of a wider, more responsible and concrete regional autonomy realization in Indonesia. The consequence was regional independency. Thus, a region should create a self-supporting condition, especially the development finances, in order to achieve reduction to the budgetary dependency from the central government. As consequences, local regions should explore the potential local own revenues resources (PAD).*

*Generally, the contribution of municipal or city's local own revenue in Indonesia was relatively small. It so happens in Mataram Municipality. High dependency of budgetary aid from the central government was shown by the local own revenue contribution to Mataram municipal RGDP (PDRB) of 8,01 percent in year 2002. Regarding regional autonomy realization, the municipal government should try to reduce the budgetary dependency.*

*The attempt for the improvement of local own revenue from the municipal government was the intensification of local taxes and retribution. Thus, it was being implemented optimally with the involvement of special team for the local own revenue improvement. Meanwhile, the attempt of local taxes and retribution extensification had not been done optimally.*

*The identification shows twelve sorts of contribution from local taxes and retributions, which consist of two sorts of local taxes and ten sorts of local retribution. After a set of analysis on every sort of local taxes and retributions, the result shows three new local taxes and retribution which contains parking taxes, services on jobs retribution and tourism business license retribution. Those sectors were feasible to be carried out as the first priority in Mataram Municipality with the predicted contribution of 8,93 percent. The analysis instrument used normative analysis and analytic hierarchical process.*

*Therefore, the Municipal government should consider and undertake action to exceed the three sorts of local taxes and retribution.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daaerah merupakan awal pelaksanaan otonomi daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Salah satu konsekuensi otonomi daerah adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya, mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Daerah harus mempunyai dana yang cukup untuk melakukan kegiatan, baik kegiatan rutin maupun pembangunan. Daerah harus membayar seluruh gaji pegawai daerah, pegawai pusat yang statusnya dialihkan menjadi pegawai daerah, dan anggota legislatif daerah. Disamping itu daerah juga dituntut untuk tetap menyelenggarakan jasa-jasa publik dan kegiatan pembangunan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Sementara itu, secara umum kondisi yang ada sekarang adalah masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sebagian besar daerah di Indonesia. Demikian pula halnya dengan Kota Mataram, disatu sisi dihadapkan pada meningkatnya kebutuhan dana pembangunan seiring dengan perkembangan kota yang membutuhkan dukungan dana yang relatif besar, disisi lain dihadapkan pada masih terbatasnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai gambaran, kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



(APBD) Kota Mataram pada Tahun Anggaran 2002 hanyalah sebesar 8,01%. Ini menunjukkan masih besarnya ketergantungan Kota Mataram terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat untuk dapat membiayai pelaksanaan pembangunannya. Sementara itu seperti telah disebutkan di atas, bahwa di era otonomi daerah ini ketergantungan tersebut harus dapat dikurangi, guna mewujudkan kemandirian daerah.

Berbagai upaya peningkatan PAD telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram, antara lain dengan membentuk Tim Peningkatan PAD yang anggotanya terdiri dari kalangan birokrat, kalangan akademisi (dari Universitas Mataram) dan orang-orang yang dianggap pakar. Kegiatan Tim tersebut saat ini masih di fokuskan pada upaya intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan upaya ekstensifikasi belum ditangani oleh tim. Upaya intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah yang telah dan sedang dilakukan adalah :

- Memperluas basis penerimaan. Tindakan ini dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak (dilakukan dengan menerapkan sistem MENTARI yaitu mendata dan mendaftar setiap hari), memperbaiki basis data obyek, serta menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
- Memperkuat proses pemungutan. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan antara lain dengan mempercepat revisi beberapa Perda tentang pajak dan retribusi daerah yang kurang sesuai, menaikkan tarif khususnya tarif Retribusi Parkir, dan peningkatan kualitas SDM.

- Meningkatkan Pengawasan untuk meminimalkan kebocoran. Dilakukan antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala berupa pelaksanaan uji petik, penerapan penggunaan Bill (bukti pembayaran) dan Pemeriksaan (audit) Rampung setiap akhir tahun pajak terhadap Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran (bekerjasama dengan Perwakilan BPKP Propinsi Bali dan Bawasda Kota Mataram; Pemeriksaan rampung bertujuan untuk mengevaluasi sekaligus menguji kebenaran atas kewajiban pembayaran dan penyeteroran Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak serta mengetahui / memperhitungkan jumlah Pajak yang seharusnya disetor oleh Wajib Pajak), meningkatkan penerapan sanksi hukum terhadap penunggak pajak dengan mengaktifkan Tim Yustisi yang ada serta meningkatkan pengawasan intern Dinas/Instansi Pengelola PAD melalui mekanisme pengawasan melekat guna meminimalisasi kebocoran sebagai upaya preventif.
- Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Dilakukan antara lain dengan mengoptimalkan penerapan SISDUR MAPATDA (Sistem dan Prosedur Manual Pendapatan Asli Daerah) terutama sistem komputerisasi MAPATDA, menerapkan *Full Self Assesment System* terhadap Wajib Pajak yang tergolong besar dan telah dikelola secara profesional seperti KFC, Mc. Donald's dan Hotel Lombok Raya.
- Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, yaitu dengan meningkatkan koordinasi antar dinas/instansi pengelola PAD, melakukan sosialisasi peraturan Perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak dan wajib retribusi.

**TABEL I.1.**  
**PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2001 DAN 2002**

NO.	JENIS PENERIMAAN	TAHUN 2001			TAHUN 2002			PERTUMBUHAN	
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	(Rp)	%
<b>A. PAJAK DAERAH</b>									
	Pajak Hotel dan Restoran	2.250.000.000	2.091.381.671	92,95					dipisah menjadi Pajak Hotel dan Pajak Restoran
1	Pajak Hotel	-	-	-	752.428.471	711.581.633	94,57	304.144.154,00	
2	Pajak Restoran	-	-	-	1.693.528.682	1.683.944.192	99,43		
3	Pajak Hiburan	75.000.000	69.507.125	92,68	100.000.000	97.190.700	97,19	27.683.575,00	39,83
4	Pajak Reklame	325.000.000	301.702.240	92,83	375.000.000	360.478.470	96,13	58.776.230,00	19,48
5	Pajak Penerangan Jalan	2.356.482.156	1.952.067.485	82,84	3.100.000.000	3.013.271.830	97,20	1.061.204.345,00	54,36
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	190.000.000	156.313.402	82,27	190.000.000	186.842.678	98,34	30.529.276,17	19,53
7	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	65.000.000	67.076.300	103,19	-	-	-	(67.076.300,00)	Jadi Pajak Propinsi
8	Pajak Atas Pengiriman Barang Antar Pulau	-	-	-	400.000.000	511.197.273	127,80	511.197.272,60	Pajak Baru
	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	5.261.482.156	4.638.048.223	88,15	6.610.957.153	6.564.506.776	99,30	1.926.458.562,77	41,54
<b>B. RETRIBUSI DAERAH</b>									
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	232.500.000	219.175.523	94,27	250.000.000	248.443.012	99,38	28.287.489,00	13,35
2	Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	365.040.000	344.142.820	94,28	375.000.000	355.223.910	94,73	11.081.090,00	3,22
3	Ret. Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	312.618.000	303.501.000	97,08	314.000.000	305.327.500	97,24	1.826.500,00	0,60
4	Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	225.000.000	186.753.900	83,00	350.000.000	339.830.000	97,09	153.076.100,00	81,97
5	Ret. Pelayanan Pasar	1.700.000.000	1.640.866.525	96,51	2.000.000.000	1.979.920.775	99,00	339.254.250,00	20,68
6	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	132.000.000	125.805.900	95,16	200.000.000	274.624.608	137,31	149.018.708,00	118,64
7	Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	-	-	-	2.600.000	2.500.000	96,15	2.500.000,00	Ret. Baru
8	Ret. Penggantian Biaya Cetak Peta	1.000.000	585.000	58,50	1.200.000	1.048.000	87,33	483.000,00	79,15
9	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	75.000.000	73.807.854	98,41	75.000.000	74.419.875	99,23	612.021,00	0,83
10	Ret. Pasar Grosir dan/atau Perlokalan	225.000.000	210.966.190	93,58	250.000.000	239.287.860	95,71	28.701.670,00	13,63
11	Ret. Terminal	160.000.000	150.299.050	93,94	180.000.000	176.519.500	98,07	26.220.450,00	17,45
12	Ret. Tempat Khusus Parkir	70.000.000	64.329.674	91,90	115.000.000	108.579.790	94,42	44.250.116,00	68,79
13	Ret. Penyediaan Kaku	16.000.000	15.080.000	94,25	20.000.000	19.005.000	95,03	3.925.000,00	26,03
14	Ret. Rumah Potong Hewan	170.000.000	156.886.760	92,29	170.000.000	160.172.250	94,22	3.285.490,00	2,09
15	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	615.000.000	608.471.507	98,94	750.000.000	749.961.187	99,99	141.489.680,24	23,25
16	Ret. Izin Gangguan	32.000.000	30.150.000	94,22	32.000.000	30.575.000	95,55	425.000,00	1,41
17	Ret. Izin Trayek	15.000.000	22.441.800	149,61	20.000.000	31.829.300	159,15	9.387.500,00	41,83
18	Ret. Izin Usaha Perdagangan	-	-	-	15.200.000	28.175.000	185,36	28.175.000,00	Ret. Baru
19	Ret. Izin Usaha Perindustrian	-	-	-	2.150.000	2.250.000	104,65	2.250.000,00	Ret. Baru
20	Ret. Izin Usaha Perikanan dan Reklamasi Video	-	-	-	3.000.000	2.900.000	96,67	2.900.000,00	Ret. Baru
	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	4.346.158.000	4.152.463.503	95,54	5.125.150.000	5.130.572.567	100,11	978.109.064,24	23,55
	Jml. Penerimaan Pajak Daerah & Ret. Daerah	9.607.640.156	8.790.511.726	91,50	11.736.107.153	11.695.079.343	99,65	2.904.567.617,01	33,04

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Mataram, 2003

Keberhasilan Tim Peningkatan PAD dalam melakukan intensifikasi penerimaan PAD khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terlihat dari meningkatnya realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2002 menjadi sebesar 99,65% dari target yang telah ditetapkan, dibandingkan dengan pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2001 yang baru mencapai 91,50% dari target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel I.1. Dari Tabel I.1. juga terlihat bahwa pada Tahun Anggaran 2002, persentase realisasi penerimaan masing-masing jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hampir semuanya telah mencapai di atas 90% dari target yang telah ditetapkan, bahkan ada yang telah melampaui target yang ditetapkan, seperti Pajak Atas Pengiriman Barang antar pulau mencapai 127,80% dari target, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor mencapai 137,31% dan Retribusi Izin Trayek mencapai 159,15%. Walaupun upaya intensifikasi telah menunjukkan hasil yang cukup optimal, namun sampai saat ini upaya intensifikasi masih terus dilakukan (masih menjadi fokus kegiatan) oleh Tim tersebut. Sedangkan upaya ekstensifikasi belum ditangani oleh Tim Peningkatan PAD, tetapi hanya ditangani oleh Dinas/Instansi Pengelola PAD masing-masing tanpa adanya koordinasi yang baik.

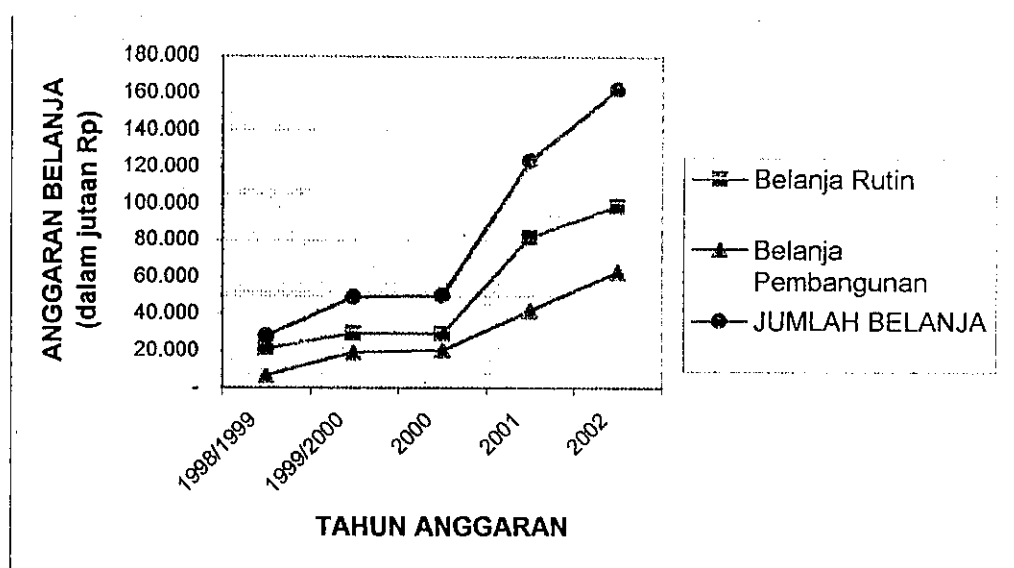
Mengingat terus meningkatnya kebutuhan pendanaan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Kota Mataram yang terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan, serta untuk mengurangi ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat, maka upaya peningkatan PAD khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak cukup hanya dilakukan melalui intensifikasi seperti yang selama ini dilakukan, tetapi perlu juga dilakukan melalui

ekstensifikasi. Untuk lebih jelas mengenai besarnya peningkatan Anggaran Belanja Kota Mataram dari Tahun Anggaran 1998/1999 sampai dengan 2002, dapat dilihat pada Tabel I.2. di bawah ini.

**TABEL I.2.**  
**IKHTISAR ANGGARAN BELANJA KOTA MATARAM**  
**TAHUN ANGGARAN 1998/1999 S/D 2002**

TAHUN ANGGARAN	URAIAN		
	BELANJA RUTIN	BELANJA PEMBANGUNAN	JUMLAH BELANJA
1998/1999	21.351.450.728,55	7.004.098.481,72	28.355.549.210,27
1999/2000	29.891.166.431,00	19.431.697.481,00	49.322.863.912,00
2000	29.664.419.629,00	20.466.800.550,00	50.131.220.179,00
2001	81.802.843.927,00	41.885.563.019,00	123.688.406.946,00
2002	99.428.056.230,00	63.076.031.506,00	162.504.087.736,00

Sumber : Nota Perhitungan APBD Kota Mataram TA. 1998/1999 s/d 2002



Sumber : Hasil Analisis, 2003

**GAMBAR 1.1.**  
**GRAFIK PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA**  
**KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN 1998/1999 S/D 2002**

Upaya ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dimungkinkan mengingat Kota Mataram yang memiliki letak sangat strategis, yaitu jaraknya yang cukup dekat dengan Pulau Bali yang merupakan daerah tujuan wisata utama di Indonesia, memiliki potensi berbagai jenis Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah yang belum tergali. Selain itu upaya ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga dimungkinkan dilakukan karena didukung oleh Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pasal 2 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Dengan Peraturan Daerah Dapat ditetapkan jenis Pajak Kabupaten/Kota selain yang ditetapkan dalam ayat (2)...”, dan pada pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam ayat (3) sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan”. Jadi usaha ekstensifikasi terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilakukan sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000.

Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram dari Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak atas Pengiriman Barang Antar Pulau. Sementara itu penerimaan dari Retribusi Daerah berasal dari 20 jenis retribusi, antara lain yang dominan adalah Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil. Untuk lebih jelasnya, pada Tabel I.1 disajikan data penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2002.

Sampai saat ini Pemerintah Kota Mataram belum melaksanakan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah secara konsekuen, hal ini ditandai dengan belum diberlakukannya Pajak Parkir serta beberapa jenis Retribusi Daerah seperti Retribusi Tempat Pelelangan; Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; Retribusi Penyeberangan di atas Air; Retribusi Pengolahan Limbah Cair; Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Belum diberlakukannya Pajak Parkir dan beberapa jenis Retribusi tersebut karena belum dilakukannya kajian kelayakan terhadap pemberlakuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut sehingga potensinya juga belum diketahui secara pasti.

Pada Tabel I.1. juga terlihat bahwa pada tahun 2002 terdapat jenis Pajak Daerah yang hilang dan ada pula jenis Pajak Daerah baru. Jenis pajak yang hilang yaitu Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang pemungutannya diambil alih oleh Pemerintah Propinsi, sedangkan jenis Pajak baru yang dipungut oleh Pemerintah Kota Mataram adalah Pajak Atas Pengiriman Barang Antar Pulau. Pajak Atas Pengiriman Barang Antar Pulau ini dipungut melalui kerjasama antar Pemerintah Kota dan Kabupaten se Pulau Lombok, yaitu Pemerintah Kota Mataram, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Sementara itu untuk Retribusi Daerah, pada tahun 2002 mulai ditarik beberapa jenis Retribusi Daerah baru, yaitu Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam

Kebakaran, Retribusi Izin Usaha Perdagangan, Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Retribusi Izin Usaha Perfilman dan Rekaman Video.

Namun demikian, sampai saat ini usaha ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram belum memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan PAD. Kontribusi Pajak Atas Pengiriman Barang Antar Pulau terhadap PAD tahun 2002 hanya sebesar 3,67%, masih lebih rendah dari rata-rata kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD yang sebesar 5,88%. Demikian pula dengan kontribusi penerimaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (0,02%), Retribusi Izin Usaha Perdagangan (0,20%), Retribusi Izin Usaha Perindustrian (0,02%) dan Retribusi Izin Usaha Perfilman dan Rekaman Video (0,02%), semuanya masih dibawah rata-rata kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD tahun 2002 yang sebesar 1,84%.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas, kiranya penting untuk dilakukan kajian yang diarahkan pada ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam menunjang pembiayaan pembangunan Kota Mataram.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Mengingat upaya peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi, sementara itu upaya intensifikasi telah dan sedang gencar dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram bahkan dengan membentuk suatu tim khusus yaitu Tim Peningkatan PAD, dan hasilnya sudah mulai terlihat, yang ditunjukkan dengan meningkatnya realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seperti diuraikan di atas, sedangkan upaya ekstensifikasi belum mendapatkan penanganan



yang serius, ditambah lagi dengan masih terdapatnya potensi berbagai jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum tergali terutama dengan adanya pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat maupun propinsi kepada Kota Mataram sebagai daerah otonom terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka kiranya perlu dilakukan kajian mengenai upaya ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara garis besar permasalahan yang melatar belakangi dilakukannya studi ini, dirumuskan dalam pertanyaan penelitian : ***“Bagaimana Mengekstensifkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan Kota Mataram”***.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, kiranya menarik untuk dilakukan kajian mengenai *Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam menunjang pembiayaan pembangunan Kota Mataram*, sehingga dapat dijadikan bahan kebijakan bagi Pemerintah Kota Mataram dalam melakukan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **1.3. Tujuan dan Sasaran Studi**

#### **1.3.1. Tujuan Studi**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, studi ini bertujuan untuk mengekstensifkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Mataram dengan melakukan kajian atas jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah apa saja yang masih memungkinkan diterapkan sebagai jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru di Kota Mataram. Selanjutnya merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Mataram untuk memberlakukan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru sesuai hasil kajian studi ini.

### 1.3.2. Sasaran Studi

Untuk mencapai tujuan studi, sasaran studi yang akan dilakukan, diantaranya adalah :

1. Mengidentifikasi jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dikembangkan sebagai jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru
2. Mengidentifikasi besaran potensi aktual usulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru.
3. Menganalisis kelayakan secara normatif atas usulan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Menganalisis kelayakan ekonomi (rasio efisiensi) usulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru, yaitu perbandingan antara biaya pungut dengan perkiraan pendapatan.
5. Memilih alternatif jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru dengan Proses Hierarki Analitik (PHA).
6. Menyusun Matrik Tipologi dari hasil analisis kelayakan normatif dan PHA.
7. Menganalisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah baru terhadap PAD dan APBD dalam menunjang pembiayaan pembangunan Kota Mataram.
8. Menganalisis variabel ekonomi makro, berupa pendapatan perkapita, tingkat inflasi, perubahan landuse dan perkembangan aktivitas ekonomi. Analisis ini sebagai dasar pertimbangan pemberlakuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru serta merupakan dasar untuk memproyeksikan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dimasa yang akan datang.

9. Mengidentifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang maupun kendala (analisis SWOT) yang dihadapi dalam upaya ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10. Menyusun program rencana tindak untuk mendukung pelaksanaan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Mataram.
11. Merekomendasikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru sebagai upaya ekstensifikasi sesuai hasil analisis kelayakan normatif dan PHA.

#### **1.4. Ruang Lingkup Studi**

##### **1.4.1. Ruang Lingkup Substansial**

Ruang lingkup materi ini dibatasi pada aspek-aspek yang dikaji dalam studi. Adapun aspek-aspek bahasan tersebut adalah :

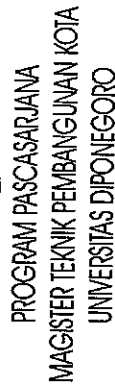
1. Identifikasi jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dikembangkan sebagai jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru.
2. Identifikasi potensi penerimaan dari sumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih dapat digali melalui upaya ekstensifikasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
3. Analisis kelayakan secara normatif atas usulan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru.
4. Analisis kelayakan ekonomi (rasio efisiensi) usulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru, yaitu perbandingan antara biaya pungut dengan perkiraan pendapatan.
5. Pemilihan alternatif jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru dengan Proses Hierarki Analitik (PHA).
6. Penyusunan Matrik Tipologi dari hasil analisis kelayakan normatif dan PHA.

7. Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah baru terhadap PAD dan APBD dalam menunjang pembiayaan pembangunan Kota Mataram.
8. Analisis variabel ekonomi makro, berupa pendapatan perkapita, tingkat inflasi, perubahan landuse dan perkembangan aktivitas ekonomi. Analisis ini sebagai dasar pertimbangan pemberlakuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru serta merupakan dasar untuk memproyeksikan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dimasa yang akan datang.
9. Mengidentifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang maupun kendala (analisis SWOT) yang dihadapi dalam upaya ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10. Penyusunan program rencana tindak untuk mendukung pelaksanaan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Mataram.
11. Rekomendasi kepada Pemerintah Kota Mataram atas jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang layak diberlakukan sebagai upaya ekstensifikasi berdasarkan hasil kajian studi ini.

#### **1.4.2. Ruang Lingkup Spasial**

Secara spasial ruang lingkup studi ini meliputi seluruh wilayah administratif Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat, seperti diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Mataram.

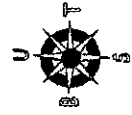
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan lengkap tentang ruang lingkup spasial dari studi yang dilakukan ini, dapat dilihat pada Gambar 1.2.



**EKSTENSIFIKASI  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN  
PEMBANGUNAN KOTA MATARAM**

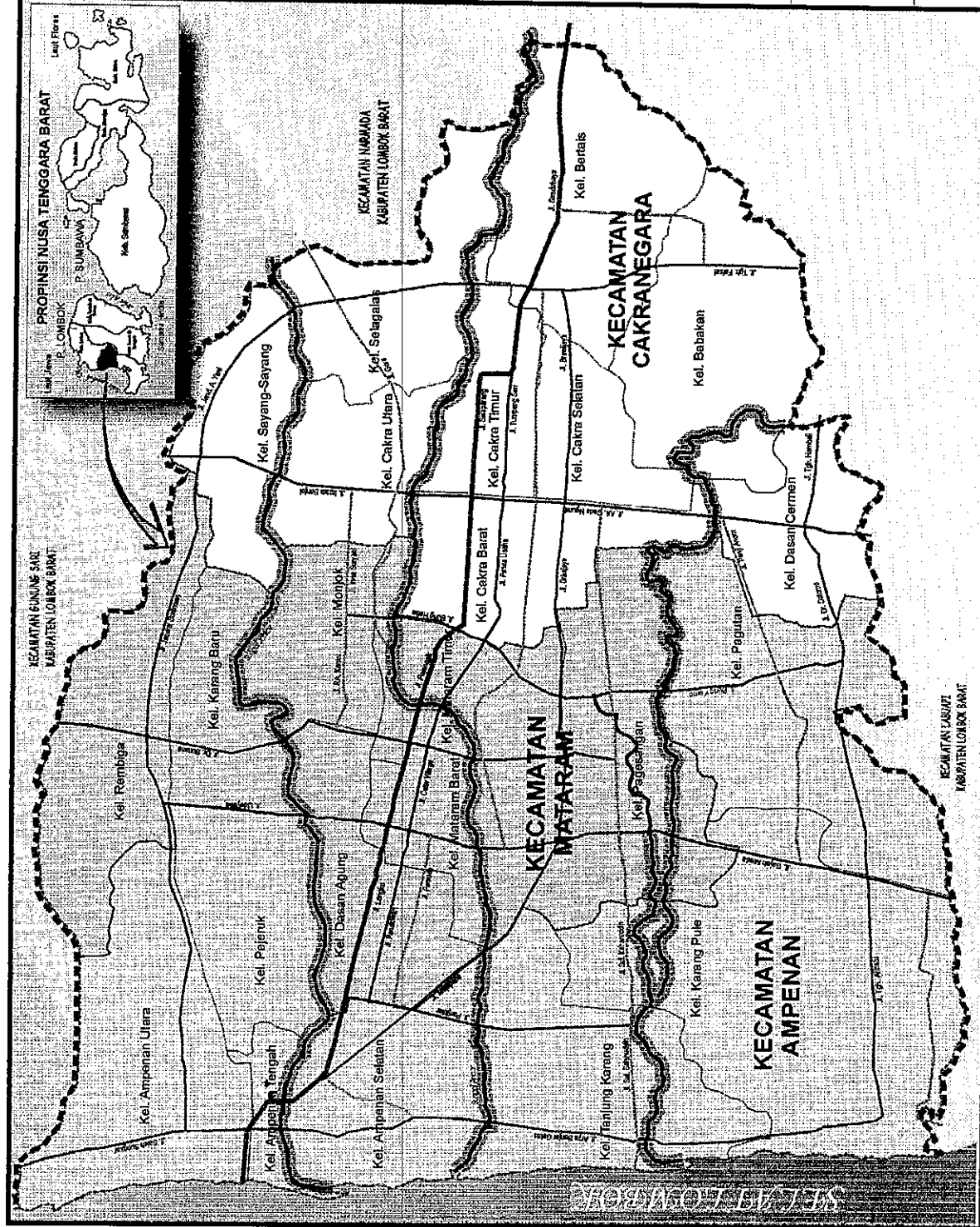
**PETA ADMINISTRASI  
KOTA MATARAM**

	Batas Kota Mataram
	Batas Kecamatan
	Batas Kelurahan
	Jalan Utama
	Jalan Antar Sub Wilayah
	Jalan Antar Lingkungan
	Jalan Lingkungan
	Kecamatan Ampenan
	Kecamatan Mataram
	Kecamatan Cakranegara



1:1.500.000  
1:2.  
14

BAPPEDA KOTA MATARAM



### 1.5. Kerangka Pemikiran

Meningkatnya kebutuhan dana pembangunan seiring dengan perkembangan Kota Mataram, membutuhkan ketersediaan dana yang mencukupi untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Disisi lain masih terbatasnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang antara lain bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sementara usaha peningkatan PAD melalui intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan secara optimal dengan bantuan Tim Peningkatan PAD Kota Mataram, yang terlihat dari pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2002 telah mencapai 99,65% dari target yang ditetapkan. Namun hal ini belum mampu meningkatkan PAD secara berarti. Sementara itu, masih terdapat potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum tergali, yang memberikan peluang untuk dilakukannya penggalan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru.

Berdasarkan kedua hal di atas, kiranya perlu dicari sumber-sumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru guna memenuhi kebutuhan dana pembangunan, melalui ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk mengetahui jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah apa saja yang memiliki peluang untuk dijadikan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru, dilakukan identifikasi dengan meminta usulan dari Dinas/Instansi yang selama ini mengelola beberapa penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu juga dilakukan perbandingan dengan daerah lain untuk mengetahui jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah apa saja yang telah diberlakukan oleh daerah lain (Kota/Kabupaten) tetapi belum diberlakukan di

Kota Mataram, serta dengan melakukan kajian literatur guna mengetahui jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lainnya yang memungkinkan dilaksanakan.

Disamping melakukan identifikasi terhadap jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga dilakukan identifikasi terhadap besaran potensi aktual dari masing-masing jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut. Untuk mengetahui besaran potensi aktual tersebut, dapat dilakukan dengan meminta informasi secara langsung kepada Dinas/Instansi yang mengusulkan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut, maupun dengan melakukan perhitungan atas dasar pengamatan langsung di lapangan.

Dari kedua identifikasi tersebut, akan diperoleh jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru serta besaran potensi aktual dari masing-masing Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut. Selanjutnya dilakukan analisis kelayakan normatif yaitu dengan melihat kesesuaiannya dengan kriteria-kriteria Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditentukan oleh Undang-undang No. 34 Tahun 2000. Hasil dari analisis kelayakan normatif berupa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memenuhi kelayakan normatif.

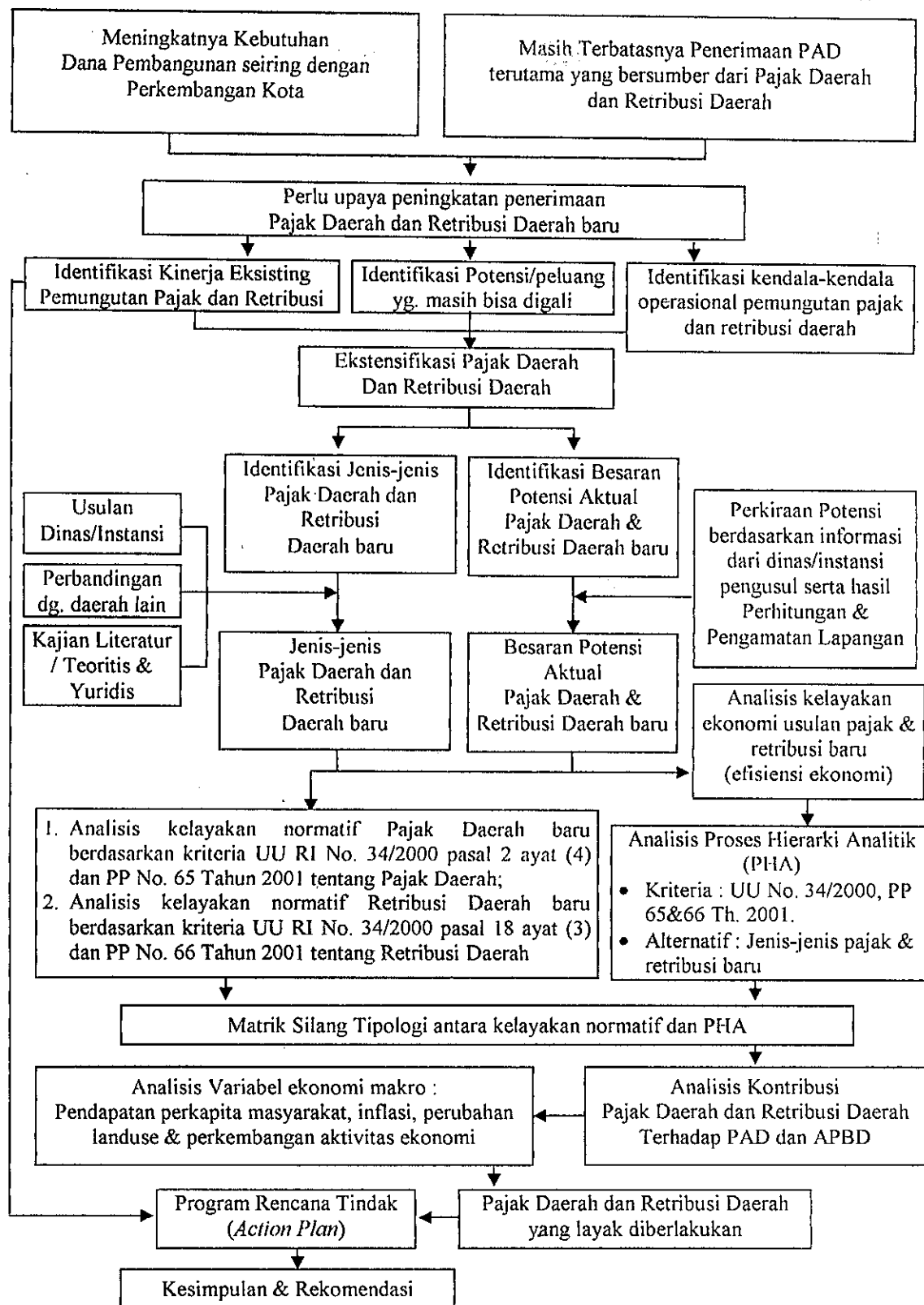
Bersamaan dengan analisis normatif, dilakukan juga analisis kelayakan ekonomi berupa pengukuran efisiensi atas masing-masing jenis pajak daerah dan retribusi daerah baru dengan cara membandingkan antara besaran biaya pungut dengan perkiraan penerimaan. Selanjutnya dilakukan analisis Proses Hierarki Analitik (PHA) untuk memilih alternatif jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang terbaik (menjadi unggulan). Analisis PHA ini didasarkan pada pendapat nara sumber yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur pengusaha (swasta), unsur

pakar/akademisi dan unsur masyarakat. Pendapat nara sumber ini diperoleh melalui questioner yang mereka isi, sesuai dengan tahapan PHA.

Hasil dari analisis kelayakan normatif dan PHA berupa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dinilai layak dan menjadi unggulan untuk diberlakukan sebagai upaya ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Mataram, selanjutnya disusun dalam matrik silang Tipologi kelayakan normatif dan PHA. Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berada pada kuadran I matrik tipologi, yaitu yang memenuhi kelayakan normatif maupun PHA, merupakan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diprioritaskan untuk diberlakukan. Kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui kontribusi dari masing-masing jenis pajak daerah dan retribusi daerah baru tersebut terhadap PAD dan APBD dalam menunjang pembiayaan pembangunan Kota Mataram. Untuk dapat diterapkan sebagai jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru, sebelumnya dilakukan Analisis variabel ekonomi makro berupa perkembangan pendapatan perkapita masyarakat, perkembangan tingkat inflasi, perubahan landuse dan perkembangan aktivitas ekonomi selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2002. Analisis terhadap perkembangan ekonomi makro dimaksudkan untuk melihat kemampuan masyarakat seandainya diberikan tambahan beban berupa pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru, serta sebagai dasar untuk memproyeksikan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dimasa yang akan datang. Selanjutnya dilakukan analisis SWOT dan dilanjutkan dengan menyusun Program Rencana Tindak penerapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut sebagai upaya ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Mataram.



Untuk lebih jelasnya, uraian kerangka pemikiran Kajian Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Mataram seperti yang dijelaskan di atas, dapat dilihat pada Gambar 1.3. berikut ini.



Sumber : Hasil Analisis, 2003

**GAMBAR 1.3.**  
**KERANGKA PEMIKIRAN EKSTENSIFIKASI**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENUNJANG**  
**PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM**

## **1.6. Pendekatan dan Metoda Studi**

### **1.6.1. Pendekatan Studi**

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah apa saja yang masih memungkinkan diterapkan sebagai jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru di Kota Mataram, maka pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan deskriptif eksploratif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang didasarkan pada suatu aturan atau pedoman ideal tertentu. Aturan tersebut dapat merupakan suatu standar yang ditetapkan oleh instansi tertentu maupun landasan hukum atau lainnya. Pendekatan deskriptif eksploratif memaparkan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah apa saja yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru.

Untuk mengetahui jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah apa saja yang memiliki peluang untuk dijadikan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru, dilakukan identifikasi dengan meminta usulan dari Dinas/Instansi yang selama ini mengelola beberapa penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu juga dilakukan perbandingan dengan daerah lain untuk mengetahui jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah apa saja yang telah diberlakukan oleh daerah lain (Kota/Kabupaten) tetapi belum diberlakukan di Kota Mataram, melakukan kajian literatur guna mengetahui jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lainnya yang memungkinkan dilaksanakan serta dengan mempertimbangkan aspek yuridis.

Selain melakukan identifikasi terhadap jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga dilakukan identifikasi terhadap besaran potensi aktual dari

masing-masing jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut. Untuk mengetahui besaran potensi aktual tersebut, dapat dilakukan dengan meminta informasi secara langsung kepada Dinas/Instansi yang mengusulkan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut, maupun dengan melakukan perhitungan atas dasar pengamatan langsung di lapangan.

Dari kedua identifikasi tersebut, akan diperoleh jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru serta besaran potensi aktual dari masing-masing Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut. Selanjutnya dilakukan analisis kelayakan normatif yaitu dengan melihat kesesuaiannya dengan kriteria-kriteria Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditentukan oleh Undang-undang No. 34 Tahun 2000. Hasil dari analisis kelayakan normatif berupa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memenuhi kelayakan normatif.

Bersamaan dengan analisis normatif, dilakukan juga analisis efisiensi ekonomi terhadap jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah baru serta besaran potensi aktual pajak daerah dan retribusi daerah baru tersebut. Selanjutnya dilakukan analisis Proses Hierarki Analitik (PHA). Analisis PHA ini didasarkan pada pendapat nara sumber yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur pengusaha (swasta), unsur pakar/akademisi dan unsur masyarakat. Pendapat nara sumber ini diperoleh melalui kuesioner yang mereka isi, sesuai dengan tahapan PHA.

Hasil dari analisis kelayakan normatif dan PHA berupa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dinilai layak untuk diberlakukan sebagai upaya ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Mataram, selanjutnya disusun dalam matrik silang Tipologi kelayakan normatif dan PHA. Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berada pada kuadran I matrik tipologi, yaitu

yang memenuhi kelayakan normatif maupun PHA, merupakan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diprioritaskan untuk diberlakukan. Kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui kontribusi dari masing-masing jenis pajak daerah dan retribusi daerah baru tersebut terhadap PAD dan APBD. Untuk dapat diterapkan sebagai jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru, sebelumnya dilakukan Analisis variabel ekonomi makro berupa perkembangan pendapatan perkapita masyarakat, perkembangan tingkat inflasi, perubahan landuse dan perkembangan aktivitas ekonomi selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2002. Analisis terhadap perkembangan ekonomi makro dimaksudkan untuk melihat kemampuan masyarakat seandainya diberikan tambahan beban berupa pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru, serta sebagai dasar untuk memproyeksikan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dimasa yang akan datang. Selanjutnya dilakukan analisis SWOT dan dilanjutkan dengan menyusun Program Rencana Tindak penerapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut sebagai upaya ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Mataram.

## **1.6.2. Metoda Pelaksanaan Studi**

### **1.6.2.1. Kebutuhan Data**

Hal yang paling penting dalam penelitian adalah adanya data yang relevan sesuai dengan kebutuhan, yang dapat digunakan sebagai bahan analisis yang telah dirumuskan. Data merupakan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan yang dikaitkan dengan tempat dan waktu yang merupakan dasar suatu perencanaan dan merupakan alat bantu dalam pengambilan keputusan. Data dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder. Data primer

merupakan informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya. Sedangkan data sekunder merupakan informasi yang telah dikumpulkan pihak lain. Selengkapnya mengenai kebutuhan data seperti terlihat pada Tabel I.3.

**TABEL I.3.**  
**KEBUTUHAN DATA**  
**EKSTENSIFIKASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM**

NO.	VARIABEL	KEBUTUHAN DATA	JENIS DATA	SUMBER DATA
1.	Besaran Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Besaran penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2001 dan tahun 2002 (data PAD/APBD)	Sekunder	Sekretariat Pemerintah Kota Mataram (Bagian Hukum), Kepustakaan & internet
2	Besaran Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	Perkiraan besaran Potensi aktual usulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Sekunder	Dipenda Kota Mataram / Bagian Keuangan Setda Kota Mataram
3.	Permasalahan dalam ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jenis-jenis penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2001 dan tahun 2002 Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kontribusi penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD	Primer	Dinas/Instansi pengusul dan pengamatan lapangan
4.	Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat diterapkan	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru yang diusulkan Dinas/Instansi Pajak dan Retribusi yang berlaku di Daerah lain Kaji kecocokan Pajak dan Retribusi Daerah Kesepakatan pendapat para pakar	Sekunder	Dipenda Kota Mataram
5.	Biaya Pungut Pajak dan Retribusi Daerah	• Besaran biaya pemungutan Pajak Daerah • Besaran biaya pemungutan Retribusi Daerah	Primer	Sekretariat Pemerintah Kota Mataram
6.	Renstra	Rencana Strategi Dipenda Kota Mataram Rencana Strategi Pemerintah Kota Mataram	Sekunder	Dipenda Kota Mataram
7.	PDRB	PDRB Kota Mataram tahun 1998 - 2002	Sekunder	Sekretariat Pemerintah Kota Mataram
8.	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Kota Mataram tahun 1998 - 2002	Sekunder	BPS Kota Mataram
9.	Perkembangan landuse	Peta landuse Kota Mataram tahun 1994 & 2002 (eksisting)	Sekunder	Bappeda Kota Mataram
10.	Tingkat inflasi	Tingkat inflasi Kota Mataram Tahun 1998 - 2002	Sekunder	BPS Kota Mataram
11.	Perkembangan unit usaha	Jumlah unit usaha di Kota Mataram tahun 1998 - 2002	Sekunder	BPS Kota Mataram/Dinas Perindag

Sumber: Hasil analisis, 2003

#### **1.6.2.2. Teknik Pengumpulan Data**

Tahap pengumpulan data merupakan tahapan yang dilakukan untuk memperoleh data yang akan dijadikan input dalam melakukan tahap kegiatan analisis. Data yang akan dikumpulkan dikelompokkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Teknik pengumpulan data primer, dalam studi ini dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait, dan menyebarkan angket penelitian kepada narasumber.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan memanfaatkan dokumentasi dari beberapa instansi yang terkait. Instansi-instansi yang dijadikan sumber data, diantaranya adalah Sekretariat Pemerintah Kota Mataram, Kantor Dinas Pendapatan Kota Mataram, dan instansi terkait lainnya. Data sekunder juga diperoleh melalui studi literatur serta dari hasil penelitian lain yang relevan.

#### **1.6.2.3. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data**

Data yang telah diperoleh, selanjutnya dapat disajikan dalam bentuk tabulasi, yaitu pengolahan data dengan cara menyajikan angka-angka dalam bentuk tabel-tabel sesuai keperluan. Disamping itu data yang berhasil dikumpulkan melalui studi ini, juga diolah dan disajikan dalam bentuk gambar/peta dan bentuk-bentuk penyajian lain yang informatif.

#### **1.6.2.4. Teknik Sampling**

Mengingat dalam penelitian ini dibutuhkan data primer baik untuk keperluan analisis kualitatif (PHA) maupun kuantitatif (Analisis Kelayakan Ekonomi / efisiensi Ekonomi), berupa usulan jenis-jenis Pajak Daerah dan



Retribusi Daerah baru, besaran potensi aktual dari masing-masing Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diusulkan tersebut dan pemilihan alternatif oleh narasumber (untuk analisis PHA), maka perlu kiranya ditentukan teknik sampling yang akan digunakan dalam memilih narasumber untuk mendapatkan data-data yang diperlukan tersebut.

Pemilihan sampel pada bagian ini disesuaikan dengan tujuan dan sasaran penelitian serta metode analisis yang digunakan, dalam hal ini adalah metode Proses Hierarki Analitik (PHA) yang mensyaratkan bahwa narasumber yang dipilih adalah yang benar-benar memahami dan mengerti permasalahan yang dihadapi sesuai dengan pendidikan, pengalaman dan keahliannya.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan data usulan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru, data besaran potensi masing-masing jenis Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang diusulkan tersebut serta pemilihan alternatif oleh narasumber (untuk analisis PHA), digunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2002 : 62) "*purposive sampling*, adalah teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja".

Inti dari pendapat di atas adalah bahwa pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling*, bisa dilakukan dengan tanpa menggunakan rumus, karena itulah untuk kepentingan studi ini, pengambilan dan pemilihan sampel untuk dijadikan narasumber, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu, yakni pemilihan narasumber didasarkan pada pengetahuan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengalaman dalam mengelola bidang pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi aktor yang terlibat, serta mampu mewakili institusi tertentu terkait dengan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Secara spesifik, komposisi sampel yang diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk keperluan analisis PHA dapat dilihat pada Tabel I.4.

**TABEL I.4.**  
**KOMPOSISI NARASUMBER EKSTENSIFIKASI**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MATARAM**

NO.	KELOMPOK NARASUMBER	JUMLAH (orang)	KODE QUESIONER
	<b>Pemerintah :</b>		
1.	Dinas Pendapatan Kota Mataram	1	P, R1, R3
2.	Dinas Perhubungan Kota Mataram	1	P, R1, R3
3.	Dinas Pariwisata Kota Mataram	1	R3
4.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram	1	R3
5.	Dinas Pertanian Kota Mataram	1	P
6.	Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Mataram	1	P, R3
7.	Dinas Kesehatan Kota Mataram	1	R1, R3
8.	Dinas Kebersihan Kota Mataram	1	R1
9.	Dinas PU Kota Mataram	1	R1
10.	Bagian Ekonomi Setda Kota Mataram	1	R1, R3
	<b>Pakar / Akademisi</b>		
11.	Fakultas Ekonomi Universitas Mataram	1	P
	<b>Wakil Pengusaha :</b>		
12.	Gapensi	1	P
	<b>Wakil/Tokoh Masyarakat</b>		
13.	Anggota DPRD Kota Mataram (Komisi C)	2	P, R1, R3
<b>JUMLAH NARASUMBER</b>		<b>14</b>	

Sumber : Hasil Analisis, 2003

**KETERANGAN :**

P = Narasumber untuk pajak daerah

R1 = Narasumber untuk Retribusi Jasa Umum

R2 = Narasumber untuk Retribusi Jasa Usaha

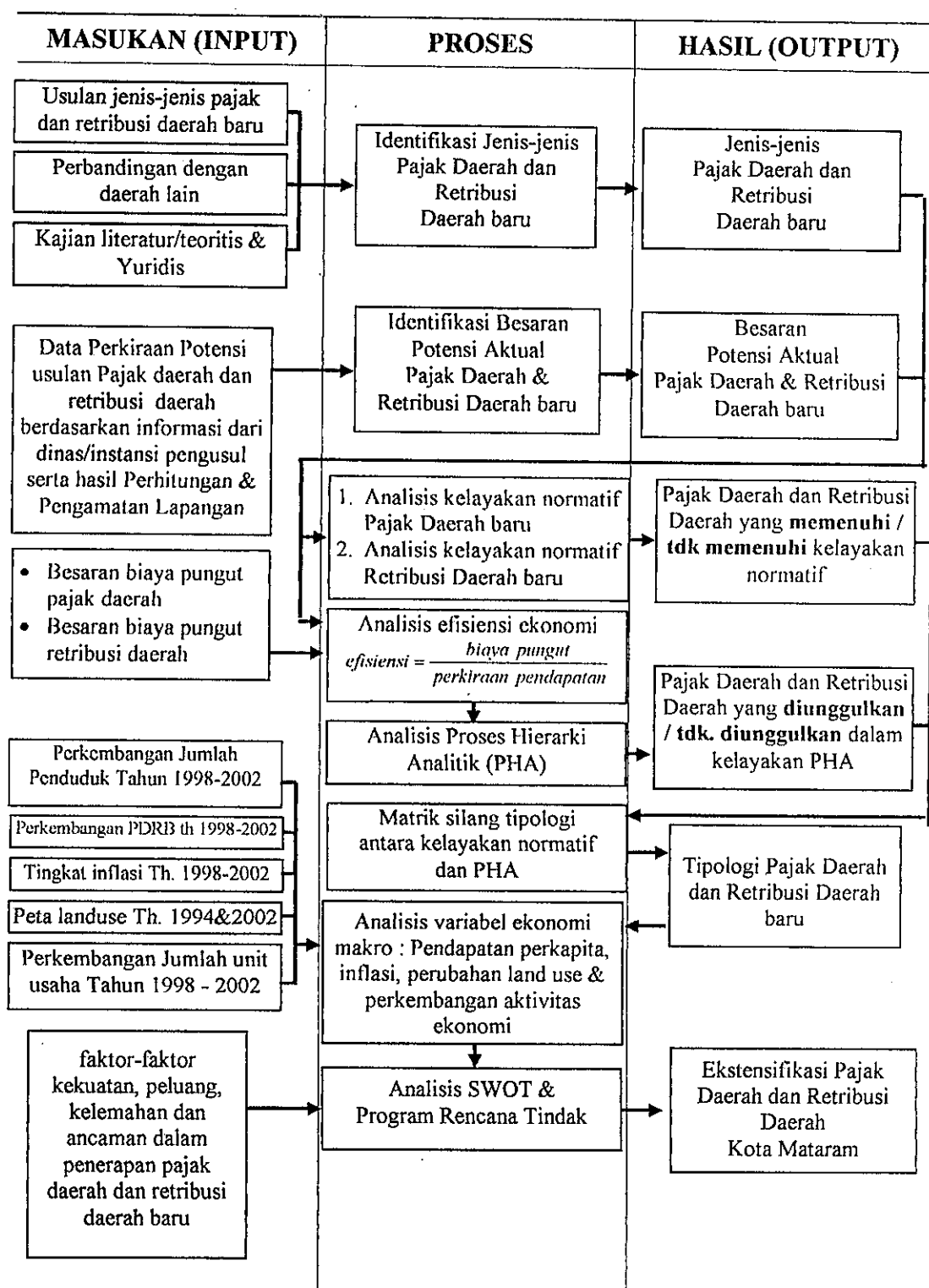
R3 = Narasumber untuk Retribusi Perizinan Tertentu

Pada Tabel I.4 tersebut terlihat bawa :

- Jumlah narasumber untuk Pajak Daerah (P) = 8 orang
- Jumlah narasumber untuk Retribusi Jasa Umum (R1) = 8 orang
- Jumlah narasumber untuk Retribusi Jasa Usaha (R2) = tidak ada
- Jumlah narasumber untuk Retribusi Perizinan Tertentu (R3) = 9 orang

#### **1.6.2.5. Kerangka Analisis**

Hasil atau output dari studi *“Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan Kota Mataram”* ini diperoleh melalui serangkaian analisis sebagai berikut (Gambar 1.4.) :



Sumber : Hasil Analisis, 2003.

**GAMBAR 1.4.**  
**KERANGKA ANALISIS EKSTENSIFIKASI**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENUNJANG**  
**PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM**

#### **1.6.2.6. Teknik Analisis**

Teknik analisis yang digunakan dalam Studi ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif dipakai untuk data yang bersifat terukur, sedangkan untuk data yang tidak terukur dipakai analisis kualitatif.

#### **Analisis kualitatif**

a. **Kelayakan Normatif**, yaitu analisis berdasarkan suatu aturan atau pedoman ideal tertentu. Aturan tersebut dapat merupakan suatu standar yang ditetapkan oleh instansi tertentu maupun landasan hukum atau lainnya. Dalam studi ini, analisis normatif digunakan untuk menganalisis usulan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memenuhi kriteria untuk diterapkan dalam usaha ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Mataram. Kriteria-kriteria tersebut berdasarkan Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kriteria-kriteria untuk Pajak Daerah adalah sebagaimana yang terdapat pada Pasal 2 ayat (4), yaitu :

- (a) bersifat pajak dan bukan Retribusi;
- (b) objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- (c) objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- (d) objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak Pusat;

- (e) potensinya memadai;
- (f) tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- (g) memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
- (h) menjaga kelestarian lingkungan.

Untuk memperkuat kriteria yang ada, kiranya perlu ditambahkan kriteria:

- (i) Sudah diterapkan di daerah lain.

Sedangkan kriteria-kriteria untuk Retribusi Daerah terdapat pada Pasal 18 ayat (3), yaitu :

(a) Retribusi Jasa Umum:

1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar Retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan Retribusi;
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
7. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

(b) Retribusi Jasa Usaha :

1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

(c) Retribusi Perizinan Tertentu:

1. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
2. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
3. biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan.

Seperti halnya pada kriteria pajak daerah, kriteria untuk semua golongan retribusi juga perlu diperkuat dengan kriteria :

( i ) Sudah diterapkan di daerah lain.

Penilaian dilakukan dengan pemberian skoring untuk setiap kriteria dengan tanda (✓) menyatakan bahwa pajak/retribusi tersebut memenuhi kriteria yang ada; tanda (✕) menyatakan bahwa pajak/retribusi tersebut tidak memenuhi kriteria.

Hasil dari penilaian, kemudian dikompilasi untuk melihat kesesuaian / kelayakan setiap usulan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijadikan sebagai Pajak Daerah / Retribusi Daerah baru. Pajak / Retribusi dinyatakan sesuai / layak sebagai jenis Pajak / Retribusi baru apabila semua kriteria dapat terpenuhi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel I.5., Tabel I.6., Tabel I.7. dan Tabel I.8. berikut ini :

**TABEL I.5.**  
**ANALISIS SKORING KELAYAKAN NORMATIF**  
**PAJAK DAERAH BARU DI KOTA MATARAM**

No.	JENIS PAJAK DAERAH	Kriteria Pajak Daerah								Keterangan (layak/tdk.layak)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i
1.	Pajak A									
2.	Pajak B									
3.	Pajak C									
.....	Pajak .....									

Sumber : Hasil Analisis, 2003.

Keterangan :

a, b, c, d, e, f, g, h = kriteria pajak daerah sesuai UU No. 34/2000

i = kriteria tambahan : Sudah diterapkan di daerah lain.

**TABEL I.6.**  
**ANALISIS SKORING KELAYAKAN NORMATIF**  
**RETRIBUSI JASA UMUM BARU DI KOTA MATARAM**

No.	JENIS RETRIBUSI JASA UMUM	Kriteria Retribusi Jasa Umum								Keterangan (layak/tdk.layak)
		a	b	c	d	e	f	g	i	
1.	Retribusi A									
2.	Retribusi B									
3.	Retribusi C									
.....	Retribusi ....									

Sumber : Hasil Analisis, 2003.

Keterangan :

a, b, c, d, e, f, g = kriteria retribusi jasa umum sesuai UU No. 34/2000

i = kriteria tambahan : Sudah diterapkan di daerah lain.



**TABEL I.7.**  
**ANALISIS SKORING KELAYAKAN NORMATIF**  
**RETRIBUSI JASA USAHA BARU DI KOTA MATARAM**

No.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA	Kriteria Retribusi Jasa Usaha			Keterangan (layak/tdk.layak)
		a	b	i	
1.	Retribusi A				
2.	Retribusi B				
3.	Retribusi C				
.....	Retribusi ....				

Sumber : Hasil Analisis, 2003.

Keterangan :

a, b = kriteria retribusi jasa usaha sesuai UU No. 34/2000

i = kriteria tambahan : Sudah diterapkan di daerah lain.

**TABEL I.8.**  
**ANALISIS SKORING KELAYAKAN NORMATIF**  
**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI KOTA MATARAM**

No.	JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu				Keterangan (layak/tdk.layak)
		a	B	c	i	
1.	Retribusi A					
2.	Retribusi B					
3.	Retribusi C					
.....	Retribusi ....					

Sumber : Hasil Analisis, 2003.

Keterangan :

a, b, c = kriteria retribusi perizinan tertentu sesuai UU No. 34/2000

i = kriteria tambahan : Sudah diterapkan di daerah lain.

Berdasarkan hasil uji kelayakan terhadap usulan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru sesuai dengan kriteria kelayakan normatif tersebut di atas, akan ditemukan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memenuhi kriteria kelayakan secara normatif untuk dipungut sebagai jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru.

**b. Proses Hierarki Analitik (PHA)**

Analisis kualitatif lainnya yang dilakukan terhadap usulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru adalah Analisis Hierarki Proses / Proses Hierarki Analitik (PHA).

Penggunaan metode ini didasarkan pada pertimbangan antara lain : metode ini mempunyai kemampuan untuk mengkuantitatifkan data kualitatif, dan mampu menangkap persepsi dari mereka yang dianggap mengetahui dan mengerti tentang persoalan yang sedang dihadapi. Kelebihan metode Proses Hierarki Analitik (PHA) ini adalah : data yang bersifat kualitatif dapat dikuantitatifkan, dapat digunakan untuk memecahkan masalah dengan tujuan majemuk dan kriteria majemuk, mempunyai kemampuan dalam menentukan keputusan yang didasarkan pada aspek akademis, aspek kepakaran dan aspek intuisi, dan terakhir dapat digunakan untuk merinci keadaan yang bersifat kompleks dan tidak terstruktur sehingga menghasilkan keputusan terbaik.

- **Gambaran Umum Metode PHA**

Metode Proses Hierarki Analitik (PHA) dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli matematika yang berkerja pada University of Pittsburg di Amerika Serikat pada awal Tahun 1977. Penggunaan metode PHA terutama untuk suatu keadaan yang bersifat kompleks atau tidak terstruktur kedalam komponen-komponennya. Bagian-bagian dari komponen tersebut disusun dalam bentuk hierarki, lalu diberikan bobot verbal atau numerik pada komponen yang dianggap penting dengan cara perbandingan berpasangan. Setelah itu dilakukan sintesa dari pendapat tadi untuk menentukan komponen mana yang memiliki prioritas tertinggi yang akan

keluar sebagai hasil analisis baik dalam penilaian relatif maupun dalam penilaian secara absolut.

Metode PHA dikembangkan dengan memperhatikan proses pengembangan pendapat manusia dalam pengambilan keputusan dan berhubungan dengan proses perhitungan matematis untuk menguji validitas proses pendapat manusia tadi.

- Konsep Pokok PHA

Terdapat tiga prinsip dasar dalam Proses Hierarki Analitik (PHA) yaitu :

(a) Menggambarkan dan menguraikan secara hierarki. Yang disebut dengan menyusun secara hierarki adalah memecah-mecah persoalan menjadi unsur yang terpisah; (b) Pembedaan prioritas dan sintesis yang disebut penetapan prioritas, yaitu menentukan peringkat elemen-elemen menurut relatif pentingnya; (c) Konsistensi logis, yaitu menjamin bahwa semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingkatkan secara konsisten sesuai dengan suatu kriteria yang logis.

- Model PHA dalam Pengambilan Keputusan

Proses pengembangan pendapat manusia ketika harus membuat keputusan, dilatarbelakangi oleh fungsi-fungsi psikologis yaitu : intuisi, berpikir, perasaan dan penginderaan. Dalam setiap diri manusia akan terdapat salah satu dari keempat fungsi tersebut yang superior dan juga terdapat satu fungsi lainnya yang bersifat inferior. Keempat fungsi itulah yang digunakan manusia dalam mengembangkan analisa hierarki proses secara matematis.

Pada tahap-tahap yang berbeda dalam metode PHA, keempat fungsi itu bisa berperan, tergantung dari masalah yang dihadapi. Misalnya dalam proses membuat suatu struktur hierarki, orang akan cenderung untuk menggunakan fungsi berpikir secara dominan dibandingkan dengan ketiga fungsi lainnya. Sedangkan dalam proses menentukan tingkat kepentingan (bobot) elemen-elemen yang ada pada masing-masing tingkat, maka fungsi berpikir mulai dikombinasikan dengan intuisi, perasaan dan penginderaan. Saaty menyusun suatu tabel untuk membandingkan tingkat kepentingan suatu elemen terhadap elemen lain dengan skala penilaian antara 1 sampai 9 seperti terlihat pada Tabel 1.9.

**TABEL 1.9.**  
**SKALA BANDING SECARA BERPASANGAN**  
**DALAM MODEL PHA**

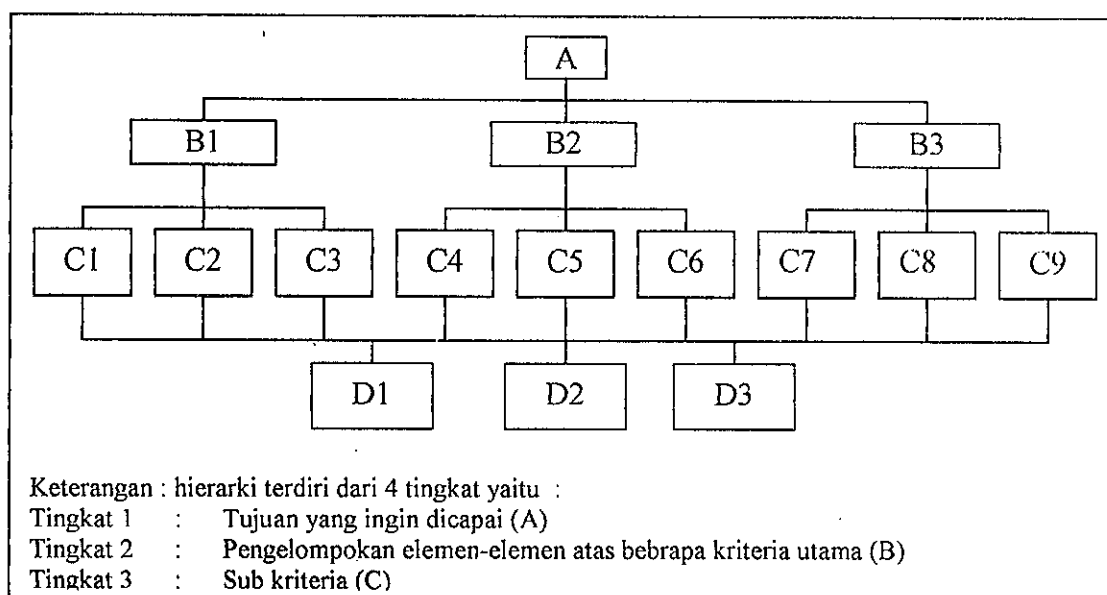
BOBOT	DEFINISI	PENJELASAN
1	Kedua elemen sama pentingnya	Kedua elemen menyumbangkan sama besar pada sifat itu.
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada yang lainnya	Pengalaman dan pertimbangan sedikit menyokong satu elemen atas yang lainnya.
5	Elemen yang satu sangat penting dibandingkan yang lainnya	Pengalaman dan pertimbangan dengan kuat menyokong satu elemen atas yang elemen lainnya.
7	Satu elemen jelas lebih penting dari elemen yang lainnya	Satu elemen dengan kuat didukung dan dominannya terlihat dalam praktek.
9	Satu elemen mutlak lebih penting daripada elemen yang lainnya	Bukti yang mendukung elemen yang satu atas yang lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan.
2,4,6,8	Nilai-nilai diantara dua pertimbangan yang berdekatan	Kompromi diperlukan antara dua pertimbangan.
Kebalikan	Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka bila dibandingkan dengan aktivitasnya j, maka j mempunyai nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan i.	

Sumber : Saaty, 1993 : 85

- Tahapan Operasional dalam Proses Hierarki Analitik

- (a) Penyusunan Hierarki

Penggunaan model PHA selalu diawali dengan penyusunan hierarki sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Tidak ada aturan yang pantang dilanggar untuk menyusun hierarki. Penyusunan hierarki ini dimaksudkan untuk menstruktur permasalahan yang kompleks menjadi elemen-elemen pokok secara hierarkis. Penyusunan hierarki dapat dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang paham terhadap permasalahan yang dikaji. Yang terpenting dalam penyusunan hierarki adalah kemampuan untuk menyusun, untuk memadukan wawasan, pengalaman, rasionalitas dan intuisi dalam menghasilkan hierarki yang handal dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam pemilihan prioritas/alternatif hierarki disusun berupa digram pohon, secara skematis seperti Gambar 1.5.



Sumber : Saaty (1993 : 33)

**GAMBAR 1.5.**  
**MODEL HIERARKI DALAM METODE PHA**

(b) Pengisian Persepsi Manusia

Tahapan ini merupakan penilaian narasumber terhadap tingkat kepentingan atau prioritas relatif antar elemen yang dijadikan kriteria dalam pengambilan keputusan. Sebelumnya diperlukan syarat bahwa narasumber yang dipilih adalah benar-benar memahami dan mengerti permasalahan yang dihadapi sesuai dengan pendidikan, pengalaman dan keahliannya. Proses pengisian persepsi dilakukan dengan kuesioner yang berisi perbandingan berpasangan dari kriteria dengan skala penilaian antara 1 sampai 9. Berdasarkan nilai-nilai perbandingan tadi, dapat disusun matriks penilaian untuk setiap hierarki mulai tingkat teratas sampai dengan tingkat hierarki terendah. Apabila telah berada dalam matriks, maka setiap matriks perlu dinormalisasikan dengan menggunakan operasi matriks tertentu sebelum masuk dalam analisis berikutnya.

(c) Perhitungan Bobot dan Uji Konsistensi

Setelah setiap matriks dinormalisasikan, maka dilanjutkan dengan penghitungan bobot prioritas. Bobot prioritas masing-masing elemen dalam masing-masing matriks ditentukan sesuai dengan nilai *eigen*-vektornya. Nilai-nilai ini menggambarkan prioritas suatu elemen dalam matriks. Rata-rata nilai *eigen*-vektor dalam sebuah matriks disebut *Eigenvalue* ( $\lambda$  maks).

Untuk melihat tingkat konsistensi narasumber dalam mempersepsikan sesuatu elemen diperlukan perhitungan uji konsistensi atau *Consistency Index* (CI) berdasarkan nilai *eigenvalue* dan jumlah baris

dalam matriks. Apabila hasil pengujian menunjukkan  $IC < 0,1$  dapat dianggap bahwa konsistensi narasumber dalam memberikan penilaian relatif bersifat valid.

(d) Pengukuran Prioritas Global

Bila tahapan tersebut dilakukan dengan benar maka proses perhitungan telah dilakukan dengan baik. Hasil yang diperoleh dalam nilai-nilai prioritas lokal permatriks dengan elemen sejenis. Berdasarkan nilai prioritas lokal dapat dibuat nilai prioritas global antara elemen-elemen dengan nilai prioritas pada matriks yang terletak paling bawah dari sebuah hierarki.

**Analisis PHA atas Usulan Pajak Daerah di Kota Mataram**

Untuk dapat memilih salah satu unggulan jenis Pajak Daerah baru dari beberapa alternatif Pajak Daerah baru tersebut yang paling memungkinkan untuk diberlakukan sebagai Pajak Daerah di Kota Mataram, dapat dianalisis dengan membuat hierarkhi sederhana yang terdiri dari beberapa level. Narasumber untuk analisis ini adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan beberapa Kepala Dinas / Instansi terkait yang berkompeten, pakar/akademisi, tokoh masyarakat (diwakili anggota DPRD Komisi C) serta wakil pengusaha/swasta (Gapensi) yang telah membuat kesepakatan untuk sependapat memilih salah satu alternatif yang paling memungkinkan untuk dapat dijadikan sebagai jenis Pajak Daerah baru karena dapat memenuhi persyaratan sebagai ahli untuk masalah tersebut, yaitu bisa memahami benar permasalahannya dan sebagai pihak yang mempunyai kepentingan atas permasalahan tersebut, di mana sebelum

mengisi hierarki ini, terlebih dahulu narasumber sudah melakukan pengamatan terhadap keunggulan masing-masing jenis Pajak untuk dijadikan sebagai salah satu Pajak Daerah baru di Kota Mataram.

Level pertama memilih suatu jenis Pajak Daerah baru yang paling memungkinkan untuk dapat diberlakukan sebagai salah satu Pajak Daerah di Kota Mataram. Kriteria-kriteria yang dikembangkan dalam memilih jenis Pajak Daerah baru adalah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000.

#### **Analisis PHA Terhadap usulan Retribusi Daerah di Kota Mataram**

Analisis PHA terhadap kelayakan Retribusi Daerah dilakukan dengan cara / langkah yang sama dengan analisis PHA terhadap kelayakan Pajak Daerah, hanya saja pada Level II tentang Kriteria Kelayakan, menggunakan kriteria yang ditentukan oleh pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 34 Tahun 2000.

#### **c. Penyusunan Matrik Silang Tipologi antara Kelayakan Normatif dan PHA**

Hasil dari analisis kelayakan normatif dan PHA berupa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dinilai memenuhi kelayakan maupun yang tidak memenuhi kelayakan untuk diberlakukan sebagai upaya ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Mataram, selanjutnya disusun dalam matrik silang Tipologi kelayakan normatif dan PHA. Tujuan dari penyusunan matrik silang ini adalah agar dapat diketahui tipologi jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah apa saja yang :

- memenuhi kelayakan normatif dan menjadi unggulan dalam PHA;



- memenuhi kelayakan normatif;
- menjadi unggulan dalam PHA;
- tidak memenuhi kelayakan normatif dan/atau tidak diunggulkan dalam PHA;

Bentuk matrik silang tipologi tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.6. berikut ini.

Kelayakan Normatif	Memenuhi Kelayakan	II	I
	Tidak Memenuhi	III	IV
		Tidak Diunggulkan	Diunggulkan
		PHA	

Sumber : Hasil Analisis, 2003

**GAMBAR 1.6.**  
**MATRIK SILANG TIPOLOGI**  
**KELAYAKAN NORMATIF DAN PHA**

Matrik silang memiliki 4 (empat) kuadran, yaitu Kuadran I, Kuadran II, Kuadran III dan Kuadran IV. Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berada di Kuadran I menunjukkan bahwa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut memenuhi kelayakan normatif dan menjadi unggulan dalam PHA. Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berada di kuadran II memenuhi kelayakan normatif. Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berada di kuadran III berarti tidak memenuhi kelayakan normatif dan/atau

tidak diunggulkan dalam PHA. Sedangkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berada di kuadran IV berarti menjadi unggulan dalam PHA.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berada di kuadran I merupakan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang harus diprioritaskan penerapannya sebagai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru.

#### **d. Analisis Variabel Ekonomi Makro**

Analisis ini dimaksudkan untuk melihat kemampuan masyarakat Kota Mataram dalam menerima beban tambahan berupa pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah baru dan sebagai dasar untuk memproyeksikan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dimasa yang akan datang. Variabel ekonomi makro yang digunakan dalam analisis ini dibatasi hanya pada :

- Pendapatan perkapita masyarakat
- Tingkat inflasi
- Perkembangan land use Kota Mataram dari tahun 1994 sampai tahun 2002 (kondisi eksisting)
- Perkembangan aktivitas ekonomi, yang tercermin dari pertumbuhan berbagai sektor usaha.

Variabel-variabel ekonomi makro tersebut (kecuali tingkat inflasi), dilihat trend perkembangannya, apakah menunjukkan pertumbuhan atau kemunduran. Apabila trend-nya menunjukkan pertumbuhan, berarti dapat dikatakan bahwa masyarakat Kota Mataram memiliki kemampuan untuk menerima beban tambahan berupa pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru. Sebaliknya apabila trend-nya menunjukkan

penurunan/kemunduran, berarti masyarakat Kota Mataram diasumsikan tidak akan mampu menerima beban tambahan tersebut. Khusus untuk tingkat inflasi, berlaku sebaliknya, yaitu semakin tinggi tingkat inflasi justru akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

**e. Analisis SWOT**

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). (Freddy Rangkuti, 2000 : 18)

Dalam studi ini, analisis SWOT digunakan untuk menganalisis faktor-faktor kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman dalam penerapan pajak daerah dan retribusi daerah baru dari hasil analisis.

**f. Program Rencana Tindak (*Action Plan*)**

Program rencana tindak disusun menggunakan pendekatan rasional. Rasional memiliki arti bahwa rencana tindak yang diprogramkan mampu dilaksanakan sesuai dengan potensi sumberdaya manusia dan sistem administrasi yang berlaku pada dinas/instansi pelaksana.

Langkah-langkah dalam menyusun rencana tindak antara lain :

- Mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul
- Melibatkan seluruh instansi terkait
- Menyamakan visi dan misi pihak-pihak yang akan terlibat dalam kegiatan
- Menetapkan program dari rencana tindak tersebut.

### **Analisis kuantitatif**

Analisis kuantitatif yang digunakan berupa analisis efisiensi ekonomi (rasio efisiensi), yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya pungut (biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dari pajak / retribusi) dengan perkiraan realisasi pendapatan yang diterima. Suatu Pajak Daerah / Retribusi Daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti semakin efisien pemungutan suatu pajak/retribusi. (Abdul Halim, 2002 : 130)

$$\text{efisiensi ekonomi} = \frac{\text{biaya pungut pajak / retribusi}}{\text{perkiraan pendapatan}} \dots\dots\dots (1)$$

Biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru, sesuai pendapat Gray, et.all. (1993 : 274), dirangkum sebagai berikut: Biaya pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menurut: (1) barang-barang modal, seperti gedung, kendaraan dan peralatan, (2) Biaya operasional atau rutin mencakup gaji pegawai, perjalanan dinas, biaya administrasi, dan lain-lain, (3) Subsidi, misalnya untuk biaya transportasi.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dalam penyusunan tesis ini adalah :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan sasaran studi, ruang lingkup studi, kerangka pemikiran serta sistematika penulisan dari tesis dan metode penelitian.

#### **BAB II EKSTENSIFIKASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KOTA**

Bab ini Berisi tentang uraian teoritis yang ditulis para pakar, maupun produk hukum, antara lain sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah; peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah; pengertian dan dasar hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; teori ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; kriteria-kriteria penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru; Prinsip-prinsip Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; fungsi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan diakhiri dengan menyajikan sintesa kajian pustaka..

### **BAB III KAJIAN UMUM PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM**

Berisi uraian/penjelasan singkat tentang lokasi penelitian, antara lain memberikan gambaran tentang sejarah terbentuknya Kota Mataram, kondisi geografis, kondisi demografi, serta potensi yang dimiliki oleh Kota Mataram.

### **BAB IV IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM**

Pada bab ini menjelaskan mengenai serangkaian analisis yang dilakukan dalam upaya ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Mataram.

### **BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Pada bab terakhir ini disimpulkan temuan studi dan memberikan rekomendasi untuk arahan pelaksanaan maupun penelitian lebih lanjut.

## **BAB II**

### **EKSTENSIFIKASI**

### **PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM**

### **MENUNJANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KOTA**

#### **2.1. Sumber-sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah**

Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Sebagai konsekuensi pelaksanaan asas desentralisasi dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah lahirnya *local self-government* atau pemerintahan lokal yang mengurus rumah tangga sendiri. Ini berarti bahwa Otonomi Daerah adalah merupakan hak, wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Tujuan diberikannya kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tersebut antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu

menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari paparan di atas jelaslah bahwa faktor kemampuan untuk mengelola keuangan daerah merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan kata lain, salah satu ciri dari daerah otonom terletak pada kemampuan *self supporting*-nya dalam bidang keuangan, termasuk di dalamnya adalah kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan dengan baik dan menggunakannya secara tepat dan benar. Daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonominya. (Mulyanto, 2002 : 6)

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan dasar-dasar pembiayaan pemerintah daerah, yaitu :

- 1) Penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban APBD.
- 2) Penyelenggaraan tugas pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah propinsi dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN.
- 3) Penyelenggaraan tugas pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan desa dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban APBN.
- 4) Penyerahan atau pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur atau penyerahan kewenangan atau penugasan pemerintah pusat kepada Bupati/walikota diikuti dengan pembiayaannya.

Sumber-sumber penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi seperti yang tercantum dalam Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah :

a) Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari :

- Hasil pajak daerah;
- Hasil retribusi daerah;
- Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan;
- lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

b) Dana Perimbangan, terdiri dari :

- Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya alam. Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. Penerimaan negara dari BPHTB dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. 10% penerimaan PBB dan 20% penerimaan BPHTB yang menjadi bagian pemerintah pusat, dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota. Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan sebagai berikut :



untuk minyak bumi dibagi dengan imbangan 85% untuk pemerintah pusat dan 15% untuk daerah; untuk gas alam dibagi dengan imbangan 70% untuk pemerintah pusat dan 30% untuk daerah.

- Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU untuk seluruh daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
  - Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.
- c) Pinjaman Daerah
- Daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri untuk membiayai sebagian anggarannya.
  - Daerah melakukan pinjaman dari sumber luar negeri melalui Pemerintah Pusat
  - Daerah dapat melakukan pinjaman jangka panjang guna membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan pendapatan

- Daerah dapat melakukan pinjaman jangka pendek guna pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan kas daerah.

d) Lain-lain pendapatan yang sah.

Dalam Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, komponen pendapatan dibagi menjadi 3 (tiga) ; pertama, pendapatan asli propinsi; kedua, pendapatan asli kabupaten/kota; dan ketiga, dana perimbangan.

Pendapatan asli propinsi terdiri dari pajak propinsi, retribusi propinsi, bagian laba BUMD dan pendapatan lain. Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, jenis pajak propinsi terdiri dari :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas air;
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- 7) Pajak Parkir.

Sedangkan untuk retribusi Kabupaten/Kota menurut Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, terdiri dari :

a) Retribusi Jasa Umum, meliputi :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- 10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

b) Retribusi Jasa Usaha, meliputi :

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
- 4) Retribusi Terminal;
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/Villa;
- 7) Retribusi Penyedotan Kakus;
- 8) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;

- 10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
  - 11) Retribusi Penyeberangan di atas Air;
  - 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
  - 13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c) Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi :
- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
  - 3) Retribusi Izin Gangguan;
  - 4) Retribusi Izin Trayek;

Sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah seperti yang telah disebutkan di atas merupakan sumber pembiayaan konvensional. Selain sumber pembiayaan konvensional tersebut, pemerintah daerah dapat juga memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang bersifat non konvensional. Sumber pembiayaan non konvensional yaitu sumber pembiayaan pembangunan daerah yang berasal dari mekanisme non anggaran pemerintah.

“Modal bagi pembiayaan non konvensional ini berasal dari tiga sumber yaitu dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Adapun perbedaan mendasar antara swasta dan masyarakat adalah bahwa tujuan dari peran serta swasta dalam pembiayaan pembangunan antara lain berorientasi pada profit / keuntungan, sedangkan masyarakat tidak berorientasi pada profit tetapi lebih pada kepentingan umum”. (Samsul Ma’rif, 2002 : 41)

Lebih lanjut Samsul Ma’rif (2002 : 41) menyatakan bahwa untuk setiap jenis modal, terdapat beberapa jenis instrumen keuangan, yaitu :

- 1) Sumber Pembiayaan melalui Pendapatan (*Revenue Financing*), terdiri dari :

- a) Pembiayaan melalui Pendapatan Pemerintah (*Public Revenue Financing*), berupa Pungutan Perbaikan (*Betterment Levies*), merupakan tagihan modal (*capital charges*) yang ditujukan untuk menutupi atau membiayai biaya modal dari investasi prasarana. Hal ini dapat dikenakan pada suatu kawasan dimana biaya-biaya peningkatan mutu lingkungan langsung dibebankan pada nilai tanah. Tujuannya adalah untuk mendorong masyarakat yang memperoleh manfaat dari prasarana umum agar turut menanggung dana. Dapat dikenakan berdasarkan luas pekarangan depan, luas seluruh tanah yang dimiliki atau taksiran manfaat.
- b) Pembiayaan melalui pendapatan swasta (*Private Revenue Financing*). Bentuk dari *Private Revenue Financing* diantaranya adalah Biaya Dampak Pembangunan (*Development Impact Fees*) dan Biaya Sambungan (*Connection Fees*).
- Biaya Dampak Pembangunan (*Development Impact Fees*) adalah suatu biaya yang dikenakan akibat suatu pembangunan baru dan merupakan salah satu cara untuk mengurangi beban biaya penyediaan sarana dan prasarana bagi pembangunan baru. Biaya ini dikenakan melalui mekanisme perizinan.
  - Biaya Sambungan (*Connection Fees*), merupakan pungutan yang dikenakan oleh perusahaan jasa pelayanan kepada individu, misalnya air bersih, saluran pembuangan kotoran, dan telepon. Tujuan utama dari dikenakannya pungutan ini adalah untuk menutupi biaya yang timbul sebagai akibat adanya tambahan

konsumen dalam jaringan yang sudah ada. Walaupun secara tradisional sebenarnya jenis pungutan ini termasuk dalam kategori *private revenue financing*, namun lebih dikenal sebagai *public revenue financing* karena perusahaan yang menyelenggarakan jenis pelayanan tersebut adalah perusahaan pemerintah.

- c) Pembiayaan melalui Pendapatan Pemerintah-Swasta (*Public-Private Revenue Financing*), antara lain berupa konsolidasi lahan. Konsolidasi lahan merupakan suatu usaha pengaturan kembali pemilik lahan dengan tujuan agar penggunaan lahan akan menjadi lebih baik dan optimal dalam pengertian kelestarian, pemanfaatan dan produktivitas. Dalam pelaksanaan konsolidasi lahan ini menggunakan sistem swadaya masyarakat yang pada prinsipnya semua biaya pembangunan ditanggung oleh pemilik lahan yang termasuk dalam lokasi proyek. Salah satu sasaran dalam konsolidasi lahan adalah untuk melaksanakan tertib administrasi dalam penguasaan dan penggunaan lahan melalui pemberian sertifikat kepada para pemilik lahan, sehingga dapat memberikan pemasukan kepada pemerintah melalui Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2) Sumber Pembiayaan melalui Hutang (*Debt Financing*).
- a) Pembiayaan melalui Hutang Pemerintah (*Public Debt Financing*), berupa penerbitan obligasi pemerintah.
  - b) Pembiayaan melalui Hutang Swasta (*Private Debt Financing*), berupa *Development Exactions*, yang dikenakan pada developer dalam rangka pembangunan prasarana di dalam lingkungan (*on site*) area

pembangunan, sebagai salah satu syarat sebelum pembangunan itu dimulai. Besarnya pungutan berdasarkan negosiasi atau perjanjian.

c) Pembiayaan melalui Hutang Swasta-Pemerintah (*Private-Public Debt Financing*), terdiri dari :

- *Excess Condemnation*, merupakan pembiayaan prasarana secara tidak langsung, dimana sejumlah tanah disisihkan untuk pembangunan prasarana dan sejumlah lainnya diberikan kepada developer swasta untuk pembangunan komersial.
- *Linkage*, merupakan pembiayaan prasarana secara langsung, yaitu developer diharuskan menyediakan dan membiayai prasarana yang sejenis (pararel) di daerah lain yang kurang diinginkan dalam rangka mendapatkan persetujuan pembangunan di daerah yang mereka inginkan. Contoh : membangun RSS untuk dapat membangun perumahan mewah.

3) Sumber Pembiayaan melalui Kekayaan (*Equity Financing*), terdiri dari Pembiayaan melalui kekayaan swasta-pemerintah (*Private-Public Equity Financing*), berupa :

- a) *Joint Venture* (Usaha Patungan), merupakan kerjasama antara swasta dan pemerintah, dimana masing-masing pihak mempunyai posisi yang seimbang dalam perusahaan yang bersangkutan.
- b) BOT (*Build, Operation, Transfer*), merupakan bentuk konsesi antara swasta dengan pemerintah, dengan pengertian swasta membangun, mengoperasikan dan memperoleh pendapatan dari suatu fasilitas selama jangka waktu tertentu yang disepakati. Selama masa konsesi, swasta

berhak mengutip pembayaran baik dari pemakai atau bahkan pemerintah sesuai dengan kontrak kerjasama yang telah dibuat sebelumnya. Setelah masa konsesi, fasilitas atau infrastruktur yang dibangun dan dioperasikan diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah kemudian dapat mengoperasikan fasilitas tersebut sendiri, membuat perjanjian baru dengan perusahaan yang telah membangun dan mengoperasikannya selama ini atau membuat perjanjian kerjasama dengan perusahaan lain.

- c) BOO (*Built, Own, Operate*), juga merupakan salah satu bentuk konsesi antara pemerintah dengan swasta. Investor akan membangun proyek di atas tanah milik pemerintah daerah, setelah selesai proyek langsung dihibahkan kepada pemerintah daerah dan investor dapat mengoperasikan bangunan tersebut dalam jangka waktu tertentu.
- d) BOL (*Built, Operation, Leasing*) dan *Build Lease Transfer* (BLT). Dalam pola ini pihak swasta yang membangun suatu fasilitas infrastruktur menyerahkan fasilitas tersebut kepada pemerintah setelah fasilitasnya terbangun. Pemerintah kemudian dapat mengoperasikan sendiri fasilitas tersebut, meminta perusahaan swasta tertentu untuk mengoperasikannya (pola BTO) atau menyewakannya kepada pihak swasta untuk dioperasikan. Pengoperasian ini dilakukan untuk masa konsesi yang masih tersedia.
- e) Sewa (*Leasing*). Dalam pola ini pemerintah menyewakan fasilitas untuk dioperasikan oleh swasta dengan fee tertentu. swasta tentunya menanggung resiko komersial dan resiko lainnya yang mungkin terjadi.



Untuk lebih jelasnya, sumber-sumber pembiayaan daerah yang berasal dari mekanisme nonkonvensional tersebut di atas, secara ringkas disajikan pada Tabel II.1.

**TABEL II.1.**  
**SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN NONKONVENSIIONAL**

<b>AKTOR INSTRUMEN PEMBANGUNAN</b>	<b>KEKAYAAN</b>	<b>HUTANG</b>	<b>PENDAPATAN</b>
<b>PEMERINTAH</b>	Lahan, bangunan	Obligasi	Betterment Levies
<b>SWASTA</b>	-	Development exactions	Biaya dampak pembangunan, biaya sambungan
<b>PEMERINTAH &amp; SWASTA</b>	Joint Venture, Konsesi (BOO, BOT, Leasing)	Excess condemnation, linkage	Konsolidasi lahan

*Sumber : Samsul Ma'rif (2002 : 47)*

## **2.2. Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan Daerah**

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggalan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen dari PAD, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan

kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penyelenggaraan otonomi daerah akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung dengan sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Potensi ekonomi daerah sangat menentukan dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah bagi penyelenggaraan rumah tangganya. Namun demikian, otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan hanya semata diukur dari jumlah PAD yang dapat dicapai tetapi lebih dari itu yaitu sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

## **2.3. Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

### **2.3.1. Pengertian Pajak Daerah**

Beberapa ahli memberikan pengertian pajak yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Di antara berbagai pengertian yang dikemukakan para ahli, disini dipilih pengertian pajak dari 4 (empat) penulis yang berbeda (Muqodim, 1999 : 1) :

- 1) Menurut Sommerfeld, pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor

pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapat suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya menjalankan pemerintahan.

- 2) Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan 'surplus'nya digunakan untuk '*public saving*' yang merupakan sumber utama untuk membiayai '*publik investment*'.
- 3) Menurut M.J.H. Smeets, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa ada kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
- 4) Menurut Ray M. Sommer, Hershel M. Andersen dan Horace R. Brock, "A tax can be defined meaningfully as any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria without reference to specific benefits received, so as to accomplish some of a nation's economic and social objectives.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat dikemukakan pengertian secara lengkap, yaitu pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah (kas negara) berdasarkan undang-undang atau peraturan, sehingga dapat dipaksakan, tanpa ada kontra prestasi yang langsung dan seimbang yang dapat ditunjukkan secara individual dan hasil penerimaan pajak tersebut merupakan sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Sementara itu, pengertian Pajak Daerah seperti yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 dinyatakan bahwa "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah".

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.
2. Berdasarkan Undang-Undang.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### **2.3.2. Pengertian Retribusi Daerah**

Menurut Muqodim (1999 : 3) “Retribusi adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar”.

Pengertian Retribusi Daerah yang hampir sama dikemukakan oleh Kunarjo (1996 : 170) menyatakan bahwa “Retribusi adalah pemungutan uang sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik Pemerintah baik yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan Pemerintah dan berdasarkan peraturan umum yang dibuat oleh Pemerintah”.

Pengertian Retribusi Daerah seperti yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah dinyatakan bahwa “Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu, berikut ini disajikan pengertian dari masing-masing golongan retribusi tersebut menurut Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah :

- a) Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b) Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- c) Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Devas (1989 : 95), bahwa “kebijaksanaan tentang pemungutan bayaran (retribusi) terhadap masyarakat atas barang dan layanan yang disediakan pemerintah berpangkal pada pengertian efisiensi ekonomi. Dalam hal orang perorangan bebas menentukan besar layanan tertentu yang hendak dinikmatinya, pungutan retribusi sebagai harga untuk layanan itu memainkan peranan penting dalam menjatah permintaan, mengurangi penghamburan, dan menutup biaya pengadaan layanan tersebut”.

Penerimaan hasil pungutan (retribusi) atas penyediaan berbagai barang dan layanan yang disediakan oleh pemerintah (daerah) merupakan salah satu sumber yang bisa diandalkan dalam pemupukan pendapatan pemerintah daerah yang menjadi sumber pembiayaan rumah tangga daerah.

Sementara itu Davcy (1988 : 136) menjelaskan bahwa "Retribusi dapat menguji arah dan skala dari permintaan masyarakat terhadap layanan (jasa), di mana kebutuhan atas bentuk dan standar penyediaan layanan tidak dapat dengan tegas ditentukan terhadap keinginan seluruh masyarakat. Suatu kasus dapat dibuat hampir pada setiap pengeluaran pemerintah, kesediaan masyarakat membayar langsung bagi pelayanan yang disediakan pemerintah tersebut adalah suatu pengujian penting atas keinginan masyarakat".

Hasil pemungutan retribusi itu sendiri akhirnya menjadi bagian guna membiayai pembangunan, terutama dalam pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan berbagai fasilitas pelayanan, supaya bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Kaho (1995 : 156), secara umum keunggulan utama sektor retribusi atas sektor pajak adalah karena pemungutan retribusi berdasarkan pada kontraprestasi, dimana tidak ditentukan secara limitatif seperti halnya sektor pajak. Pembatas utama bagi sektor retribusi adalah terletak pada ada atau tidaknya jasa yang disediakan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, sebenarnya Pemerintah Daerah dapat saja mengusahakan retribusi selama ia dapat menyediakan jasa untuk itu.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

husus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

### **2.3.3. Dasar Hukum Pajak Daerah**

Dasar hukum Pajak Daerah yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pembaharuan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian Daerah dari segi keuangan dengan memberikan kewenangan kepada Daerah untuk dapat menggali beberapa sumber Pendapatan Daerah yang baru, diantaranya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru.

Sementara itu di dalam Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah, sekurang-kurangnya harus mengatur ketentuan mengenai:

- a) Nama, objek, dan subjek pajak.
- b) Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak.
- c) Wilayah pemungutan.
- d) Masa Pajak.
- e) Penetapan.
- f) Tata cara pembayaran dan penagihan.
- g) Kedaluwarsa.
- h) Sanksi Administrasi.
- i) Tanggal mulai berlakunya.

Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai:

- a) pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
- b) tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa;
- c) asas timbal balik.

#### **2.3.4. Dasar Hukum Retribusi Daerah**

Dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, di mana Pemerintah Daerah diberi kewenangan otonomi secara luas, nyata dan bertanggung jawab, maka Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi Daerah, diubah lagi melalui Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tentang Retribusi Daerah.

#### **2.4. Teori Ekstensifikasi Dalam Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah merupakan sumber yang sangat potensial dalam usaha memupuk Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu segenap potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu digali secara optimal, terutama dengan melakukan ekstensifikasi. Adapun yang dimaksud dengan istilah ekstensifikasi sebagaimana dikemukakan oleh Fuad Bawazier (1998 : 14), adalah sebagai berikut :



Ekstensifikasi dalam pemungutan pajak daerah maupun retribusi daerah, dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan usaha ekspansi untuk menambah objek-objek maupun subjek-subjek pajak daerah atau retribusi daerah yang baru, serta berpotensi untuk dipungut pajak dan retribusinya. Sehingga dengan bertambahnya objek dan subjek pajak atau retribusi daerah yang baru, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah akibat bertambahnya penerimaan dari objek pajak daerah dan retribusi daerah baru, hasil dari usaha ekstensifikasi.

Lebih lanjut Fuad Bawazier (1998 : 16) juga mengemukakan penjelasan sebagai berikut:

Ekstensifikasi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, yaitu mengadakan pendataan atau menginventarisir berbagai objek yang berpotensi untuk dipungut pajak atau retribusinya, melakukan kalkulasi secara cermat, sehingga dapat diperhitungan secara akurat tentang potensi penerimaan, menghitung besarnya biaya yang diperlukan untuk mengadakan ekstensifikasi, menyiapkan sumber daya yang diperlukan, membuat rencana, dan sebagainya. Dengan demikian upaya ekstensifikasi dalam pemungutan pajak daerah atau retribusi dapat lebih realistik.

Upaya ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimungkinkan dilakukan karena didukung oleh Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pasal 2 ayat (4) yang menyatakan bahwa "Dengan Peraturan Daerah Dapat ditetapkan jenis Pajak Kabupaten/Kota selain yang ditetapkan dalam ayat (2)...", dan pada pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa "Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam ayat (3) sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan". Jadi usaha ekstensifikasi terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilakukan sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000.

## **2.5. Kriteria-kriteria Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Baru**

### **2.5.1. Kriteria-kriteria Penetapan Pajak Daerah Baru**

Kriteria-kriteria dalam penetapan Pajak Daerah baru menurut Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

- a) Bersifat pajak dan bukan retribusi
- b) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- c) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d) Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak Pusat.
- e) Potensinya memadai.
- f) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
- g) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
- h) Menjaga kelestarian lingkungan.

Selanjutnya penjelasan dari kriteria-kriteria tersebut seperti yang terdapat pada Penjelasan atas undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

- a) Yang dimaksud dengan kriteria bersifat pajak dan bukan Retribusi adalah bahwa pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6.
- b) Yang dimaksud dengan kriteria objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum berarti bahwa pajak tersebut

dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketenteraman, dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

- c) Yang dimaksud dengan kriteria potensinya memadai berarti bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi Daerah.
- d) Yang dimaksud dengan kriteria tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif berarti bahwa pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak merintang arus sumber daya ekonomi antar Daerah maupun kegiatan ekspor impor.
- e) Yang dimaksud dengan kriteria aspek keadilan, antara lain adalah objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan Wajib Pajak.  
Yang dimaksud dengan kriteria kemampuan masyarakat adalah kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.
- f) Yang dimaksud dengan kriteria menjaga kelestarian lingkungan adalah bahwa pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Kriteria penetapan Pajak Daerah menurut sifatnya dapat dibagi menjadi dua yaitu kriteria umum dan kriteria khusus:

1. Kriteria umum, merupakan kriteria yang bersifat umum bagi semua Daerah Kabupaten/Kota. Kriteria ini meliputi; bersifat pajak dan bukan retribusi, objek pajak terletak di wilayah yang bersangkutan, objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan objek Pajak Propinsi dan/atau Pajak Pusat.
2. Kriteria khusus, kriteria ini merupakan potensi atau kepentingan daerah dalam usaha meningkatkan pajak. Kriteria ini meliputi; potensi memadai, tidak memberikan dampak positif, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kriteria penetapan Pajak Daerah dapat dilihat dalam Tabel II.2. berikut ini:

**TABEL II.2.**  
**KRITERIA PENETAPAN PAJAK DAERAH BARU**

<i><b>KRITERIA UMUM</b></i>	<i><b>KETERANGAN</b></i>
1. Bersifat pajak dan bukan retribusi	• Merupakan pajak
2. Objek pajak terletak di wilayah yang bersangkutan	• Objek berada di wilayah administrasi Kota Mataram
3. Objek dan dasar pengenaan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	• Untuk kepentingan bersama yang lebih luas ataupun objek pajak yang merupakan orang-orang tertentu yang berkepentingan dengan pajak
4. Objek pajak bukan objek pajak Pusat/Propinsi	• Bukan objek pajak Pusat/Propinsi.
<i><b>KRITERIA KHUSUS</b></i>	<i><b>KETERANGAN</b></i>
1. Potensi memadai	• Hasil yang besar dan biaya administrasi yang kecil ( $B/C > 1$ ) • Laju pertumbuhan sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi
2. Tidak memberikan dampak ekonomi negatif	• Tidak mengganggu kegiatan ekonomi yang lain • Objek dan subjek pajak jelas
3. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat	• Tarif ditentukan dengan kondisi wajib pajak (tarif progresif) • Kemampuan wajib pajak dalam menambah biaya beban pajak yang ditanggung
4. Menjaga kelestarian lingkungan	• Bersifat netral terhadap lingkungan (tidak mengganggu lingkungan)

*Sumber : Penjelasan UU RI No. 34 Tahun 2000.*

Hasil dari penilaian, kemudian dikompilasi untuk melihat kesesuaian/kelayakan setiap alternatif pajak. Pajak dinyatakan sesuai/layak sebagai objek pajak baru apabila semua kriteria (umum dan khusus) dapat

terpenuhi, sedangkan objek pajak dinyatakan tidak sesuai/layak sebagai objek pajak, apabila semua kriteria tidak terpenuhi (baik umum dan khusus).

### **2.5.2. Kriteria-kriteria Penetapan Retribusi Daerah Baru**

Sedangkan pelaksanaan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber penerimaan Retribusi Daerah harus didasarkan pada kriteria sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut :

- a. Retribusi Jasa Umum, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - 1) Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perijinan Tertentu.
  - 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
  - 3) Jasa yang diberikan memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
  - 4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
  - 5) Tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
  - 6) Dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
  - 7) Pungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

b. Retribusi Jasa Usaha, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1) Bersifat bukan pajak dan bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perijinan Tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai, atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
- 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- 3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar, sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Untuk mewujudkan kemampuan keuangan daerah agar semakin mandiri dalam pelaksanaan otonomi daerah, upaya-upaya ekstensifikasi baik terhadap penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah, adalah menjadi salah satu alternatif untuk memperbesar Pendapatan Asli Daerah.

## 2.6. Prinsip-prinsip Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

### 2.6.1. Prinsip-prinsip Pemungutan Pajak Daerah

Dalam pengenaan pajak, Adam Smith telah mengajukan beberapa prinsip bagi pengenaan pajak yang baik yang disebut dengan "*Smith's Canons*", yaitu :  
(M. Suparmoko, 2000 : 97-98)

- 1) Prinsip kesamaan/keadilan (*equity*). Artinya ialah bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar di dalam distribusi beban pajak itu, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting tetapi beban riil dalam arti kepuasan yang hilang.
- 2) Prinsip kepastian (*certainty*). Pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri.
- 3) Prinsip kecocokan/kelayakan (*convenience*). Pajak jangan sampai terlalu menekan seorang wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.
- 4) Prinsip ekonomi (*economy*). Pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar daripada jumlah penerimaan pajaknya.

*Smith's Canons* ini masih dilengkapi oleh sarjana lain dengan satu prinsip lagi yaitu yang disebut dengan prinsip ketepatan (*adequate*). Pajak hendaknya dipungut tepat pada waktunya dan jangan sampai mempersulit posisi anggaran belanja pemerintah.

Sementara itu Van Justi, ahli ekonomi Jerman dalam bukunya yang terbit tahun 1760 sebagaimana dikutip oleh Muqodim (1999 : 17), mengemukakan 4 (empat) syarat pemungutan pajak, yaitu :

- 1) Tidak merugikan kemerdekaan individu dan tidak merugikan perusahaan; merugikan disini jika dipungutnya pajak sedemikian rupa, sehingga dapat menghambat serta mencegah kelangsungan perusahaan yang bersangkutan.
- 2) Pembagian secara merata.
- 3) Tidak memuat kekosongan yang dapat diselundupi.
- 4) Tidak memakan biaya yang banyak.

Prinsip-prinsip lainnya dikemukakan oleh Machfud Sidik (2002 : 2)

yaitu:

- Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
- Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
- Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak.
- Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- Non-distorsi terhadap perekonomian : implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (*extra burden*) yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (*dead-weight loss*).

Lebih lanjut Machfud Sidik (2002 : 3) mengemukakan bahwa untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, adalah sebagai berikut :

- Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
- Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
- Tax basenya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

Menurut Ter-Minassian sebagaimana dikutip oleh Jane (2002 : 121-122), ada beberapa kriteria dan pertimbangan yang diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan kepada tingkat Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu :



- 1) Pajak yang dimaksudkan untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan cocok untuk tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
- 2) Basis pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya tidak terlalu "*mobile*". Pajak daerah yang sangat "*mobile*" akan mendorong pembayar pajak merelokasi usahanya dari daerah yang beban pajaknya tinggi ke daerah yang beban pajaknya rendah. Sebaliknya basis pajak yang tidak terlalu "*mobile*" akan mempermudah daerah untuk menetapkan tarif pajak yang berbeda sebagai cerminan dari kemampuan masyarakat. Untuk alasan ini pajak konsumsi di banyak negara yang diserahkan kepada daerah hanya karena pertimbangan wilayah daerah yang cukup luas (seperti propinsi di Canada). Dengan demikian, basis pajak yang "*mobile*" merupakan persyaratan utama untuk mempertahankan di tingkat pemerintah yang lebih tinggi (Pusat/Propinsi).
- 3) Basis pajak yang distribusinya sangat timpang antar daerah, seharusnya diserahkan kepada Pemerintah Pusat.
- 4) Pajak daerah seharusnya "*visible*", dalam arti bahwa pajak seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak dan besarnya pajak terutang dapat dengan mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah.
- 5) Pajak daerah seharusnya tidak dapat dibebankan kepada penduduk daerah lain, karena akan memperlemah hubungan antar pembayar pajak dengan pelayanan yang diterima (pajak adalah fungsi dari pelayanan).
- 6) Pajak daerah seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan yang memadai untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar. Hasil penerimaan, idealnya harus elastis sepanjang waktu dan seharusnya tidak terlalu berfluktuasi.
- 7) Pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya relatif mudah diadministrasikan atau dengan kata lain perlu pertimbangan efisiensi secara ekonomi berkaitan dengan kebutuhan data, seperti identifikasi jumlah pembayar pajak, penegakan hukum (*law-enforcement*) dan komputerisasi.
- 8) Pajak dan retribusi berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan secukupnya pada semua tingkat pemerintahan, namun penyerahan kewenangan pemungutannya kepada daerah akan tepat sepanjang manfaatnya dapat dilokalisasi bagi pembayar pajak lokal.

### 2.6.2. Prinsip-prinsip Pemungutan Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 21 dan menurut Peraturan Pemerintah RI

Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa prinsip-prinsip pemungutan Retribusi Daerah berbeda-beda sesuai dengan golongan Retribusi Daerah tersebut.

Untuk Retribusi Daerah yang termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu : biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

Untuk Retribusi Daerah yang termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Sedangkan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

## **2.7. Fungsi Pemerintah Kota Dalam Melaksanakan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Dalam upaya melaksanakan ekstensifikasi terhadap sumber penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang perlu adanya peran dan tanggung jawab Pemerintah Kota untuk menggali potensi secara maksimal, mengenali dan meminimalkan kelemahan-kelemahan, memanfaatkan setiap peluang yang ada, serta mengidentifikasi dan mengatasi berbagai faktor penghambat melalui upaya pengawasan yang mantap, baik terhadap kinerja operasional aparatur di lapangan dan masyarakat yang menjadi subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dapat mencegah atau menghindarkan penyimpangan, penyelewengan dan kebocoran. Dengan demikian potensi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah dapat digali secara optimal sehingga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah semakin meningkat.

Upaya ekstensifikasi terhadap penerimaan dari sumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat memberikan dampak secara langsung dalam bentuk kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah yang akan menjadi faktor pendorong peningkatan kemandirian pemerintah Kota Mataram dalam upaya membiayai penyelenggaraan rumah tangga pemerintahan dan sekaligus melaksanakan berbagai upaya pembangunan kota sesuai tujuan pemberian otonomi secara luas, nyata dan bertanggung jawab, serta aspirasi masyarakat.

Murzani (2002 : 135) dalam penelitiannya yang berjudul "*Kajian Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Lhokseumawe*" menyatakan bahwa Pajak Sarang Burung Walet yang menurut hasil analisisnya dinyatakan layak diterapkan sebagai jenis pajak daerah baru di Kota Lhokseumawe, dapat memberikan kontribusi sebesar 88,95% terhadap peningkatan penerimaan Pajak Daerah. Sementara itu hasil analisisnya terhadap jenis retribusi daerah baru, ditemukan bahwa Retribusi Izin IPAL memenuhi kelayakan untuk diterapkan sebagai retribusi daerah baru di Kota Lhokseumawe, yaitu dapat memberikan kontribusi sebesar 42,69% terhadap peningkatan penerimaan retribusi daerah. Demikian pula halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Hidayat (2002) yang meneliti tentang upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah di Kabupaten Grobogan menyatakan bahwa, usaha peningkatan pendapatan daerah melalui ekstensifikasi yang dapat dilakukan di Kabupaten Grobogan meliputi penarikan pajak sarang burung sebagai obyek pajak baru di Kabupaten Grobogan

Dari gambaran hasil penelitian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya masih cukup banyak peluang peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya melalui ekstensifikasi, asalkan pemerintah kota/kabupaten mau menggali potensi-potensi yang ada yang selama ini belum dimanfaatkan.

## **2.8. Sintesa Kajian Pustaka**

Tujuan diberikannya kewenangan yang lebih besar kepada daerah melalui otonomi daerah antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keeluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja harus tetap dalam koridor peraturan perundang-

undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Upaya ekstensifikasi dilaksanakan dengan memperluas, atau mencari jenis-jenis baru baik dari penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah untuk meningkatkan penerimaan melalui perluasan jenis pendapatan yang dapat dipungut. Upaya ekstensifikasi atas sumber-sumber penerimaan Pajak Daerah harus didasarkan kepada kriteria-kriteria seperti yang diatur dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2000. Sedangkan pelaksanaan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber penerimaan retribusi daerah harus didasarkan pada kriteria-kriteria sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **BAB III**

## **KAJIAN UMUM PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM**

### **3.1. Gambaran Keruangan Kota Mataram**

#### **3.1.1. Terbentuknya Kota Mataram**

Kota Mataram terbentuk berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 1993 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram dan diresmikan pada tanggal 31 Agustus 1993 oleh Menteri Dalam Negeri yang diberi nama Kotamadya Dati II Mataram, terdiri dari tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Ampenan, Kecamatan Mataram dan Kecamatan Cakranegara. Dalam sejarah pertumbuhannya Kota Mataram mengalami 6 (enam) periode, yaitu :

- Periode pertama, berlangsung sebelum terbentuknya Negara Indonesia Timur dimana Lombok merupakan bagian dari Residensi Bali – Lombok.
- Periode kedua, berlangsung selama berdirinya Negara Indonesia Timur, daerah otonom terbagi dalam 3 (tiga) wilayah administrasi pemerintahan setempat. Wilayah Pemerintahan Lombok Barat sama seperti saat sebelum terbentuknya Negara Indonesia Timur.
- Periode ketiga, berlangsung ketika terbentuknya Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Barat pada tanggal 17 Desember 1959 yang terdiri dari 6 Daerah Swatantra Tingkat II, diantaranya Daswati II Lombok Barat terdiri dari 6 kedistrikan dimana kedistrikan Ampenan Barat dikembangkan menjadi 2 kedistrikan yaitu kedistrikan Ampenan dan Cakranegara. Pada periode inilah yaitu pada tanggal 17 Agustus 1959 Kota Mataram menjadi wilayah kedistrikan Ampenan sekaligus sebagai ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Barat.

- Periode keempat, yaitu sejak berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 yang menyatakan bahwa Dati II Lombok Barat dikembangkan menjadi beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Mataram, yang merupakan pemekaran Kecamatan Ampenan dan Cakranegara setelah beberapa kelurahan / desa di kedua kecamatan tersebut dikurangi.
- Periode kelima, yaitu sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1978 yaitu tentang pembentukan Kotip Mataram dengan wilayah meliputi Kecamatan Ampenan, Mataram dan Cakranegara. Setelah diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1978 sebutan Kota Cakranegara, Mataram dan Ampenan tergabung menjadi satu yaitu Kota Mataram dibawah pimpinan seorang Walikota Administratif Mataram.
- Periode keenam, yaitu sejak beralih status dari Kota Administratif menjadi Kotamadya Dati II Mataram dengan Undang – undang Nomor 4 Tahun 1993, yang diresmikan pada tanggal 31 Agustus 1993 oleh Menteri Dalam Negeri.
- Periode ketujuh, perubahan sebutan Kotamadya Dati II Mataram menjadi Kota Mataram dan beberapa perubahan sebutan lainnya sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Memperhatikan perjalanan sejarah Kota Mataram, nampak bahwa karena letaknya yang sangat strategis maka sejak dulu telah menjadi pusat aktivitas seperti pemerintahan, pendidikan, perdagangan, industri dan jasa. Sehingga wajar bila Propinsi Nusa Tenggara Barat maupun Kabupaten Lombok Barat pada saat itu menjadikan Kota Mataram sebagai Ibukotanya.

Sejak tanggal 31 Agustus 1993 Kota Mataram resmi menjadi ibukota Pemerintah Daerah Kota Mataram, disamping masih tetap menyandang status sebagai ibukota Propinsi Nusa Tenggara Barat.

### **3.1.2. Letak Geografis Kota Mataam**

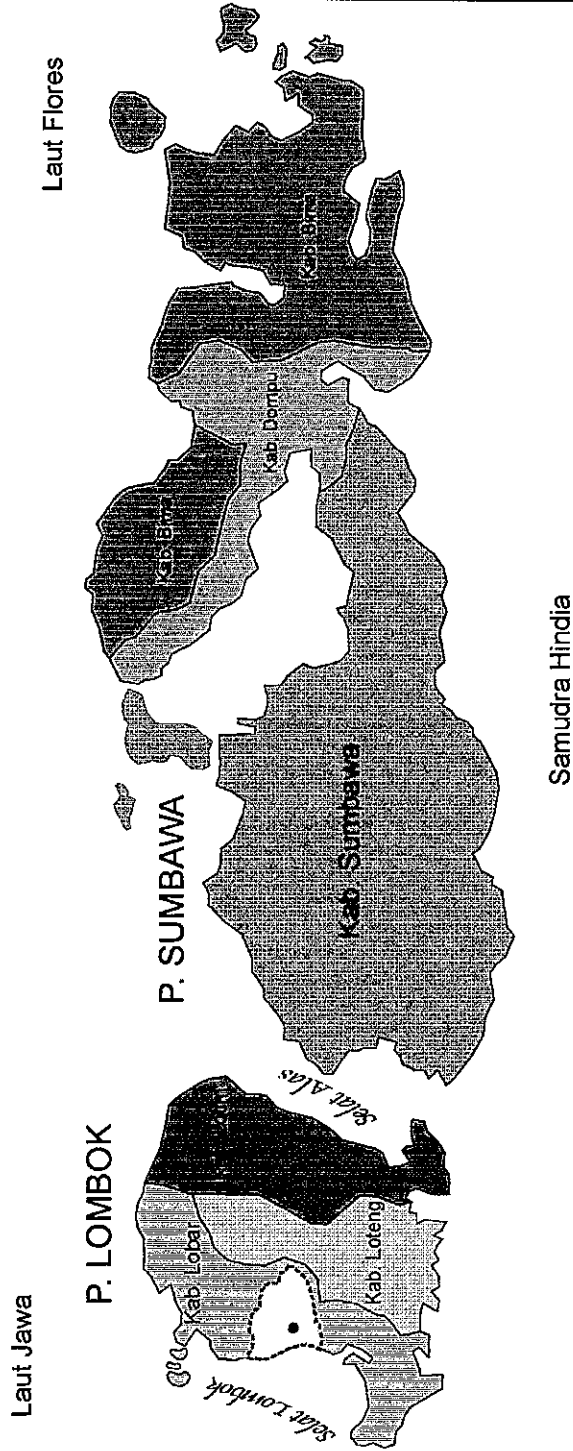
Kota Mataram yang sekaligus merupakan Ibukota Propinsi Nusa Tenggara Barat, berada di Pulau Lombok. Kota Mataram dengan luas wilayah 61,30 km<sup>2</sup> merupakan dataran rendah dengan ketinggian 16 m dari permukaan laut, yang terletak antara 116°.04" – 116°.07" Bujur Timur dan 08°.33" – 08°.42" Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut : (untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.1.)

- Sebelah Utara : Kecamatan Gunung Sari dan Narmada.
- Sebelah Timur : Kecamatan Narmada dan Lingsar.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Labuapi.
- Sebelah Barat : Selat Lombok.

Luas wilayah masing-masing kecamatan yang ada di Kota Mataram yaitu : Kecamatan Ampenan 23,59 km<sup>2</sup>; Kecamatan Mataram 17,72 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Cakranegara 19,99 km<sup>2</sup>. Persentase luas wilayah Kota Mataram menurut kecamatan, dapat dilihat pada Gambar 3.2.



# PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

## T E S I S

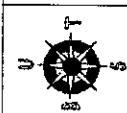
EKSTENSIFIKASI  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN  
PEMBANGUNAN KOTA MATARAM

### G A M B A R

PETA PROPINSI  
NUSA TENGGARA BARAT

### KETERANGAN

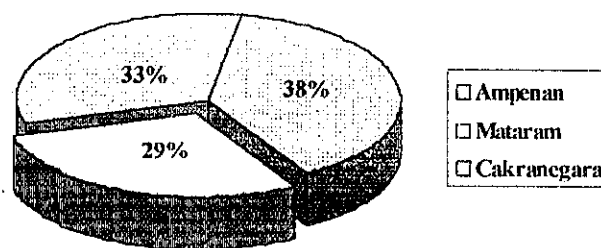
- Batas Kabupaten
  - Kota Mataram
  - Kabupaten Lombok Barat
  - Kabupaten Lombok Tengah
  - Kabupaten Lombok Timur
  - Kabupaten Sumbawa
  - Kabupaten Dompu
  - Kabupaten Bima



Skala  
No. Gambar  
No. Halaman

1:2000000  
3.1.  
82

SUMBER  
BAPPEDA PROPINSI  
NUSA TENGGARA BARAT



*Sumber : Hasil Analisis, 2003*

**GAMBAR 3.2.**  
**GRAFIK PERSENTASE LUAS WILAYAH KOTA MATARAM**  
**MENURUT KECAMATAN**

Dilihat dari letak geografisnya, Kota Mataram memiliki posisi yang sangat strategis, terutama pada beberapa aspek :

- Aspek perdagangan, karena berbatasan dengan Selat Lombok yang merupakan alur pelayaran internasional dan dekat dengan Kota Surabaya sebagai pusat perdagangan yang secara ekonomis sangat menguntungkan.
- Aspek pariwisata, karena terletak pada segitiga emas Daerah Tujuan Wisata (DTW) yaitu bagian Barat dengan Propinsi Bali, bagian Timur dengan Pulau Komodo (Propinsi Nusa Tenggara Timur) dan bagian Utara dengan Tanah Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, yang secara ekonomi dan sosial budaya sangat menguntungkan. Selain itu Kota Mataram dimasa yang akan datang dapat menjadi kota transito karena dapat menjembatani bagian barat wilayah Indonesia dengan bagian timur wilayah Indonesia, dengan pintu masuk dan keluar lewat udara melalui Bandar Udara Selaparang dan lewat laut melalui Pelabuhan Lembar yang jaraknya  $\pm 10$  km dari pusat kota, yang direncanakan oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat menjadi pelabuhan kontainer kelas III. Sedangkan dengan kabupaten lain di Pulau Lombok, tersedia jaringan jalan dan dengan pulau lain tersedia angkutan Ferry dengan frekuensi

penyeberangan yang cukup tinggi. Pintu masuk ke Kota Mataram akan semakin cepat dan singkat, apabila rencana pembangunan dermaga di bekas pelabuhan Kota Lama Ampenan dapat terwujud, yang akan difungsikan sebagai pelabuhan pelayaran rakyat serta untuk menunjang pengembangan pariwisata, khususnya wisata bahari dan budaya.

### **3.1.3. Potensi Khusus**

Potensi sumber daya lahan yang dapat dibudidayakan berdasarkan kesesuaian lahan adalah 73,28% dari total luas daerah Kota Mataram. Sebagian besar masih merupakan lahan pertanian (42,648%).

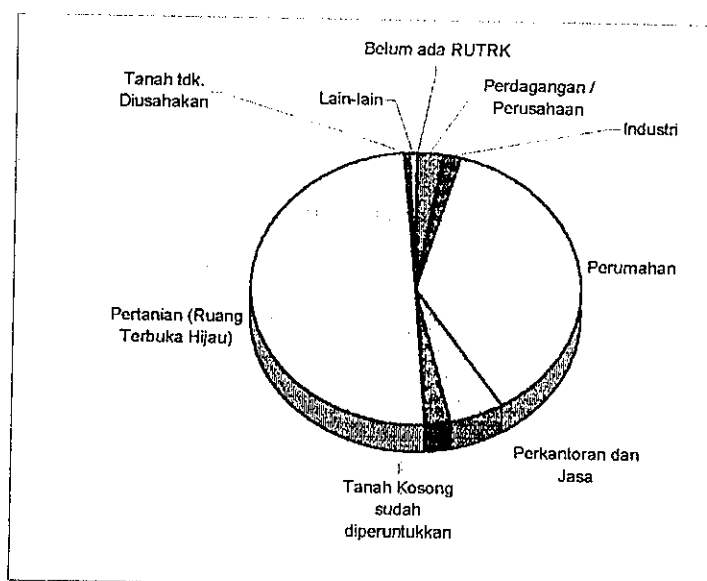
Luas lahan pertanian pada tahun 2000 adalah 1.837 Ha, yang terdiri dari lahan sawah irigasi teknis 766 Ha, lahan sawah irigasi setengah teknis 1.049 Ha, dan lahan pasang surut 19 Ha, lahan sawah yang tidak diusahakan sekitar 3 Ha. Perkebunan rakyat tidak terlalu luas yaitu 986 Ha, dengan sebagian besar adalah perkebunan kelapa seluas 634 Ha. Wilayah pinggiran kota masih merupakan wilayah pertanian. Untuk lebih jelasnya mengenai peruntukan lahan dan penggunaan lahan Kota Mataram dapat dilihat pada Tabel III.1., Gambar 3.3. dan Gambar 3.4.

Wilayah terbangun berkembang mengikuti pola pita, yaitu mengikuti jalan utama kota yang melintas dari arah Barat ke Timur, dari Kecamatan Ampenan di sebelah Barat, Kecamatan Mataram di tengah dan Kecamatan Cakranegara di sebelah Timur.

**TABEL III.I.**  
**PERUNTUKAN LAHAN DAN PENGGUNAAN LAHAN**  
**KOTA MATARAM TAHUN 2000**

No.	Uraian	Peruntukan Lahan		Penggunaan Lahan		Selisih Lahan	
		Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)	(%)
1	Perdagangan / Perusahaan	720,40	11,75	160,48	2,62	559,92	9,13
2	Industri	70,86	1,16	91,87	1,50	(21,01)	(0,34)
3	Perumahan	4.041,48	65,93	2.271,98	37,06	1.769,50	28,87
4	Perkantoran dan Jasa	469,20	7,65	326,52	5,33	142,68	2,33
5	Tanah Kosong sudah diperuntukkan	-	-	138,09	2,25	(138,09)	(2,25)
6	Pertanian (Ruang Terbuka Hijau)	380,00	6,20	3.054,46	49,83	(2.674,46)	(43,63)
7	Tanah tdk. Diusahakan	-	-	32,78	0,53	(32,78)	(0,53)
8	Lain-lain	-	-	53,81	0,88	(53,81)	(0,88)
9	Belum ada RUTRK	448,06	7,31	-	-	448,06	7,31
<b>Kota Mataram</b>		<b>6.130,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.130,00</b>	<b>100,00</b>	-	-

*Sumber : Badan Pertanahan Kota Mataram, 2000*



*Sumber : Hasil Analisis, 2003*

**GAMBAR 3.3.**  
**GRAFIK PENGGUNAAN LAHAN KOTA MATARAM**  
**TAHUN 2000**



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

## TESIS

EKSTENSIFIKASI  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN  
PEMBANGUNAN KOTA MATARAM

### GAMBAR

PETA TATA GUNA LAHAN  
KOTA MATARAM  
TAHUN 2002 (EKSISTING)

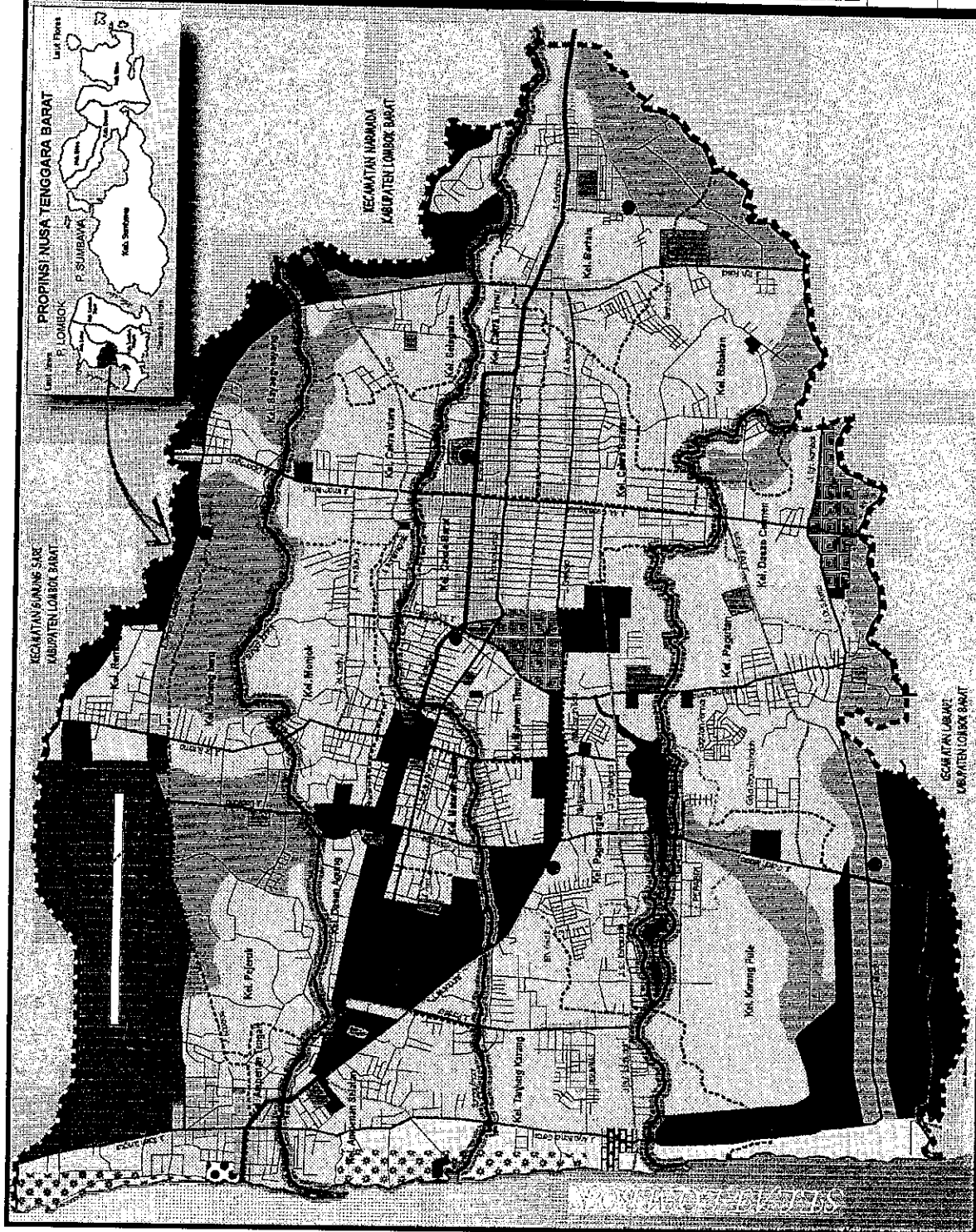
#### KETERANGAN :

	Batas Kota Mataram		Jalan Antar Lingkungan
	Batas Kecamatan		Jalan Lingkungan
	Batas Kelurahan		Pemukiman
	Jalan Utama		Perkantoran
	Jalan Antar Sub Wilayah		Militer
	Kesehatan		Konservasi Sungai
	Pendidikan Tinggi		Pompa Bersih
	Perdagangan		
	Kawasan Pertahanan		
	Lembaga Pemasyarakatan (LP)		
	Industri dan Perdagangan		
	Kawasan Pengembangan Terbatas		
	Kawasan Hijau		
	Depot Pertamina Cabang Alperan		
	Lapangan Olah Raga dan taman		
	Kawasan Pengawasan Bandara		
	Pembangkit Tenaga Listrik Diesel (P.LTD)		
	Kawasan Pariwisata		
	Rumah Peternak Hewan (RPH)		
	Terminal dan Sub Terminal		

	U
	Skala
0 1.5 3 4.5 6 KM	No. Gambar
	3.4.
	No. Halaman
	86

#### SUMBER

BAPPEDA KOTA MATARAM



### 3.1.4. Kondisi Khusus Mengenai Perencanaan

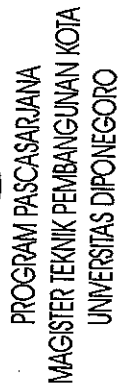
Penataan ruang Kota Mataram diarahkan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang mantap, efisien, efektif, optimal dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan daerah dan kemampuan daya dukung lahan yang tersedia.

Konsep dasar rencana adalah menciptakan struktur pelayanan yang berjenjang mulai dari pusat kota, sub pusat kota dan pusat lingkungan. Sedangkan konsep bentuk kota adalah dengan memanfaatkan jalan lingkar yang ada sebagai pembentuk kota, sehingga bentuk kota mendekati bentuk pusat jamak yang berjenjang sehingga menjamin terdistribusinya kegiatan pembangunan kota. Bagian Wilayah pusat Kota dikembangkan ke arah Selatan. Terminal regional, perdagangan regional dan pergudangan serta kegiatan pemerintahan diarahkan ke Timur yaitu Kecamatan Cakranegara, perdagangan lokal ke arah Barat dan Tengah yaitu Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Mataram dan industri non polutan skala menengah ke arah selatan dan sentra industri kecil tersebar di rumah-rumah penduduk. Sedangkan kawasan perguruan tinggi diarahkan ke Selatan dan pusat kota. Kota Mataram secara spasial terbagi dalam tiga Wilayah Pengembangan, yaitu :

- Wilayah Pengembangan I (satu) meliputi wilayah Kelurahan Mataram Barat, Dasan Agung, Ampenan Tengah, Monjok, Cakra Barat, dan Cakra Timur. Kegiatan utamanya adalah pemerintahan, perdagangan, jasa dan pendidikan.
- Wilayah Pengembangan II (dua) meliputi wilayah Kelurahan Cakra Utara, Pejeruk, Karang Baru dan Mataram Timur. Kegiatan utamanya adalah pertanian dan perumahan.

- Wilayah Pengembangan III (tiga) meliputi Kelurahan Bertais, Babakan, Dasan Cermen, Pagesangan, Karang Pule, Pagutan, Tanjung Karang, Ampenan Selatan, Ampenan Utara, Rembiga, Sayang-sayang, Selagalas dan Cakra Selatan. Adapun kegiatan utamanya adalah perdagangan dan jasa, perumahan dan pemukiman, kawasan pengembangan terbatas, kawasan konservasi pantai.

Untuk menciptakan pelayanan yang hirarkis sehingga mudah dijangkau oleh seluruh penduduk kota dengan memperhatikan proyeksi penduduk dan perkembangan fisik kota saat ini, maka Kota Mataram dibagi ke dalam empat Bagian Wilayah Kota (BWK) yaitu BWK pusat kota atau BWK I meliputi sebagian besar Kecamatan Mataram, BWK II sebagian wilayah Kecamatan Cakranegara dan BWK III sebagian besar wilayah Kecamatan Ampenan, serta BWK IV meliputi sebagian wilayah Kecamatan Ampenan, sebagian Kecamatan Mataram dan sebagian Kecamatan Cakranegara. Untuk lebih jelasnya, pembagian BWK Kota Mataram disajikan pada Gambar 3.5.



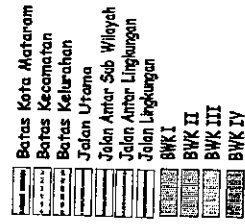
# THE

**EKSTENSIFIKASI  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN  
PEMBANGUNAN KOTA MATARAM**

**GAMBAR**

**PETA BAGIAN WILAYAH KOTA  
(BWK) KOTA MATARAM**

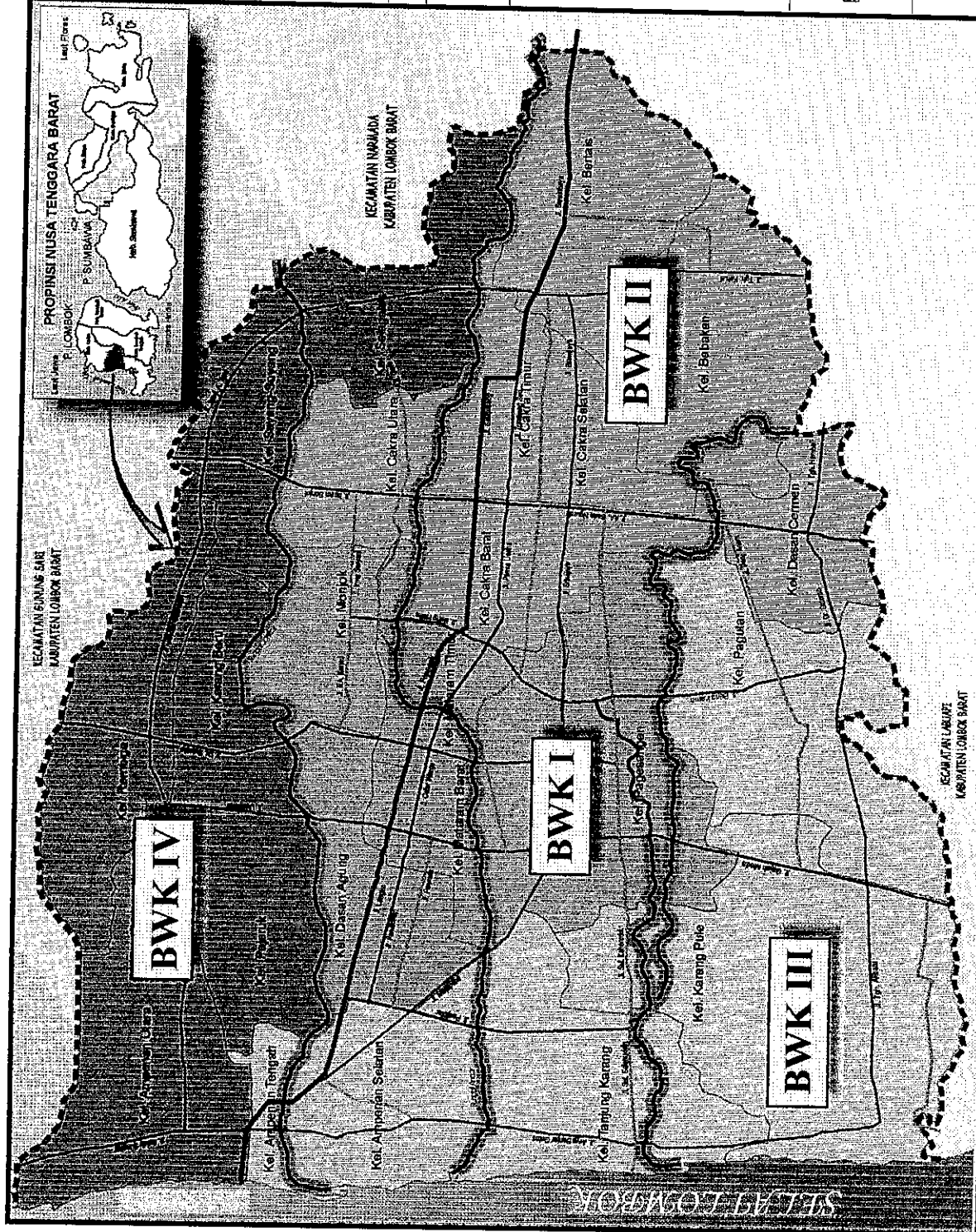
**KETERANGAN :**



1:1,500,000  
3.5.  
89

# SUMMER

BAPPEDA KOTA MATARAM





- BWK I (Pusat Kota), terdapat kawasan pusat kota, kawasan pemerintahan Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Kota Mataram, perdagangan, pusat pelayanan lokal dan regional.
- BWK II (Timur), merupakan pengembangan BWK Pusat Kota ke arah bagian timur kota. Fungsi BWK II adalah kawasan permukiman, kawasan perdagangan regional dan lokal, kawasan industri, kawasan terminal dan kawasan pertanian serta pusat kegiatan olah raga (GOR).
- BWK III (Barat), BWK III merupakan pengembangan Kota Mataram ke arah Barat, Barat Laut dan Barat Daya. Fungsi BWK III adalah sebagai kawasan permukiman, kawasan perdagangan lokal, kawasan industri, pergudangan, pariwisata dan kawasan pertanian yang bersifat agro wisata. Kawasan industri yang akan dikembangkan adalah zona industri atau industri menengah dan industri kecil dengan kategori non polutan.
- BWK IV (Utara), merupakan pengembangan wilayah kota ke arah Utara. Kawasan ini dikembangkan secara terbatas dengan adanya Bandar Udara Selaparang. Fungsi lainnya adalah sebagai ruang terbuka hijau (taman kota) pertanian, kawasan militer dan kawasan permukiman dengan kerapatan bangunan yang rendah.

Dalam kategori untuk kawasan strategis Kota Mataram terdapat lima kawasan strategis, yaitu :

- Kota Ampenan sebagai kota tua dikembangkan untuk pusat perdagangan lokal dan pariwisata (budaya dan bahari).
- Kawasan perdagangan Cakranegara untuk pusat perdagangan lokal dan regional

- Kawasan perdagangan Bertais dikembangkan sebagai pusat perdagangan regional.
- Kawasan Pagutan dikembangkan untuk pusat permukiman dan pendidikan.
- Kawasan Sayang-sayang dikembangkan menjadi pusat perdagangan lokal, perumahan dan permukiman serta transportasi (terminal type C).

Kawasan-kawasan tersebut mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dan dinilai potensial untuk penanaman investasi.

Berdasarkan hasil evaluasi penggunaan lahan serta disesuaikan dengan kecenderungan perkembangan lahan kota, maka telah dilakukan revisi rencana penggunaan lahan terutama pada kawasan permukiman yang berubah fungsi menjadi kawasan perdagangan dan jasa, kawasan jalur hijau yang telah menjadi lahan terbangun, kawasan terminal yang telah padat aktivitasnya serta menyusun pengarahannya penggunaan lahan yang lebih spesifik agar tercapai kejelasan dalam arahan penggunaan lahan. Pola jaringan jalan Kota Mataram direncanakan berbentuk radial konsentris yaitu memusat dan menyebar di sekitar kawasan pusat kota dan kawasan pertumbuhan baru, terutama di permukiman baru. Untuk prasarana jalan diprogramkan penambahan jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi ke pusat pemasaran. Untuk transportasi udara, sasarannya adalah memperluas Bandar Udara selaparang berupa perpanjangan landasan, penambahan fasilitas pengaman serta bangunan lainnya. Dalam pengembangan Kota Mataram pada wilayah di sekitar bandar udara Selaparang perlu dijaga kepadatannya yaitu mencegah meluasnya wilayah terbangun dan bangunan-bangunan tinggi. Bahkan jika perlu pihak pengelola bandar udara segera mengamankan lahan untuk keperluan perluasan bandar udara di masa mendatang.

Masalah lain yang diduga akan muncul adalah terjadinya pengembangan kota yang tidak terkendali ke arah pinggir kota, sehingga dikhawatirkan akan terjadi pembangunan prasarana kota yang tidak tertata dengan baik.

### 3.2. Sosial Kependudukan Kota Mataram

Berdasarkan sensus penduduk oleh BPS pada tahun 2000 jumlah penduduk Kota Mataram adalah 314.968 jiwa dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki 155.886 jiwa dan perempuan berjumlah 159.082 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk rata-rata selama periode 1971 – 1980 adalah 2,88 % pertahun, periode 1980 – 1990 menjadi 3,27 % pertahun, periode 1994 – 1998 sebesar 1,98 % dan pada tahun 2000 mencapai 1,18 %. Kepadatan penduduk rata-rata sebesar 4.950 jiwa/Km<sup>2</sup> dengan distribusi penduduk yang relatif merata oleh karena meratanya potensi pada ketiga wilayah kecamatan.

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk Kota Mataram tahun 1998-2002, dapat dilihat pada Tabel III.2. sedangkan untuk penyebaran penduduk Kota Mataram dapat dilihat pada Gambar 3.6.

**TABEL III.2.**  
**JUMLAH DAN TINGKAT PERTUMBUHAN PENDUDUK**  
**KOTA MATARAM TAHUN 1998-2002**

TAHUN	JML. PENDUDUK (JIWA)	PERTUMBUHAN (%)
1998	306.771	
1999	311.286	1,47
2000	314.968	1,18
2001	319.190	1,34
2002	324.649	1,71

*Sumber : Mataram Dalam Angka, 1998-2002*



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

## T E S I S

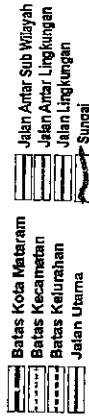
EKSTENSIFIKASI

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN  
PEMBANGUNAN KOTA MATARAM

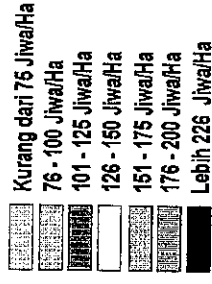
## GAMBAR

## PETA PENYEBARAN DAN KEPADATAN PENDUDUK KOTA MATARAM

### KETERANGAN :



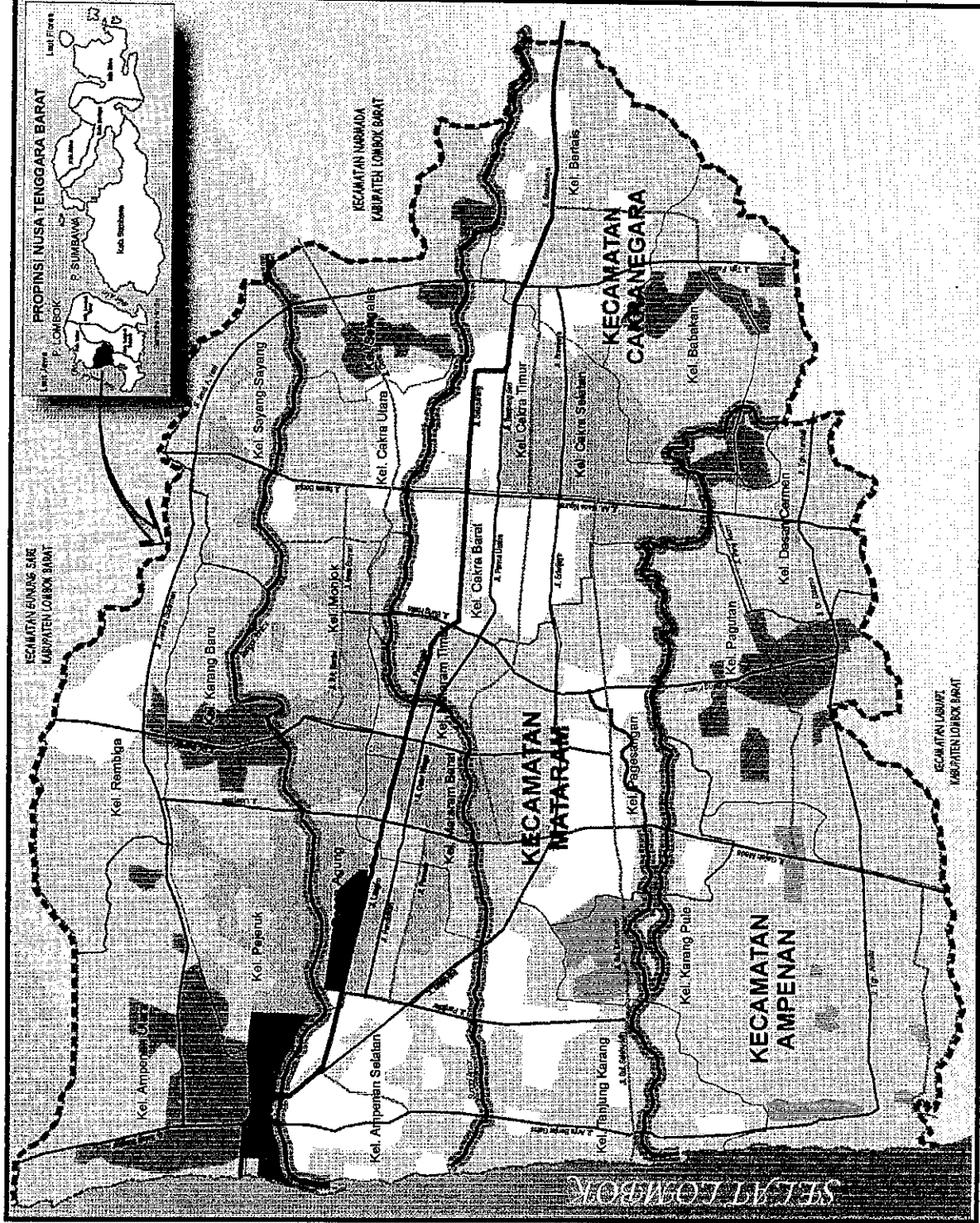
### KEPADATAN PENDUDUK :



SKALA  
1 : 1.500.000  
No. Gambar  
3.6.  
No. Halaman  
93

### SUMBER

BAPPEDA KOTA MATARAM



Sedangkan berdasarkan mata pencaharian, penduduk Kota Mataram dikelompokkan ke dalam 10 (sepuluh) kelompok mata pencaharian, yang terdiri dari mata pencaharian sebagai petani, buruh tani, pengusaha, buruh industri, buruh bangunan, pedagang, pengangkutan, PNS/ABRI, pensiunan dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel III.3. berikut ini.

**TABEL III.3.**  
**KOMPOSISI MATA PENCAHARIAN PENDUDUK**  
**KOTA MATARAM TAHUN 2001**

NO.	JENIS MATA PENCAHARIAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)			JUMLAH (JIWA)
		AMPENAN	MATARAM	CAKRANEGARA	
1	PETANI	2.278	4.113	5.480	11.871
2	BURUH TANI	4.510	3.786	6.845	15.141
3	PENGUSAHA	1.344	1.255	839	3.438
4	BURUH INDUSTRI	5.791	3.283	6.213	15.287
5	BURUH BANGUNAN	9.128	6.102	13.329	28.559
6	PEDAGANG	4.451	3.650	3.905	12.006
7	PENGANGKUTAN	10.267	7.501	11.356	29.124
8	PNS/ABRI	17.770	22.062	18.910	58.742
9	PENSIUNAN	8.306	14.881	7.225	30.412
10	LAIN-LAIN	51.172	37.432	26.006	114.610
	<b>JUMLAH</b>	<b>115.017</b>	<b>104.065</b>	<b>100.108</b>	<b>319.190</b>

*Sumber : Mataram Dalam Angka, 2001*

### 3.3. Potensi Perekonomian dan Variabel Makro Perekonomian Kota Mataram

#### 3.3.1. Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB

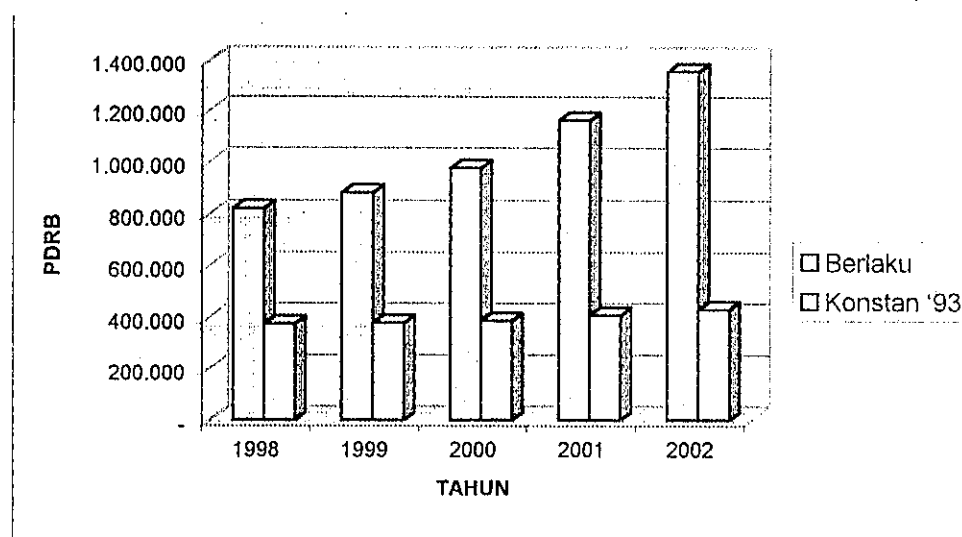
PDRB merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang terbentuk akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu daerah. Data PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dimilikinya guna menghasilkan suatu produk melalui proses produksi. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan suatu daerah sangat tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi yang dimiliki.

PDRB yang terbentuk dari aktivitas ekonomi di Kota Mataram untuk periode tahun 1998-2002 dapat dilihat pada Tabel III.4.

**TABEL III.4.**  
**PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN PDRB KOTA MATARAM**  
**TAHUN 1998-2002**

TAHUN	PDRB (jutaan Rp.)		Pertumbuhan (%)	
	Berlaku	Konstan '93	Berlaku	Konstan '93
1998	822.439,32	376.054,48	56,73	-2,60
1999	883.226,91	380.891,23	7,39	1,29
2000	977.284,97	388.933,46	10,65	2,11
2001	1.164.448,96	410.290,90	19,15	5,49
2002	1.358.621,16	433.101,92	16,68	5,56

*Sumber : PDRB Kota Mataram Tahun 1998-2002*



*Sumber : Hasil Analisis, 2003*

**GAMBAR 3.7.**  
**GRAFIK PERKEMBANGAN PDRB KOTA MATARAM**  
**ATAS DASAR HARGA KONSTAN DAN HARGA BERLAKU**  
**TAHUN 1998-2002**

PDRB Kota Mataram atas dasar harga berlaku pada tahun 2001 tercatat sebesar 1.164.448,96 juta rupiah dan meningkat menjadi 1.358.621,16 juta rupiah pada tahun 2002 atau dengan laju pertumbuhan sebesar 16,68%.

Perkembangan PDRB riil Kota Mataram (unsur inflasi dikeluarkan) pada tahun 2002 terjadi peningkatan. PDRB Kota Mataram atas dasar harga konstan 1993 pada tahun 2001 tercatat 410.290,90 juta rupiah dan meningkat menjadi

433.101,92 juta rupiah pada tahun 2002, dengan laju pertumbuhan pada periode tahun 2001-2002 sebesar 5,56%.

### 3.3.2. Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari peranan masing-masing sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB daerah tersebut, yang biasanya digunakan adalah PDRB atas dasar harga berlaku.

Struktur perekonomian Kota Mataram periode tahun 1998-2002 didominasi oleh sektor pengangkutan dan komunikasi. Namun demikian dengan adanya krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997 dan gejolak politik nasional maupun regional telah terjadi perubahan dalam besaran distribusi persentase sektoral PDRB Kota Mataram.

Pada tahun 2002 kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi terhadap pembentukan PDRB Kota Mataram tercatat sebesar 36,54 %, sektor perdagangan, hotel dan restoran kontribusinya sebesar 19,72 %.

Gambaran secara rinci tentang kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB Kota Mataram dapat dilihat pada Tabel III.5. berikut ini :

**TABEL III.5.**  
**DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU**  
**KOTA MATARAM TAHUN 1998 – 2002 (PERSEN)**

URAIAN	1998	1999	2000	2001	2002
1. Pertanian	4,65	4,21	4,03	4,18	4,79
2. Pertambangan dan Penggalian	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10
3. Industri Pengolahan	13,11	12,88	12,50	11,30	10,68
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,74	0,78	0,85	0,83	0,79
5. Bangunan	7,70	7,99	7,97	8,39	8,39
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	22,69	21,50	20,80	20,64	19,72
7. Pengangkutan & Komunikasi	31,73	32,74	32,46	33,80	36,54
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	6,57	5,24	5,08	5,24	4,99
9. Jasa-jasa	12,69	14,54	16,20	15,51	14,00
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : PDRB Kota Mataram Tahun 1998-2002

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menganalisis pembangunan ekonomi disuatu daerah. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa (output), yang pada akhirnya akan menghasilkan balas jasa terhadap penggunaan faktor-faktor produksi tersebut.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah/wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya peranan masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB, tetapi juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan masing-masing sektor yang mempunyai peranan cukup besar.

Data mengenai laju pertumbuhan PDRB Kota Mataram masing-masing sektor dapat dilihat pada Tabel III.6. berikut ini :

**TABEL III.6.**  
**LAJU PERTUMBUHAN PDRB KOTA MATARAM MENURUT**  
**LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993**  
**TAHUN 1998 – 2002 (PERSEN)**

URAIAN	1998	1999	2000	2001	2002
1. Pertanian	-15,10	8,44	6,61	-2,63	26,32
2. Pertambangan dan Penggalian	-63,27	-0,83	-4,94	-10,61	0,01
3. Industri Pengolahan	-0,35	3,54	1,57	0,39	5,66
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	3,45	4,02	6,03	3,74	3,96
5. Bangunan	-3,04	1,88	2,08	9,43	8,16
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	-4,17	0,41	1,78	3,46	3,61
7. Pengangkutan & Komunikasi	1,19	5,14	3,11	9,28	5,45
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	-17,42	-21,50	1,42	11,07	2,63
9. Jasa-jasa	1,91	1,56	0,50	0,89	4,29
<b>PDRB</b>	<b>-2,60</b>	<b>1,29</b>	<b>2,11</b>	<b>5,49</b>	<b>5,56</b>

Sumber : PDRB Kota Mataram Tahun 1998-2002

Pada Tabel III.6. di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2002 sektor yang memiliki laju pertumbuhan terbesar adalah sektor pertanian sebesar 26,32% diikuti sektor bangunan dengan laju pertumbuhan sebesar 8,16% dan sektor industri pengolahan dengan laju pertumbuhan 5,66%. Sektor yang memiliki laju pertumbuhan terkecil pada tahun 2002 adalah sektor pertambangan dan



penggalan dengan laju pertumbuhan 0,01%. Peningkatan laju pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2002, terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pertumbuhan sub sektor tanaman bahan makanan yakni sebesar 36,71% dan peningkatan pertumbuhan sub sektor pertanian lainnya.

### 3.3.4. Pendapatan Per Kapita

PDRB per kapita merupakan pembagian antara besaran PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, karena sulitnya untuk mendapatkan data pendapatan yang keluar masuk Kota Mataram yang diperlukan dalam penghitungan pendapatan per kapita, maka diasumsikan PDRB per kapita merupakan pendapatan per kapita.

Gambaran mengenai PDRB per kapita Kota Mataram atas dasar harga berlaku maupun konstan dapat dilihat pada Tabel III.7. berikut ini :

**TABEL III.7.**  
**PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN PDRB PER KAPITA**  
**KOTA MATARAM TAHUN 1998 – 2002**

URAIAN	1998	1999	2000	2001	2002
<b>ATAS DASAR HARGA BERLAKU</b>					
1. PDRB Per Kapita (Rp)	2.687.508	2.837.349	3.095.240	3.636.778	4.184.854
2. Indeks Berantai	154,49	105,83	109,09	117,50	115,07
<b>ATAS DASAR HARGA KONSTAN '93</b>					
1. PDRB Per Kapita (Rp)	1.228.844	1.223.605	1.234.823	1.281.410	1.334.050
2. Indeks Berantai	96,00	99,82	100,67	104,03	104,11

*Sumber : PDRB Kota Mataram Tahun 1998-2002*

Berdasarkan Tabel III.7. tersebut di atas, terlihat bahwa PDRB per kapita Kota Mataram untuk tahun 2002 telah mencapai Rp. 4.184.854 yakni meningkat sebesar 15,07% dari tahun sebelumnya dengan besaran PDRB per kapita pada tahun 2001 sebesar Rp. 3.636.778 menurut PDRB atas dasar harga berlaku. Jika unsur inflasi dikeluarkan maka PDRB per kapita pada tahun 2002 adalah sebesar

Rp. 1.334.050, meningkat sebesar 4,11% jika dibandingkan dengan tahun 2001 dengan besaran PDRB per kapita Rp. 1.281.410.

### 3.3.5. Tingkat Inflasi Kota Mataram

Tingkat inflasi Kota Mataram selalu berfluktuasi dan sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi serta kondisi perekonomian nasional. Sejak tahun 1999 hingga tahun 2001 tingkat inflasi Kota Mataram terus meningkat. Hal ini disebabkan terutama oleh pengaruh meningkatnya harga BBM yang mempengaruhi seluruh sektor usaha. Pada tahun 2002 tingkat inflasi Kota Mataram berhasil mengalami penurunan hingga mencapai 7,96%. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Tabel III.8.

**TABEL III.8.**  
**TINGKAT INFLASI KOTA MATARAM DAN NASIONAL**  
**TAHUN 1998-2002**

NO.	TAHUN	INFLASI KOTA MATARAM (%)	INFLASI NASIONAL (%)
1	1998	90,50	77,63
2	1999	0,59	2,01
3	2000	5,19	9,35
4	2001	14,76	9,35
5	2002	7,96	10,03

*Sumber : Mataram Dalam Angka Tahun 1998-2002*

Pada Tabel III.8. terlihat bahwa pada tahun 1998, yaitu pada saat terjadinya krisis moneter dan awal reformasi, tingkat inflasi Kota Mataram jauh di atas tingkat inflasi nasional. Hal ini karena terhambatnya pasokan berbagai jenis barang kebutuhan masyarakat akibat terjadinya kerusuhan. Sehingga secara umum harga-harga akan naik.

### **3.3.6. Perkembangan Aktivitas Ekonomi**

Aktivitas perekonomian di Kota Mataram, khususnya sektor perdagangan, koperasi dan industri, baik industri formal maupun non formal terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, meskipun pada tahun 1998-2000 perkembangannya sangat kecil, sebagai dampak krisis moneter yang melanda Indonesia. Pada tahun 2001-2002 barulah perkembangan unit-unit usaha khususnya perdagangan dan industri terlihat cukup berarti.

### **3.4. Keuangan Pemerintah Kota Mataram**

#### **3.4.1. Masalah Keuangan Pemerintah Kota Mataram**

Untuk dapat melaksanakan pembangunan dengan baik, tentunya dibutuhkan dukungan dana yang memadai, yang diperoleh dari berbagai sumber penerimaan daerah. Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, bantuan dana dari pemerintah pusat memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, tetapi dengan diberlakukannya otonomi daerah, dimana daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam hal pengelolaan keuangannya, maka ketergantungan kepada pemerintah pusat harus dapat dikurangi.

Masih rendahnya PAD Kota Mataram yang antara lain bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan suatu tantangan tersendiri yang harus segera dicari pemecahannya, guna menuju suatu kemandirian keuangan daerah.

Untuk mencapai kemandirian Kota Mataram dibidang keuangan, Pemerintah Kota Mataram telah dan akan terus melakukan berbagai upaya. Hal ini dapat dilihat pada visi dan misi Pemerintah Kota Mataram dibidang keuangan daerah sebagai berikut :

1. **Visi** : Terealisirnya kemampuan PAD dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah
2. **Misi** : Peningkatan Kontribusi PAD terhadap APBD guna mengurangi tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat dengan cara mengintensifkan pemungutan sumber-sumber PAD yang sudah ada, menggali dan mengembangkan sumber-sumber PAD baru dan meminimalkan tingkat kebocoran PAD.

#### **3.4.2. Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram**

Pada Tahun Anggaran 2000, APBD Kota Mataram hanyalah sebesar Rp 51.297.118.153. Sumber pendapatan yang memberikan kontribusi terbesar adalah Dana Perimbangan, khususnya Dana Rutin Daerah, yaitu sebesar 43,08%. Sementara itu kontribusi PAD hanyalah sebesar 9,19%.

Pada Tahun Anggaran 2001, sumber pendapatan terbesar masih didominasi oleh Dana Perimbangan, khususnya DAU sebesar 69,25%. Sementara itu kontribusi PAD justru menurun menjadi 7,71%. Penurunan kontribusi PAD terhadap pembentukan APBD Kota Mataram bukan berarti disebabkan oleh turunnya besaran penerimaan PAD, tetapi lebih disebabkan oleh meningkatnya secara drastis penerimaan Dana Perimbangan. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya besaran penerimaan PAD dari Rp 4.715.142.393 pada tahun 2000 menjadi Rp 10.285.938.526.

Pada Tabel III.9. terlihat bahwa sampai tahun.2002, sumber pendapatan terbesar masih didominasi oleh Dana Perimbangan, khususnya DAU. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan Kota Mataram sangat tergantung pada bantuan dana dari Pemerintah Pusat.

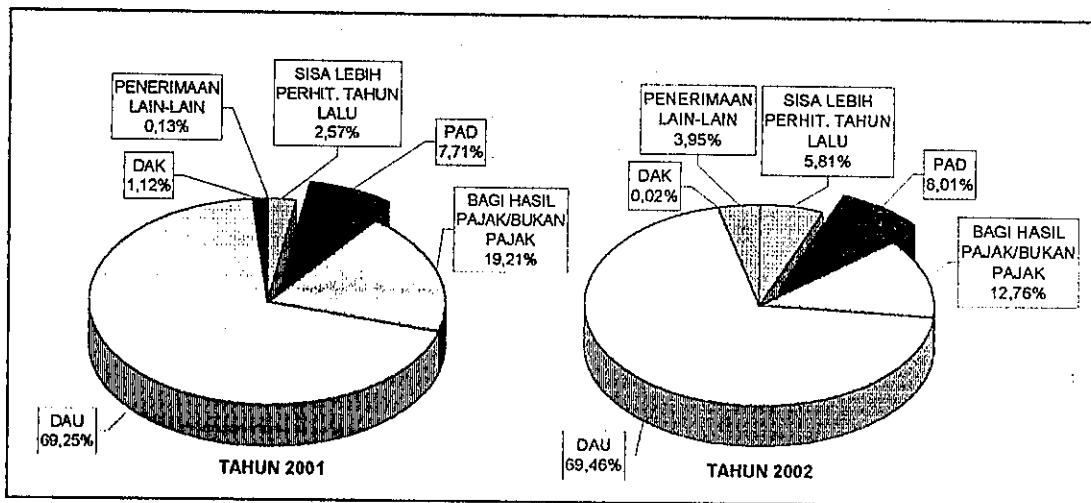
Hal lain yang dapat dilihat dari Tabel III.9. yaitu bahwa komponen penerimaan, khususnya Dana Perimbangan dalam APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2000 sedikit berbeda dengan komponen Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2001 dan 2002, yaitu pada Tahun 2000 masih terdapat pos Dana Rutin Daerah dan pos Bantuan Pembangunan, sedangkan pada Tahun 2001 dan 2002 kedua pos penerimaan tersebut diganti dengan pos Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan baru yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daaerah.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai komposisi sumber-sumber penerimaan APBD Kota Mataram Tahun 2001 dan tahun 2002, maka pada Gambar 3.8 disajikan Grafik Lingkaran Komposisi Penerimaan APBD Kota Mataram Tahun 2001 dan Tahun 2002. Dari Gambar 3.8. tersebut terlihat jelas bahwa lebih dari 60% pendapatan Kota Mataram berasal dari bantuan Pemerintah Pusat dalam bentuk DAU.

**TABEL III.9.**  
**REALISASI PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KOTA MATARAM TAHUN 2000 - 2002**

NO.	SUMBER PENDAPATAN DAERAH	TAHUN 2000		TAHUN 2001		TAHUN 2002	
		PENERIMAAN (Rp)	KONTRIBUSI (%)	PENERIMAAN (Rp)	KONTRIBUSI (%)	PENERIMAAN (Rp)	KONTRIBUSI (%)
1	SISA LEBIH PERHIT. TAHUN LALU	1.526.762.049	2,98	3.433.070.114	2,57	10.115.718.419	5,81
2	PAD :	4.715.142.393	9,19	10.285.938.526	7,71	13.944.632.369	8,01
	• Pajak Daerah	1.835.321.339	3,58	4.638.048.223	3,48	6.564.506.776	3,77
	• Retribusi Daerah	2.052.005.316	4,00	4.152.463.503	3,11	5.130.572.567	2,95
	• Laba Perusahaan Daerah	471.099.461	0,92	308.610.789	0,23	488.519.300	0,28
	• Lain-lain PAD yang sah	356.716.277	0,70	1.186.816.011	0,89	1.761.033.726	1,01
3	DANA PERIMBANGAN :	44.585.985.851	86,92	119.448.055.518	89,58	143.157.934.638	82,23
	• BAGI HASIL PAJAK & BUKAN PAJAK	6.171.269.496	12,03	25.611.289.007	19,21	22.207.426.182	12,76
	• DANA RUTIN DAERAH	22.099.687.934	43,08	-	-	-	-
	• BANTUAN PEMBANGUNAN	16.315.029.421	31,80	-	-	-	-
	• DAU	-	-	92.336.766.511	69,25	120.921.111.456	69,46
	• DAK	-	-	1.500.000.000	1,12	29.397.000	0,02
6	PENERIMAAN LAIN-LAIN	469.226.860	0,91	170.410.008	0,13	6.876.847.065	3,95
	J U M L A H APBD	51.297.118.153	100,00	133.337.474.166	100,00	174.094.932.491	100,00

Sumber : Nota Perhitungan APBD Kota Mataram TA. 2000 - 2002



Sumber : Hasil Analisis, 2003

**GAMBAR 3.8.**  
**GRAFIK KOMPOSISI PENERIMAAN APBD KOTA MATARAM**  
**TAHUN 2001 DAN TAHUN 2002**

### 3.4.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan gambaran tingkat kemampuan keuangan daerah yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram terdiri dari penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Penerimaan dari Pajak Daerah bersumber dari 7 (tujuh) jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Atas Pengiriman Barang Antar Pulau. Dalam hal jenis pajak yang dipungut, Kota Mataram belum menerapkan sepenuhnya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, ini terlihat dari belum dipungutnya Pajak Parkir.

Pajak Atas Pengiriman Barang Antar Pulau merupakan pajak baru yang diterapkan oleh Kota Mataram bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten se-Pulau Lombok, yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan

Kabupaten Lombok Timur. Pajak Atas Pengiriman Barang Antar Pulau adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan pengiriman barang antar pulau, baik berupa hasil hutan, hasil laut, hasil bumi, hasil ternak/hewan dan hasil alam lainnya.

Sementara itu penerimaan PAD yang bersumber dari Retribusi Daerah, diperoleh dari 20 (dua puluh) jenis retribusi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.10. berikut ini.

**TABEL III.10.**  
**KONTRIBUSI PENDAPATAN**  
**MASING-MASING POS PAD TERHADAP TOTAL PAD**  
**KOTA MATARAM TAHUN 2001-2002**

NO.	JENIS PENERIMAAN	TAHUN 2001		TAHUN 2002	
		PENERIMAAN	% thd. PAD	PENERIMAAN	% thd. PAD
<b>A</b>	<b>PAJAK DAERAH</b>				
	Pajak Hotel dan Restoran	2.091.381.671	20,33	-	-
1	Pajak Hotel	-	-	711.581.633	5,10
2	Pajak Restoran	-	-	1.683.944.192	12,08
3	Pajak Hiburan	69.507.125	0,68	97.190.700	0,70
4	Pajak Reklame	301.702.240	2,93	360.478.470	2,59
5	Pajak Penerangan Jalan	1.952.067.485	18,98	3.013.271.830	21,61
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	156.313.402	1,52	186.842.678	1,34
7	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	67.076.300	0,65	-	-
8	Pajak Atas Pengiriman Barang Antar Pulau	-	-	511.197.273	3,67
	<b>Jumlah Penerimaan Pajak Daerah</b>	<b>4.638.048.223</b>	<b>45,09</b>	<b>6.564.506.776</b>	<b>47,08</b>
<b>B</b>	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>				
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	219.175.523	2,13	248.443.012	1,78
2	Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	344.142.820	3,35	355.223.910	2,55
3	Ret. Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	303.501.000	2,95	305.327.500	2,19
4	Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	186.753.900	1,82	339.830.000	2,44
5	Ret. Pelayanan Pasar	1.640.666.525	15,95	1.979.920.775	14,20
6	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	125.605.900	1,22	274.624.608	1,97
7	Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	-	-	2.500.000	0,02
8	Ret. Penggantian Biaya Cetak Peta	585.000	0,01	1.048.000	0,01
9	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	73.807.854	0,72	74.419.875	0,53
10	Ret. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	210.566.190	2,05	239.267.860	1,72
11	Ret. Terminal	150.299.050	1,46	176.519.500	1,27
12	Ret. Tempat Khusus Parkir	64.329.674	0,63	108.579.790	0,78
13	Ret. Penyedotan Kakus	15.080.000	0,15	19.005.000	0,14
14	Ret. Rumah Potong Hewan	156.886.760	1,53	160.172.250	1,15
15	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	608.471.507	5,92	749.961.187	5,38
16	Ret. Izin Gangguan	30.150.000	0,29	30.575.000	0,22
17	Ret. Izin Trayek	22.441.800	0,22	31.829.300	0,23
18	Ret. Izin Usaha Perdagangan	-	-	28.175.000	0,20
19	Ret. Izin Usaha Perindustrian	-	-	2.250.000	0,02
20	Ret. Izin Usaha Perfilman dan Rekaman Video	-	-	2.900.000	0,02
	<b>Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah</b>	<b>4.152.463.503</b>	<b>40,37</b>	<b>5.130.572.567</b>	<b>36,79</b>
<b>C</b>	<b>Laba Perusahaan Milik Daerah</b>	<b>308.610.789</b>	<b>3,00</b>	<b>488.519.300</b>	<b>3,50</b>
<b>D</b>	<b>Lain-lain PAD yang sah</b>	<b>1.186.816.011</b>	<b>11,54</b>	<b>1.761.033.726</b>	<b>12,63</b>
	<b>JUMLAH PAD</b>	<b>10.285.938.526</b>	<b>100,00</b>	<b>13.944.632.369</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Nota Perhitungan APBD Kota Mataram TA. 2001 - 2002



Pada Tabel III.10. terlihat bahwa pos PAD yang memiliki kontribusi terbesar terhadap pembentukan PAD secara keseluruhan adalah Pajak Daerah, sedangkan yang kontribusinya terkecil adalah pos Laba Perusahaan Milik Daerah.

#### **3.4.4. Tinjauan Penerimaan Pajak Daerah Kota Mataram**

Undang-undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari 7 (tujuh) jenis yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir, lebih lanjut disebutkan bahwa kabupaten/kota dapat menetapkan jenis pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ada. Diantara ketujuh jenis pajak tersebut, terdapat satu jenis pajak yang belum diterapkan di Kota Mataram, yaitu Pajak Parkir.

Seperti terlihat pada Tabel III.10. bahwa Pajak Daerah merupakan kontributor terbesar terhadap pembentukan PAD Kota Mataram, namun demikian apabila dilihat kontribusinya terhadap pembentukan APBD, maka akan terlihat bahwa kontribusi Pajak Daerah masih sangat kecil, yaitu hanya sebesar 3,77%. Sementara itu dengan berlakunya otonomi daerah, dimana daerah dituntut kemandiriannya dalam hal pembiayaan pembangunannya, maka yang paling memungkinkan dilakukan adalah melakukan upaya-upaya peningkatan penerimaan pajak daerah melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Usaha peningkatan penerimaan pajak daerah melalui upaya intensifikasi telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram, dan hasilnya dapat dikatakan optimal, seperti terlihat pada Tabel III.11., dimana pada tahun 2002 realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai 99,30% dari target yang ditetapkan.

Sedangkan usaha ekstensifikasi yang juga sudah mulai dilakukan, belum memberikan hasil yang memadai. Hingga saat ini baru satu jenis pajak baru yang berhasil diterapkan, yaitu Pajak Atas Pengiriman Barang Antar Pulau, yang hanya memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 3,67%. Dengan kata lain, upaya ekstensifikasi masih memiliki peluang yang besar untuk dilaksanakan guna meningkatkan penerimaan pendapatan Kota Mataram.

**TABEL III.11.**  
**TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH**  
**KOTA MATARAM TAHUN 2001-2002**

NO.	JENIS PENERIMAAN	TAHUN 2001			TAHUN 2002		
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	<b>PAJAK DAERAH</b>						
	Pajak Hotel dan Restoran	2.250.000.000	2.091.381.671	92,95			
1	Pajak Hotel	-	-		752.428.471	711.581.633	94,57
2	Pajak Restoran	-	-		1.693.528.662	1.683.944.192	99,43
3	Pajak Hiburan	75.000.000	69.507.125	92,68	100.000.000	97.190.700	97,19
4	Pajak Reklame	325.000.000	301.702.240	92,83	375.000.000	360.478.470	96,13
5	Pajak Penerangan Jalan	2.356.482.156	1.952.067.485	82,84	3.100.000.000	3.013.271.830	97,20
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	190.000.000	156.313.402	82,27	190.000.000	186.842.678	98,34
7	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	65.000.000	67.076.300	103,19	-	-	
8	Pajak Atas Pengiriman Barang Antar Pulau	-	-		400.000.000	511.197.273	127,80
	<b>Jumlah Penerimaan Pajak Daerah</b>	<b>5.261.482.156</b>	<b>4.630.048.223</b>	<b>88,15</b>	<b>6.610.957.153</b>	<b>6.564.506.776</b>	<b>99,30</b>

Sumber : Nota Perhitungan APBD Kota Mataram TA. 2001 - 2002

### 3.4.5. Tinjauan Penerimaan Retribusi Daerah Kota Mataram

Retribusi Daerah juga memiliki peranan yang cukup besar dalam pembentukan PAD Kota Mataram, kontribusinya mencapai 40,37%, sehingga menempati urutan kedua terbesar dalam hal kontribusinya membentuk PAD secara keseluruhan.

**TABEL III.12.**  
**TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH**  
**KOTA MATARAM TAHUN 2001-2002**

NO.	JENIS PENERIMAAN	TAHUN 2001			TAHUN 2002		
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	RETRIBUSI DAERAH						
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	232.500.000	219.175.523	94,27	250.000.000	248.443.012	99,38
2	Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	365.040.000	344.142.620	94,28	375.000.000	355.223.910	94,73
3	Ret. Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	312.618.000	303.501.000	97,08	314.000.000	305.327.500	97,24
4	Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	225.000.000	186.753.900	83,00	350.000.000	339.830.000	97,09
5	Ret. Pelayanan Pasar	1.700.000.000	1.640.666.525	96,51	2.000.000.000	1.979.920.775	99,00
6	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	132.000.000	125.605.900	95,16	200.000.000	274.624.608	137,31
7	Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	-	-	-	2.600.000	2.500.000	96,15
8	Ret. Penggantian Biaya Cetak Peta	1.000.000	585.000	58,50	1.200.000	1.048.000	87,33
9	Ret. Pemakalan Kekayaan Daerah	75.000.000	73.807.854	98,41	75.000.000	74.419.875	99,23
10	Ret. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	225.000.000	210.566.190	93,58	250.000.000	239.267.860	95,71
11	Ret. Terminal	160.000.000	150.299.050	93,94	160.000.000	178.519.500	111,57
12	Ret. Tempat Khusus Parkir	70.000.000	64.329.674	91,90	115.000.000	108.579.790	94,42
13	Ret. Penyediaan Kokus	16.000.000	15.080.000	94,25	20.000.000	19.005.000	95,03
14	Ret. Rumah Potong Hewan	170.000.000	158.886.760	92,29	170.000.000	160.172.250	94,22
15	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	615.000.000	608.471.507	98,94	750.000.000	749.961.187	99,99
16	Ret. Izin Gangguan	32.000.000	30.150.000	94,22	32.000.000	30.575.000	95,55
17	Ret. Izin Trayek	15.000.000	22.441.000	149,61	20.000.000	31.829.300	159,15
18	Ret. Izin Usaha Perdagangan	-	-	-	15.200.000	28.175.000	185,36
19	Ret. Izin Usaha Perindustrian	-	-	-	2.150.000	2.250.000	104,65
20	Ret. Izin Usaha Perfilman dan Rekaman Video	-	-	-	3.000.000	2.900.000	96,67
	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	4.346.158.000	4.152.463.503	95,54	5.125.150.000	5.130.572.567	100,11

Sumber : Nota Perhitungan APBD Kota Mataram TA. 2001 - 2002

Jenis Retribusi Daerah Kota Mataram yang telah dipungut pada tahun 2001 sebanyak 16 jenis, tahun 2002 jenis pungutan Retribusi Daerah bertambah menjadi 20 jenis. Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah disebutkan ada 27 jenis retribusi daerah, dan pemerintah kabupaten/kota dapat menetapkan jenis retribusi lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang. Jenis retribusi daerah yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tetapi belum dipungut oleh Pemerintah Kota Mataram adalah :

- 1) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- 2) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/Villa
- 5) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
- 6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
- 7) Retribusi Penyeberangan di atas Air

- 8) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- 9) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- 10) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Belum dipungutnya beberapa jenis retribusi daerah tersebut di Kota Mataram disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena untuk beberapa jenis retribusi, obyeknya memang tidak/belum ada di Kota Mataram. Untuk jenis retribusi yang obyeknya sudah ada tetapi belum dipungut, lebih disebabkan oleh belum dilakukannya kajian kelayakan pemberlakuan jenis retribusi daerah tersebut di Kota Mataram, sehingga besaran potensi dari retribusi tersebut belum diketahui dengan pasti.

Pada Tabel III.12. terlihat bahwa pada tahun 2002 penerimaan Retribusi Daerah mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan penerimaan tahun 2001. Bahkan bila dilihat persentase realisasinya terhadap target yang mencapai 100,10% pada tahun 2002, menunjukkan bahwa penerimaan Retribusi Daerah telah melampaui target yang ditetapkan. Peningkatan pencapaian realisasi retribusi daerah dari 91,50% pada tahun 2001 menjadi 100,10% pada tahun 2002 merupakan wujud keberhasilan Pemerintah Kota Mataram dalam melakukan upaya intensifikasi penerimaan Retribusi Daerah. Upaya intensifikasi ini diharapkan akan dapat lebih meningkatkan besaran penerimaan retribusi daerah bila diikuti juga oleh upaya ekstensifikasi. Kepala Dinas Pendapatan Kota Mataram menyatakan bahwa selama ini upaya ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah belum dilakukan dengan sungguh-sungguh karena masih terfokus pada pelaksanaan intensifikasi.

### **3.4.6. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD dan APBD Kota Mataram**

#### **a) Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD**

Pada Tabel III.10. terlihat bahwa pada tahun 2001 kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Mataram adalah sebesar 45,09%, sedangkan pada tahun 2002 kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Mataram meningkat menjadi 47,08%.

#### **b) Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD**

Pada Tabel III.10. juga terlihat bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap PAD tahun 2001 adalah sebesar 40,37%, sedangkan pada tahun 2002 turun menjadi 36,79%. Bila dilihat dari persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD memang terlihat mengalami penurunan, namun secara besaran nominal, penerimaan retribusi daerah justru mengalami peningkatan. Pada tahun 2001 besaran penerimaan retribusi daerah adalah sebesar Rp. 4.152.463.503 dan pada tahun 2002 naik menjadi Rp 5.130.572.567,-.

#### **c) Kontribusi Pajak Daerah terhadap APBD**

Kontribusi pajak daerah terhadap APBD Kota Mataram dari tahun 2001 sampai tahun 2002 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2001 kontribusi pajak daerah terhadap APBD adalah sebesar 3,48% dan pada tahun 2002 meningkat menjadi 3,77%. Walaupun terjadi peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap APBD, namun peningkatan ini belum mampu untuk mewujudkan kemandirian Kota Mataram dalam hal pembiayaan pembangunan.

**d) Kontribusi Retribusi Daerah terhadap APBD**

Kontribusi retribusi daerah Kota Mataram pada tahun 2001 adalah sebesar 3,11%, sedangkan pada tahun 2002 mengalami penurunan menjadi 2,95%. Hal ini tidak menunjukkan turunnya besaran penerimaan Retribusi Daerah tetapi justru karena terjadi peningkatan besaran penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hanya saja peningkatan yang lebih besar dicapai oleh Pajak Daerah. Hal yang hampir sama juga terjadi pada Tahun 2002. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.9.

## **BAB IV**

### **IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM**

#### **4.1. Identifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Mataram**

##### **4.1.1. Identifikasi Jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Mataram**

Identifikasi atas jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Mataram dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan kegagalan daerah lain. Menurut penelitian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) di 250 kabupaten/kota di Indonesia menemukan sedikitnya ada 3.500 perda baru yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibuat setelah era otonomi daerah, yang tidak kondusif bagi perkembangan iklim usaha. Dari jumlah itu, bahkan 65 persennya bermasalah karena terbit tanpa mengindahkan peraturan di atasnya.

Menurut Harian Kompas (14 Agustus 2003) KPPOD telah merekomendasikan perda bermasalah tersebut untuk dikaji oleh Tim Pengkaji Perda (TPP) yang antara lain terdiri atas unsur Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag), serta Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Sampai saat ini, TPP telah meneliti 1.648 perda dan 206 di antaranya telah direkomendasikan untuk dibatalkan. Adapun dasar penerbitan rekomendasi pembatalan itu adalah karena perda tersebut bertentangan dengan pajak pusat, pungutan retribusi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip retribusi, dan menimbulkan duplikasi dengan pungutan daerah. Selain itu, perda

tersebut juga menghambat lalu lintas barang, menimbulkan ekonomi biaya tinggi, serta berpeluang meningkatkan beban subsidi pemerintah. Lebih lanjut direktur eksekutif KPPOD Agung Pambudhi mengungkapkan, dalam studinya mengenai perda pajak dan retribusi daerah, pihaknya mengidentifikasi adanya 14 jenis pelanggaran perda, yang dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkat masalah. Pertama masalah prinsip, kedua masalah substansi, dan ketiga masalah teknis atau yuridis. Yang dimaksud dengan masalah prinsip adalah pelanggaran terkait dengan konteks aktivitas perekonomian secara luas. Yang termasuk dalam hal ini adalah pelanggaran prinsip *free internal trade*, menghalangi akses ekonomi masyarakat, kepentingan umum, serta kewenangan pemerintah. Sedangkan masalah substansial antara lain diskoneksi antara tujuan dan isi perda. Ketidakjelasan standar pelayanan seperti waktu, biaya, prosedur, struktur, dan standar tarif. Terakhir, teknis menyangkut relevansi acuan sumber hukum, acuan perundangan terbaru, dan kelengkapan teknis yuridis formal yang harus dipenuhi perda mengenai pungutan.

Pada Lampiran C disajikan Daftar Perda yang dipertimbangkan untuk dibatalkan sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-486/MK.07/2001 Tanggal 2 November 2001.

Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2000, Bab III: Ketentuan lain-lain, Pasal 5 ayat 1 dan 2, Perda tidak boleh bertentangan dengan perjanjian dan komitmen internasional yang telah berlaku dan akan dibuat oleh pemerintah karena perjanjian dan komitmen internasional yang berlaku dan akan dibuat oleh pemerintah juga berlaku bagi daerah otonom. Pembatalan Perda dapat dilakukan oleh pemerintah pusat jika Perda bertentangan dengan ketiga hal diatas



sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114, UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pembatalan perda dan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom. ([www.infootda.com](http://www.infootda.com) 24/06/03)

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka analisis yang dilakukan dalam studi ini menjadi sangat relevan, yaitu melakukan upaya ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Mataram tanpa melakukan pelanggaran atas berbagai aturan yuridis yang ada. Sehingga nantinya perda yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hasil ekstensifikasi, tidak bermasalah, karena telah melalui berbagai analisis dalam studi ini.

Lebih lanjut, mengingat pembatalan berbagai perda yang dilakukan oleh Mendagri telah melalui berbagai kajian, maka jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diatur dalam perda yang dinyatakan dicabut tersebut tidak diusulkan untuk diberlakukan di Kota Mataram, terutama perda yang dicabut karena masalah prinsip dan teknis yuridis. Hal ini berakibat pada sedikitnya usulan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru, tetapi ini lebih baik daripada akan menjadi masalah dikemudian hari. Walaupun yang menjadi tujuan dalam studi ini adalah untuk mengekstensifkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Mataram dengan melakukan kajian atas jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah apa saja yang masih memungkinkan diterapkan sebagai jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru di Kota Mataram, tetapi bukan berarti upaya ekstensifikasi tersebut dilakukan dengan membabi buta tanpa memperhatikan berbagai hal. Jadi bukan semata-mata mencari sebanyak-banyaknya jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru tetapi lebih pada menggali jenis Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah yang benar-benar memiliki potensi besar dan memenuhi berbagai kriteria yang ditetapkan dalam aturan perundang-undangan yang ada (pertimbangan yuridis).

Identifikasi terhadap jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru yang memiliki peluang untuk diberlakukan di Kota Mataram, dilakukan melalui pengkajian berbagai sumber, antara lain dari usulan dinas/instansi pengelola PAD, perbandingan dengan daerah lain serta dari kajian literatur/teoritis dan yuridis. Selanjutnya jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut, terutama yang diperoleh dari hasil perbandingan dengan daerah lain, dikaji kecocokannya dengan situasi dan kondisi Kota Mataram secara umum misalnya apakah jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku di daerah lain tersebut juga memiliki potensi untuk diberlakukan di Kota Mataram dan apakah jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut termasuk dalam perda yang dicabut pemberlakuannya oleh Mendagri.

#### **4.1.1.1. Identifikasi Jenis-jenis Pajak Daerah di Kota Mataram**

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa proses identifikasi untuk mengetahui jenis-jenis pajak daerah baru yang dapat diberlakukan di Kota Mataram dilakukan melalui pengkajian berbagai sumber, antara lain dari usulan dinas/instansi pengelola PAD, perbandingan dengan daerah lain serta dari kajian literatur/teoritis dan yuridis.

##### **a) Identifikasi Jenis-jenis Pajak Daerah Baru dari Usulan Dinas/Instansi**

Jumlah dinas/instansi yang ditunjuk mengelola PAD di Kota Mataram adalah sebanyak 11 (sebelas) dinas/instansi. Yaitu terdiri dari Dinas Pendapatan (sebagai Koordinator), Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian

dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan, Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan, Dinas PU, Bagian Ekonomi, dan Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk menjaring usulan pajak daerah baru dari seluruh dinas/instansi tersebut dilakukan melalui kuesioner (Kuesioner terlampir pada Lampiran A) dan wawancara. Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang tidak terstruktur. Wawancara ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kesalahan pemahaman narasumber atas kuesioner yang diberikan serta untuk memperjelas dan mengkaji lebih dalam pendapat narasumber.

Dari 11 (sebelas) dinas/instansi yang dimintai usulan pajak daerah baru, hanya dua dinas yang menyatakan ada usulan untuk jenis pajak baru, yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas Pertanian. Untuk lebih jelasnya mengenai usulan jenis-jenis pajak daerah baru dari dinas/instansi pengelola PAD di Kota Mataram, dapat dilihat pada Tabel IV.1. di bawah ini.

**TABEL IV.1.**  
**USULAN JENIS-JENIS PAJAK DAERAH BARU DARI DINAS/INSTANSI**  
**PENGELOLA PAD DI KOTA MATARAM**

NO.	JENIS PAJAK BARU	DINAS / INSTANSI YANG MENGUSULKAN	KETERANGAN
1.	Pajak Parkir	Dinas Perhubungan	Dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menyclenggarakan tempat parkir
2.	Pajak Sarang Burung Walet	Dinas Pertanian	Dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan sarang burung walet

*Sumber : Hasil Quesioner dan wawancara, 2003*

Dari hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa latar belakang Dinas Pertanian Kota Mataram mengajukan usulan pemberlakuan Pajak Sarang Burung Walet adalah karena semakin banyaknya masyarakat yang mengusahakan

Sarang Burung Walet, dan sebagian besar usaha Sarang Burung Walet tersebut dilakukan oleh pemilik ruko di kawasan perdagangan Cakranegara dan Ampenan. Sehingga dengan diberlakukannya Pajak Sarang Burung Walet nantinya, diharapkan selain dapat meningkatkan PAD (fungsi *budgetair* dari pajak) juga dapat sebagai alat pengendalian/pengatur (fungsi *regurelend*) bagi pemerintah untuk membatasi perkembangan jumlah usaha sarang burung walet di tengah kota dan lebih diarahkan ke daerah pinggiran kota. Hal ini karena sebagian besar usaha sarang burung walet yang ada di Kecamatan Cakranegara dan Ampenan menggunakan lantai atas ruko sebagai tempat usaha sarang burung walet, akibatnya ruko tersebut terlihat kotor dan kumuh karena tidak dicat dan jarang dibersihkan untuk membuat burung walet tetap betah tinggal ditempat tersebut. Bila dibiarkan terus-menerus tanpa adanya pengaturan, maka akan mengakibatkan terganggunya keindahan wajah kota secara keseluruhan (lihat Gambar 4.1.).

Sedangkan munculnya usulan Pajak Parkir lebih didorong oleh upaya meningkatkan penerimaan dari perparkiran dan mengoptimalkan penggalan potensi yang ada serta menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 34 tahun 2000.



Usaha sarang burung walet yang memanfaatkan lantai atas ruko, seperti yang terjadi di sepanjang Jl. Yos Sudarso – Ampenan, terlihat sangat mengganggu keindahan wajah kota (fisik spasial).  
Sumber : *Survai Primer*, 2003.

**GAMBAR 4.1.**  
**USAHA SARANG BURUNG WALET DI JL. YOS SUDARSO**  
**KECAMATAN AMPENAN KOTA MATARAM**

**b) Identifikasi Jenis-jenis Pajak Daerah Baru dari Hasil Perbandingan Dengan Daerah Lain**

Selain dari usulan dinas/instansi, proses identifikasi jenis-jenis pajak daerah baru dilakukan dengan mengadakan perbandingan dengan daerah lain. Perbandingan ini dilaksanakan dengan melihat jenis-jenis pajak daerah apa saja yang sudah diberlakukan di daerah lain, tetapi tidak termasuk jenis pajak daerah yang dinyatakan bermasalah dan direkomendasikan untuk dicabut oleh Menteri Keuangan, karena jenis pajak daerah yang dinyatakan bermasalah tersebut berdasarkan kajian dari KPPOD ternyata tidak layak dilihat dari berbagai aspek (lihat penjelasan di bagian awal Bab IV ini).

Untuk lebih jelasnya mengenai pajak daerah yang berlaku di daerah lain dapat dilihat pada Tabel IV.2. Pada Tabel IV.2. terlihat bahwa ada dua jenis pajak daerah yang sudah diberlakukan di daerah lain tetapi belum diberlakukan di Kota Mataram, yaitu Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet.

**TABEL IV.2.**  
**PAJAK DAERAH YANG BERLAKU DI DAERAH LAIN**

No.	Jenis Pajak Daerah	Beberapa Daerah yang Telah Melaksanakan	Keterangan
1	Pajak Parkir	Kota Tangerang, Kota Batam, Kota Semarang, dll.	Dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir
2	Pajak Sarang Burung Walet	Kab. Jember, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Bima, Kab. Rokan Hilir, Kab. Serang, Kab. Kendal, Kota Medan, dll.	Dikenakan kepada pribadi atau badan yang mengusakan sarang burung walet.

*Sumber : Dari berbagai sumber, 2003*

Pada Tabel IV.2. terlihat hanya dua jenis pajak daerah yang berlaku di daerah lain tetapi belum berlaku di Kota Mataram. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar jenis pajak daerah yang berlaku di berbagai daerah

(kota/kabupaten) di Indonesia telah diberlakukan juga di Kota Mataram. Selain itu, menurut Info Otda ([www.infootda.com](http://www.infootda.com)) menyatakan bahwa hal ini diakibatkan juga oleh pelaksanaan desentralisasi di Indonesia sebenarnya masih bersifat *one sided* karena hanya menyerahkan wewenang pengeluaran tanpa wewenang penerimaan (pajak) utama. Pemerintah pusat hanya menyerahkan pajak yang *revenue*-nya kecil kepada daerah dan sumber-sumber penerimaan pajak yang potensial/gemuk (*revenue*-nya besar) masih dikelola oleh pemerintah pusat. Hal ini nampak pada UU No. 34 Tahun 2000 yang terlalu *restriktif* karena tidak menyerahkan pajak utama ke daerah.

**c) Identifikasi Jenis-jenis Pajak Daerah Baru dari Kajian Literatur / Teoritis dan Yuridis**

Upaya menggali jenis-jenis pajak daerah baru berdasarkan kajian teoritis/literatur dan yuridis dilakukan dengan melakukan penelusuran yang mendalam terhadap teori-teori perpajakan yang ada dari berbagai literatur, terutama tentang pajak daerah dan dengan memperhatikan berbagai aturan per-Undang-undangan maupun produk hukum (yuridis) yang mengatur perpajakan di Indonesia serta dengan selalu melihat kesesuaiannya dengan kondisi nyata di Kota Mataram. Sehingga dari kajian ini diharapkan akan muncul usulan jenis-jenis pajak daerah baru yang secara teoritis dapat diterima (logis) karena sesuai dengan teori yang ada serta tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Dari kajian literatur/teoritis dan yuridis yang dilakukan ternyata tidak ditemukan adanya jenis pajak baru yang cocok diterapkan sesuai dengan potensi yang dimiliki Kota Mataram, selain yang sudah diberlakukan saat ini serta yang sudah diberlakukan di daerah lain. Hal ini sesuai pula dengan yang diungkapkan oleh Info Otda seperti dikutip di atas.

#### **4.1.1.2. Identifikasi Jenis-jenis Retribusi Daerah di Kota Mataram**

Proses identifikasi untuk mengetahui jenis-jenis retribusi daerah baru yang dapat diberlakukan di Kota Mataram dilakukan dengan cara yang sama seperti halnya identifikasi jenis-jenis pajak baru, yaitu melalui pengkajian berbagai sumber, antara lain dari usulan dinas/instansi pengelola PAD, perbandingan dengan daerah lain serta dari kajian literatur/teoritis dan yuridis.

Hal yang membedakan dengan pajak daerah adalah bahwa retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yang berbeda, yaitu Golongan Retribusi Jasa Umum, Golongan Retribusi Jasa Usaha dan Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

##### **a) Identifikasi Jenis-jenis Retribusi Daerah Baru dari Usulan Dinas / Instansi**

Jumlah dinas/instansi yang mengelola PAD di Kota Mataram adalah sebanyak 11 (sebelas) dinas/instansi. Yaitu terdiri dari Dinas Pendapatan (sebagai Koordinator), Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan, Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan, Dinas PU, Bagian Ekonomi, dan Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk menjaring usulan retribusi daerah baru dari seluruh dinas/instansi tersebut dilakukan melalui kuesioner (Kuesioner terlampir pada Lampiran A) dan wawancara. Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang tidak terstruktur. Wawancara ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kesalahan pemahaman narasumber atas kuesioner yang diberikan serta untuk memperjelas dan mengkaji lebih dalam pendapat narasumber.

Dari 11 (sebelas) dinas/instansi yang dimintai usulan retribusi daerah baru, hanya empat dinas yang menyatakan ada usulan untuk jenis retribusi daerah baru, yaitu Dinas Pendapatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan. Untuk lebih jelasnya mengenai usulan jenis-jenis retribusi daerah baru dari dinas/instansi pengelola PAD di Kota Mataram, dapat dilihat pada Tabel IV.3.

**TABEL IV.3.**  
**USULAN JENIS-JENIS RETRIBUSI DAERAH BARU DARI**  
**DINAS/INSTANSI PENGELOLA PAD KOTA MATARAM**

NO.	JENIS RETRIBUSI BARU	DINAS/INSTANSI YANG MENGUSULKAN	KETERANGAN
<b><i>Retribusi Jasa Umum</i></b>			
1.	Retribusi Jasa Atas Pekerjaan	Dinas Pendapatan	Retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan jasa oleh pemerintah berupa pemberian pekerjaan oleh pemerintah Kota Mataram kepada Pengusaha/rekanan yang sumber dananya berasal dari APBD Kota Mataram.
2.	Retribusi Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor (Cidomo)	Dinas Perhubungan	Retribusi yang dipungut atas setiap pelayanan pengujian kendaraan tidak bermotor (angkutan tradisional Cidomo)
<b><i>Retribusi Perizinan Tertentu</i></b>			
1.	Retribusi Izin Usaha Pariwisata	Dinas Pariwisata	Retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan izin usaha pariwisata.
2.	Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta	Dinas Kesehatan	Retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan izin usaha kesehatan swasta
3.	Retribusi Izin Berpangkal Ojek	Dinas Perhubungan	Retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan izin berpangkal ojek.

*Sumber : Hasil wawancara dan Quesioner, 2003*

Dari Tabel IV.3. dapat dilihat bahwa untuk Golongan Retribusi Jasa Umum diperoleh dua jenis usulan retribusi, dan untuk Golongan Retribusi



Perizinan Tertentu diperoleh tiga jenis retribusi, sedangkan untuk Golongan Retribusi Jasa Usaha tidak ada satupun usulan yang diperoleh. Hal ini mengingat bahwa yang menjadi obyek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, jadi ada atau tidaknya potensi Retribusi Jasa Usaha tergantung pada ada atau tidaknya pelayanan yang disediakan oleh pemerintah yang menganut prinsip komersial tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa yang mendasari Dinas Pendapatan Kota Mataram mengajukan usulan pemberlakuan Retribusi Jasa Atas Pekerjaan adalah untuk meningkatkan peran serta pengusaha/rekanan dalam pembangunan melalui kontribusi atas pekerjaan yang diperoleh dari proyek-proyek pemerintah dan mencegah adanya praktik pungutan yang tidak memiliki dasar hukum sehingga pungutan dari proyek APBD menjadi legal. Sementara itu, latar belakang Dinas Perhubungan Kota Mataram mengajukan usulan Retribusi Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor (Cidomo) adalah bahwa angkutan tidak bermotor yang disebut Cidomo, yang merupakan alat angkutan tradisional di Pulau Lombok khususnya Kota Mataram, keberadaannya masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Mataram. Dan untuk dapat menjadi alat angkutan yang aman dan nyaman dibutuhkan adanya pengawasan oleh pemerintah dalam hal pengujian kelayakan jalan. Sehingga alat angkutan tradisional Cidomo yang beroperasi di Kota Mataram adalah yang benar-benar memenuhi persyaratan layak jalan. Disamping itu akan ditentukan pula bahwa selain layak jalan, juga harus memenuhi aspek keindahan fisik dari alat angkutan

Cidomo tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keindahan Kota Mataram dan agar Cidomo dapat menjadi salah satu daya tarik wisata bagi Kota Mataram.

Sedangkan yang mendasari Dinas Pariwisata Kota Mataram mengusulkan Retribusi Izin Usaha Pariwisata adalah karena Kota Mataram yang merupakan salah satu pintu gerbang masuknya wisatawan ke Nusa Tenggara Barat, baik wisatawan domestik maupun wisatawan manca negara, memiliki potensi berbagai fasilitas penunjang dibidang pariwisata, seperti hotel berbintang, hotel melati, penginapan keluarga (*home stay*), Biro Perjalanan Wisata dan sebagainya yang pengurusan perizinannya merupakan wewenang Pemerintah Kota Mataram, seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Mataram No. 14 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kota Mataram Sebagai Daerah Otonom. Melihat besarnya potensi tersebut dan mengingat perlunya Pemerintah Kota Mataram melakukan pembinaan dan pengendalian yang terarah dan berkesinambungan serta karena biaya penyelenggaraan izin tersebut cukup besar, maka dinilai layak untuk diusulkan pemberlakuan Retribusi Izin Usaha Pariwisata.

Dinas Kesehatan Kota Mataram mengusulkan Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan swasta dengan pertimbangan bahwa semakin banyaknya bermunculan berbagai usaha dibidang pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pihak swasta seperti praktek dokter, klinik, laboratorium, rumah bersalin swasta dan sebagainya yang keberadaannya perlu pengawasan dan pembinaan agar tidak merugikan masyarakat serta agar keberadaan pelayanan kesehatan swasta tersebut dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Kota Mataram melalui pembayaran Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta.

Retribusi Izin Berpangkal Ojek yang merupakan usulan Dinas Perhubungan Kota Mataram, dimaksudkan untuk dapat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengusaha ojek melalui perizinan yang diberikan. Melalui mekanisme pemberian izin ini diharapkan populasi kendaraan ojek dapat terkontrol, sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dalam hal trayek (rute yang dilayani) maupun tarif, baik diantara tukang ojek itu sendiri maupun dengan pengusaha angkutan lainnya yang beroperasi di Kota Mataram, seperti Angkutan Kota (Bemo) dan angkutan tidak bermotor (tradisional) Cidomo.

**b) Identifikasi Jenis-jenis Retribusi Daerah Baru dari Hasil Perbandingan Dengan Daerah Lain**

Untuk menggali jenis retribusi daerah baru yang dapat diberlakukan di Kota Mataram dilakukan juga dengan mengadakan perbandingan dengan daerah lain. Perbandingan ini dilaksanakan dengan menginventarisir jenis-jenis retribusi daerah apa saja yang sudah diberlakukan di daerah lain, tetapi tidak termasuk jenis retribusi daerah yang dinyatakan bermasalah dan direkomendasikan untuk dicabut oleh Menteri Keuangan, karena jenis retribusi daerah yang dinyatakan bermasalah tersebut berdasarkan kajian dari KPPOD ternyata tidak layak dilihat dari berbagai aspek.

Untuk lebih jelasnya mengenai retribusi daerah yang berlaku di daerah lain dapat dilihat pada Tabel IV.4. Pada Tabel IV.4. terlihat bahwa ada dua jenis Retribusi Jasa Umum yang telah berlaku di daerah lain tetapi belum diberlakukan di Kota Mataram. Sedangkan untuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu terdapat tujuh jenis retribusi daerah yang telah berlaku di daerah lain tetapi belum diberlakukan di Kota Mataram.

**TABEL IV.4.**  
**RETRIBUSI DAERAH YANG BERLAKU DI DAERAH LAIN**

No.	Jenis Retribusi Daerah	Beberapa Daerah yang Telah Melaksanakan	Keterangan
<b><i>Retribusi Jasa Umum</i></b>			
1	Retribusi Jasa Atas Pekerjaan	Kabupaten Lombok Barat	Retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan jasa oleh pemerintah berupa pemberian pekerjaan oleh pemerintah Kota Mataram kepada Pengusaha/rekanan yang sumber dananya berasal dari APBD Kota Mataram.
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor (Cidomo)	Kabupaten Lombok Barat, Kab. Jember	Retribusi yang dipungut atas setiap pelayanan pengujian kendaraan tidak bermotor (angkutan tradisional Cidomo)
<b><i>Retribusi Perizinan Tertentu</i></b>			
1	Retribusi Izin Usaha Pariwisata	Kab. Cianjur, Kab. Karawang, Kab. Lombok Barat, Kota Makasar, Kota Tegal	Retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan izin usaha pariwisata.
2	Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta	Kab. Mojokerto, Kota Surabaya, Kab. Lombok Barat, Kab. Pekalongan	Retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan izin usaha kesehatan swasta
3	Retribusi Izin Berpangkal Ojek	Kota Pagaralam, Kab. Bone, Kota Jayapura, Kab. Lombok Barat	Retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan izin berpangkal ojek.
4	Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair	Kab. Bogor	Retribusi yang dipungut atas pelayanan izin pembuangan limbah cair hasil dari kegiatan usaha komersial oleh orang pribadi atau badan ke perairan umum maupun unit pengolahan limbah cair milik pribadi atau badan yang bersangkutan.
5	Retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	Kab. Gorontalo, Kab. Karawang, Kota Balikpapan	Retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan izin pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah untuk keperluan usaha komersial
6	Retribusi Izin Usaha Peternakan	Kab. Serang, Kab. Semarang	Retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan izin usaha peternakan oleh orang pribadi atau badan
7	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Kab. Gianyar	Retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Sumber : Dari berbagai sumber, 2003

Dari Tabel IV.4. terlihat bahwa cukup banyak jenis retribusi daerah yang telah diberlakukan di daerah lain, namun belum diberlakukan di Kota Mataram. Hal ini merupakan peluang bagi Kota Mataram untuk memberlakukan jenis-jenis

retribusi tersebut guna meningkatkan penerimaan PAD khususnya yang bersumber dari retribusi daerah, tentunya setelah dilakukan kajian kelayakan pemberlakuan retribusi daerah tersebut di Kota Mataram. Karena retribusi yang berlaku di daerah lain, belum tentu dapat diberlakukan di Kota Mataram, sebab tergantung dari ada atau tidaknya potensi yang dimiliki, yang menjadi obyek dari retribusi tersebut.

Nama-nama daerah yang telah memberlakukan retribusi daerah sebagaimana yang tercantum pada Tabel IV.4. hanyalah sebagian dari daerah yang sebenarnya telah memberlakukan masing-masing jenis retribusi daerah tersebut. Hal ini karena keterbatasan data yang diperoleh, baik karena hambatan birokrasi maupun hambatan teknis lainnya. Data tersebut sebagian besar diperoleh dari situs-situs resmi kabupaten/kota yang bersangkutan dan juga dari situs-situs berita di internet. Walaupun dengan keterbatasan tersebut, setidaknya dapat diketahui bahwa ada beberapa jenis retribusi daerah yang telah berlaku di daerah lain tetapi belum diberlakukan di Kota Mataram.

Retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota sedangkan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah merupakan kewenangan provinsi. Untuk Kota Mataram, kewenangan perizinan pemanfaatan air bawah tanah termasuk dalam salah satu Kewenangan Wajib Bidang Lingkungan Hidup seperti yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kota Mataram Sebagai Daerah Otonom.

**c) Identifikasi Jenis-jenis Retribusi Daerah Baru dari Kajian Literatur / Teoritis dan Yuridis**

Seperti halnya dalam mengidentifikasi pajak daerah, identifikasi jenis-jenis retribusi daerah baru dari kajian literatur/teoritis dan yuridis juga dilakukan terhadap retribusi daerah. Upaya menggali jenis-jenis retribusi daerah baru berdasarkan kajian teoritis/literatur dilakukan dengan melakukan penelusuran yang mendalam terhadap teori-teori penerimaan daerah maupun literatur/teori-teori lainnya yang relevan dan dengan memperhatikan berbagai aturan per-Undang-undangan maupun produk hukum lainnya (yuridis) yang mengatur retribusi daerah di Indonesia serta dengan selalu melihat kesesuaiannya dengan kondisi nyata di Kota Mataram. Sehingga dari kajian ini diharapkan akan muncul usulan jenis-jenis retribusi daerah baru yang secara teoritis dapat diterima (logis) karena sesuai dengan teori yang ada serta tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Dari kajian literatur/teoritis dan yuridis yang dilakukan, diperoleh satu jenis retribusi daerah baru dari Golongan Retribusi Jasa Umum yang kemungkinan cocok diterapkan sesuai dengan potensi yang dimiliki Kota Mataram, selain yang telah diberlakukan saat ini serta yang telah diberlakukan di daerah lain. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Tabel IV.5.

**TABEL IV.5.**  
**JENIS-JENIS RETRIBUSI DAERAH BARU**  
**DARI KAJIAN LITERATUR/TEORITIS DAN YURIDIS**

NO.	JENIS RETRIBUSI BARU	DASAR TEORITIS/YURIDIS	KETERANGAN
<i>Retribusi Jasa Umum</i>			
1.	Retribusi Pengujian Kualitas Limbah Cair	*) Lihat Penjelasan	Retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kualitas limbah cair yang dihasilkan oleh kegiatan usaha yang ada di Kota Mataram

*Sumber : Hasil Analisis, 2003*

\*) Penjelasan :

Secara Teoritis, dari kajian literatur dinyatakan bahwa menurut Soetrisno (1981 : 106) “salah satu fungsi pungutan pemerintah adalah fungsi mengatur (*regulelende functie*) yaitu untuk mendorong, mengarahkan, melindungi, memberikan kebebasan-kebebasan tertentu dan lain-lain”. Melindungi disini termasuk melindungi kepentingan dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam *Declaration of Human Rights* jo. Undang- undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, jo. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ([www.ngo.or.id](http://www.ngo.or.id)). Oleh karena itu perlu dibuat aturan-aturan di tingkat daerah yang dapat menjamin hak-hak masyarakat untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Misalnya dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap limbah yang dihasilkan oleh usaha-usaha yang ada di daerah. Terhadap limbah yang dihasilkan oleh kegiatan usaha di daerah perlu diuji terlebih dahulu sebelum dibuang ke perairan umum maupun tempat pembuangan limbah lainnya.

Sedangkan secara yuridis, pengujian kualitas limbah cair termasuk dalam kewenangan Kota Mataram sebagai Daerah Otonom sebagaimana tercantum dalam Bab I, Bagian Kedua tentang Kewenangan Wajib, Pasal 3, huruf (h) Bidang Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kota Mataram No. 14 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kota Mataram Sebagai Daerah Otonom.

Atas dasar kedua hal tersebut di atas, maka diusulkan untuk dilakukan kajian terhadap kelayakan pemberlakuan Retribusi Pengujian Kualitas Limbah.

#### 4.1.1.3. Rekapitulasi Hasil Identifikasi Jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Mataram

Dari serangkaian identifikasi yang telah dilakukan untuk mendapatkan usulan jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru, baik dari usulan dinas/instansi, perbandingan dengan daerah lain maupun dari kajian literatur/teoritis dan yuridis diperoleh berbagai usulan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru seperti yang diuraikan di atas, dan untuk lebih jelasnya ditampilkan pada Tabel IV.6.

**TABEL IV.6.**  
**REKAPITULASI HASIL IDENTIFIKASI JENIS-JENIS**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BARU**  
**DI KOTA MATARAM**

No.	Jenis Pajak Daerah / Retribusi Daerah	Sumber Usulan	Keterangan
<i>Pajak Daerah</i>			
1	Pajak Parkir	Usulan Dinas Perhubungan	Dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir
2	Pajak Sarang Burung Walet	Usulan Dinas Pertanian	Dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan sarang burung walet

*Dilanjutkan ...*



*Lanjutan ...*

<b>Retribusi Jasa Umum</b>			
1	Retribusi Jasa Atas Pekerjaan	Usulan Dinas Pendapatan dan Perbandingan dengan Daerah Lain	Retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan jasa oleh pemerintah berupa pemberian pekerjaan oleh pemerintah Kota Mataram kepada Pengusaha/rekanan yang sumber dananya berasal dari APBD Kota Mataram.
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor (Cidomo)	Usulan Dinas Perhubungan dan Perbandingan dengan Daerah Lain	Retribusi yang dipungut atas setiap pelayanan pengujian kendaraan tidak bermotor (angkutan tradisional Cidomo)
3	Retribusi Pengujian Kualitas Limbah Cair	Literatur/Teoritis dan Yuridis	Retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kualitas limbah cair yang dihasilkan oleh kegiatan usaha yang ada di Kota Mataram
<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>			
1	Retribusi Izin Usaha Pariwisata	Usulan Dinas Pariwisata dan Perbandingan dengan Daerah Lain	Retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan izin usaha pariwisata.
2	Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta	Usulan Dinas Kesehatan dan Perbandingan dengan Daerah Lain	Retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan izin usaha kesehatan swasta
3	Retribusi Izin Berpangkal Ojek	Usulan Dinas Perhubungan dan Perbandingan dengan Daerah Lain	Retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan izin berpangkal ojek.
4	Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair	Perbandingan dengan Daerah Lain	Retribusi yang dipungut atas pelayanan izin pembuangan limbah cair hasil dari kegiatan usaha komersial oleh orang pribadi atau badan ke perairan umum maupun unit pengolahan limbah cair milik pribadi atau badan yang bersangkutan.
5	Retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	Perbandingan dengan Daerah Lain	Retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan izin pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah untuk keperluan usaha komersial
6	Retribusi Izin Usaha Peternakan	Perbandingan dengan Daerah Lain	Retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan izin usaha peternakan oleh orang pribadi atau badan
7	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Perbandingan dengan Daerah Lain	Retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Sumber : Hasil Analisis, 2003

Untuk mengetahui sebaran lokasi dari beberapa potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut secara fisik spasial di wilayah Kota Mataram, dapat dilihat pada Gambar 4.2.



## EKSTENSIFIKASI


**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN  
PEMBANGUNAN KOTA MATARAM**

## GAMBAR

**SEBARAN BEBERAPA POTENSI  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA MATARAM**

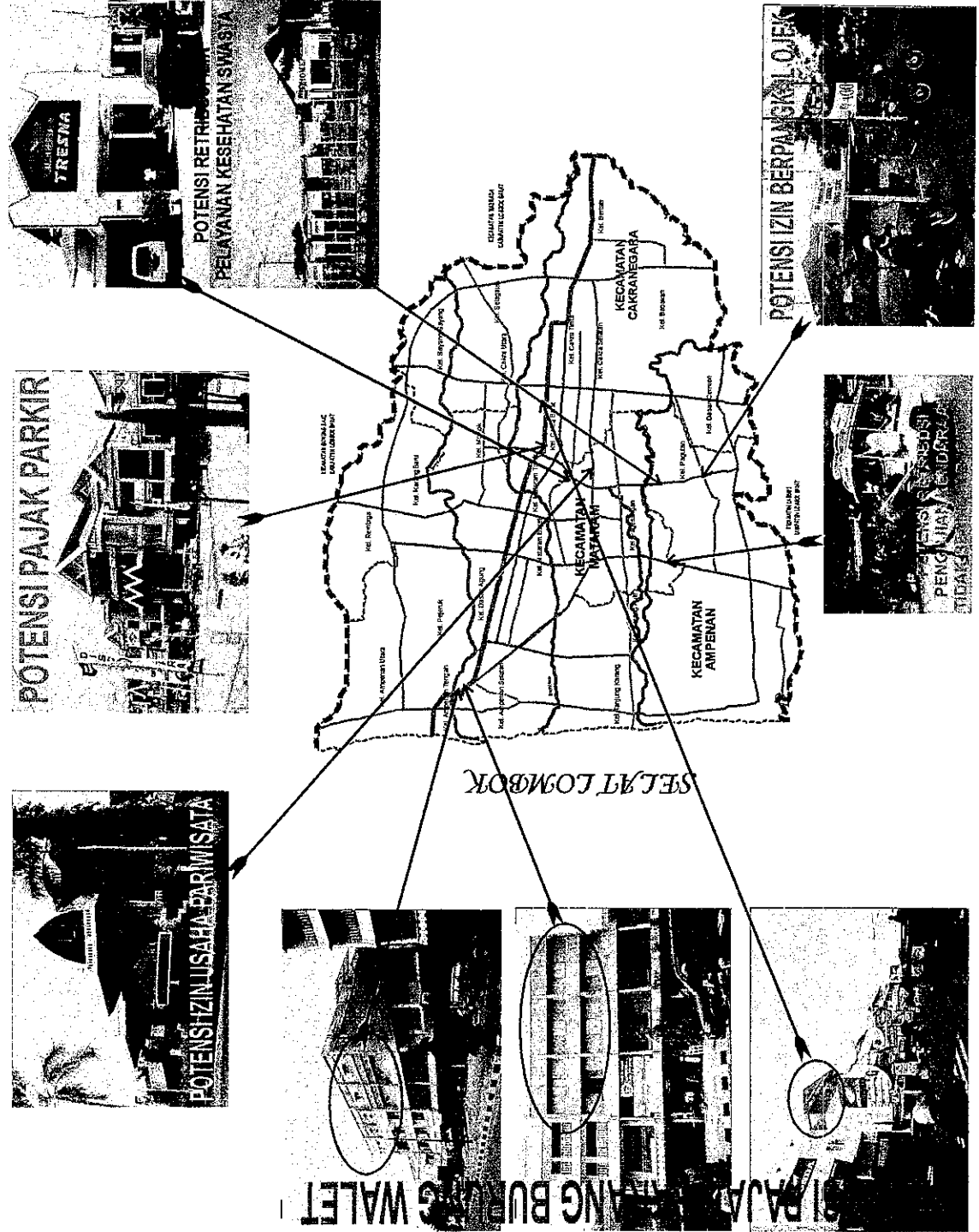
**KETERANGAN :**

-----	Batas Kota Mataram
-----	Batas Kecamatan
-----	Batas Kelurahan
-----	Jalan Utama
-----	Jalan Antar Sub Wilayah
-----	Jalan Antar Lingkungan
-----	Jalan Lingkungan



Stata	No. Gambar	No. Halaman
1:1500000	4.2.	132

**SUMBER  
HASIL ANALISIS, 2003**



#### **4.1.2. Identifikasi Besaran Potensi Aktual Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Mataram**

##### **4.1.2.1. Identifikasi Besaran Potensi Aktual Pajak Daerah di Kota Mataram**

###### **a) Besaran Potensi Aktual Pajak Parkir**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Mataram, Potensi Pajak Parkir Kota Mataram berasal dari 14 (empat belas) titik lokasi parkir, yang tersebar di tiga kecamatan, dan terbanyak berada di Kecamatan Mataram, yaitu sebanyak 8 (delapan) lokasi parkir (dapat dilihat pada Gambar 4.3.). Penerimaan Pajak Parkir terbesar diharapkan dari lokasi parkir Mataram Mall yang berada di Kecamatan Cakranegara. Kecamatan Cakranegara merupakan kawasan niaga, yang memiliki peruntukan lahan sebagai kawasan perdagangan terbanyak diantara kecamatan lainnya. Sedangkan potensi pajak parkir dari pusat perbelanjaan (retail) lainnya tidak begitu besar. Mataram Plaza misalnya, hanya memiliki lahan parkir satu lantai yang berada di lantai dasar. Demikian juga halnya dengan ACC Plaza dan Ruby Supermarket, hanya memiliki lahan parkir yang sangat terbatas di halaman depan. Hal ini berakibat pada digunakannya tepi jalan umum sebagai tempat parkir. Penggunaan tepi jalan umum sebagai tempat parkir tidak meningkatkan penerimaan Pajak Parkir, karena merupakan obyek Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum. Lain halnya dengan pusat perbelanjaan MGM Plaza. MGM Plaza memiliki areal parkir yang cukup luas di halaman belakang, namun sampai saat ini MGM Plaza memberikan pelayanan parkir gratis bagi pengunjungnya. Karena tidak adanya pembayaran parkir, maka tidak dapat dilakukan penarikan Pajak Parkir. Untuk lebih jelasnya mengenai besaran potensi aktual Pajak Parkir, dapat dilihat pada Tabel IV.8.

Tabel IV.8. juga menunjukkan bahwa perkiraan besaran potensi Pajak Parkir Kota Mataram adalah sebesar Rp. 140.688.000,- (seratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) per tahun. Jumlah ini diperoleh berdasarkan perhitungan rata-rata jumlah kendaraan yang menggunakan lahan parkir perharinya baik kendaraan roda dua maupun roda empat (perhitungan diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Mataram), dikalikan besaran tarif yang direncanakan, yaitu untuk sepeda motor sebesar Rp. 500 dan mobil sebesar Rp. 1000. Besaran tarif parkir ini ditentukan berdasarkan besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir yang telah berlaku selama ini. Sedangkan untuk besaran tarif Pajak Parkir yang akan diberlakukan, direncanakan sebesar 20% dari pendapatan yang diperoleh oleh pengelola parkir. Besaran tarif Pajak Parkir ini sesuai dengan batasan maksimal tarif Pajak Parkir seperti yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, khususnya dalam ketentuan Bab XII mengenai Pajak Parkir, Pasal 71 ayat (1) yang berbunyi "Tarif Pajak Parkir paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)". Diambilnya batas tarif Pajak Parkir tertinggi sebesar 20%, adalah karena melihat perbandingan dengan daerah lain. Dari berbagai daerah yang telah melaksanakan Pajak Parkir, semuanya mengenakan tarif Pajak Parkir sebesar 20%, perbedaannya hanya terletak pada besaran tarif parkir yang dikenakan kepada konsumen, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat serta kondisi perekonomian masing-masing daerah.

Potensi Pajak Parkir diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya, sehingga akan menjadi sumber penerimaan pajak daerah yang dapat diandalkan. Perkiraan ini didasarkan pada data Perkembangan dan Pertumbuhan Jumlah

Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Mataram Tahun 2001-2002 yang mengalami peningkatan. Pada Tabel IV.7. terlihat bahwa tahun 2002 jumlah kendaraan bermotor di Kota Mataram bertambah sebesar 17,29% dari tahun 2001. Pertumbuhan terbesar adalah pada jenis kendaraan sepeda motor dan kendaraan mini bus (Kijang, Panther dan sebagainya) yang sebagian besar digunakan untuk kendaraan pribadi. Dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, khususnya kendaraan pribadi, diharapkan jumlah kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir juga akan bertambah.

Aktivitas masyarakat yang semakin tinggi, juga berpengaruh terhadap peningkatan penyediaan lahan parkir. Hal ini terlihat pada dilakukannya perluasan lahan parkir oleh BCA Cabang Cakranegara dengan menggunakan lahan di bagian belakang kantornya. Perluasan lahan parkir ini memiliki kemungkinan akan dilakukan juga oleh perusahaan lainnya. Mengingat penyediaan lahan parkir merupakan bagian dari pelayanan yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada konsumen/nasabahnya.

Sementara itu untuk kompleks perumahan yang memiliki lebar jalan lingkungan yang sempit (tidak cukup untuk dilalui mobil) seperti di Perumnas Tanjung Karang – Ampenan, maka warga Perumnas yang memiliki mobil pribadi tentunya membutuhkan suatu tempat untuk menipkan mobilnya. Hal ini memberi peluang bagi perorangan/badan usaha untuk membuka usaha jasa penitipan mobil (garasi mobil) dengan memungut bayaran kepada pemilik mobil. Usaha seperti ini juga merupakan obyek Pajak Parkir.

**TABEL IV.7.**  
**PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN JUMLAH SERTA JENIS**  
**KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH KOTA MATARAM**  
**TAHUN 2001-2002**

NO.	JENIS KENDARAAN	JUMLAH (BUAH)		PERTUMBUHAN (%)
		TAHUN 2001	TAHUN 2002	
1	Sepeda Motor	62.958	73.963	17,48
2	Pick-up	3.811	4.324	13,46
3	Truck	2.039	2.439	19,62
4	Bus/Micro Bus	249	288	15,66
5	Mini Bus	4.113	5.124	24,58
6	Sedan	1.763	1.927	9,30
7	Jeep	2.172	2.352	8,29
8	Taxi	235	331	40,85
9	Mobil Box	311	336	8,04
10	Ambulance	30	31	3,33
<b>JUMLAH</b>		<b>77.681</b>	<b>91.115</b>	<b>17,29</b>

*Sumber : Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam 9 Tahun Kota Mataram*

**TABEL IV.8.**  
**POTENSI AKTUAL USULAN PAJAK PARKIR KOTA MATARAM**

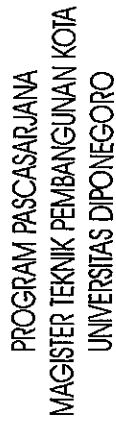
LOKASI PARKIR	RODA DUA		MOBIL		JUMLAH (Rp)	HARI KERJA PER MINGGU	PENDAPATAN /MINGGU	PENDAPATAN /BULAN	PENDAPATAN /TAHUN	PAJAK 20%
	RATA-RATA UNIT/HARI	TARIF x RATA- RATA UNIT/HARI (Rp)	RATA-RATA UNIT/HARI	TARIF x RATA- RATA UNIT/HARI (Rp)						
- Bandara Selaparang	25	12.500	300	300.000	312.500	7	2.187.500	8.750.000	105.000.000	21.000.000
- Mataram Plaza	120	60.000	40	40.000	100.000	7	700.000	2.800.000	33.600.000	6.720.000
- Mataram Mall	750	375.000	325	325.000	700.000	7	4.900.000	19.600.000	235.200.000	47.040.000
- BNI 46	450	225.000	50	50.000	275.000	5	1.375.000	5.500.000	66.000.000	13.200.000
- BPD (Bank NTB)	150	75.000	35	35.000	110.000	5	550.000	2.200.000	26.400.000	5.280.000
- PT. POSINDO	100	50.000	30	30.000	80.000	6	480.000	1.920.000	23.040.000	4.608.000
- PT. Telkom Mataram	90	45.000	55	55.000	100.000	5	500.000	2.000.000	24.000.000	4.800.000
- Bank Mandiri	40	20.000	25	25.000	45.000	5	225.000	900.000	10.800.000	2.160.000
- ACC Plaza	125	62.500	45	45.000	107.500	7	752.500	3.010.000	36.120.000	7.224.000
- BCA	210	105.000	40	40.000	145.000	5	725.000	2.900.000	34.800.000	6.960.000
- RS. Antonius	75	37.500	20	20.000	57.500	7	402.500	1.610.000	19.320.000	3.864.000
- PDAM Mataram	125	62.500	15	15.000	77.500	5	387.500	1.550.000	18.600.000	3.720.000
- RSU. Mataram	200	100.000	50	50.000	150.000	7	1.050.000	4.200.000	50.400.000	10.080.000
- RS Islam Mataram	80	40.000	20	20.000	60.000	7	420.000	1.680.000	20.160.000	4.032.000
<b>JUMLAH</b>	<b>2.540</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050.000</b>	<b>2.320.000</b>		<b>14.655.000</b>	<b>58.620.000</b>	<b>703.440.000</b>	<b>140.688.000</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Mataram, 2003

Keterangan :

- Tarif Parkir untuk kendaraan roda dua = Rp 500,- (lima ratus rupiah)
- Tarif Parkir untuk mobil = Rp 1.000,- (seribu rupiah)





**EKSTENSIFIKASI  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN  
PEMBANGUNAN KOTA MATARAM**

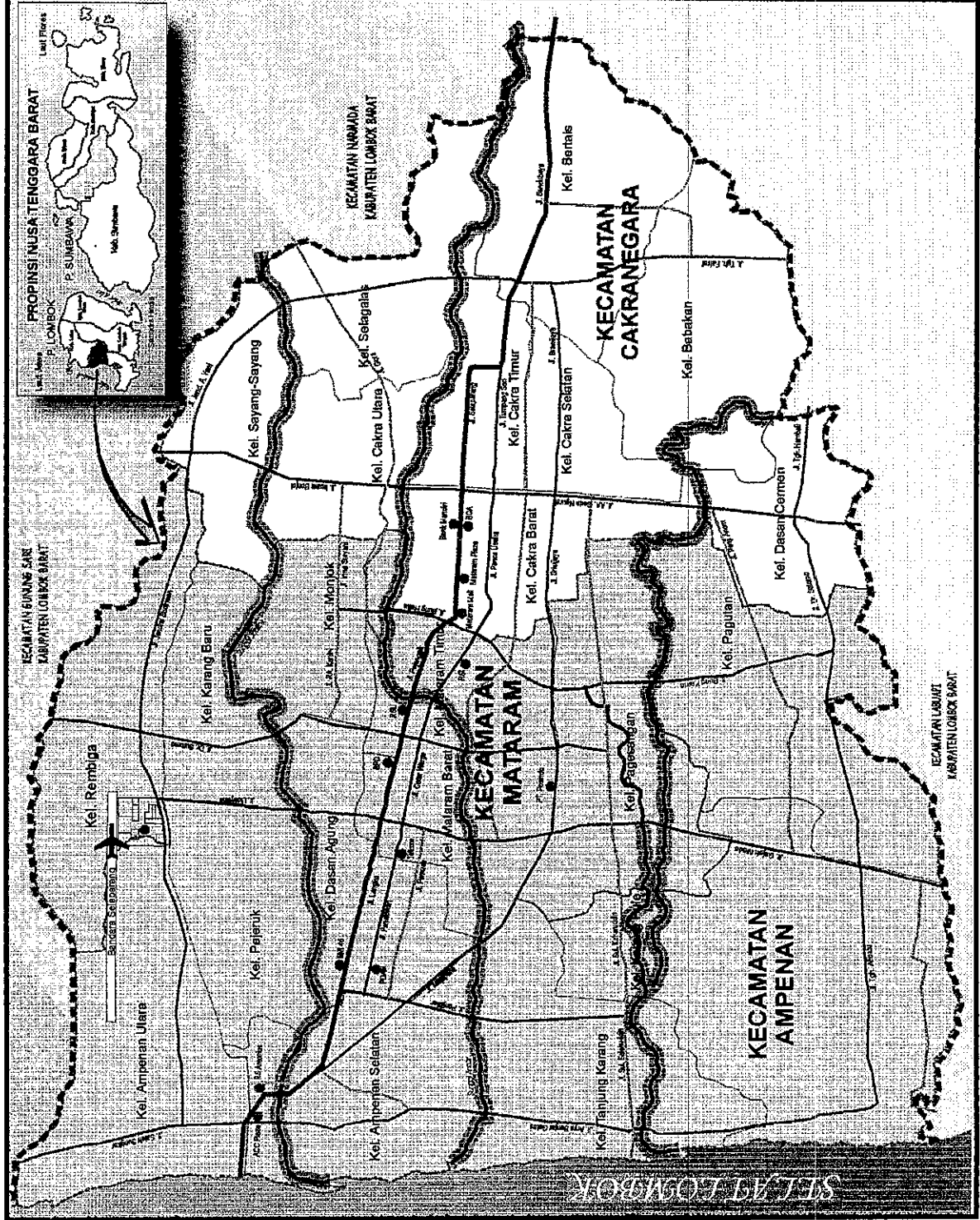
## SEBARAN LOKASI POTENSI PAJAK PARKIR KOTA MATARAM

	Batas Kota Mataram
	Batas Kecamatan
	Batas Kelurahan
	Jalan Utama
	Jalan Antar Sub Wilayah
	Jalan Antar Lingkungan
	Jalan Lingkungan
	Kecamatan Ampenan
	Kecamatan Mataram
	Kecamatan Cakranegara
	Lokasi Potensi Pasir Partikel



1:1,500,000  
4.3.  
138

**SUMBER**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**KOTA MATARAM**



**b) Besaran Potensi Aktual Pajak Sarang Burung Walet**

Jumlah pengusaha sarang burung walet di Kota Mataram berdasarkan hasil pendataan Dinas Pendapatan Kota Mataram Tahun 2001 dalam rangka pengenaan sumbangan pihak ketiga terhadap pengusaha sarang burung walet, adalah sebanyak 28 orang, semua berbentuk usaha perorangan. Setiap pengusaha rata-rata memiliki 1000 ekor burung (hasil pendataan Dinas Pendapatan, 2001). Menurut keterangan pemilik/pengusaha sarang burung walet, setiap 500 ekor burung walet mampu menghasilkan 1 kg sarang burung walet. Kualitas sarang burung walet yang dihasilkan umumnya berkualitas baik, dengan kadar kotoran yang rendah, hal ini sesuai dengan pernyataan Noerdjito, pakar burung dari Balitbang Zoologi Puslitbang Biologi LIPI Bogor (Kompas, 18 April 2001) yang menyatakan bahwa "Sarang walet yang berasal dari rumah walet di tengah maupun di pinggir kota lebih bersih dan bagus bentuknya". Dalam setahun pengusaha sarang burung walet di Kota Mataram dapat melakukan tiga kali panen. Umumnya hasil panen mereka dibeli langsung oleh pedagang pengumpul seharga rata-rata Rp 7.500.000 per kilo gram. Sebenarnya pengusaha sarang burung akan dapat menjual dengan harga yang lebih tinggi apabila dapat melakukan ekspor secara langsung produksi sarang burungnya tanpa melalui perantara pedagang pengumpul, tetapi ini masih sulit dilakukan mengingat masih sedikitnya hasil produksi mereka. Harga sarang burung walet di pasaran sangat bervariasi, menurut LBH Medan ([www.ngo.or.id/lbhmedan](http://www.ngo.or.id/lbhmedan)) "harga sarang burung walet mencapai Rp 10 juta s/d Rp 18 juta per kg". Sementara itu menurut Noerdjito (Kompas, 18 April 2001) "harga sarang walet sekitar Rp 10 juta/ kg walet goa dan Rp 20 juta/kg walet rumah". Namun mengingat sebagian besar

sarang burung walet ini diekspor, maka variasi harga ini juga dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah. Untuk lebih jelasnya mengenai besaran potensi Pajak Sarang Burung Walet di Kota Mataram dapat dilihat pada Tabel IV.9.

**TABEL IV.9.**  
**BESARAN POTENSI AKTUAL**  
**PAJAK SARANG BURUNG WALET**

KETERANGAN	PERINCIAN	SATUAN
Jumlah Pengusaha eksisting	28	pengusaha
Rata-rata kepemilikan Burung Walet/pengusaha	1.000	ekor
Populasi Total Burung Walet	28.000	ekor
Produksi per panen (1 kg/500 ekor)	56	kg
Produksi per tahun (3x panen/tahun)	168	kg
Harga jual rata-rata/kg	7.500.000	Rp
Total hasil penjualan	1.260.000.000	Rp
Pajak 10%	126.000.000	Rp

*Sumber : Dinas Pendapatan Kota Mataram, 2003*

Pada Tabel IV.9. terlihat bahwa omzet pengusaha sarang burung walet di Kota Mataram yang berjumlah 28 orang adalah sebesar Rp 1.260.000.000 per tahun, sehingga dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10%, akan diperoleh penerimaan Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta) per tahun. Penentuan besaran tarif Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10% didasari oleh hasil perbandingan dengan daerah lain yang telah menerapkan Pajak Sarang Burung Walet, seperti Kabupaten Bima misalnya, yang menerapkan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10%. Digunakannya Kabupaten Bima sebagai pembanding, karena Kabupaten Bima merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Barat seperti halnya Kota Mataram, sehingga memiliki banyak kesamaan dengan Kota Mataram dalam hal kondisi perekonomian, jumlah penduduk dan sebagainya.

Prospek usaha sarang burung walet di Kota Mataram cukup besar, mengingat tingginya harga jual sarang burung walet tersebut (lihat uraian di awal

analisis ini). Namun data yang pasti mengenai perkembangan jumlah usaha burung walet di Kota Mataram belum tersedia. Tetapi bila diamati secara langsung, nampaknya perilaku burung walet yang suka bergerombol / berkelompok, cenderung menyukai suatu kawasan yang sudah biasa mereka diami, sehingga bila disuatu tempat populasi mereka sudah terlalu padat, biasanya sebagian dari mereka akan mencari tempat baru disekitar tempat yang mereka diami saat ini. Hal ini menjadi peluang untuk membuat rumah walet baru disekitar rumah walet yang sudah ada sekarang. Dengan demikian usaha sarang burung walet akan terus berkembang.

Mengingat pengembangan usaha Burung Walet di tengah kota dapat memberikan dampak negatif berupa menurunnya keindahan wajah Kota Mataram, maka kiranya perlu dicari lokasi pengembangan / budidaya Walet di daerah pinggiran kota.

Ciri-ciri daerah yang sesuai dan merupakan sentra pengembangan walet menurut Philip Yamin (2002 : 1-2) adalah sebagai berikut :

- Daerah yang memiliki hutan tropis.
- Daerah dataran rendah sampai ketinggian maksimal 500m dpl dengan suhu rata-rata berkisar 26-29°C.
- Daerah basah yang mempunyai musim hujan lebih dari enam bulan dalam satu tahun.
- Daerah pertanian subur dan beririgasi.
- Daerah perikanan yang banyak tambak, kolam, sungai atau rawa.
- Daerah yang tidak terlalu banyak angin kencang.
- Daerah yang belum tercemari polusi dari industri.
- Daerah yang tidak banyak musuh alami walet, seperti elang, kelelawar atau burung hantu.
- Daerah pengendalian hama pertanian tanpa insektisida.

Lebih lanjut Philip Yamin (2002 : 4) mengatakan bahwa syarat lingkungan makro yang diinginkan oleh walet yaitu harus ada unsur air, terminal

perburuan, terminal hunian, jalur terbang, daerah penghijauan, ketersediaan pakan secara kontinyu dan merupakan daerah dataran rendah. Daerah sumber pakan alami ditandai dengan tumbuhnya banyak tanaman atau pepohonan. Selain itu, merupakan daerah perairan, seperti sungai.

Sementara itu, kondisi fisik wilayah Kota Mataram : berada pada ketinggian 0-50 m dpl. Relatif datar dengan kemiringan lereng antara 0-2%. Suhu udara rata-rata 26,35 °C. Rata-rata kecepatan angin maksimum sebesar 20 knots. Curah hujan cukup tinggi, yaitu sebanyak 252 mm. Memiliki tiga buah sungai besar yang membelah Kota Mataram, yaitu Sungai Jangkok, Sungai Ancar dan Sungai Bernyok. Memiliki ruang terbuka hijau berupa tanah pertanian dan perkebunan yang cukup luas, mencapai 49,83% (Data Pokok, 2001 : 18). Melihat kondisi fisik Kota Mataram seperti disebutkan di atas, bila dikaitkan dengan ciri-ciri daerah yang sesuai dan merupakan sentra pengembangan walet, maka hampir seluruh wilayah Kota Mataram cocok digunakan sebagai lahan budidaya Burung Walet. Hanya saja tentunya harus memperhatikan faktor-faktor lain. Seperti penggunaan lahan eksisting di lokasi tersebut, rencana penggunaan lahan, tingkat kepadatan penduduk serta faktor-faktor lain yang relevan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka diperoleh dua kawasan yang secara teoritis cocok sebagai lahan budidaya Burung Walet. Kawasan tersebut berada di bagian Timur Laut dan Barat Daya Kota Mataram.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sebaran lokasi eksisting usaha sarang burung walet secara spasial serta rencana kawasan budidaya Burung Walet di wilayah Kota Mataram, dapat dilihat pada Gambar 4.4.

Pada Gambar 4.4. terlihat bahwa ada dua kawasan yang secara teoritis cocok sebagai lokasi budi daya walet. Kedua kawasan ini terpilih selain karena memenuhi ciri-ciri sebagai daerah yang disukai Burung Walet, juga memenuhi kriteria lainnya. Kriteria lain yang menjadi pertimbangan yaitu bahwa di kedua kawasan ini tingkat kepadatan penduduknya relatif rendah, yaitu kurang dari 75 jiwa/Ha (lihat Gambar 3.6. tentang Peta Penyebaran dan Kepadatan Penduduk Kota Mataram), selain itu sebagian besar kawasan ini masih berupa ruang terbuka hijau.

Rencana Kawasan Budidaya Burung Walet I yang berada di wilayah Kelurahan Sayang-sayang, Cakra Utara dan Selagalas, memiliki keunggulan dibandingkan dengan Kawasan II. Keunggulannya adalah bahwa di Kawasan I sudah ada usaha Burung Walet eksisting, sehingga untuk mengembangkan usaha Burung Walet di kawasan ini tidak begitu sulit. Sedangkan di kawasan II belum ada usaha Burung Walet eksisting.

Untuk mencegah semakin menurunnya kualitas keindahan wajah Kota Mataram, maka perkembangan usaha Sarang Burung Walet di tengah kota perlu dibatasi. Melalui Perda tentang Pajak Sarang Burung Walet yang nantinya merupakan dasar hukum pemungutan pajak ini, Pemerintah Kota Mataram dapat mengarahkan perkembangan usaha Sarang Burung Walet ke kawasan yang direncanakan tersebut.



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

# T E S I S

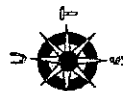
EKSTENSIFIKASI  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN  
PEMBANGUNAN KOTA MATARAM

## GAMBAR

### SEBARAN LOKASI USAHA SARANG BURUNG WALET DI KOTA MATARAM

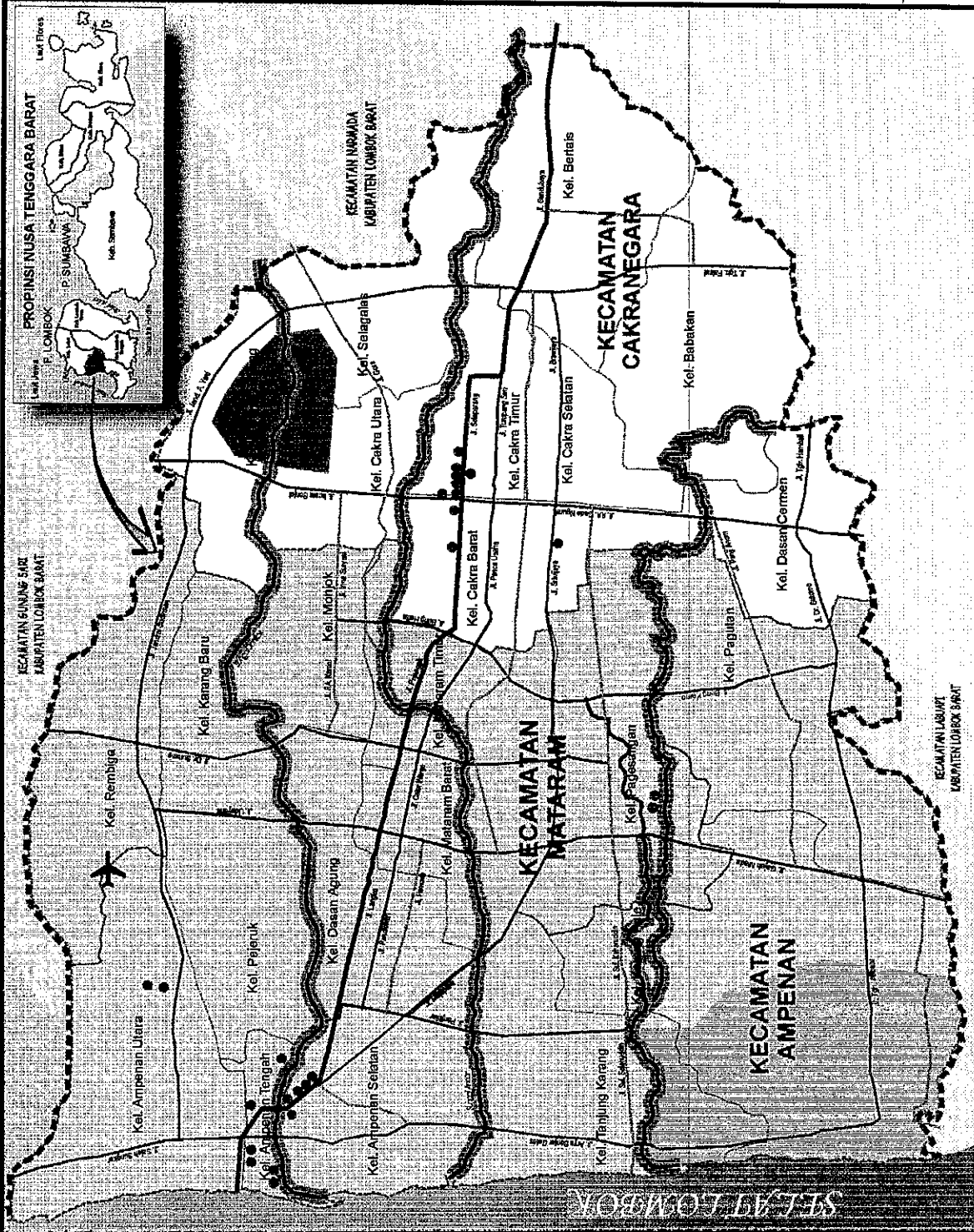
#### KETERANGAN :

- Batas Kota Mataram
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Utama
- Jalan Antar Sub Wilayah
- Jalan Antar Lingkungan
- Jalan Lingkungan
- Kecamatan Ampenan
- Kecamatan Mataram
- Kecamatan Cakranegara
- Lokasi Usaha Sarang Burung Walet (Eksisting)
- Rencana Kawasan Budaya Burung Walet (I)
- Rencana Kawasan Budaya Burung Walet (II)



Skala  
1 : 1500000  
No. Gambar  
4.4.  
No. Halaman  
144

SUMBER  
DINAS PENDAPATAN & DINAS PERTANIAN  
KOTA MATARAM



#### **4.1.2.2. Identifikasi Besaran Potensi Aktual Retribusi Daerah di Kota Mataram**

##### **a) Besaran potensi aktual Retribusi Jasa Atas Pekerjaan**

Retribusi Jasa Atas Pekerjaan adalah Retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan jasa oleh pemerintah berupa pemberian pekerjaan oleh pemerintah Kota Mataram kepada pengusaha/rekanan yang sumber dananya berasal dari APBD Kota Mataram. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai kontrak kerja paket pekerjaan yang diberikan.

Dikecualikan dari obyek retribusi ini adalah (a) jenis pekerjaan proyek-proyek pemerintah yang dibiayai dari dana bantuan luar negeri (*loan*); (b) jenis pekerjaan proyek-proyek pemerintah dan padat karya yang tidak dilaksanakan oleh pihak ketiga (rekanan); (c) pengadaan barang dan jasa yang tidak dilaksanakan oleh pihak ketiga (rekanan).

Besarnya tarif Retribusi Jasa Atas Pekerjaan direncanakan sebesar 1,5% dari *real cost* yang dikeluarkan untuk penyediaan jasa pemborongan, penyediaan barang/jasa atau penyediaan jasa konsultasi oleh pengusaha/rekanan. Besaran tarif ini didasarkan oleh suatu hal yang sudah menjadi rahasia umum bahwa hampir setiap pengusaha/rekanan yang mendapatkan suatu proyek pemerintah biasanya membayar *fee* tidak resmi kepada oknum tertentu berkisar antara 1% - 2%, dan sekali lagi ini sudah menjadi kebiasaan, jika tidak ada *fee* dan uang muka, kontraktor tidak dapat proyek. Dari besaran *fee* tidak resmi ini diambil angka rata-ratanya sehingga diperoleh besaran 1,5%. Selain atas dasar pertimbangan tersebut di atas, besaran tarif retribusi sebesar 1,5% ini juga berdasarkan perbandingan dengan Kabupaten Lombok Barat yang telah menerapkan Retribusi Jasa Atas Pekerjaan berdasarkan Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 29 Tahun 2001,



dimana didalam perda tersebut, khususnya pada Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa “besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebesar 1,5%”. Tujuan dari dikenakannya Retribusi Jasa Atas Pekerjaan ini adalah untuk mencegah praktek pungutan yang tidak memiliki dasar hukum sehingga pungutan dari proyek APBD menjadi legal.

Untuk menghitung perkiraan besaran potensi aktual dari Retribusi Jasa Atas Pekerjaan ini, diperlukan data jumlah dan nilai proyek-proyek pemerintah yang dibiayai dari APBD. Tetapi berhubung adanya kendala teknis dan birokrasi dilapangan dalam mengumpulkan data dimaksud, maka untuk memberikan gambaran mengenai potensi retribusi ini, kiranya dapat dilakukan dengan berbagai asumsi. Untuk mengetahui nilai proyek-proyek pemerintah Kota Mataram tahun 2002, digunakan besaran Anggaran Belanja Pembangunan, dengan asumsi bahwa seluruh Anggaran Belanja Pembangunan digunakan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah.

Anggaran Belanja Pembangunan Kota Mataram Tahun Anggaran 2002 adalah sebesar Rp. 63.076.031.506,- yang terbagi kedalam 19 sektor dan dialokasikan pada 114 proyek (Nota Perhitungan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2002), sehingga besaran potensi aktual Retribusi Jasa Atas Pekerjaan adalah sebesar  $\text{Rp. } 63.076.031.506 \times 1,5\% = \text{Rp. } 946.140.472,-$  (sembilan ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah). Bila dilihat data perkembangan Anggaran Belanja Pembangunan Kota Mataram dari Tahun Anggaran 1998/1999 sampai dengan Tahun Anggaran 2002 seperti yang ditunjukkan pada Tabel I.2. dan Gambar I.1. terlihat adanya tren yang meningkat setiap tahunnya, sehingga apabila diasumsikan bahwa kondisi

seperti ini akan terus berlanjut karena kondisi perekonomian Indonesia secara makro relatif stabil, maka jumlah Anggaran Belanja Pembangunan Kota Mataram Tahun Anggaran 2003 dan seterusnya juga akan terus mengalami peningkatan. Meningkatnya jumlah Anggaran Belanja Pembangunan tentunya akan meningkatkan penerimaan dari Retribusi Jasa Atas Pekerjaan.

**b) Besaran Potensi Aktual Retribusi Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor (Cidomo)**



GAMBAR 4.5.  
WUJUD ALAT ANGKUTAN  
TRADISIONAL CIDOMO

Sumber : *Survai Primer*, 2003.

Retribusi Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor (Cidomo) adalah retribusi yang dipungut atas setiap pelayanan pengujian kendaraan tidak bermotor (angkutan tradisional Cidomo).

Populasi angkutan tradisional Cidomo di Kota

Mataram menurut Data Pokok Pembangunan

Kota Mataram (2001 : 102) adalah sebanyak 2.098 buah. Bila untuk pengujian angkutan cidomo ini yang dilakukan satu tahun sekali ditarik retribusi sebesar Rp. 15.000/cidomo maka diperoleh penerimaan sebesar  $2.098 \times \text{Rp } 15.000 = \text{Rp } 31.470.000,-$  (tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dalam kaitannya dengan penetapan tarif ini, Devas (1989 : 95) menyatakan bahwa penetapan tarif retribusi yang logis haruslah didasarkan pada biaya tambahan (*marginal cost*), artinya tarif retribusi yang dibebankan kepada penerima jasa pelayanan haruslah sesuai dengan jasa pelayanan yang diterimanya. Besaran tarif retribusi sebesar Rp.15.000/cidomo didasarkan pada besarnya biaya penyediaan jasa pengujian tersebut oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Mataram, ditambah sejumlah *marginal cost* tertentu dalam hal ini adalah

keuntungan yang diharapkan oleh pemerintah selaku penyedia layanan. Mengingat sangat sulitnya melakukan perhitungan yang rinci mengenai besaran masing-masing komponen biaya yang membentuk tarif retribusi pengujian kendaraan tidak bermotor (cidomo) ini, maka cara yang dilakukan adalah dengan mengadopsi besaran tarif yang diberlakukan di Kabupaten Lombok Barat, yaitu sebesar Rp. 15.000/cidomo/tahun.

**c) Besaran Potensi Aktual Retribusi Pengujian Kualitas Limbah Cair**

Kegiatan usaha yang berpotensi menghasilkan limbah cair di Kota Mataram, khususnya dari kegiatan industri, jumlahnya masih relatif kecil, karena sebagian besar industri yang ada merupakan industri kecil / industri rumah tangga dan kegiatan usahanya tersebar pada kawasan-kawasan permukiman penduduk.

Menurut peta Tata Guna Lahan Tahun 2002, luas lahan yang digunakan untuk industri di Kota Mataram adalah seluas 91,870 hektar atau 1,50% dari luas wilayah Kota Mataram (Data Pokok Pembangunan Kota Mataram, 2002 : 31). Masih kecilnya persentase penggunaan lahan untuk kegiatan industri menunjukkan bahwa saat ini kegiatan industri belum mendominasi kegiatan usaha di Kota Mataram. Hal ini ditunjukkan pula oleh sumbangan sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kota Mataram tahun 2002 yang hanya sebesar 8,76% (PDRB Kota Mataram, 2002). Namun demikian bila dilihat laju pertumbuhan sektor industri dari tahun ke tahun, menunjukkan adanya trend yang positif. Pada tahun 2001 pertumbuhan sektor industri hanya sebesar 0,39% dan pada tahun 2002 meningkat menjadi 5,66%.

Uraian di atas menunjukkan bahwa saat ini sektor industri belum memberikan sumbangan yang berarti bagi perekonomian Kota Mataram, namun

beberapa tahun kedepan secara perlahan tapi pasti, sektor industri akan semakin mendominasi kegiatan perekonomian Kota Mataram.

Kaitan penjelasan di atas dengan Retribusi Pengujian Kualitas Limbah Cair adalah bahwa pada kondisi Kota Mataram saat ini, dimana jumlah kegiatan industri yang berpotensi menghasilkan limbah cair masih sedikit, namun dimasa mendatang, seiring dengan pertumbuhan sektor industri, maka jumlah kegiatan industri yang berpotensi menghasilkan limbah cair maupun volume dari limbah cair yang dihasilkan juga akan bertambah banyak. Limbah cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri umumnya mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya dan merusak lingkungan. Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dalam kaitannya dengan pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yaitu suatu pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan mereka (Mitchell, dalam Syaharuddin Yasin 2002) maka diperlukan pengawasan yang ketat serta aturan hukum terhadap limbah cair tersebut yang umumnya di buang ke perairan umum (sungai / laut) maupun ke dalam tanah melalui sumur resapan. Retribusi ini dipungut untuk menutupi biaya pengujian kualitas limbah cair tersebut.

Jumlah industri yang berpotensi menghasilkan limbah cair yang mengandung bahan kimia di Kota Mataram menurut informasi dari Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Kota Mataram adalah sebanyak 6 (enam) perusahaan, yang terdiri dari tiga perusahaan tenun ikat, masing-masing satu perusahaan pencelupan benang, perusahaan kecap dan perusahaan pengolahan minyak kelapa.

Besaran tarif Retribusi Pengujian Kualitas Limbah Cair direncanakan sebesar Rp 150.000 setiap kali pengujian terhadap sampel limbah cair. Tarif ini ditentukan berdasarkan biaya pengujian di laboratorium milik Dinas Kesehatan Propinsi NTB sebesar Rp 100.000 (untuk sementara pengujian kualitas limbah cair akan menggunakan fasilitas pihak ketiga, yaitu laboratorium milik Dinas Kesehatan Propinsi NTB karena Kota Mataram belum memiliki fasilitas yang diperlukan), ditambah *marginal cost* yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Mataram sebesar Rp 50.000. Sehingga perkiraan besaran penerimaan dari enam buah perusahaan tersebut adalah sebesar  $\text{Rp } 150.000 \times 6 \text{ perusahaan} = \text{Rp } 900.000,-$ . Setiap perusahaan industri tersebut diwajibkan melakukan pengujian kualitas limbahnya setiap enam bulan sekali (dua kali setahun). Hal ini dimaksudkan apabila dalam waktu enam bulan tersebut ternyata kualitas limbah yang dihasilkan tidak memenuhi standar baku mutu lingkungan, maka pembuangan limbahnya dapat segera dihentikan, sehingga kerusakan lingkungan dapat ditekan seminimal mungkin. Oleh karena itu besaran potensi Retribusi Pengujian Kualitas Limbah Cair setahun adalah  $\text{Rp } 900.000 \times 2 = \text{Rp } 1.800.000,-$  (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

**d) Besaran Potensi Aktual Retribusi Izin Usaha Pariwisata**

Kota Mataram dilihat dari kondisi geografisnya mempunyai posisi yang sangat strategis karena terletak berdekatan dengan salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia yaitu Bali. Kota Mataram juga merupakan pintu gerbang utama bagi wisatawan yang mengunjungi Nusa Tenggara Barat khususnya Pulau Lombok melalui pelabuhan udara Selaparang ataupun melalui pelabuhan Lembar. Kedua kondisi tersebut memberikan keuntungan bagi Kota Mataram dalam hal

pengembangan kepariwisataan termasuk usaha-usaha pendukungnya seperti hotel, rumah makan, Biro Perjalanan Wisata dan sejenisnya.

Perkembangan kepariwisataan beserta usaha pendukungnya tersebut merupakan potensi yang perlu digali sebagai upaya meningkatkan penerimaan daerah sejalan dengan adanya pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk kewenangan dibidang kepariwisataan. Di dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kota Mataram Sebagai Daerah Otonom disebutkan ada 22 buah kewenangan Kota Mataram dibidang kepariwisataan, beberapa diantaranya adalah kewenangan pemberian izin hotel berbintang, pemberian izin hotel non bintang, rumah makan dan pemberian izin Biro Perjalanan Wisata. Sebelum otonomi daerah, pemberian izin hotel berbintang merupakan kewenangan pemerintah propinsi.

Izin Usaha Pariwisata direncanakan berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus diperpanjang setiap tahun. Masa berlaku dan periode waktu perpanjangan izin ini adalah hal yang umum berlaku pada semua jenis perizinan yang selama ini ada. Pada tahun pertama pemberlakuan Retribusi Izin Usaha Pariwisata ini, nantinya semua obyek retribusi baik yang sudah lama berdiri maupun yang baru, diharuskan mengajukan permohonan izin baru (melakukan daftar ulang). Untuk lebih jelasnya mengenai rincian potensi Retribusi Izin Usaha Pariwisata dapat dilihat pada Tabel IV.10.

**TABEL IV.10.**  
**POTENSI AKTUAL RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA**  
**DI KOTA MATARAM**

JENIS USAHA PARIWISATA	TARIF RETRIBUSI		POPULASI	PERKIRAAN PENERIMAAN	
	IZIN BARU	PERPANJANGAN		IZIN BARU	PERPANJANGAN
Hotel Bintang 3	150.000 /kamar	75.000 /kamar	140 kamar	21.000.000	10.500.000
Hotel Bintang 1	100.000 /kamar	50.000 /kamar	289 kamar	28.900.000	14.450.000
Hotel Melati 3	50.000 /kamar	25.000 /kamar	433 kamar	21.650.000	10.825.000
Hotel Melati 2	40.000 /kamar	20.000 /kamar	426 kamar	17.040.000	8.520.000
Hotel Melati 1	30.000 /kamar	15.000 /kamar	148 kamar	4.440.000	2.220.000
Pondok Wisata / Homestay	200.000 /unit	100.000 /unit	9 unit	1.800.000	900.000
Restauran	50.000 /meja	25.000 /meja	140 meja	7.000.000	3.500.000
Rumah Makan	20.000 /meja	10.000 /meja	1239 meja	24.780.000	12.390.000
Jasa Boga / Catering	250.000	125.000	20	5.000.000	2.500.000
Arena Latihan Golf	2.000.000	1.000.000	1	2.000.000	1.000.000
Kolam Memancing	75.000	37.500	20	1.500.000	750.000
Arena Bola Sodik (Bilyard)	35.000 /meja	17.500 /meja	18 meja	630.000	315.000
Gelombang Renang	250.000	125.000	2	500.000	250.000
Salon Kecantikan / Pangkas Rambut	15.000 /kursi	7.500 /kursi	85 kursi	1.275.000	637.500
Pusat Olah Raga / Fitness Centre	750.000	375.000	9	6.750.000	3.375.000
Jasa Biro Perjalanan Wisata	250.000	125.000	46	11.500.000	5.750.000
Jasa Pramuwisata	20.000	10.000	35	700.000	350.000
Kamoka	250.000	125.000	7	1.750.000	875.000
<b>JUMLAH</b>				<b>158.215.000</b>	<b>79.107.500</b>

*Sumber : Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Mataram, 2003*

Untuk keperluan studi ini, penentuan besaran tarif retribusi, baik terhadap izin baru maupun perpanjangan, mengikuti besaran tarif yang diterapkan oleh Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan penentuan tarif sebenarnya apabila retribusi ini akan diterapkan di Kota Mataram, tentunya akan melalui pembahasan yang mendalam antara Pemerintah Kota Mataram dengan anggota DPRD Kota Mataram. Dari Tabel IV.10. terlihat bahwa pada tahun pertama pemberlakuan Retribusi Izin Usaha Pariwisata ini, direncanakan akan diperoleh penerimaan dari permohonan izin baru sebesar Rp 158.215.000,- (seratus lima puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah) sedangkan pada tahun berikutnya penerimaan akan sebesar penerimaan dari perpanjangan izin ditambah dengan penerimaan dari permohonan izin usaha pariwisata baru. Besaran perkiraan penerimaan diperoleh dari hasil perkalian antara besaran tarif retribusi dengan jumlah populasi usaha pariwisata yang ada.

Prospek pertumbuhan dari retribusi ini tentunya sangat tergantung dari perkembangan kepariwisataan Kota Mataram, serta kepariwisataan Propinsi NTB

secara umum. Sementara itu perkembangan sektor pariwisata sangat tergantung pada kondisi keamanan, baik skala lokal, regional maupun nasional.

Sebaran potensi Retribusi Izin Usaha Pariwisata di wilayah administratif Kota Mataram dapat dilihat pada Gambar 4.6.





PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

## T E S I S

### EKSTENSIFIKASI

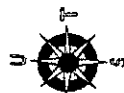
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN  
PEMBANGUNAN KOTA MATARAM

### GAMBAR

### SEBARAN LOKASI POTENSI RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA DI KOTA MATARAM

#### KETERANGAN :

	Batas Kota Mataram		Arena Lahan Golf
	Batas Kecamatan		Restoran/RA
	Batas Kelurahan		Kalam Penatanganan Ikan
	Jalan Utama		Arena Bilyard
	Jalan Antar Sub Wilayah		Belanggang Rengas
	Jalan Amir Lingkaran		Fitness Center
	Jalan Lingkaran		Biro Perjalanan Wisata
	Kecamatan Ampenan		Karaoke
	Kecamatan Mataram		Salon Kecantikan
	Kecamatan Cakranegara		
	Hotel non Bintang (Melati)		
	Hotel Bintang 1		
	Hotel Bintang 3		



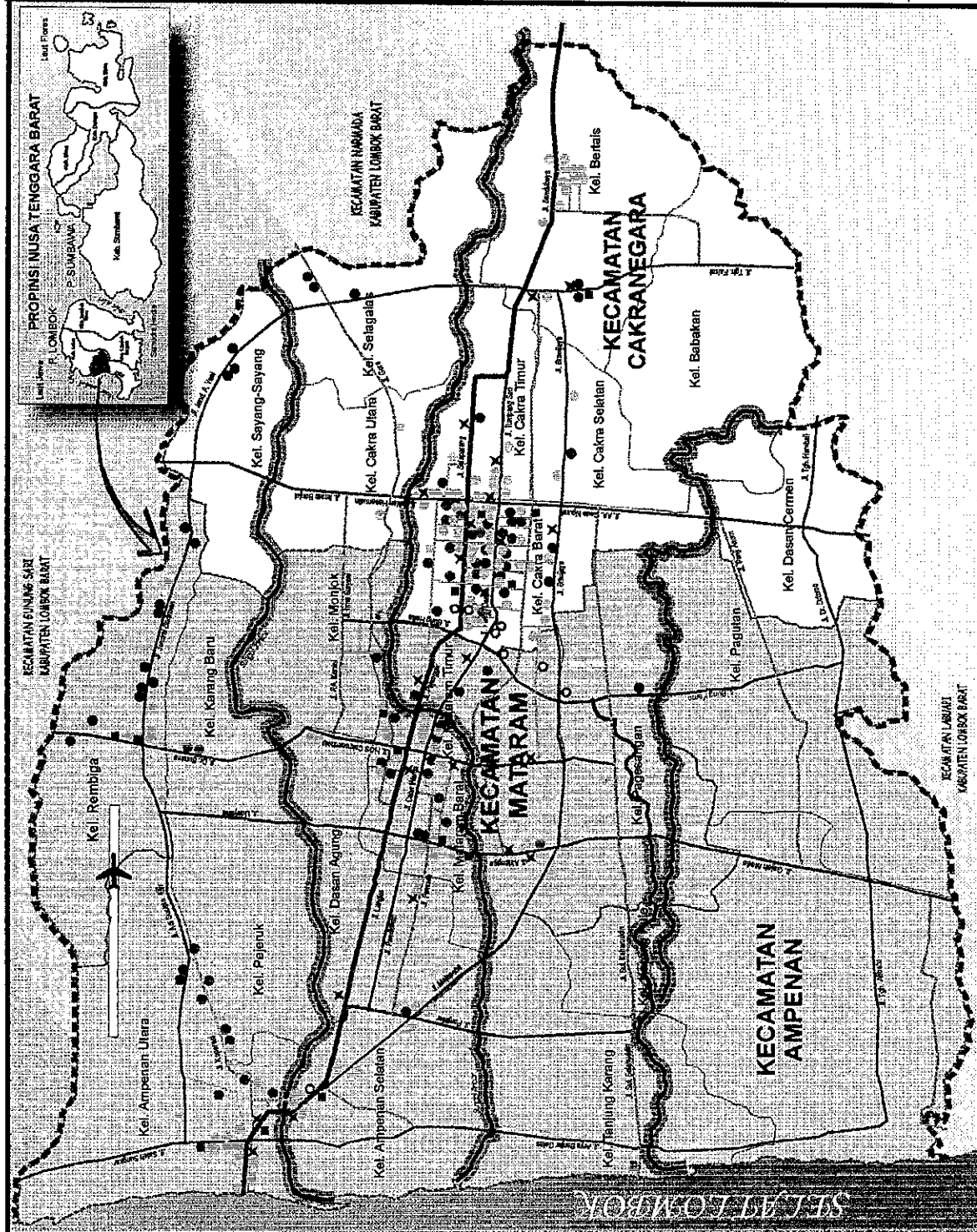
Skala  
1 : 1.500.000

No. Gambar  
4.6.

No. Halaman  
154

#### SUMBER

DINAS PARIWISATA, SENI & BUDAYA  
KOTA MATARAM



**e) Besaran Potensi Aktual Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta**

Seiring dengan peningkatan pendapatan penduduk, maka tuntutan akan ketersediaan pelayanan kesehatan yang lebih baik (dalam hal kualitas pelayanan dan fleksibilitas waktu pelayanan) juga meningkat. Sementara itu kemampuan pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah melalui rumah sakit milik pemerintah dan puskesmas masih sangat terbatas. Hal ini memberikan peluang bagi pihak swasta untuk ikut berperan dalam penyediaan pelayanan kesehatan melalui pendirian rumah sakit swasta, klinik, rumah bersalin, praktek dokter dan sebagainya.

Selama ini usaha pelayanan kesehatan swasta tersebut belum memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD khususnya dari penarikan retribusi, untuk itu diusulkan untuk diberlakukan Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta. Izin Pelayanan Kesehatan Swasta ini direncanakan berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus diperpanjang setiap tahun. Pada tahun pertama pemberlakuan Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta ini, nantinya semua obyek retribusi baik yang sudah lama berdiri maupun yang baru, diharuskan mengajukan permohonan izin baru (melakukan daftar ulang). Untuk lebih jelasnya mengenai rincian potensi Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta dapat dilihat pada Tabel IV.11.

**TABEL IV.11.**  
**POTENSI AKTUAL RETRIBUSI IZIN PELAYANAN**  
**KESEHATAN SWASTA DI KOTA MATARAM**

NO.	JENIS PELAYANAN KESEHATAN SWASTA	TARIF RETRIBUSI (Rp)		POPULASI	PERKIRAAN PENERIMAAN (Rp)	
		IZIN BARU	PERPAN-JANGAN		IZIN BARU	PERPAN-JANGAN
1	Praktek Perorangan Dokter Umum	50.000	37.500	89	4.450.000	3.337.500
2	Praktek Perorangan Dokter Gigi	100.000	75.000	24	2.400.000	1.800.000
3	Praktek Perorangan Dokter Spesialis	100.000	75.000	29	2.900.000	2.175.000
4	Praktek Kelompok Dokter Umum	100.000	75.000	3	300.000	225.000
5	Praktek Kelompok Dokter Gigi	150.000	112.500	-	-	-
6	Praktek Kelompok Dokter Spesialis	150.000	112.500	2	300.000	225.000
7	Praktek Bidan	25.000	18.750	32	800.000	600.000
8	Praktek Tukang Gigi	25.000	18.750	5	125.000	93.750
9	Surat Izin Kerja Asisten Apoteker	30.000	22.500	50	1.500.000	1.125.000
10	Optikal	125.000	93.750	9	1.125.000	843.750
11	Rumah Bersalin	175.000	131.250	4	700.000	525.000
12	Rumah Sakit Umum	175.000	131.250	2	350.000	262.500
13	Laboratorium Klinik	150.000	112.500	15	2.250.000	1.687.500
14	Pengobatan Tradisional	20.000	15.000	8	160.000	120.000
JUMLAH					17.360.000	13.020.000

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Mataram, 2003

Seperti halnya dalam penentuan besaran tarif Retribusi Izin Usaha Pariwisata, penentuan tarif Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan swasta inipun ditentukan dengan cara yang sama. Pada Tabel IV.11. terlihat bahwa pada tahun pertama pemberlakuan Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta ini, direncanakan akan diperoleh penerimaan dari permohonan izin baru (daftar ulang) sebesar Rp 17.360.000,- (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Besaran perkiraan penerimaan diperoleh dari hasil perkalian antara besaran tarif retribusi dengan jumlah populasi usaha pelayanan kesehatan swasta yang ada.

Untuk mengetahui sebaran potensi Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta ini secara fisik spasial di wilayah administratif Kota Mataram, dapat dilihat pada Gambar 4.7.



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

## T E S I S

### EKSTENSIFIKASI

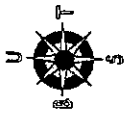
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN  
PEMBANGUNAN KOTA MATARAM

## GAMBAR

SEBARAN LOKASI  
POTENSI RETRIBUSI IZIN  
PELAYANAN KESEHATAN SWASTA  
DI KOTA MATARAM

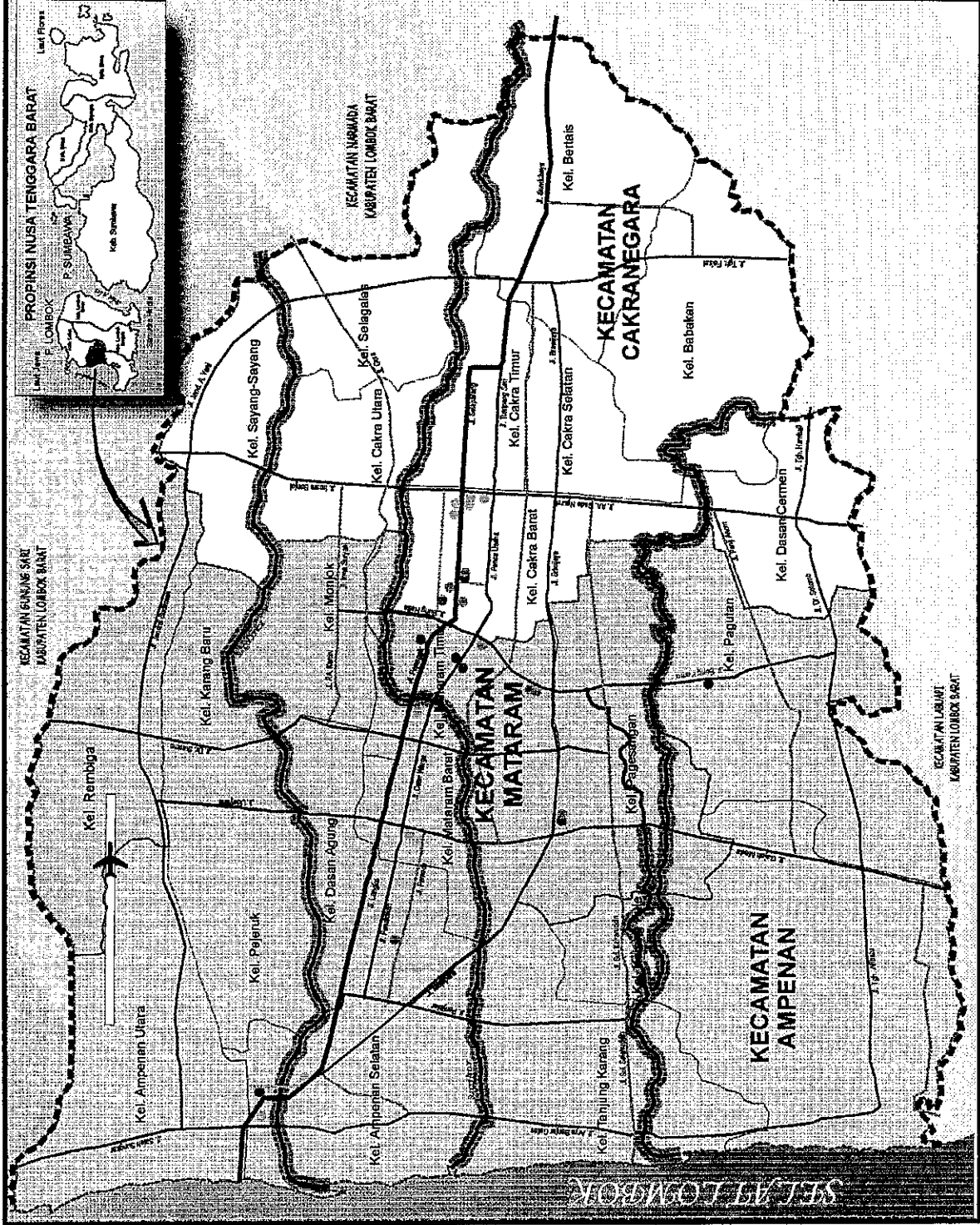
### KETERANGAN :

	Batas Kota Mataram		Rumah Sakit Umum
	Batas Kecamatan		Lab. Klinik
	Batas Kelurahan		Optik
	Jalan Utama		
	Jalan Arter Sub Wilayah		
	Jalan Arter Lingkungan		
	Jalan Lingkungan		
	Kecamatan Ampenan		
	Kecamatan Mataram		
	Kecamatan Cakranegara		
	Praktek Gigi Dr Umum		
	Praktek Gigi Dr Spesialis		
	Rumah Bersalin		



Skala  
1 : 1.500.000  
No. Gambar  
4.7.  
No. Halaman  
157

SUMBER  
DINAS KESEHATAN  
KOTA MATARAM



**f) Besaran Potensi Aktual Retribusi Izin Berpangkal Ojek**

Jumlah populasi ojek di Kota Mataram sesuai hasil pendataan Dinas Perhubungan Kota Mataram Tahun 2001 adalah sebanyak 311 kendaraan, tarif retribusi Rp 25.000 per kendaraan per tahun, sehingga perkiraan potensi penerimaan Retribusi Izin Berpangkal Ojek per tahunnya adalah Rp. 7.775.000,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Penentuan besaran tarif retribusi sebesar Rp 25.000 ini diperoleh dari penjumlahan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, dalam hal ini Dinas Perhubungan dalam penyediaan perizinan tersebut, ditambah dengan sejumlah *marginal cost* yang diharapkan. Namun kenyataannya, yang biasa terjadi di lapangan bukan hanya dua faktor ini saja yang membentuk besaran tarif suatu retribusi, tetapi juga faktor politik. Sehingga besaran tarif retribusi dapat lebih rendah dari total biaya, dapat juga lebih tinggi dari total biaya penyediaan perizinan tersebut. Mengingat rumitnya proses penentuan besaran tarif riil yang akan diterapkan tersebut, serta keterbatasan data yang diperoleh, maka untuk keperluan studi ini, penentuan besaran tarif Retribusi Izin Berpangkal Ojek dilakukan dengan mengadopsi besaran tarif yang berlaku di daerah lain, dalam hal ini Kabupaten Lombok Barat, dengan asumsi bahwa kondisi Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat dalam berbagai hal adalah sama. Karena berada di propinsi yang sama, dan merupakan daerah yang berbatasan. Bahkan Kota Mataram sendiri merupakan hasil pemecahan Kabupaten Lombok Barat.

**g) Besaran Potensi Aktual Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair**

Seperti halnya perhitungan besaran potensi aktual retribusi lainnya yang telah diuraikan di atas, besaran potensi aktual Retribusi Izin Pembuangan Limbah

Cair inipun diperoleh dengan perhitungan yang sama, yaitu hasil perkalian antara tarif retribusi dengan perkiraan jumlah perusahaan yang direncanakan menjadi obyek dari retribusi ini.

Besaran tarif Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair direncanakan sebesar Rp 100.000 per tahun (izin berlaku selama satu tahun). Besaran tarif ini terbentuk dari komponen-komponen biaya sebagai berikut : biaya penyediaan perizinan Rp 50.000 (terdiri dari biaya administrasi dan biaya perjalanan dinas), biaya penanggulangan dampak negatif dari pemberian izin tersebut terhadap lingkungan Rp 30.000, dan marginal cost sebesar Rp 20.000,- sehingga total biaya penyediaan perizinan ini menjadi Rp 100.000,-. Penentuan besaran masing-masing biaya tersebut berdasarkan perhitungan kasar, tanpa didukung oleh data yang akurat, karena keterbatasan data yang diperoleh serta mengingat begitu rumitnya proses perhitungan tarif retribusi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk faktor politik.

Obyek Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair ini lebih luas dari obyek Retribusi Pengujian Kualitas Limbah Cair, karena meliputi seluruh jenis usaha yang menghasilkan limbah cair, baik yang mengandung bahan kimia maupun tidak. Jumlah kegiatan usaha yang menghasilkan limbah cair di Kota Mataram menurut data yang diperoleh dari Bagian Lingkungan Hidup Kota Mataram adalah sebanyak 657 perusahaan, terdiri dari perusahaan industri 424 buah, hotel 52 buah, rumah makan 160 buah, rumah bersalin 4 buah, rumah sakit umum 2 buah, dan laboratorium klinik 15 buah. Sehingga perkiraan besaran potensi aktual Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair per tahun adalah  $Rp\ 100.000 \times 657 = Rp\ 65.700.000,-$  (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

**h) Besaran Potensi Aktual Retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah**

Jumlah perusahaan yang menggunakan air bawah tanah di Kota Mataram cukup banyak, hal ini dikarenakan masih terbatasnya kemampuan PDAM dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi kegiatan usaha yang membutuhkan air bersih dalam jumlah besar. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah perlu diatur dan dibatasi penggunaannya dengan memperketat perizinannya, mengingat pengambilan air bawah tanah yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, yaitu terjadinya intrusi air laut ke daratan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Kota Mataram (hasil pendataan tahun 2000 pada saat Pajak Air Bawah Tanah masih menjadi Pajak Daerah Tingkat II), menunjukkan bahwa jumlah perusahaan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah adalah sebanyak 411 perusahaan, terdiri dari perusahaan industri 311 buah, hotel 41 buah, rumah makan 48 buah, rumah bersalin 2 buah, rumah sakit umum 2 buah, perusahaan Air Minum Dalam Kemasan 1 buah, dan bengkel (pencucian mobil dan motor) 6 buah.

Besaran tarif Retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah direncanakan sebesar Rp 100.000,- dengan komponen biaya yang diasumsikan sama dengan Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair, karena kedua jenis kegiatan ini sama-sama dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah ditetapkan berlaku selama satu tahun.

Dengan besaran tarif perizinan sebesar Rp 100.000 dan jumlah subyek retribusi sebanyak 411 perusahaan, maka besaran potensi Retribusi Izin

Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah diperkirakan sebesar Rp  $100.000 \times 411 = \text{Rp } 41.100.000,-$  (empat puluh satu juta seratus ribu rupiah).

**i) Besaran Potensi Aktual Retribusi Izin Usaha Peternakan**

Pengembangan peternakan bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak, meningkatkan pendapatan peternak, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat khususnya di bidang konsumsi daging, telur dan susu serta meningkatkan penyediaan gizi hewani.

Berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kota Mataram tahun 2002, peruntukan lahan untuk usaha peternakan tidak ada, demikian pula halnya dengan Peta Penggunaan Tanah Tahun 2002 pada skala 1 : 10.000, tidak dijumpai adanya penggunaan tanah untuk usaha peternakan.

Usaha peternakan di Kota Mataram diusahakan oleh rakyat (masyarakat) secara kecil-kecilan dan tersebar di permukiman penduduk. Jenis ternak yang diusahakan seperti kuda, kerbau, kambing, domba, babi, ayam buras dan itik. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis dan jumlah populasi ternak serta jumlah peternak di Kota Mataram dapat dilihat pada Tabel IV.12.



**TABEL IV.12.**  
**JENIS DAN JUMLAH POPULASI TERNAK SERTA**  
**JUMLAH USAHA PETERNAKAN DI KOTA MATARAM TAHUN 2000**

JENIS TERNAK		KECAMATAN			JUMLAH TERNAK (EKOR)	JUMLAH USAHA PETERNAKAN
		Ampenan	Mataram	Cakranegara		
TERNAK BESAR	KERBAU	103	108	16	227	45
	SAPI	913	364	275	1.552	310
	KUDA	1.705	511	453	2.669	1.335
TERNAK KECIL	KAMBING	994	628	233	1.855	186
	DOMBA	329	120	-	449	45
	BABI	534	1.483	2.229	4.246	425
	KELINCI	-	9	218	227	15
TERNAK UNGGAS	AYAM BURAS	9.231	30.332	19.242	58.805	29
	AYAM RAS	14.134	3.202	60	17.396	3
	ITIK / ANGSA	3.960	1.444	459	5.863	29
	ENTOK	2.015	2.137	1.681	5.833	23
	MERPATI	6.896	3.728	1.436	12.060	60
JUMLAH						2.506

*Sumber : Data Pokok Pembangunan Kota Mataram, 2001*

Pada Tabel IV.12. terlihat bahwa jumlah usaha peternakan di Kota Mataram adalah sebanyak 2.506 buah.

Besaran tarif Retribusi Izin Usaha Peternakan direncanakan sebesar Rp 15.000,- per-izin/tahun. Penentuan besaran tarif ini didasari oleh pertimbangan bahwa sebagian besar pengusaha peternakan adalah pengusaha perorangan, walaupun ada juga yang berbentuk kelompok, dan sebagian besar bukan merupakan usaha pokok, namun hanya sebagai usaha sampingan. Seperti misalnya usaha peternakan kuda, pada Tabel IV.12. terlihat berjumlah 1.335 buah, kuda tersebut sebenarnya ditenakkan bukan untuk dijual, baik daging maupun susunya, tetapi digunakan sebagai penarik cidomo (kendaraan tidak bermotor; angkutan tradisional khas Kota Mataram). Retribusi Izin Usaha Peternakan direncanakan berlaku selama satu tahun.

Besaran potensi aktual Retribusi Izin Usaha Peternakan di Kota Mataram, adalah sebesar  $\text{Rp } 15.000 \times 2.506 = \text{Rp } 37.590.000,-$  (tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) per tahun.

**j) Besaran Potensi Aktual Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**

Penjualan minuman beralkohol hanya diizinkan di toko-toko yang termasuk kategori pasar modern, seperti pasar swalayan dan mall serta di hotel berbintang. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Mataram yang sangat membatasi peredaran minuman beralkohol guna mencegah terjadinya berbagai tindak kejahatan maupun permasalahan sosial lainnya yang disebabkan baik secara langsung maupun tidak langsung akibat mengkonsumsi minuman beralkohol.

Populasi tempat penjualan minuman beralkohol di Kota Mataram yang tercatat di Bagian Ekonomi Setda Kota Mataram, sebanyak 11 buah. Besaran tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol direncanakan sebesar Rp. 50.000 per tahun. Besaran tarif ini terbentuk dari komponen biaya sebagai berikut : biaya administrasi Rp 10.000, biaya pungut Rp 5.000 serta *marginal cost* sebesar Rp 35.000. Dari komponen pembentuk tarif retribusi tersebut, terlihat bahwa komponen biaya yang terbesar adalah *marginal cost*, besarnya *marginal cost* ini dimaksudkan untuk membuat tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol menjadi mahal, sehingga akan mengurangi niat pengusaha untuk berusaha dibidang ini, selain itu juga untuk meningkatkan pendapatan Kota Mataram dari jenis retribusi ini. Atas dasar penjelasan di atas, maka perkiraan besaran potensi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah

sebesar  $11 \times \text{Rp } 50.000 = \text{Rp } 550.000$  (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun.

#### 4.1.2.3. Rekapitulasi Hasil Identifikasi Besaran Potensi Aktual Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Mataram

Melalui proses identifikasi besaran potensi aktual pajak daerah dan retribusi daerah yang telah dilakukan di atas, dapat diketahui besaran potensi aktual masing-masing jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas atas hasil identifikasi tersebut, maka pada Tabel IV.13. disajikan keseluruhan hasil identifikasi yang telah dilakukan, baik terhadap jenis-jenis pajak daerah maupun retribusi daerah baru yang diusulkan.

**TABEL IV.13.**  
**REKAPITULASI HASIL IDENTIFIKASI BESARAN POTENSI AKTUAL**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**BARU DI KOTA MATARAM**

NO.	JENIS PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH	BESARAN POTENSI AKTUAL (Rp)
	<b>Pajak Daerah</b>	
1	Pajak Parkir	140.688.000
2	Pajak Sarang Burung Walet	126.000.000
	<b>JML. POTENSI PAJAK DAERAH</b>	<b>266.688.000</b>
	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	
1	Retribusi Jasa Atas Pekerjaan	946.140.472
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor (Cidomo)	31.470.000
3	Retribusi Pengujian Kualitas Limbah	1.800.000
	<b>JML. POTENSI RETRIBUSI JASA UMUM</b>	<b>979.410.472</b>
	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	
1	Retribusi Izin Usaha Pariwisata	158.215.000
2	Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta	17.360.000
3	Retribusi Izin Berpangkal Ojek	7.775.000
4	Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair	65.700.000
5	Retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	41.100.000
6	Retribusi Izin Usaha Peternakan	37.590.000
7	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	550.000
	<b>JML. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU</b>	<b>328.290.000</b>
	<b>JML. POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI</b>	<b>1.574.388.472</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2003

Pada Tabel IV.13. terlihat bahwa yang memiliki potensi terbesar adalah Retribusi Jasa Atas Pekerjaan. Sedangkan yang potensinya terkecil adalah Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

#### **4.2. Analisis Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan Kota Mataram**

##### **4.2.1. Analisis Kelayakan Normatif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Mataram**

###### **4.2.1.1. Analisis Kelayakan Normatif Pajak Daerah**

Analisis ini digunakan untuk mengkaji kecocokan suatu usulan pajak daerah baru terhadap kriteria-kriteria Pajak Daerah sebagaimana yang terdapat pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu :

- (a) bersifat pajak dan bukan Retribusi;
- (b) objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- (c) objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- (d) objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak Pusat;
- (e) potensinya memadai;
- (f) tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- (g) memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
- (h) menjaga kelestarian lingkungan.

Untuk memperkuat kriteria yang ada, kiranya perlu ditambahkan kriteria:

- (i) Sudah diterapkan di daerah lain.

Penilaian dilakukan dengan pemberian skoring untuk setiap kriteria dengan tanda (✓) menyatakan bahwa pajak/retribusi tersebut memenuhi kriteria yang ada; tanda (✗) menyatakan bahwa pajak/retribusi tersebut tidak memenuhi kriteria.

Hasil dari penilaian, kemudian dikompilasi untuk melihat kesesuaian / kelayakan setiap usulan jenis Pajak Daerah dijadikan sebagai Pajak Daerah baru. Suatu Pajak Daerah dinyatakan sesuai / layak sebagai jenis Pajak baru apabila semua kriteria dapat terpenuhi.

Untuk lebih jelas mengenai kelayakan normatif usulan pajak daerah baru Kota Mataram, dapat dilihat pada Tabel IV.14.

**TABEL IV.14.**  
**ANALISIS SKORING KELAYAKAN NORMATIF**  
**PAJAK DAERAH BARU DI KOTA MATARAM**

No.	JENIS PAJAK DAERAH	Kriteria Pajak Daerah									Keterangan (layak/tdk.layak)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	
1.	Pajak Parkir	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Layak
2.	Pajak Sarang Burung Walet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Layak

*Sumber : Hasil Analisis, 2003.*

Keterangan :

✓ = sesuai dengan kriteria

✗ = tidak sesuai dengan kriteria

a, b, c, d, e, f, g, h = kriteria pajak daerah sesuai UU No. 34/2000

i = kriteria tambahan : Sudah diterapkan di daerah lain.

Berdasarkan hasil kaji kecocokan dengan kriteria pajak daerah sebagaimana yang terdapat pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ternyata semua usulan pajak yang ada memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan, sehingga dinyatakan layak.

#### **4.2.1.2. Analisis Kelayakan Normatif Retribusi Daerah**

Analisis yang sama digunakan juga untuk melakukan kaji kecocokan suatu usulan retribusi daerah terhadap kriteria-kriteria retribusi daerah. Mengingat retribusi daerah terdiri dari tiga golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu dan masing-masing golongan retribusi daerah tersebut mempunyai kriteria yang berbeda, maka kaji kecocokan terhadap kriteria masing-masing dilakukan secara terpisah untuk masing-masing golongan retribusi. Tetapi berhubung dari hasil identifikasi usulan retribusi daerah hanya diperoleh usulan atas dua golongan retribusi saja yaitu retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu, sedangkan untuk golongan retribusi jasa usaha tidak diperoleh usulan, maka dalam analisis inipun akan dilakukan terhadap dua golongan retribusi yang ada tersebut.

##### **a) Analisis Kelayakan Normatif Retribusi Jasa Umum**

Analisis ini melakukan kaji kecocokan antara usulan retribusi jasa umum dengan kriteria retribusi jasa umum sebagaimana yang terdapat pada Pasal 18 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk lebih jelas mengenai kelayakan normatif usulan retribusi jasa umum baru Kota Mataram, dapat dilihat pada Tabel IV.15.

**TABEL IV.15.**  
**ANALISIS SKORING KELAYAKAN NORMATIF**  
**RETRIBUSI JASA UMUM BARU DI KOTA MATARAM**

No.	JENIS RETRIBUSI JASA UMUM	Kriteria Retribusi Jasa Umum							Keterangan (layak/tdk.layak)
		a	b	c	d	e	f	g	i
1.	Retribusi Jasa Atas Pekerjaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Layak
2.	Retribusi Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor (Cidomo)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Layak
3.	Retribusi Pengujian Kualitas Limbah Cair	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	Tidak Layak

*Sumber : Hasil Analisis, 2003.*

Keterangan :

✓ = sesuai dengan kriteria

✗ = tidak sesuai dengan kriteria

a, b, c, d, e, f, g = kriteria retribusi jasa umum sesuai UU No. 34/2000

i = kriteria tambahan : Sudah diterapkan di daerah lain.

Dari analisis normatif yang ditampilkan pada Tabel IV.15. di atas, terlihat bahwa hanya usulan Retribusi Pengujian Kualitas Limbah Cair yang tidak memenuhi kelayakan, yaitu tidak memenuhi kriteria (f) “retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien...” hal ini terlihat dari hasil analisis rasio efisiensi yang menunjukkan hasil 2,48 (>1).

#### **b) Analisis Kelayakan Normatif Retribusi Perizinan Tertentu**

Analisis ini melakukan kaji kecocokan antara usulan retribusi jasa umum dengan kriteria retribusi jasa umum sebagaimana yang terdapat pada Pasal 18 ayat (3) huruf (c) Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk lebih jelas mengenai kelayakan normatif usulan retribusi perizinan tertentu Kota Mataram, dapat dilihat pada Tabel IV.16.

**TABEL IV.16.**  
**ANALISIS SKORING KELAYAKAN NORMATIF**  
**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI KOTA MATARAM**

No.	JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu				Keterangan (layak/tdk.layak)
		a	b	c	i	
1.	Retribusi Izin Usaha Pariwisata	✓	✓	✓	✓	Layak
2.	Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta	✓	✓	✓	✓	Layak
3.	Retribusi Izin Berpangkal Ojek	✓	✓	✓	✓	Layak
4.	Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair	✓	✓	✓	✓	Layak
5.	Retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	✓	✓	✓	✓	Layak
6.	Retribusi Izin Usaha Peternakan	✓	✓	✓	✓	Layak
7.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	✓	✓	✓	✓	Layak

*Sumber : Hasil Analisis, 2003.*

Keterangan :

✓ = sesuai dengan kriteria

✗ = tidak sesuai dengan kriteria

a, b, c = kriteria retribusi perizinan tertentu sesuai UU No. 34/2000

i = kriteria tambahan : Sudah diterapkan di daerah lain.

Dari analisis normatif terhadap usulan retribusi perizinan tertentu yang ditampilkan pada Tabel IV.16. di atas, terlihat bahwa seluruh usulan retribusi perizinan tertentu dinyatakan layak, yaitu Retribusi Izin Usaha Pariwisata, Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta, Retribusi Izin Berpangkal Ojek, Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair, Retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Retribusi Izin Usaha Peternakan dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

#### **4.2.2. Analisis Efisiensi Ekonomi (Rasio Efisiensi) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Mataram**

##### **4.2.2.1. Analisis Efisiensi Ekonomi (Rasio Efisiensi) Pajak Daerah**

Analisis efisiensi ekonomi (rasio efisiensi), yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya pungut (biaya yang



dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dari pajak) dengan perkiraan realisasi pendapatan yang diterima. Suatu Pajak Daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti semakin efisien pemungutan suatu pajak. (Abdul Halim, 2002 : 130)

$$\text{efisiensi ekonomi} = \frac{\text{biaya pungut pajak}}{\text{perkiraan pendapatan}} \dots\dots\dots (1)$$

Menurut Kepmendagri No. 35 tahun 2002, pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.

Penentuan besaran biaya pungut pajak daerah sangat sulit dilakukan, mengingat sistem administrasi pemerintah saat ini tidak melakukan pencatatan secara khusus atas setiap biaya yang dikeluarkan untuk memungut suatu jenis pajak. Sedangkan untuk menghitung unsur biaya pungut pajak di dalam total pengeluaran pemerintah daerah yang sedemikian besar dan kompleks bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk itu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan asumsi-asumsi.

Asumsi yang digunakan yaitu bahwa komponen biaya yang harus dikeluarkan untuk pemungutan suatu jenis pajak daerah terdiri dari :

- 1) Biaya tetap, meliputi biaya honor juru pungut per bulan. Diasumsikan honor juru pungut perbulan Rp 350.000 (tenaga honorer). Sehingga biaya honor juru pungut ini per-orang pertahun sebesar Rp. 350.000 x 12 = Rp 4.200.000,-

- 2) Biaya operasional atau rutin mencakup gaji pegawai, biaya perjalanan dinas, biaya administrasi, biaya transportasi dan lain-lain sebesar 10% dari realisasi penerimaan pajak daerah.
- 3) Biaya pemungutan, yaitu biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Biaya pemungutan ini diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah. Biaya pemungutan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dari realisasi penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan uraian di atas, pengeluaran untuk pemungutan suatu jenis pajak daerah diperkirakan sebesar 15% dari jumlah penerimaan, yang terdiri dari biaya operasional sebesar 10% dan biaya pemungutan sebesar 5%.

**a) Analisis Efisiensi Ekonomi (Rasio Efisiensi) Pajak Parkir**

Besaran potensi aktual Pajak Parkir seperti diuraikan pada Sub Bab Identifikasi Besaran Potensi Aktual Pajak Daerah adalah sebesar Rp 140.688.000 per tahun. Maka besaran biaya pungut adalah :

- Biaya Tetap. Jumlah juru pungut direncanakan sebanyak 3 (tiga) orang, sehingga biayanya menjadi  $\text{Rp. } 4.200.000 \times 3 = \text{Rp } 12.600.000,-$
- Biaya operasional =  $10\% \times \text{Rp } 140.688.000 = \text{Rp } 14.068.800$
- Biaya pemungutan =  $5\% \times \text{Rp } 140.688.000 = \text{Rp } 7.034.400$

Total biaya pungut =  $\text{Rp } 12.600.000 + \text{Rp } 14.068.800 + \text{Rp } 7.034.400 = \text{Rp } 33.703.200,-$

Setelah besaran potensi aktual dan besaran biaya pungut diketahui, maka efisiensi ekonomi dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{efisiensi ekonomi} &= \frac{\text{biaya pungut pajak}}{\text{perkiraan pendapatan}} \\
 &= \frac{\text{Rp } 33.703.200}{\text{Rp } 140.688.000} \\
 &= 0,24
 \end{aligned}$$

dari perhitungan di atas diperoleh rasio efisiensi Pajak Parkir adalah sebesar 0,24 nilai ini lebih kecil dari 1 (satu) maka Pajak Parkir dapat dikatakan **efisien**.

**b) Analisis Efisiensi Ekonomi (Rasio Efisiensi) Pajak Sarang Burung Walet**

Besaran potensi aktual Pajak Sarang Burung Walet seperti diuraikan pada Sub Bab Identifikasi Besaran Potensi Aktual Pajak Daerah adalah sebesar Rp 126.000.000 per tahun. Maka besaran biaya pungut adalah :

- Biaya Tetap. Jumlah juru pungut direncanakan sebanyak 2 (dua) orang, sehingga biayanya menjadi  $\text{Rp. } 4.200.000 \times 2 = \text{Rp } 8.400.000,-$
- Biaya operasional =  $10\% \times \text{Rp } 126.000.000 = \text{Rp } 12.600.000$
- Biaya pemungutan =  $5\% \times \text{Rp } 126.000.000 = \text{Rp } 6.300.000$

Total biaya pungut =  $\text{Rp } 8.400.000 + \text{Rp } 12.600.000 + \text{Rp } 6.300.000 = \text{Rp } 27.300.000$

Setelah besaran potensi aktual dan besaran biaya pungut diketahui, maka efisiensi ekonomi dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{efisiensi ekonomi} &= \frac{\text{biaya pungut pajak}}{\text{perkiraan pendapatan}} \\
 &= \frac{\text{Rp } 27.300.000}{\text{Rp } 126.000.000} \\
 &= 0,22
 \end{aligned}$$

dari perhitungan di atas diperoleh rasio efisiensi Pajak Sarang Burung Walet adalah sebesar 0,22 nilai ini lebih kecil dari 1 (satu) maka Pajak Sarang Burung Walet dapat dikatakan **efisien**.

#### **4.2.2.2. Analisis Efisiensi Ekonomi (Rasio Efisiensi) Retribusi Daerah**

Untuk mengetahui rasio efisiensi retribusi daerah digunakan rumus yang sama dengan pajak daerah. Penentuan besaran biaya pungut retribusi daerah lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan pajak daerah. Hal ini disebabkan karena retribusi daerah pada dasarnya adalah harga yang harus dibayar oleh masyarakat atas pelayanan jasa maupun pemberian izin oleh pemerintah. Jadi diasumsikan bahwa biaya pungut retribusi daerah adalah biaya total penyediaan pelayanan ataupun pemberian izin oleh pemerintah. Sedangkan tarif retribusi adalah sebesar biaya total penyediaan pelayanan maupun perizinan tersebut ditambah dengan suatu besaran biaya tambahan tertentu (keuntungan yang diharapkan oleh pemerintah). Tetapi walaupun demikian, besaran biaya pungut yang pasti atas suatu jenis retribusi daerah juga tidak dapat ditentukan secara tepat, karena keterbatasan dalam administrasi pemerintahan.

Asumsi yang digunakan dalam perhitungan biaya pungut retribusi daerah hampir sama dengan asumsi yang digunakan pada perhitungan biaya pungut pajak daerah, yaitu :

- 1) Biaya tetap, meliputi biaya honor juru pungut per bulan. Diasumsikan honor juru pungut perbulan Rp 350.000 (tenaga honorer). Sehingga biaya honor juru pungut ini per-orang pertahun sebesar  $\text{Rp. } 350.000 \times 12 = \text{Rp. } 4.200.000,-$
- 2) Biaya operasional atau rutin mencakup gaji pegawai, biaya perjalanan dinas, biaya administrasi, biaya transportasi dan lain-lain, diasumsikan sebesar 10% dari realisasi penerimaan
- 3) Biaya pemungutan, yaitu biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan,

diasumsikan sama dengan biaya pemungutan pajak daerah yaitu sebesar 5% dari realisasi penerimaan.

**a) Analisis Efisiensi Ekonomi (Rasio Efisiensi) Retribusi Jasa Atas Pekerjaan**

Seperti telah diuraikan pada sub bab identifikasi besaran potensi aktual retribusi daerah, ditemukan bahwa besaran potensi aktual Retribusi Jasa Atas Pekerjaan adalah sebesar Rp 946.140.472,-

Berdasarkan asumsi tersebut di atas maka biaya pungut Retribusi Jasa Atas Pekerjaan adalah :

- Biaya Tetap. Jumlah juru pungut direncanakan sebanyak 2 (dua) orang, sehingga biayanya menjadi  $Rp. 4.200.000 \times 2 = Rp 8.400.000,-$
- Biaya operasional sebesar  $10\% \times Rp 946.140.472 = Rp 94.614.047$
- Biaya pemungutan sebesar  $5\% \times Rp 946.140.472 = Rp 47.307.023$

Total biaya pungut Retribusi Jasa Atas Pekerjaan adalah sebesar  $Rp 8.400.000 + Rp 94.614.047 + Rp 47.307.023 = Rp 150.321.070$ .

Maka efisiensi ekonomi (rasio efisiensi) Retribusi Jasa Atas Pekerjaan adalah :

$$\begin{aligned} \text{efisiensi ekonomi} &= \frac{\text{biaya pungut retribusi}}{\text{perkiraan pendapatan}} \\ &= \frac{Rp 150.321.070}{Rp 946.140.472} \\ &= 0,16 \end{aligned}$$

dari perhitungan di atas diketahui bahwa rasio efisiensi Retribusi Jasa Atas Pekerjaan adalah sebesar 0,16 rasio ini kurang dari 1 sehingga dinyatakan efisien.

**b) Analisis Efisiensi Ekonomi (Rasio Efisiensi) Retribusi Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor (Cidomo)**

Seperti telah diuraikan pada sub bab identifikasi besaran potensi aktual retribusi daerah, ditemukan bahwa besaran potensi aktual Retribusi Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor (Cidomo) adalah sebesar Rp 31.470.000,-

Berdasarkan asumsi tersebut di atas maka biaya pungut Retribusi Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor (Cidomo) adalah :

- Biaya Tetap. Jumlah juru pungut direncanakan sebanyak 2 (dua) orang, sehingga biayanya menjadi  $\text{Rp } 4.200.000 \times 2 = \text{Rp } 8.400.000,-$
- Biaya operasional sebesar  $10\% \times \text{Rp } 31.470.000 = \text{Rp } 3.147.000$
- Biaya pemungutan sebesar  $5\% \times \text{Rp } 31.470.000 = \text{Rp } 1.573.500$

Total biaya pungut Retribusi Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor (Cidomo) adalah sebesar  $\text{Rp } 8.400.000 + \text{Rp } 3.147.000 + \text{Rp } 1.573.500 = \text{Rp } 13.120.500$ .

Maka efisiensi ekonomi (rasio efisiensi) Retribusi Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor (Cidomo) adalah :

$$\begin{aligned} \text{efisiensi ekonomi} &= \frac{\text{biaya pungut retribusi}}{\text{perkiraan pendapatan}} \\ &= \frac{\text{Rp } 13.120.500}{\text{Rp } 31.470.000} \\ &= 0,42 \end{aligned}$$

dari perhitungan di atas diketahui bahwa rasio efisiensi Retribusi Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor (Cidomo) adalah sebesar 0,42 rasio ini kurang dari 1 sehingga dinyatakan efisien.

**c) Analisis Efisiensi Ekonomi (Rasio Efisiensi) Retribusi Pengujian Kualitas Limbah Cair**

Seperti telah diuraikan pada sub bab identifikasi besaran potensi aktual retribusi daerah, ditemukan bahwa besaran potensi aktual Retribusi Pengujian Kualitas Limbah Cair adalah sebesar Rp 1.800.000,-

Berdasarkan asumsi tersebut di atas maka biaya pungut Retribusi Pengujian Kualitas Limbah Cair adalah :

- Biaya Tetap. Jumlah juru pungut direncanakan sebanyak 1 (satu) orang, sehingga biayanya menjadi Rp. 4.200.000 x 1 = Rp 4.200.000,-
- Biaya operasional sebesar 10% x Rp 1.800.000 = Rp 180.000,-
- Biaya pemungutan sebesar 5% x Rp 1.800.000 = Rp 90.000,-

Total biaya pungut Retribusi Pengujian Kualitas Limbah Cair adalah sebesar Rp 4.200.000 + Rp 180.000 + Rp 90.000 = Rp 4.470.000,-.

Maka efisiensi ekonomi (rasio efisiensi) Retribusi Pengujian Kualitas Limbah Cair adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{efisiensi ekonomi} &= \frac{\text{biaya pungut retribusi}}{\text{perkiraan pendapatan}} \\
 &= \frac{\text{Rp 4.470.000}}{\text{Rp 1.800.000}} \\
 &= 2,48
 \end{aligned}$$

dari perhitungan di atas diketahui bahwa rasio efisiensi Retribusi Pengujian Kualitas Limbah Cair adalah sebesar 2,48 rasio ini lebih besar dari 1 sehingga dinyatakan **Tidak efisien**. Ketidakefisienan ini diakibatkan karena biaya pungut lebih besar dibandingkan perkiraan pendapatan.

**d) Analisis Efisiensi Ekonomi (Rasio Efisiensi) Retribusi Izin Usaha Pariwisata**

Besaran potensi aktual Retribusi Izin Usaha Pariwisata adalah sebesar Rp 158.215.000,- sedangkan biaya pungutnya sebesar :

- Biaya Tetap. Jumlah juru pungut direncanakan sebanyak 2 (dua) orang, sehingga biayanya menjadi Rp. 4.200.000 x 2 = Rp 8.400.000,-
- Biaya operasional sebesar 10% x Rp 158.215.000 = Rp 15.821.500
- Biaya pemungutan sebesar 5% x Rp 158.215.000 = Rp 7.910.750

Total biaya pungut Retribusi Izin Usaha Pariwisata adalah sebesar Rp 8.400.000 + Rp 15.821.500 + Rp 7.910.750 = Rp 32.132.250.

Maka efisiensi ekonomi (rasio efisiensi) Retribusi Izin Usaha Pariwisata adalah :

$$\begin{aligned} \text{efisiensi ekonomi} &= \frac{\text{biaya pungut retribusi}}{\text{perkiraan pendapatan}} \\ &= \frac{\text{Rp } 32.132.250}{\text{Rp } 158.215.000} \\ &= 0,20 \end{aligned}$$

dari perhitungan di atas diketahui bahwa rasio efisiensi Retribusi Izin Usaha Pariwisata adalah sebesar 0,20 rasio ini kurang dari 1 sehingga dinyatakan efisien.

**c) Analisis Efisiensi Ekonomi (Rasio Efisiensi) Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta**

Besaran potensi aktual Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta adalah sebesar Rp 17.360.000. sedangkan biaya pungutnya sebesar :

- Biaya Tetap. Jumlah juru pungut direncanakan sebanyak 1 (satu) orang, sehingga biayanya menjadi Rp. 4.200.000
- Biaya operasional sebesar 10% x Rp 17.360.000 = Rp 1.736.000
- Biaya pemungutan sebesar 5% x Rp 17.360.000 = Rp 868.000



Total biaya pungut Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta adalah sebesar Rp 4.200.000 + Rp 1.736.000 + Rp 868.000 = Rp 6.804.000.

Maka efisiensi ekonomi (rasio efisiensi) Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta adalah :

$$\begin{aligned} \text{efisiensi ekonomi} &= \frac{\text{biaya pungut retribusi}}{\text{perkiraan pendapatan}} \\ &= \frac{\text{Rp 6.804.000}}{\text{Rp 17.360.000}} \\ &= 0,39 \end{aligned}$$

dari perhitungan di atas diketahui bahwa rasio efisiensi Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta adalah sebesar 0,39 rasio ini kurang dari 1 sehingga dinyatakan efisien.

#### **f) Analisis Efisiensi Ekonomi (Rasio Efisiensi) Retribusi Izin Berpangkal Ojek**

Besaran potensi aktual Retribusi Izin Berpangkal Ojek adalah sebesar Rp 7.775.000. sedangkan biaya pungutnya sebesar :

- Biaya Tetap. Jumlah juru pungut direncanakan sebanyak 1 (satu) orang, sehingga biayanya menjadi Rp. 4.200.000
- Biaya operasional sebesar 10% x Rp 7.775.000 = Rp 777.500
- Biaya pemungutan sebesar 5% x Rp 7.775.000 = Rp 388.750

Total biaya pungut Retribusi Izin Berpangkal Ojek adalah sebesar Rp 4.200.000 + Rp 777.500 + Rp 388.750 = Rp 5.366.250.

Maka efisiensi ekonomi (rasio efisiensi) Retribusi Izin Berpangkal Ojek adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{efisiensi ekonomi} &= \frac{\text{biaya pungut retribusi}}{\text{perkiraan pendapatan}} \\
 &= \frac{\text{Rp } 5.366.250}{\text{Rp } 7.775.000} \\
 &= 0,69
 \end{aligned}$$

dari perhitungan di atas diketahui bahwa rasio efisiensi Retribusi Izin Berpangkal Ojek adalah sebesar 0,69 rasio ini lebih kecil dari 1 sehingga dinyatakan **efisien**.

**g) Analisis Efisiensi Ekonomi (Rasio Efisiensi) Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair**

Besaran potensi aktual Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair adalah sebesar Rp 65.700.000,- sedangkan biaya pungutnya sebesar :

- Biaya Tetap. Jumlah juru pungut direncanakan sebanyak 2 (dua) orang, sehingga biayanya menjadi  $\text{Rp } 4.200.000 \times 2 = \text{Rp } 8.400.000,-$
- Biaya operasional sebesar  $10\% \times \text{Rp } 65.700.000 = \text{Rp } 6.570.000,-$
- Biaya pemungutan sebesar  $5\% \times \text{Rp } 65.700.000 = \text{Rp } 3.285.000,-$

Total biaya pungut Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair adalah sebesar  $\text{Rp } 8.400.000 + \text{Rp } 6.570.000 + \text{Rp } 3.285.000 = \text{Rp } 18.255.000,-$ .

Maka efisiensi ekonomi (rasio efisiensi) Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{efisiensi ekonomi} &= \frac{\text{biaya pungut retribusi}}{\text{perkiraan pendapatan}} \\
 &= \frac{\text{Rp } 18.255.000}{\text{Rp } 65.700.000} \\
 &= 0,28
 \end{aligned}$$

dari perhitungan di atas diketahui bahwa rasio efisiensi Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair adalah sebesar 0,28 rasio ini kurang dari 1 sehingga dinyatakan **efisien**.

#### **h) Analisis Efisiensi Ekonomi (Rasio Efisiensi) Retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah**

Besaran potensi aktual Retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah sebesar Rp 41.100.000,- sedangkan biaya pungutnya sebesar:

- Biaya Tetap. Jumlah juru pungut direncanakan sebanyak 2 (dua) orang, sehingga biayanya menjadi  $\text{Rp. } 4.200.000 \times 2 = \text{Rp } 8.400.000,-$
- Biaya operasional sebesar  $10\% \times \text{Rp } 41.100.000 = \text{Rp } 4.110.000,-$
- Biaya pemungutan sebesar  $5\% \times \text{Rp } 41.100.000 = \text{Rp } 2.055.000,-$

Total biaya pungut Retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah sebesar  $\text{Rp } 8.400.000 + \text{Rp } 4.110.000 + \text{Rp } 2.055.000 = \text{Rp } 14.565.000,-$ .

Maka efisiensi ekonomi (rasio efisiensi) Retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah :

$$\begin{aligned} \text{efisiensi ekonomi} &= \frac{\text{biaya pungut retribusi}}{\text{perkiraan pendapatan}} \\ &= \frac{\text{Rp } 14.565.000}{\text{Rp } 41.100.000} \\ &= 0,35 \end{aligned}$$

dari perhitungan di atas diketahui bahwa rasio efisiensi Retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah sebesar 0,35 rasio ini kurang dari 1 sehingga dinyatakan efisien.

#### **i) Analisis Efisiensi Ekonomi (Rasio Efisiensi) Retribusi Izin Usaha Peternakan**

Besaran potensi aktual Retribusi Izin Usaha Peternakan adalah sebesar Rp 37.590.000. sedangkan biaya pungutnya sebesar :

- Biaya Tetap. Jumlah juru pungut direncanakan sebanyak 1 (satu) orang, sehingga biayanya menjadi Rp. 4.200.000
- Biaya operasional sebesar  $10\% \times \text{Rp } 37.590.000 = \text{Rp } 3.759.000$
- Biaya pemungutan sebesar  $5\% \times \text{Rp } 37.590.000 = \text{Rp } 1.879.500$

Total biaya pungut Retribusi Izin Usaha Peternakan adalah sebesar Rp 4.200.000 + Rp 3.759.000 + Rp 1.879.500 = Rp 9.838.500.

Maka efisiensi ekonomi (rasio efisiensi) Retribusi Izin Usaha Peternakan adalah :

$$\begin{aligned} \text{efisiensi ekonomi} &= \frac{\text{biaya pungut retribusi}}{\text{perkiraan pendapatan}} \\ &= \frac{\text{Rp } 9.838.500}{\text{Rp } 37.590.000} \\ &= 0,26 \end{aligned}$$

dari perhitungan di atas diketahui bahwa rasio efisiensi Retribusi Izin Usaha Peternakan adalah sebesar 0,26 rasio ini lebih kecil dari 1 sehingga dinyatakan efisien.

**j) Analisis Efisiensi Ekonomi (Rasio Efisiensi) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**

Besaran potensi aktual Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah sebesar Rp 550.000. sedangkan biaya pungutnya sebesar :

- Biaya Tetap. Jumlah juru pungut direncanakan sebanyak 1 (satu) orang, sehingga biayanya menjadi Rp. 4.200.000
- Biaya operasional sebesar  $10\% \times \text{Rp } 550.000 = \text{Rp } 55.000$
- Biaya pemungutan sebesar  $5\% \times \text{Rp } 550.000 = \text{Rp } 27.500$

Total biaya pungut Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah sebesar Rp 4.200.000 + Rp 55.000 + Rp 27.500 = Rp 4.282.500.

Maka efisiensi ekonomi (rasio efisiensi) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah :

$$\begin{aligned} \text{efisiensi ekonomi} &= \frac{\text{biaya pungut retribusi}}{\text{perkiraan pendapatan}} \\ &= \frac{\text{Rp 4.282.500}}{\text{Rp 550.000}} \\ &= 7,79 \end{aligned}$$

dari perhitungan di atas diketahui bahwa rasio efisiensi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah sebesar 7,79 rasio ini lebih besar dari 1 sehingga dinyatakan **tidak efisien / tidak layak**.

#### 4.2.2.3. Rekapitulasi Hasil Analisis Efisiensi Ekonomi (Rasio Efisiensi) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas atas hasil analisis efisiensi ekonomi (rasio efisiensi) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, seperti yang telah diuraikan di atas, berikut ini ditampilkan tabel rekapitulasi hasil analisis efisiensi ekonomi (rasio efisiensi) pajak daerah dan retribusi daerah.

**TABEL IV.17.**  
**REKAPITULASI HASIL ANALISIS EFISIENSI EKONOMI**  
**(RASIO EFISIENSI) PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**BARU DI KOTA MATARAM**

NO.	JENIS PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH	RASIO EFISIENSI	KETERANGAN
	<b>Pajak Daerah</b>		
1	Pajak Parkir	0,24	efisien
2	Pajak Sarang Burung Walet	0,22	efisien
	<b>Retribusi Jasa Umum</b>		
1	Retribusi Jasa Atas Pekerjaan	0,16	efisien
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor (Cidomo)	0,42	efisien
3	Retribusi Pengujian Kualitas Limbah Cair	2,48	tidak efisien
	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>		
1	Retribusi Izin Usaha Pariwisata	0,20	efisien
2	Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta	0,39	efisien
3	Retribusi Izin Berpangkal Ojek	0,69	efisien
4	Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair	0,28	efisien
5	Retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	0,35	efisien
6	Retribusi Izin Usaha Peternakan	0,26	efisien
7	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	7,79	tidak efisien

Sumber : Hasil Analisis, 2003

Pada Tabel IV.17. terlihat bahwa untuk pajak daerah, kedua jenis pajak daerah yang diusulkan memiliki rasio efisiensi di bawah 1 (satu), sehingga keduanya dinyatakan efisien. Untuk Retribusi Jasa Umum, dari tiga jenis retribusi yang diusulkan, hanya dua jenis yang efisien, yaitu Retribusi Jasa Atas Pekerjaan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor (Cidomo), sedangkan Retribusi Pengujian Kualitas Limbah Cair dinyatakan tidak efisien. Kemudian untuk Retribusi Perizinan Tertentu, dari tujuh jenis retribusi yang diusulkan, terdapat satu jenis yang dinyatakan tidak efisien karena memiliki rasio efisiensi di atas 1 (satu), yaitu Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

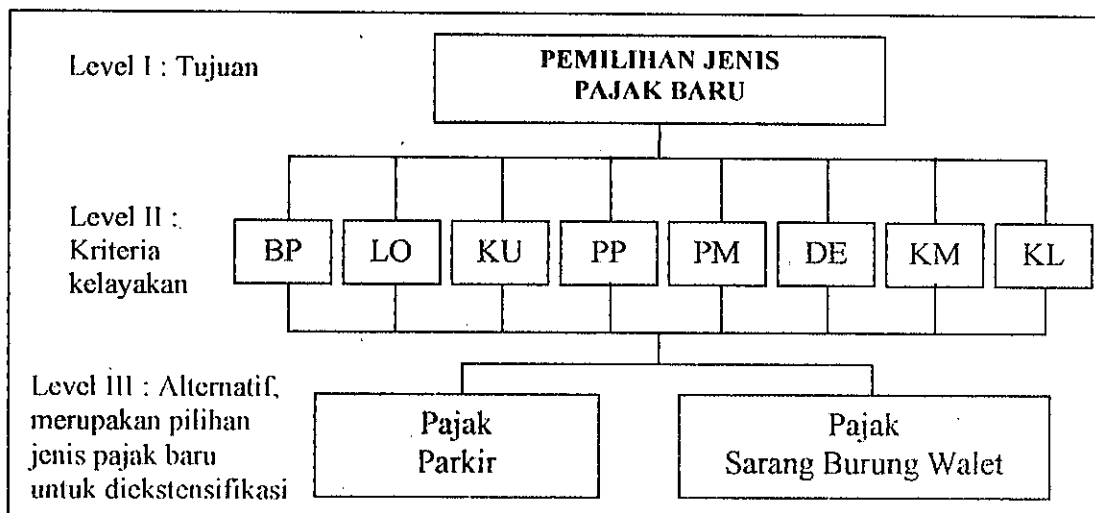
#### **4.2.3. Analisis Proses Hierarki Analitik (PHA) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Mataram**

##### **4.2.3.1. Analisis Proses Hierarki Analitik (PHA) Pajak Daerah**

Hasil analisis kelayakan ekonomi (rasio efisiensi) menunjukkan bahwa kedua usulan pajak daerah yang terdiri dari Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet, ternyata memenuhi kelayakan ekonomi (efisien) untuk dipungut sebagai pajak baru di Kota Mataram. Untuk dapat memilih salah satu unggulan jenis Pajak Daerah baru dari kedua alternatif Pajak Daerah baru tersebut yang paling memungkinkan untuk diberlakukan sebagai Pajak Daerah di Kota Mataram, akan dianalisis dengan Proses Hierarki Analisis (PHA) yaitu membuat hierarki sederhana yang terdiri dari beberapa level.

Jadi dalam studi ini PHA digunakan untuk memilih salah satu alternatif pajak daerah yang menjadi unggulan diantara berbagai usulan pajak daerah yang diperoleh. Penggunaan model PHA selalu diawali dengan penyusunan hierarki sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Untuk lebih jelasnya, struktur hierarki ekstensifikasi pajak daerah Kota Mataram dapat dilihat pada Gambar 4.8.

Berdasarkan hierarki tersebut, langkah selanjutnya adalah mengadakan perbandingan antar kriteria dengan memperhatikan pengaruh kriteria pada level di atasnya yaitu tujuan ekstensifikasi Pajak Daerah. Perbandingan dilakukan dengan skala satu sampai sembilan dan memenuhi aksioma PHA.



Sumber : Hasil Analisis, 2003

**GAMBAR 4.8.**  
**STRUKTUR HIERARKI USAHA EKSTENSIFIKASI**  
**PAJAK DAERAH KOTA MATARAM**

Keterangan :

- BP = Bersifat pajak dan bukan retribusi
- LO = Obyek pajak terletak di wilayah Kota Mataram dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat Kota Mataram
- KU = Tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- PP = Bukan merupakan objek Pajak Propinsi/Pemerintah Pusat.
- PM = Potensinya memadai
- DE = Tidak memberikan dampak ekonomi negatif
- KM = Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat

KL = Memperhatikan kelestarian lingkungan

Narasumber untuk analisis ini adalah Kepala Dinas atau karyawan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dari Dinas Pendapatan Daerah dengan beberapa Dinas / Instansi terkait yang berkompeten, pakar/akademisi, tokoh masyarakat (diwakili anggota DPRD Komisi C) serta wakil pengusaha/swasta (Gapensi) yang akan membuat kesepakatan untuk sependapat memilih salah satu alternatif yang paling memungkinkan untuk dapat dijadikan sebagai jenis Pajak Daerah baru, karena dapat memenuhi persyaratan sebagai ahli untuk masalah tersebut, yaitu bisa memahami benar permasalahannya dan sebagai pihak yang mempunyai kepentingan atas permasalahan tersebut, di mana sebelum mengisi hierarki ini, terlebih dahulu beliau-beliau sudah melakukan pengamatan terhadap keunggulan masing-masing jenis Pajak untuk dijadikan sebagai salah satu Pajak Daerah baru di Kota Mataram. Sebagai masukan atau input data dalam proses analisis adalah nilai perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) dari setiap kriteria dan alternatif. Nilai perbandingan ini merupakan persepsi narasumber yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner (Lampiran B). Skala pembandingan yang digunakan untuk penilaian adalah antara 1 sampai dengan 9 yang tingkat kepentingannya dijelaskan dalam lampiran B (Saaty, 1993: 85).

Dari hasil perhitungan PHA dengan bantuan *Software Expert Choice 9.0*, diketahui bahwa kriteria-kriteria yang ditentukan mempunyai tingkatan tersendiri untuk dipertimbangkan dalam pemilihan pajak daerah baru. Hasil penilaian ini juga menunjukkan tingkat konsistensi para narasumber dalam menentukan pilihannya yang ditunjukkan oleh rasio konsistensi antara 0,05 – 0,10 dengan rata-rata keseluruhan sebesar 0,086. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel IV.18.



Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa toleransi rasio konsistensi yang dapat diterima adalah  $\leq 0,1$ . Keragaman rasio konsistensi ini selain akibat perbedaan latar belakang narasumber juga karena faktor jumlah variabel yang dibandingkan. Semakin banyak variabel maka kemungkinan indeks konsistensi  $\geq 0,1$  akan semakin besar.

**TABEL IV.18.**  
**NILAI PRIORITAS KRITERIA PEMILIHAN PAJAK DAERAH**

Narasumber	Kriteria Pajak Daerah								Rasio Konsistensi
	BP	LO	KU	PP	PM	DE	KM	KL	
1	0,022	0,032	0,120	0,034	0,279	0,164	0,142	0,208	0,100
2	0,035	0,028	0,188	0,036	0,227	0,144	0,148	0,193	0,100
3	0,030	0,051	0,219	0,042	0,186	0,094	0,148	0,230	0,050
4	0,037	0,025	0,166	0,053	0,179	0,129	0,240	0,171	0,090
5	0,040	0,032	0,181	0,061	0,166	0,141	0,180	0,199	0,070
6	0,045	0,043	0,191	0,046	0,202	0,125	0,158	0,192	0,100
7	0,047	0,053	0,127	0,030	0,207	0,093	0,203	0,241	0,100
8	0,024	0,050	0,165	0,045	0,243	0,097	0,179	0,196	0,080
Rata-rata	0,035	0,039	0,170	0,043	0,211	0,123	0,175	0,204	0,086

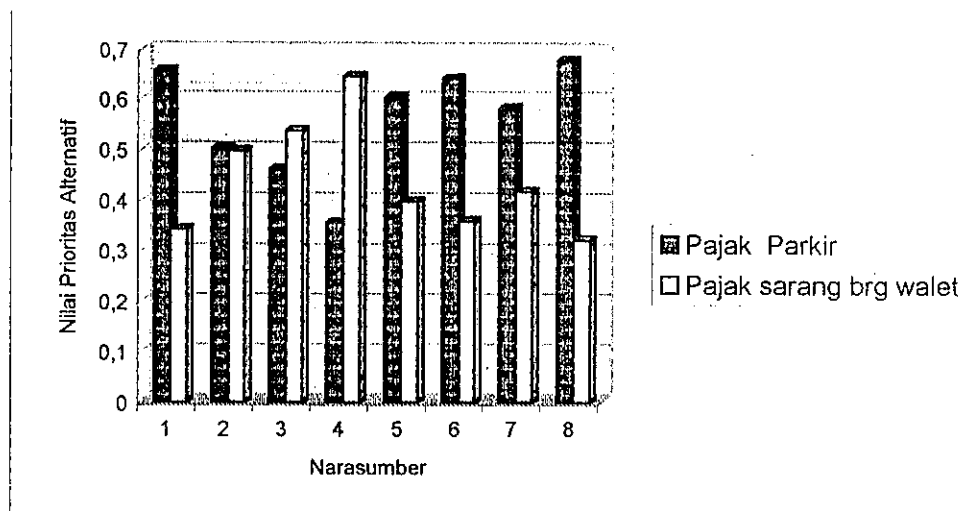
Sumber : Hasil Analisis, 2003

Hasil akhir dari analisis PHA ini menunjukkan bahwa dari delapan orang narasumber yang mengisi questioner, ternyata mereka sepakat memilih Pajak Parkir sebagai unggulan pajak daerah baru di Kota Mataram sebagai upaya ekstensifikasi pajak daerah, dengan nilai total rata-rata sebesar 0,56 lebih besar dari Pajak Sarang Burung Walet yang hanya sebesar 0,44. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil akhir perhitungan PHA ini, dapat dilihat pada Tabel IV.19. dan Gambar 4.9.

**TABEL IV.19.**  
**NILAI PRIORITAS ALTERNATIF PAJAK DAERAH**

Alternatif	Narasumber								rata-rata
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Pajak Parkir	0,657	0,502	0,462	0,355	0,603	0,641	0,582	0,678	0,56
Pajak sarang brg walet	0,343	0,498	0,538	0,645	0,397	0,359	0,418	0,322	0,44

*Sumber : Hasil Analisis, 2003*



*Sumber : Hasil Analisis, 2003*

**GAMBAR 4.9.**  
**GRAFIK NILAI PRIORITAS ALTERNATIF PAJAK DAERAH**

Gambar 4.9. menunjukkan bahwa sebagian besar narasumber, yaitu enam orang dari delapan narasumber lebih memilih Pajak Parkir sebagai pajak unggulan untuk diterapkan di Kota Mataram, dan hanya dua orang yang mengunggulkan Pajak Sarang Burung Walet. Sehingga Pajak Parkir mendapatkan nilai yang lebih tinggi, yaitu 0,56, dan dinyatakan sebagai pajak unggulan dalam pelaksanaan ekstensifikasi Pajak Daerah Kota Mataram.

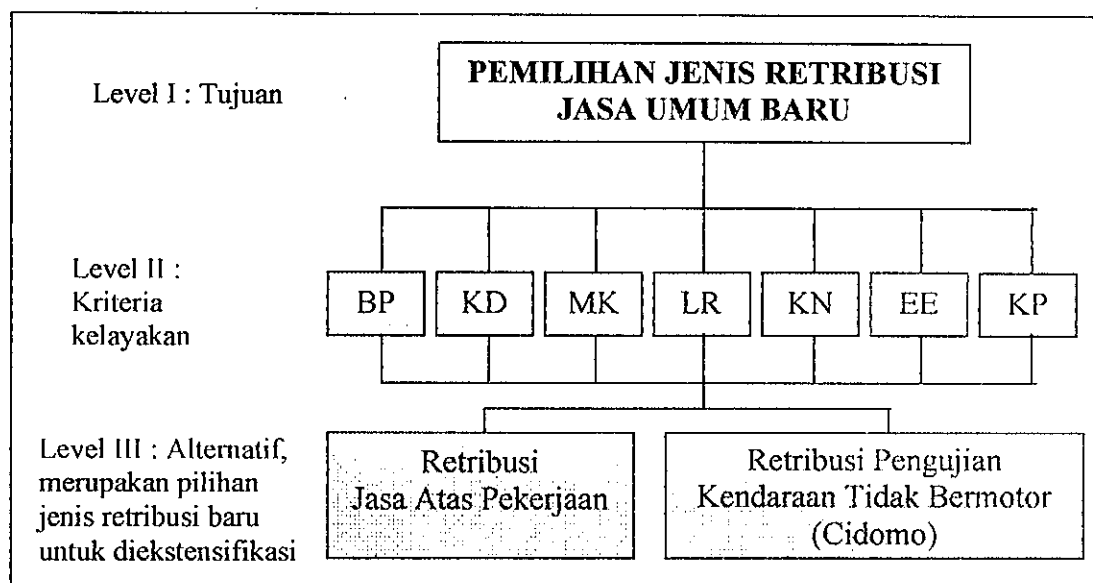
#### **4.2.3.2. Analisis Proses Hierarki Analitik (PHA) Retribusi Daerah**

Sehubungan menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 retribusi daerah dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, dan masing-masing golongan retribusi

memiliki kriteria tersendiri, maka penyusunan hierarkinyapun dibuat untuk masing-masing golongan retribusi tersebut. Tetapi karena pada proses identifikasi jenis-jenis retribusi daerah baru tidak ditemukan adanya usulan jenis retribusi daerah baru dari golongan Retribusi Jasa Usaha, maka analisis PHA hanya dilakukan pada golongan Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu.

**a) Analisis Proses Hierarki Analitik (PHA) Retribusi Jasa Umum**

Analisis PHA hanya dilakukan terhadap jenis Retribusi Jasa Umum yang dinyatakan efisien dalam analisis efisiensi ekonomi, yaitu yang memiliki rasio efisiensi lebih kecil dari 1. Sehingga dari tiga jenis Retribusi Jasa Umum yang diusulkan, hanya dua jenis yang akan dianalisis (menjadi alternatif) pada tahapan analisis PHA ini. Struktur hierarki usaha ekstensifikasi Retribusi Jasa Umum Kota Mataram disusun sebagai berikut :



*Sumber : Hasil Analisis, 2003*

**GAMBAR 4.10.**  
**STRUKTUR HIERARKI USAHA EKSTENSIFIKASI**  
**RETRIBUSI JASA UMUM KOTA MATARAM**

Keterangan :

- BP = Bersifat bukan pajak dan bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perijinan Tertentu.
- KD = Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- MK = Jasa yang diberikan memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- LR = Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- KN = Tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- EE = Dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- KP = Pungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Dari kriteria-kriteria Retribusi Jasa Umum tersebut, ada beberapa kriteria yang dapat digolongkan sebagai kriteria umum, yaitu kriteria yang dapat digunakan untuk menilai retribusi daerah dari semua golongan retribusi, atau dengan kata lain sebagai pelengkap kriteria khusus yang telah ditentukan oleh Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000. Kriteria-kriteria yang dapat digolongkan sebagai kriteria umum retribusi daerah tersebut yaitu :

- KD = Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- LR = Jasa/perizinan tersebut layak untuk dikenakan retribusi

KN = Tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.

EE = Dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

Analisis PHA terhadap dua jenis Retribusi Jasa Umum, yaitu Retribusi Jasa Atas Pekerjaan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor (Cidomo) diketahui bahwa kriteria-kriteria yang ditentukan juga mempunyai tingkatan tersendiri untuk dipertimbangkan dalam pemilihan retribusi daerah baru. Hasil penilaian ini juga menunjukkan tingkat konsistensi para narasumber dalam menentukan pilihannya yang ditunjukkan oleh rasio konsistensi antara 0,05 – 0,09 dengan rata-rata keseluruhan sebesar 0,079. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel IV.20. Jumlah narasumber yang dilibatkan dalam analisis ini adalah sebanyak delapan orang.

**TABEL IV.20.**  
**NILAI PRIORITAS KRITERIA PEMILIHAN RETRIBUSI JASA UMUM**

Narasumber	Kriteria Retribusi Jasa Umum							Rasio Konsistensi
	BP	KD	MK	LR	KN	EE	KP	
1	0,041	0,162	0,221	0,089	0,082	0,235	0,169	0,080
2	0,034	0,079	0,192	0,081	0,101	0,322	0,191	0,080
3	0,038	0,085	0,166	0,068	0,107	0,295	0,242	0,080
4	0,040	0,084	0,186	0,053	0,083	0,351	0,202	0,090
5	0,046	0,098	0,212	0,128	0,098	0,224	0,193	0,090
6	0,030	0,101	0,212	0,065	0,090	0,236	0,267	0,080
7	0,035	0,099	0,193	0,072	0,104	0,253	0,244	0,080
8	0,050	0,114	0,191	0,057	0,119	0,010	0,169	0,050
Rata-rata	0,039	0,103	0,197	0,077	0,098	0,241	0,210	0,079

Sumber : Hasil Analisis, 2003

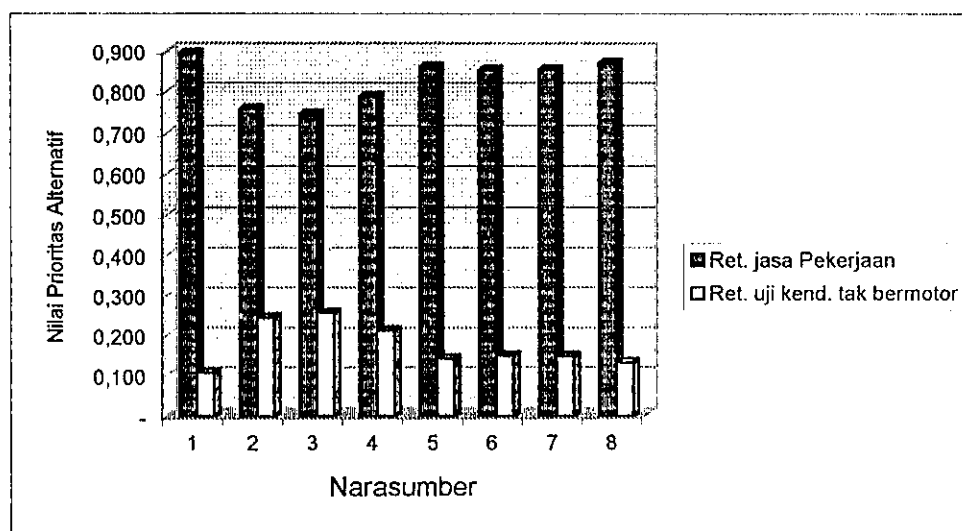
Tabel IV.21. menunjukkan bahwa dari delapan orang narasumber yang mengisi quesioner, rata-rata mengunggulkan Retribusi Jasa Atas Pekerjaan sebagai retribusi jasa umum unggulan untuk diberlakukan di Kota Mataram

sebagai upaya ekstensifikasi dengan memperoleh nilai prioritas sebesar 0,828. Sedangkan Retribusi Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor (Cidomo) hanya memperoleh nilai 0,172.

**TABEL IV.21.**  
**NILAI PRIORITAS ALTERNATIF RETRIBUSI JASA UMUM**

Alternatif	Narasumber								Rata-rata
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Ret. jasa Pekerjaan	0,894	0,757	0,745	0,788	0,860	0,853	0,854	0,870	0,828
Ret. uji kend. tak bermotor	0,106	0,243	0,255	0,212	0,140	0,147	0,146	0,130	0,172

Sumber : Hasil Analisis, 2003



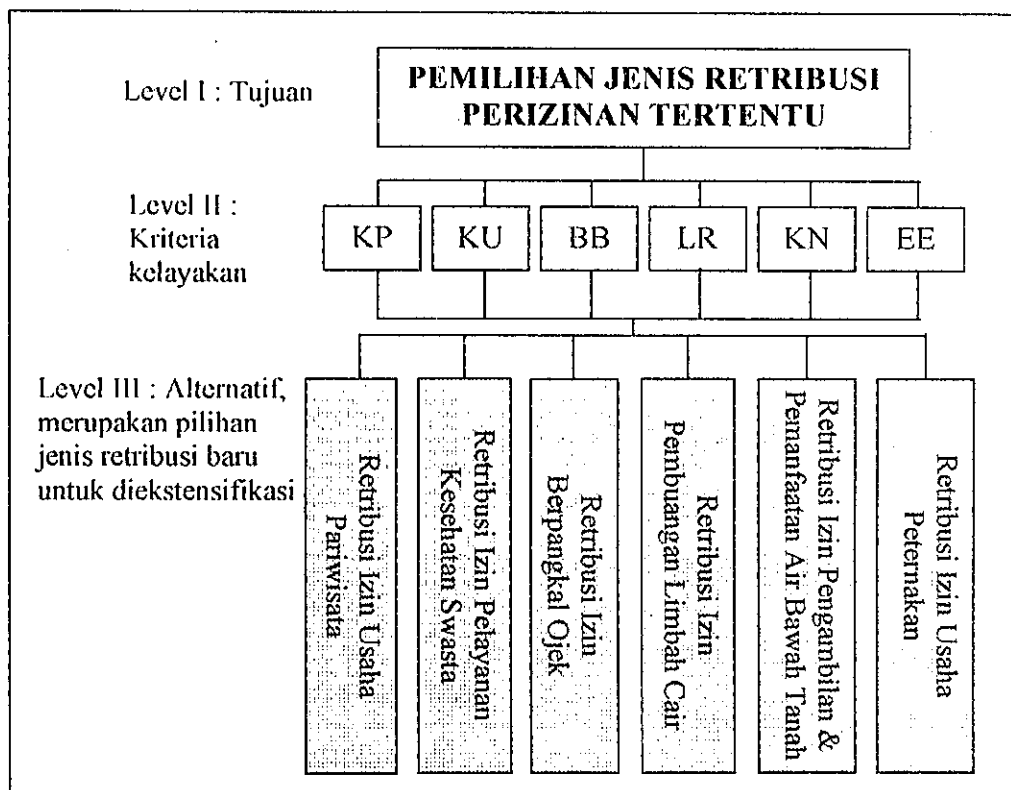
Sumber : Hasil Analisis, 2003

**GAMBAR 4.11.**  
**GRAFIK NILAI PRIORITAS ALTERNATIF RETRIBUSI JASA UMUM**

Gambar 4.11. menunjukkan secara lebih jelas bahwa keseluruhan narasumber untuk analisis PHA terhadap usulan retribusi jasa umum yang terdiri dari Retribusi Jasa Atas Pekerjaan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor (Cidomo) lebih memilih Retribusi Jasa Atas Pekerjaan sebagai retribusi jasa umum unggulan.

### b) Analisis Proses Hierarki Analitik (PHA) Retribusi Perizinan Tertentu

Analisis PHA hanya dilakukan terhadap jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dinyatakan efisien dalam analisis efisiensi ekonomi, yaitu Retribusi Izin Usaha Pariwisata, Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta, Retribusi Izin Berpangkal Ojek, Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair, Retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Retribusi Izin Usaha Peternakan.



Sumber : Hasil Analisis, 2003

**GAMBAR 4.12.**  
**STRUKTUR HIERARKI USAHA EKSTENSIFIKASI**  
**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU KOTA MATARAM**

Keterangan :

KP = Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.

- KU = Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum
- BB = Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar, sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan
- LR = Perizinan tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- KN = Tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- EE = Dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

Hasil analisis PHA terhadap enam jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang memenuhi kelayakan ekonomi/efisiensi tersebut, menunjukkan bahwa kriteria-kriteria yang ditentukan juga mempunyai tingkatan tersendiri untuk dipertimbangkan dalam pemilihan retribusi daerah baru. Hasil penilaian ini juga menunjukkan tingkat konsistensi para narasumber dalam menentukan pilihannya yang ditunjukkan oleh rasio konsistensi antara 0,04 – 0,10 dengan rata-rata keseluruhan sebesar 0,09. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel IV.22. Jumlah narasumber yang dilibatkan dalam analisis ini adalah sebanyak sembilan orang.



**TABEL IV.22.**  
**NILAI PRIORITAS KRITERIA PEMILIHAN RETRIBUSI**  
**PERIZINAN TERTENTU**

Narasumber	Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu						Rasio Konsistensi
	KP	KU	BB	LR	KN	EE	
1	0,108	0,325	0,243	0,115	0,091	0,117	0,090
2	0,078	0,260	0,247	0,123	0,154	0,138	0,100
3	0,085	0,319	0,178	0,181	0,140	0,098	0,090
4	0,093	0,318	0,250	0,122	0,135	0,082	0,100
5	0,086	0,375	0,145	0,128	0,204	0,062	0,100
6	0,214	0,260	0,116	0,092	0,209	0,110	0,100
7	0,151	0,317	0,212	0,119	0,138	0,063	0,080
8	0,185	0,357	0,096	0,076	0,203	0,084	0,040
9	0,151	0,255	0,119	0,103	0,228	0,144	0,100
Rata-rata	0,128	0,310	0,178	0,118	0,167	0,100	0,090

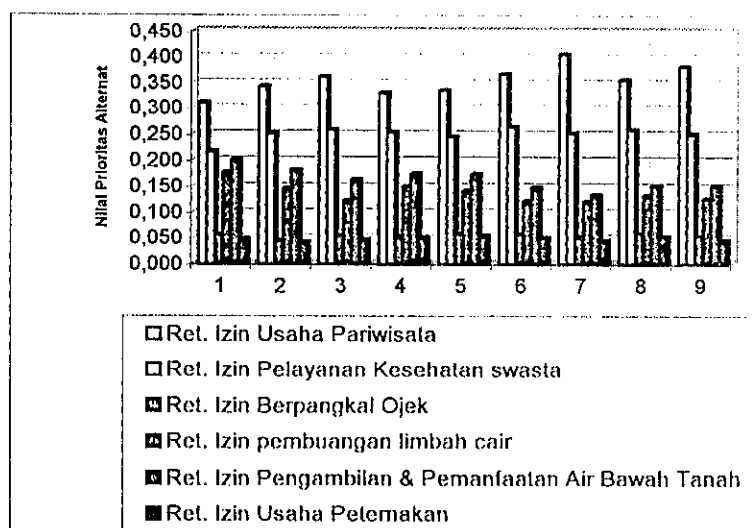
Sumber : Hasil Analisis, 2003

Tabel IV.23. menunjukkan bahwa dari sembilan orang narasumber yang mengisi questioner, rata-rata mengunggulkan Retribusi Izin Usaha Pariwisata sebagai retribusi perizinan tertentu unggulan untuk diberlakukan di Kota Mataram sebagai upaya ekstensifikasi dengan memperoleh nilai prioritas sebesar 0,353. Sedangkan Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta menempati urutan kedua dengan nilai prioritas rata-rata 0,249.

**TABEL IV.23.**  
**NILAI PRIORITAS ALTERNATIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

Alternatif	Narasumber									Rata-rata
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ret. Izin Usaha Pariwisata	0,309	0,341	0,361	0,330	0,334	0,366	0,404	0,355	0,381	0,353
Ret. Izin Pelayanan Kesehatan swasta	0,215	0,250	0,258	0,253	0,244	0,264	0,251	0,258	0,249	0,249
Ret. Izin Berpangkal Ojek	0,055	0,044	0,053	0,050	0,057	0,056	0,050	0,057	0,052	0,053
Ret. Izin pembuangan limbah cair	0,175	0,144	0,121	0,148	0,140	0,120	0,118	0,130	0,124	0,136
Ret. Izin Pengambilan & Pemanfaatan Air Bawah Tanah	0,199	0,180	0,161	0,173	0,172	0,146	0,132	0,149	0,149	0,162
Ret. Izin Usaha Pemukiman	0,047	0,041	0,046	0,048	0,053	0,048	0,044	0,051	0,045	0,047

Sumber : Hasil Analisis, 2003



Sumber : Hasil Analisis, 2003

**GAMBAR 4.13.**  
**GRAFIK NILAI PRIORITAS ALTERNATIF**  
**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

Gambar 4.13. menunjukkan bahwa keseluruhan narasumber retribusi perizinan tertentu yang berjumlah sembilan orang, sepakat untuk mengunggulkan Retribusi Izin Usaha Pariwisata sebagai retribusi unggulan pada golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

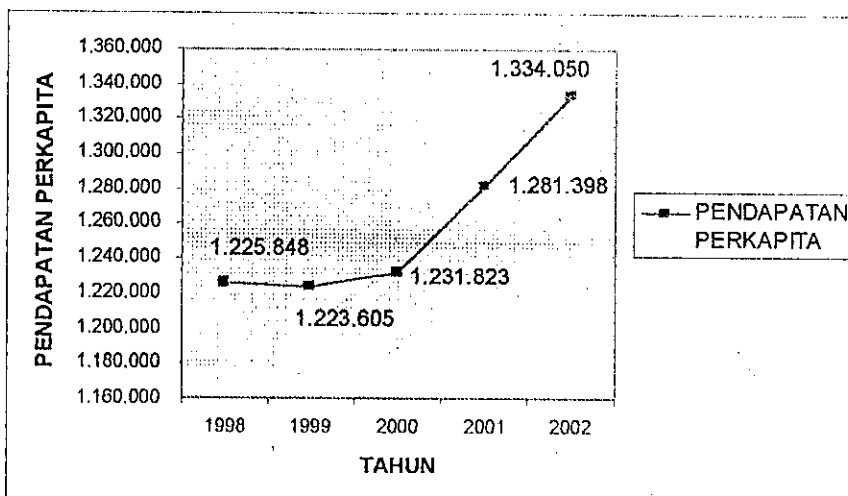
#### 4.3. Analisis Variabel Ekonomi Makro Kota Mataram

Hasil analisis variabel ekonomi makro merupakan dasar untuk memproyeksikan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dimasa yang akan datang. Analisis ini juga dimaksudkan untuk melihat kemampuan masyarakat Kota Mataram dalam menerima beban tambahan berupa pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah baru. Variabel ekonomi makro yang digunakan dalam analisis ini dibatasi hanya pada pendapatan perkapita, tingkat inflasi, perkembangan aktivitas ekonomi (kondisi lima tahun terakhir) dan perkembangan land use Kota Mataram dari tahun 1994 sampai tahun 2002. Pembatasan jumlah variabel ekonomi makro yang digunakan, disebabkan karena banyaknya jumlah variabel

ekonomi makro yang ada, sehingga perlu kiranya dipilih variabel ekonomi makro yang dominan mempengaruhi usaha ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. Variabel-variabel ekonomi makro tersebut hanya dilihat trend perkembangannya, apakah menunjukkan pertumbuhan atau kemunduran, tidak sampai pada dilakukannya analisis ekonomi yang mendalam. Apabila trend-nya menunjukkan pertumbuhan, berarti dapat dikatakan bahwa masyarakat Kota Mataram memiliki kemampuan untuk menerima beban tambahan berupa pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru. Sebaliknya apabila trend-nya menunjukkan penurunan/kemunduran, berarti masyarakat Kota Mataram diasumsikan tidak akan mampu menerima beban tambahan tersebut. Sehingga apabila dalam kondisi seperti ini dipaksakan untuk diberlakukan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka akan terjadi penolakan dari masyarakat, yang diwujudkan dalam berbagai tindakan (perlawanan pajak).

**a) Pendapatan Perkapita Kota Mataram**

Data mengenai perkembangan dan pertumbuhan pendapatan per kapita Kota Mataram dari tahun 1998 sampai 2002 (lima tahun terakhir) telah disajikan pada Bab III, tetapi untuk lebih memperjelas, di bawah ini ditampilkan Grafik perkembangan pendapatan per kapita Kota Mataram tahun 1998-2002 yang datanya diambil dari PDRB per kapita Kota Mataram atas dasar harga konstan 1993.



Sumber : PDRB Kota Mataram Tahun 1998-2002

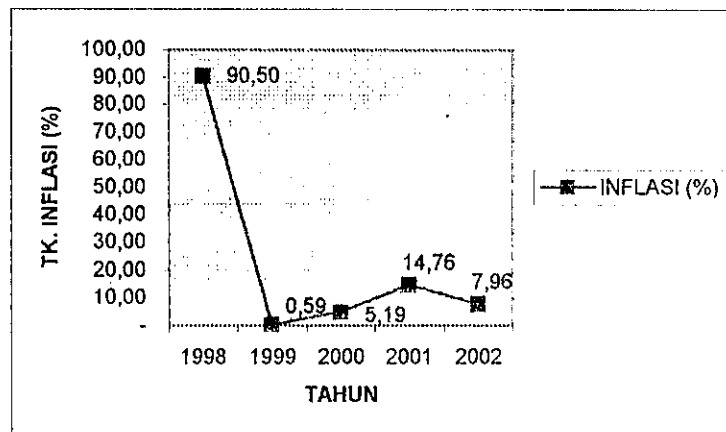
**GAMBAR 4.14.**  
**GRAFIK PERKEMBANGAN PENDAPATAN PERKAPITA**  
**KOTA MATARAM TAHUN 1998-2002**

Gambar 4.14. menunjukkan bahwa pendapatan perkapita Kota Mataram menunjukkan trend yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini sedikit banyak akan meningkatkan daya beli masyarakat dan kemampuan keuangan masyarakat dalam menanggung munculnya tambahan beban, misalnya munculnya pajak daerah dan retribusi daerah baru.

#### **b) Tingkat Inflasi**

Tingkat inflasi Kota Mataram selalu berfluktuasi dan sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi serta kondisi perekonomian nasional. Tingkat inflasi tertinggi terjadi tahun 1998 yaitu mencapai 90,50%, pada tahun 1999 tingkat inflasi turun hingga mencapai 0,59%, kemudian meningkat kembali hingga tahun 2001. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh pengaruh meningkatnya harga BBM yang mempengaruhi seluruh sektor usaha. Tahun 2002 tingkat inflasi kembali turun hingga mencapai 7,96%. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat inflasi Kota

Mataram dari tahun 1998-2002 (lima tahun terakhir), dapat dilihat pada Gambar 4.15.



Sumber : Mataram Dalam Angka Tahun 1998-2002

**GAMBAR 4.15.**  
**GRAFIK TINGKAT INFLASI**  
**KOTA MATARAM TAHUN 1998-2002**

Tingkat inflasi yang tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat akibat naiknya harga-harga. Sebaliknya, inflasi yang rendah akan dapat mempertahankan daya beli masyarakat. Untuk dapat menerapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru sebagai upaya ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Mataram, maka yang diharapkan adalah tingkat inflasi yang rendah.

#### **c) Perkembangan Aktivitas Ekonomi**

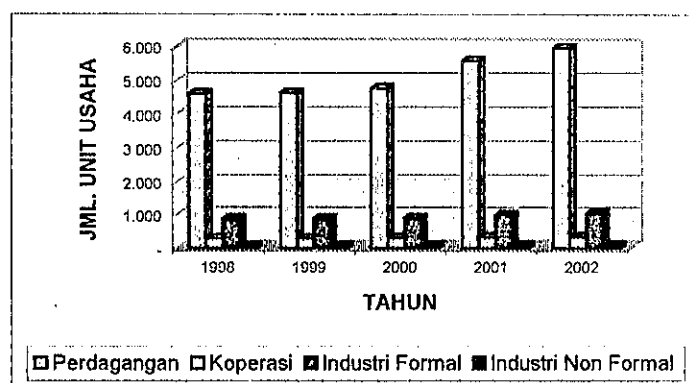
Aktivitas perekonomian di Kota Mataram, khususnya sektor perdagangan, koperasi dan industri, baik industri formal maupun non formal terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, meskipun pada tahun 1998-2000 perkembangannya sangat kecil, sebagai dampak krisis moneter yang melanda Indonesia. Pada tahun 2001-2002 barulah perkembangan unit-unit usaha khususnya perdagangan dan industri terlihat cukup berarti.

Tabel IV.24 dan Gambar 4.16. menunjukkan perkembangan unit-unit usaha di Kota Mataram dari tahun 1998-2002 (lima tahun terakhir). Adanya peningkatan jumlah unit-unit usaha setiap tahunnya, walaupun dalam jumlah yang kecil, tetapi cukup dapat memberikan gambaran adanya trend yang meningkat dari tahun ke tahun.

**TABEL IV.24.**  
**PERKEMBANGAN UNIT-UNIT USAHA DI KOTA MATARAM**  
**TAHUN 1998-2002**

NO.	JENIS USAHA	TAHUN				
		1998	1999	2000	2001	2002
1	Perdagangan	4.598	4.627	4.758	5.579	5.948
2	Koperasi	291	297	308	331	351
3	Industri Formal	882	886	895	990	1.036
4	Industri Non Formal	69	72	75	78	88

Sumber : Mataram Dalam Angka Tahun 1998-2002



Sumber : Mataram Dalam Angka Tahun 1998-2002

**GAMBAR 4.16.**  
**GRAFIK PERKEMBANGAN UNIT-UNIT USAHA DI KOTA MATARAM**  
**TAHUN 1998-2002**

#### d) Perkembangan Landuse Kota Mataram Tahun 1994-2002

Penggunaan lahan merupakan hubungan yang sangat erat antara fisik lahan/tanah dengan kegiatan manusia di atasnya. Semakin bervariasi jenis kegiatan manusia pada suatu wilayah, maka makin bervariasi pula jenis penggunaan lahan di wilayah tersebut. Lebih-lebih pada wilayah perkotaan, penggunaan lahan sangat bervariasi/heterogen dibanding dengan di wilayah

perdesaan, karena jenis kegiatan manusia yang ada di wilayah perkotaan lebih bervariasi dibandingkan dengan jenis kegiatan di wilayah perdesaan.

Klasifikasi penggunaan lahan/tanah di perkotaan dikelompokkan menjadi 8 (delapan) kelompok besar, yaitu : tanah perdagangan/perusahaan, tanah industri, tanah perumahan, tanah perkantoran dan jasa, tanah kosong sudah diperuntukkan, tanah pertanian, tanah tidak diusahakan, dan tanah untuk lain-lain seperti jalan dan sungai.

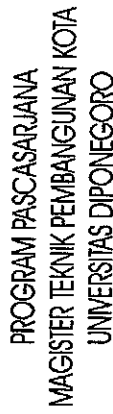
Dengan membandingkan pemetaan penggunaan lahan Kota Mataram tahun 1994 dan tahun 2002, akan dapat diketahui perubahan penggunaan lahan yang terjadi dalam kurun waktu delapan tahun.

Atas dasar perubahan penggunaan lahan akan dapat diketahui pula kecenderungan arah perkembangan kota, ketersediaan lahan dan langkah-langkah yang perlu diambil sehubungan dengan pengendalian penggunaan lahan di Kota Mataram.

Untuk lebih jelasnya mengenai perubahan penggunaan lahan (land use) Kota Mataram dari tahun 1994 yaitu pada awal berdirinya Kota Mataram, sampai dengan tahun 2002, dapat dilihat pada Gambar 3.4. dan Gambar 4.17. Dengan melakukan overlay terhadap kedua gambar tersebut, terlihat bahwa penggunaan lahan yang bertambah adalah lahan perumahan / permukiman, lahan perdagangan/perusahaan, lahan industri, lahan perkantoran/jasa dan lahan lain-lain. Sedangkan yang berkurang adalah lahan pertanian dan lahan kosong sudah diperuntukkan. Perubahan penggunaan lahan terutama dari pertanian menjadi perumahan / permukiman, perdagangan dan industri menunjukkan adanya perkembangan Kota Mataram ke arah ciri perkotaan.

Banyaknya perubahan lahan pertanian menjadi lahan perumahan / permukiman, lahan perdagangan / perusahaan, lahan industri, dan lahan perkantoran / jasa, menunjukkan adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Kota Mataram. Peningkatan aktivitas perekonomian berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Selanjutnya peningkatan pendapatan melalui suatu *multiplier effect* akan meningkatkan perekonomian Kota Mataram secara keseluruhan. Adanya pertumbuhan perekonomian ini, merupakan potensi yang dapat digali sebagai sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.





# SET




























## EKSTENSIFIKASI

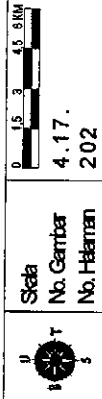
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN  
PEMBANGUNAN KOTA MATARAM**

**GAMBAR**

**PETA TATA GUNA LAHAN  
KOTA MATARAM TAHUN 1994**

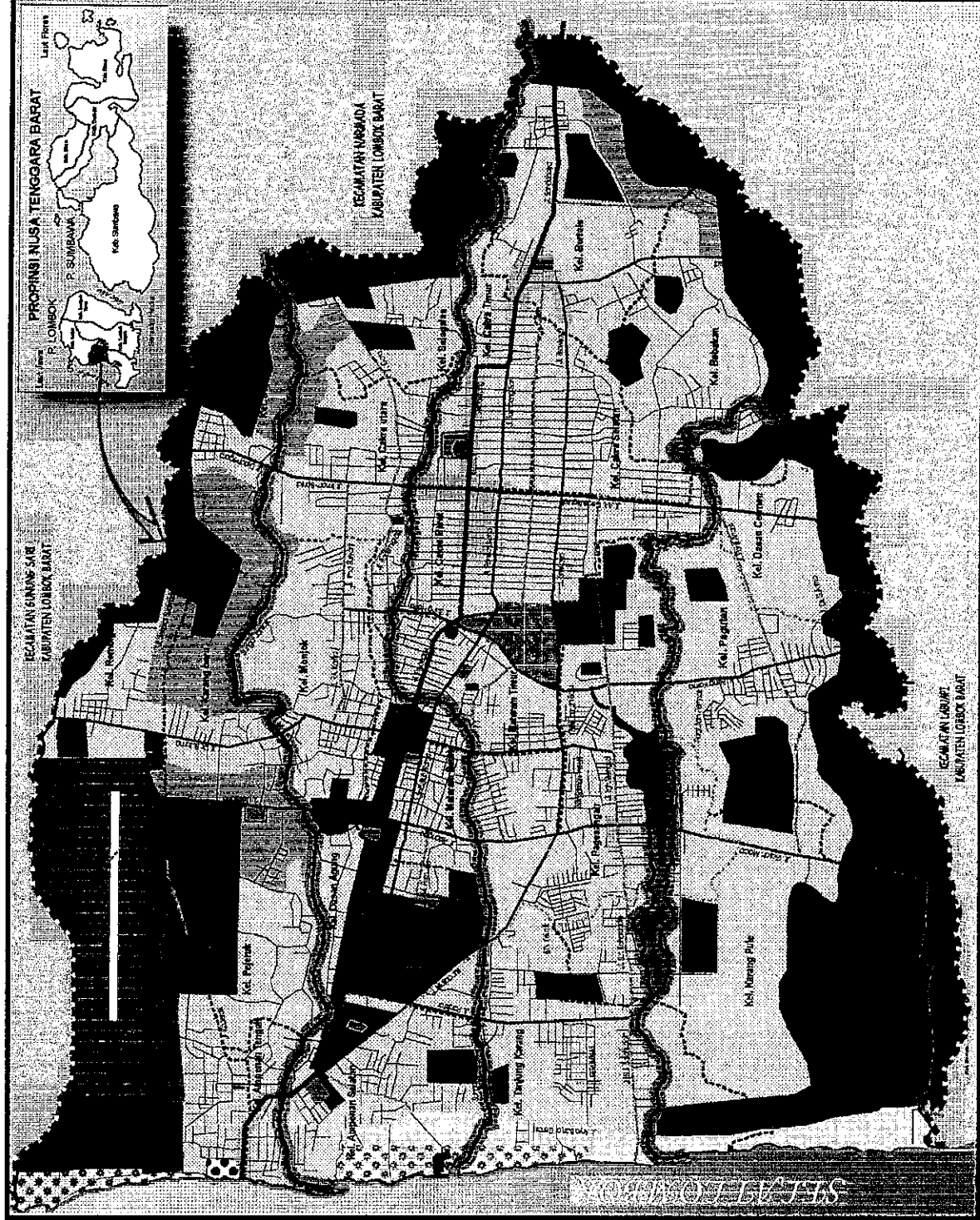
**KETERANGAN:**

- |   |   |   |                       |
|---|---|---|-----------------------|
|  | Batas Kota Mataram                      |  | Jalan Antar Lingkaran |
|  | Batas Kecamatan                         |  | Jalan Lingkaran       |
|  | Jalan Keluaran                          |  | Pemukiman             |
|  | Jalan Utama                             |  | Perkotaan             |
|  | Jalan Arter Sub Wilayah                 |  | Militer               |
|  | Kawasan                                 |  | Konservasi Sungai     |
|  | Pendidikan Tinggi                       |  | Pompa Benot           |
|  | Perencanaan                             |   |                       |
|  | Kawasan Perumahan                       |   |                       |
|  | Lembaga Pemasaran (LP)                  |   |                       |
|  | Industri dan Perdagangan                |   |                       |
|  | Kawasan Pengembangan Terbatas           |   |                       |
|  | Kawasan Hijau                           |   |                       |
|  | Depot Pertahanan Gabung Amperan         |   |                       |
|  | Lapangan Olah Raga dan Taman            |   |                       |
|  | Kawasan Pengamanan Bandara              |   |                       |
|  | Pembangkit Tenaga Listrik Diesel (PLTD) |   |                       |
|  | Kawasan Pariwisata                      |   |                       |
|  | Rumah Pajang Hewan (RPH)                |   |                       |
|  | Terminal dan Sub Terminal               |   |                       |



**SUMBER**

**BAPPEDA KOTA MATARAM**



#### **4.4. Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan Kota Mataram**

##### **4.4.1. Matrik Silang Tipologi antara Kelayakan Normatif dan PHA**

Hasil dari analisis kelayakan normatif dan PHA berupa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dinilai memenuhi kelayakan maupun yang tidak memenuhi kelayakan untuk diberlakukan sebagai upaya ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Mataram, selanjutnya disusun dalam matrik silang Tipologi kelayakan normatif dan PHA, seperti ditampilkan pada Gambar 4.18. dibawah ini. Tujuan dari penyusunan matrik silang ini adalah agar dapat diketahui tipologi jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah apa saja yang :

- memenuhi kelayakan normatif dan menjadi unggulan dalam PHA;
- memenuhi kelayakan normatif;
- menjadi unggulan dalam PHA;
- tidak memenuhi kelayakan normatif dan/atau tidak diunggulkan dalam PHA;

Dari hasil analisis kelayakan normatif diketahui bahwa dari seluruh usulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hanya Retribusi Pengujian Kualitas Limbah yang dinyatakan tidak memenuhi kelayakan, sehingga usulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memenuhi kelayakan adalah :

- 1) Pajak Parkir;
- 2) Pajak Sarang Burung Walet;
- 3) Retribusi Jasa Atas Pekerjaan;
- 4) Retribusi Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor (Cidomo);
- 5) Retribusi Izin Usaha Pariwisata;
- 6) Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta;
- 7) Retribusi Izin Berpangkal Ojek;

- 8) Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair;
- 9) Retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
- 10) Retribusi Izin Usaha Peternakan; dan
- 11) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol..

Hasil analisis PHA menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi unggulan adalah :

- 1) Pajak Parkir;
- 2) Retribusi Jasa Atas Pekerjaan; dan
- 3) Retribusi Izin Usaha Pariwisata.

Sedangkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lainnya yang tidak menjadi unggulan, tetapi tetap dapat diterapkan sebagai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru karena telah dinyatakan efisien dalam analisis efisiensi ekonomi dan tetap dapat diterima oleh narasumber PHA namun sebaiknya diberlakukan pada prioritas berikutnya setelah diberlakukannya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masuk kriteria unggulan.

Kelayakan Normatif	Memenuhi Kelayakan	<b>II</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PP</li> <li>• PSBW</li> <li>• RJAP</li> <li>• RPC</li> <li>• RIUP</li> <li>• RPK</li> <li>• RIMB</li> <li>• RIBO</li> <li>• RPLC</li> <li>• RABT</li> <li>• RUP</li> </ul>	<b>I</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PP</li> <li>• RJAP</li> <li>• RIUP</li> </ul>
	Tidak Memenuhi	<b>III</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PSBW</li> <li>• RPC</li> <li>• RPK</li> <li>• RIBO</li> <li>• RPLC</li> <li>• RABT</li> <li>• RUP</li> </ul>	<b>IV</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PP</li> <li>• RJAP</li> <li>• RIUP</li> </ul>
		Tidak Diunggulkan	Diunggulkan

PIA

Sumber : Hasil Analisis, 2003

**GAMBAR 4.18.**  
**MATRIK SILANG TIPOLOGI**  
**KELAYAKAN NORMATIF DAN PHA**

**Keterangan :**

PP	=	Pajak Parkir
PSBW	=	Pajak Sarang Burung Walet
RJAP	=	Retribusi Jasa Atas Pekerjaan
RPC	=	Retribusi Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor (Cidomo)
RPKL	=	Retribusi Pengujian Kualitas Limbah
RIUP	=	Retribusi Izin Usaha Pariwisata
RIPK	=	Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta
RIBO	=	Retribusi Izin Berpangkal Ojek
RPLC	=	Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair
RABT	=	Retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
RUP	=	Retribusi Izin Usaha Peternakan
RIMB	=	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Kuadran I	=	menunjukkan bahwa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut memenuhi kelayakan normatif dan menjadi unggulan dalam PHA.
kuadran II	=	memenuhi kelayakan normatif.
kuadran III	=	tidak memenuhi kelayakan normatif dan/atau tidak diunggulkan dalam PHA.
kuadran IV	=	menjadi unggulan dalam PHA.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berada di kuadran I merupakan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang harus diprioritaskan penerapannya sebagai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru, yaitu terdiri dari Pajak Parkir, Retribusi Jasa Atas Pekerjaan dan Retribusi Izin Usaha Pariwisata.

#### **4.4.2. Proyeksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Kontribusinya Dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan Kota Mataram**

##### **4.4.2.1. Proyeksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Mataram**

Rasio efisiensi ekonomi (rasio efisiensi) pajak daerah dan retribusi daerah baru pada tahun pertama rencana penerapannya di Kota Mataram telah disajikan pada Sub Bab 4.2.2. Sedangkan untuk rasio efisiensi pada tahun kedua sampai dengan tahun kelima rencana penerapannya di Kota Mataram, akan dianalisis pada bagian ini.

Untuk melakukan analisis efisiensi ekonomi, diperlukan data perkiraan besaran potensi aktual masing-masing pajak daerah dan retribusi daerah pada masing-masing tahun yang dianalisis. Selain itu juga diperlukan data besaran biaya pungut masing-masing pajak daerah dan retribusi daerah pada masing-masing tahun.

Perkiraan besaran potensi aktual masing-masing jenis pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun kedua hingga tahun kelima diperoleh dari hasil proyeksi berdasarkan trend pertumbuhan variabel-variabel ekonomi makro. Berdasarkan trend pertumbuhan variabel-variabel ekonomi makro, dapat ditarik suatu asumsi bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebesar 22,12% pertahun. Asumsi ini berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata PDRB Kota Mataram atas dasar harga berlaku tahun 1998-2002 seperti yang disajikan pada Tabel III.4. Digunakannya tingkat pertumbuhan PDRB, karena PDRB sendiri merupakan pencerminan dari berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi di Kota Mataram.

Dikecualikan dari penggunaan asumsi ini adalah untuk perkiraan potensi Retribusi Jasa Atas Pekerjaan. Retribusi Jasa Atas Pekerjaan menggunakan dasar asumsi yang berbeda. Asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan besaran potensi Retribusi Jasa Atas Pekerjaan adalah rata-rata pertumbuhan Anggaran Belanja Pembangunan Kota Mataram dari Tahun Anggaran 1998/1999 – 2002 (lihat Tabel I.2.) yaitu sebesar 67,60%.

Sementara itu, untuk Retribusi Izin Usaha Pariwisata dan Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta, perhitungan besaran potensinya untuk tahun kedua hingga tahun keempat berbeda dengan tahun pertama dan tahun kelima.

Perbedaan ini dikarenakan masa berlaku kedua jenis perizinan tersebut adalah lima tahun. Sehingga pada tahun kedua sampai tahun keempat merupakan masa perpanjangan izin, yang tarifnya berbeda dengan tarif daftar ulang maupun tarif permohonan izin baru. Pada tahun kedua hingga tahun keempat, besaran potensi retribusi tersebut adalah sebesar jumlah penerimaan dari perpanjangan izin ditambah dengan jumlah penerimaan dari permohonan izin baru, serta diperhitungkan juga tingkat pertumbuhan dari penerimaan retribusi tersebut.

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, maka perkiraan besaran potensi aktual pajak daerah dan retribusi daerah yang akan diberlakukan di Kota Mataram pada tahun kedua hingga tahun kelima pemberlakuannya adalah seperti terlihat pada Tabel IV.25.

**TABEL IV.25.**  
**PROYEKSI PERKEMBANGAN POTENSI AKTUAL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BARU**  
**KOTA MATARAM TAHUN KEDUA HINGGA TAHUN KELIMA RENCANA PENERAPANNYA**

NO.	JENIS PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH	BESARAN POTENSI AKTUAL (Rp)			
		TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V
	<b>Pajak Daerah</b>				
1	Pajak Parkir	171.808.186	209.812.156	256.222.605	312.899.045
2	Pajak Sarang Burung Walet	153.871.200	187.907.509	229.472.651	280.232.001
	<b>JML. POTENSI PAJAK DAERAH</b>	<b>325.679.386</b>	<b>397.719.666</b>	<b>485.695.256</b>	<b>593.131.046</b>
	<b>Retribusi Jasa Umum</b>				
1	Retribusi Jasa Atas Pekerjaan	1.585.731.431	2.657.685.878	4.454.281.532	7.465.375.848
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor (Cidomo)	38.431.164	46.932.137	57.313.526	69.991.278
3	Retribusi Pengujian Kualitas Limbah	2.198.160	2.684.393	3.278.181	4.003.314
	<b>JML. POTENSI RETRIBUSI JASA UMUM</b>	<b>1.626.360.755</b>	<b>2.707.302.409</b>	<b>4.514.873.239</b>	<b>7.539.370.441</b>
	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>				
1	Retribusi Izin Usaha Pariwisata	96.606.079	117.975.344	144.071.490	351.880.206
2	Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta	15.900.024	19.417.109	23.712.174	38.609.742
3	Retribusi Izin Berpangkal Ojek	9.494.830	11.595.086	14.159.920	17.292.094
4	Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair	80.232.840	97.980.344	119.653.596	146.120.972
5	Retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	50.191.320	61.293.640	74.851.793	91.409.010
6	Retribusi Izin Usaha Peternakan	45.904.908	56.059.074	68.459.341	83.602.547
7	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	671.660	820.231	1.001.666	1.223.235
	<b>JML. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU</b>	<b>299.001.661</b>	<b>365.140.828</b>	<b>445.909.980</b>	<b>730.137.806</b>
	<b>JML. POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI</b>	<b>2.251.041.802</b>	<b>3.470.162.903</b>	<b>5.446.478.475</b>	<b>8.862.639.293</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2003

Setelah dilakukan proyeksi terhadap besaran potensi pajak daerah dan retribusi daerah, selanjutnya dilakukan juga proyeksi untuk mengetahui besaran biaya pungut pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun kedua hingga tahun kelima rencana penerapannya di Kota Mataram. Untuk besaran biaya pungut pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun pertama rencana penerapannya telah diketahui dari hasil analisis pada Sub Bab 4.2.2.

Pertumbuhan besaran biaya pungut pajak daerah dan retribusi daerah, diasumsikan dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang terjadi. Trend laju inflasi Kota Mataram dari tahun 2001 hingga tahun 2002 menunjukkan trend yang menurun (lihat Gambar 4.15). Untuk menghindari penggunaan asumsi yang terlalu optimistik, maka tingkat inflasi yang digunakan sebagai asumsi besaran pertumbuhan biaya pungut pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebesar tingkat inflasi yang terjadi pada tahun 2002, yaitu 7,96%.

Atas dasar asumsi tersebut, maka proyeksi besaran biaya pungut pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun kedua hingga tahun kelima rencana penerapannya di Kota Mataram dapat dilihat pada Tabel IV.26.

Setelah diketahui besaran potensi dan besaran biaya pungut pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahun kedua hingga tahun kelima maka rasio efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahun kedua hingga tahun kelima tersebut sudah dapat dianalisis. Formula yang digunakan untuk mengetahui rasio efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah adalah seperti yang telah diuraikan pada Sub Bab 4.2.2. Hasil analisis rasio efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah baru untuk tahun kedua hingga tahun kelima rencana penerapannya di Kota Mataram, dapat dilihat pada Tabel IV.27.



**TABEL IV.26.**  
**PROYEKSI PERKEMBANGAN BIAYA PUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BARU**  
**KOTA MATARAM TAHUN KEDUA HINGGA TAHUN KELIMA RENCANA PENERAPANNYA**

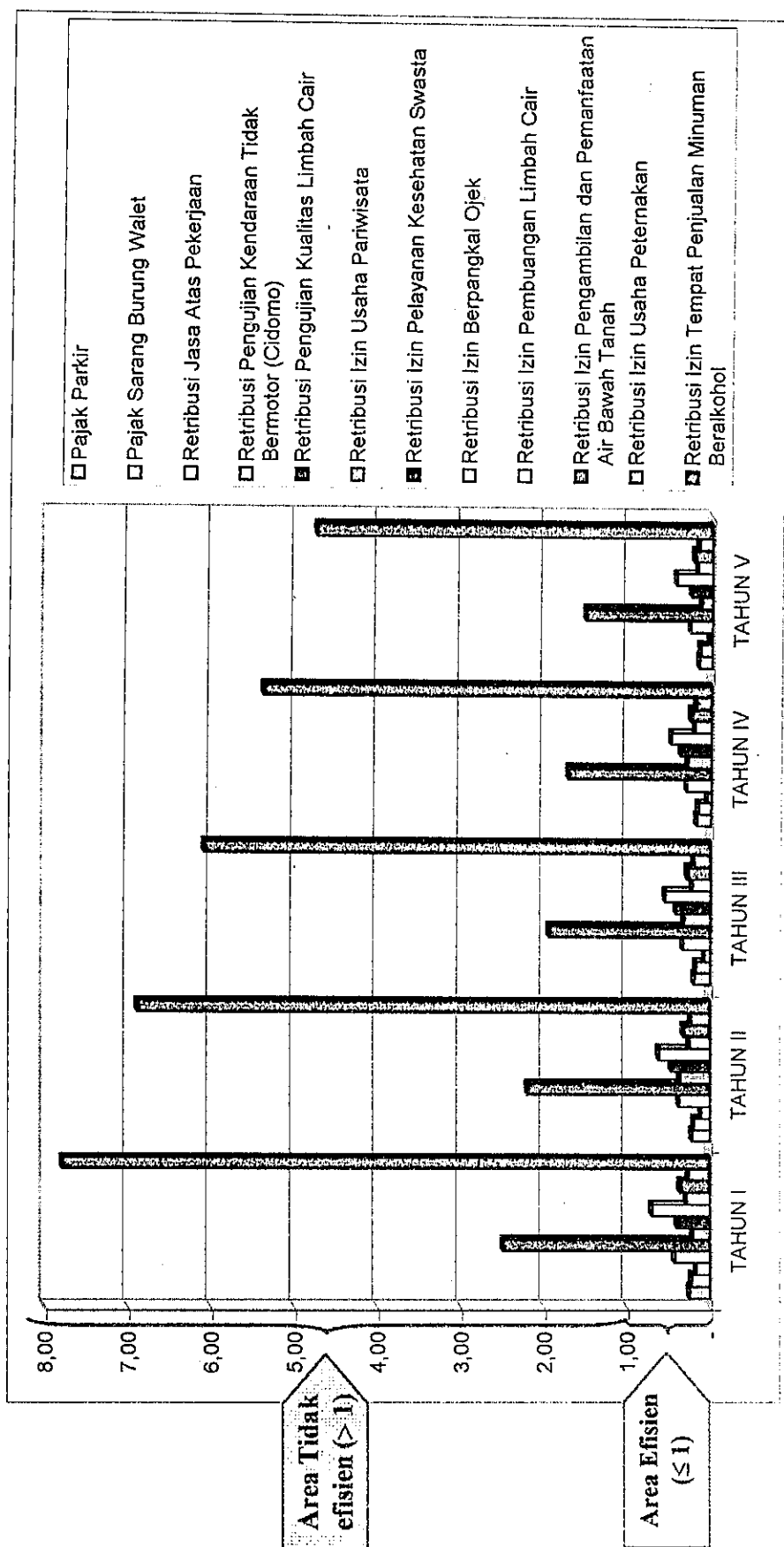
NO.	JENIS PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH	BESARAN BIAYA PUNGUT (Rp)			
		TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V
	<b>Pajak Daerah</b>				
1	Pajak Parkir	36.385.975	39.282.298	42.409.169	45.784.939
2	Pajak Sarang Burung Walet	29.473.080	31.819.137	34.351.940	37.086.355
	<b>JML. BIAYA PUNGUT PAJAK DAERAH</b>	<b>65.859.055</b>	<b>71.101.435</b>	<b>76.761.110</b>	<b>82.871.294</b>
	<b>Retribusi Jasa Umum</b>				
1	Retribusi Jasa Atas Pekerjaan	162.286.627	175.204.643	189.150.932	204.207.346
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor (Cidomo)	14.164.892	15.292.417	16.509.694	17.823.865
3	Retribusi Pengujian Kualitas Limbah Cair	4.825.812	5.209.947	5.624.658	6.072.381
	<b>JML. BIAYA PUNGUT RETRIBUSI JASA UMUM</b>	<b>181.277.331</b>	<b>195.707.007</b>	<b>211.285.284</b>	<b>228.103.593</b>
	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>				
1	Retribusi Izin Usaha Pariwisata	34.689.977	37.451.299	40.432.423	43.650.844
2	Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta	7.345.598	7.930.308	8.561.561	9.243.061
3	Retribusi Izin Berpangkal Ojek	5.793.404	6.254.558	6.752.421	7.289.914
4	Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair	19.708.098	21.276.863	22.970.501	24.798.953
5	Retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	15.724.374	16.976.034	18.327.326	19.786.182
6	Retribusi Izin Usaha Peternakan	10.621.645	11.467.128	12.379.911	13.365.352
7	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	4.623.387	4.991.409	5.388.725	5.817.667
	<b>JML. BIAYA PUNGUT RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU</b>	<b>98.506.483</b>	<b>106.347.599</b>	<b>114.812.867</b>	<b>123.951.972</b>
	<b>JML. BIAYA PUNGUT PAJAK DAN RETRIBUSI</b>	<b>345.642.868</b>	<b>373.156.041</b>	<b>402.859.251</b>	<b>434.926.859</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2003

**TABEL IV.27.**  
**PROYEKSI PERKEMBANGAN RASIO EFISIENSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BARU**  
**KOTA MATARAM TAHUN KEDUA HINGGA TAHUN KELIMA RENCANA PENERAPANNYA**

NO.	JENIS PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH	RASIO EFISIENSI			
		TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V
	<b>Pajak Daerah</b>				
1	Pajak Parkir	0,21	0,19	0,17	0,15
2	Pajak Sarang Burung Walet	0,19	0,17	0,15	0,13
	<b>Retribusi Jasa Umum</b>				
1	Retribusi Jasa Atas Pekerjaan	0,10	0,07	0,04	0,03
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor (Cidomo)	0,37	0,33	0,29	0,25
3	Retribusi Pengujian Kualitas Limbah Cair	2,20	1,94	1,72	1,52
	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>				
1	Retribusi Izin Usaha Pariwisata	0,36	0,32	0,28	0,12
2	Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta	0,46	0,41	0,36	0,24
3	Retribusi Izin Berpangkal Ojek	0,61	0,54	0,48	0,42
4	Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair	0,25	0,22	0,19	0,17
5	Retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	0,31	0,28	0,24	0,22
6	Retribusi Izin Usaha Peternakan	0,23	0,20	0,18	0,16
7	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	6,88	6,09	5,38	4,76

Sumber : Hasil Analisis, 2003



Sumber : Hasil Analisis, 2003

**GAMBAR 4.19.**  
**GRAFIK BATANG RASIO EFISIENSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BARU**  
**KOTA MATARAM TAHUN PERTAMA HINGGA TAHUN KELIMA RENCANA PENERAPANNYA**

Dari Gambar IV.19. terlihat bahwa perkiraan rasio efisiensi untuk masing-masing jenis pajak daerah dan retribusi daerah, sejak tahun pertama hingga tahun kelima rencana penerapannya, menunjukkan nilai yang semakin baik (semakin efisien). Kecuali untuk Retribusi Pengujian Kualitas Limbah Cair dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang memang sejak awal tidak efisien.

Hal ini menunjukkan bahwa semua jenis pajak daerah dan retribusi daerah tersebut (Kecuali Retribusi Pengujian Kualitas Limbah Cair dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol), apabila diterapkan di Kota Mataram akan dapat memberikan penerimaan yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran (biaya pungut). Dengan demikian, tujuan dari upaya ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah Kota Mataram, akan dapat tercapai.

#### **4.4.2.2. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan Kota Mataram**

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru yang dihasilkan dari studi ini, khususnya yang menempati Kuadran I Matrik Silang Tipologi, yaitu Pajak Parkir, Retribusi Jasa Atas Pekerjaan dan Retribusi Izin Usaha Pariwisata terhadap PAD dan APBD Kota Mataram apabila diterapkan nantinya. Data PAD dan APBD yang digunakan sebagai acuan dalam analisis ini adalah data PAD dan APBD Tahun 2002.

Data besaran PAD dan APBD Kota Mataram Tahun 2002 telah disajikan pada Bab III, khususnya pada Tabel III.9. Pada Tabel III.9. tersebut terlihat bahwa PAD Kota Mataram Tahun 2002 adalah sebesar Rp 13.944.632.369,- yang antara

lain berasal dari penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp. 6.564.506.776,- dan Retribusi Daerah sebesar Rp 5.130.572.567,- sementara itu APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2002 adalah sebesar Rp 174.094.932.491,-.

Dari hasil Analisis Besaran Potensi Aktual Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dilakukan di atas, diketahui bahwa besaran potensi Pajak Parkir adalah Rp 140.688.000, besaran potensi Retribusi Jasa Atas Pekerjaan Rp 946.140.472 dan besaran potensi Retribusi Izin Usaha Pariwisata Rp 158.215.000.

Berdasarkan data tersebut maka kontribusi Pajak Parkir, Retribusi Jasa Atas Pekerjaan dan Retribusi Izin Usaha Pariwisata adalah sebagai berikut :

a) Kontribusi Pajak Parkir :

- Terhadap penerimaan pajak daerah Tahun 2002 :

$$\frac{Rp\ 140.688.000}{Rp\ 6.564.506.776} \times 100 = 2,14\%$$

- Terhadap PAD Tahun 2002 :

$$\frac{Rp\ 140.688.000}{Rp\ 13.944.632.369} \times 100 = 1,01\%$$

- Terhadap APBD Tahun 2002 :

$$\frac{Rp\ 140.688.000}{Rp\ 174.094.932.491} \times 100 = 0,08\%$$

b) Kontribusi Retribusi Jasa Atas Pekerjaan :

- Terhadap penerimaan retribusi daerah Tahun 2002 :

$$\frac{Rp\ 946.140.472}{Rp\ 5.130.572.567} \times 100 = 18,44\%$$

- Terhadap PAD Tahun 2002 :

$$\frac{Rp\ 946.140.472}{Rp\ 13.944.632.369} \times 100 = 6,78\%$$

- Terhadap APBD Tahun 2002 :

$$\frac{Rp\ 946.140.472}{Rp\ 174.094.932.491} \times 100 = 0,54\%$$

c) Kontribusi Retribusi Izin Usaha Pariwisata :

- Terhadap penerimaan retribusi daerah Tahun 2002 :

$$\frac{Rp\ 158.215.000}{Rp\ 5.130.572.567} \times 100 = 3,08\%$$

- Terhadap PAD Tahun 2002 :

$$\frac{Rp\ 158.215.000}{Rp\ 13.944.632.369} \times 100 = 1,13\%$$

- Terhadap APBD Tahun 2002 :

$$\frac{Rp\ 158.215.000}{Rp\ 174.094.932.491} \times 100 = 0,09\%$$

d) Kontribusi retribusi daerah baru (Retribusi Jasa Atas Pekerjaan + Retribusi Izin Usaha Pariwisata) :

- Terhadap penerimaan retribusi daerah Tahun 2002 :

$$\frac{Rp\ 1.104.355.472}{Rp\ 5.130.572.567} \times 100 = 21,52\%$$

- Terhadap PAD Tahun 2002 :

$$\frac{Rp\ 1.104.355.472}{Rp\ 13.944.632.369} \times 100 = 7,92\%$$

- Terhadap APBD Tahun 2002 :

$$\frac{Rp\ 1.104.355.472}{Rp\ 174.094.932.491} \times 100 = 0,63\%$$

- e) Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah baru (Pajak Parkir + Retribusi Jasa Atas Pekerjaan + Retribusi Izin Usaha Pariwisata) :

- Terhadap PAD Tahun 2002 :

$$\frac{Rp\ 1.245.043.472}{Rp\ 13.944.632.369} \times 100 = 8,93\%$$

- Terhadap APBD Tahun 2002 :

$$\frac{Rp\ 1.245.043.472}{Rp\ 174.094.932.491} \times 100 = 0,72\%$$

Pada perhitungan di atas dapat diketahui bahwa penerimaan dari retribusi daerah baru yang terdiri dari Retribusi Jasa Atas Pekerjaan dan Retribusi Izin Usaha Pariwisata, mampu memberikan kontribusi sebesar 21,52% terhadap jumlah penerimaan retribusi daerah tahun 2002. Secara keseluruhan, pajak daerah dan retribusi daerah yang menduduki prioritas pertama untuk diberlakukan di Kota Mataram sebagai upaya ekstensifikasi, yaitu Pajak Parkir, Retribusi Jasa Atas Pekerjaan dan Retribusi Izin Usaha Pariwisata, mampu memberikan kontribusi sebesar 8,93% terhadap PAD Kota Mataram, serta 0,72% terhadap APBD Kota Mataram Tahun 2002.

Untuk lebih jelasnya, pada Tabel IV.28. ditampilkan perbandingan PAD Kota Mataram Tahun 2002 sebelum dan setelah ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah (perkiraan berdasarkan PAD Tahun 2002).

**TABEL IV.28.**  
**PERBANDINGAN PAD KOTA MATARAM**  
**TAHUN 2002 SEBELUM DAN SETELAH EKSTENSIFIKASI**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

NO.	JENIS PENERIMAAN	TAHUN 2002		TAHUN 2002 *)	
		PENERIMAAN	% thd. PAD	PENERIMAAN	% thd. PAD 2002
<b>A</b>	<b>PAJAK DAERAH</b>				
1	Pajak Hotel	711.581.633	5,10	711.581.633	5,10
2	Pajak Restoran	1.683.944.192	12,08	1.683.944.192	12,08
3	Pajak Hiburan	97.190.700	0,70	97.190.700	0,70
4	Pajak Reklame	360.478.470	2,59	360.478.470	2,59
5	Pajak Penerangan Jalan	3.013.271.830	21,61	3.013.271.830	21,61
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	186.842.678	1,34	186.842.678	1,34
7	Pajak Atas Pengiriman Barang Antar Pulau	511.197.273	3,67	511.197.273	3,67
8	Pajak Usaha Pemondokan <sup>@)</sup>	-	-	-	-
9	Pajak Parkir #)	-	-	140.688.000	1,01
10	Pajak Sarang Burung Walet #)	-	-	126.000.000	0,90
	<b>Jumlah Penerimaan Pajak Daerah</b>	<b>6.564.506.776</b>	<b>47,08</b>	<b>6.831.194.776</b>	<b>48,99</b>
<b>B</b>	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>				
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	248.443.012	1,78	248.443.012	1,78
2	Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	355.223.910	2,55	355.223.910	2,55
3	Ret. Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	305.327.500	2,19	305.327.500	2,19
4	Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	339.830.000	2,44	339.830.000	2,44
5	Ret. Pelayanan Pasar	1.979.920.775	14,20	1.979.920.775	14,20
6	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	274.624.608	1,97	274.624.608	1,97
7	Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	2.500.000	0,02	2.500.000	0,02
8	Ret. Penggantian Biaya Cetak Peta	1.048.000	0,01	1.048.000	0,01
9	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	74.419.875	0,53	74.419.875	0,53
10	Ret. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	239.267.860	1,72	239.267.860	1,72
11	Ret. Terminal	176.519.500	1,27	176.519.500	1,27
12	Ret. Tempat Khusus Parkir	108.579.790	0,78	108.579.790	0,78
13	Ret. Penyedotan Kakus	19.005.000	0,14	19.005.000	0,14
14	Ret. Rumah Potong Hewan	160.172.250	1,15	160.172.250	1,15
15	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	749.961.187	5,38	749.961.187	5,38
16	Ret. Izin Gangguan	30.575.000	0,22	30.575.000	0,22
17	Ret. Izin Trayek	31.829.300	0,23	31.829.300	0,23
18	Ret. Izin Usaha Perdagangan	28.175.000	0,20	28.175.000	0,20
19	Ret. Izin Usaha Perindustrian	2.250.000	0,02	2.250.000	0,02
20	Ret. Izin Usaha Perfilman dan Rekaman Video	2.900.000	0,02	2.900.000	0,02
21	Ret. Izin Usaha Penyelenggaraan Telekomunikasi <sup>@)</sup>	-	-	-	-
22	Ret. Pedagang Kaki Lima <sup>@)</sup>	-	-	-	-
23	Ret. Izin Usaha Jasa Konstruksi <sup>@)</sup>	-	-	-	-
24	Ret. Izin Usaha Bidang Farmasi <sup>@)</sup>	-	-	-	-
25	Retribusi Jasa Atas Pekerjaan #)	-	-	946.140.472	6,78
26	Retribusi Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor (Cidomo) #)	-	-	31.470.000	0,23
27	Retribusi Pengujian Kualitas Limbah #)	-	-	1.800.000	0,01
28	Retribusi Izin Usaha Pariwisata #)	-	-	158.215.000	1,13
29	Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta #)	-	-	17.360.000	0,12
30	Retribusi Izin Berpangkal Ojek #)	-	-	7.775.000	0,06
31	Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair #)	-	-	65.700.000	0,47
32	Retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah #)	-	-	41.100.000	0,29
33	Retribusi Izin Usaha Peternakan #)	-	-	37.590.000	0,27
34	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol #)	-	-	550.000	0,00
	<b>Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah</b>	<b>5.130.572.567</b>	<b>36,79</b>	<b>6.438.273.039</b>	<b>46,17</b>
<b>C</b>	<b>Laba Perusahaan Milik Daerah</b>	<b>488.519.300</b>	<b>3,50</b>	<b>488.519.300</b>	<b>3,50</b>
<b>D</b>	<b>Lain-lain PAD yang sah</b>	<b>1.761.033.726</b>	<b>12,63</b>	<b>1.761.033.726</b>	<b>12,63</b>
	<b>JUMLAH PAD</b>	<b>13.944.632.369</b>	<b>100,00</b>	<b>15.519.020.841</b>	<b>100,00</b>

\*) perkiraan berdasarkan PAD. Tahun 2002

@) Pajak/retribusi hasil ekstensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram

#) Pajak/retribusi hasil ekstensifikasi yang diusulkan dalam studi ini

Sumber : Hasil Analisis, 2003



Pada Tabel IV.28, tanda @) menunjukkan jenis pajak daerah dan retribusi daerah baru yang merupakan hasil usaha ekstensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram. Perda untuk masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah tersebut telah disahkan pada tanggal 12 Juli 2003. Sedangkan tanda #) menunjukkan jenis pajak daerah dan retribusi daerah baru hasil kajian studi ini.

#### **4.5. Program Rencana Tindak (*Action Plan*) Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan Kota Mataram**

Untuk dapat menyusun Program Rencana Tindak (*action plan*), terlebih dahulu perlu diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan dihadapi dalam penerapan pajak daerah dan retribusi daerah baru sebagai upaya ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut, dilakukan melalui analisis SWOT.

Analisis SWOT ini disusun berdasarkan uraian kondisi keuangan Kota Mataram seperti dijelaskan pada latar belakang dan berdasarkan hasil Analisis Variabel Ekonomi Makro yang telah dilakukan serta data sekunder lainnya seperti Laporan Nota Perhitungan APBD Kota Mataram, Renstra Dinas Pendapatan Kota Mataram serta Renstra Kota Mataram sebagai pendukung untuk memberikan penjelasan tambahan mengenai kondisi Kota Mataram.

Adapun proses analisis SWOT selengkapnya adalah sebagai berikut :

##### **Kekuatan (Strenght) :**

- 1) Adanya potensi yang cukup besar yang belum digali dan dikembangkan, terutama berkaitan dengan letak geografis yang sangat strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa dan pendidikan.

- 2) Adanya pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kota/Kabupaten dalam kerangka otonomi daerah.
- 3) Adanya komitmen Pemerintah Kota untuk meningkatkan PAD.
- 4) Tingkat pendidikan SDM dilingkungan dinas/instansi pengelola PAD cukup memadai.

#### **Kelemahan (Weakness)**

- 1) Kurang optimalnya penggalian sumber-sumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru.
- 2) Kurangnya koordinasi antar dinas/instansi yang terkait dengan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Terbatasnya jumlah juru pungut.
- 4) Data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kurang akurat.

#### **Peluang (Opportunity)**

- 1) Adanya sebelas jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memenuhi kelayakan normatif, tiga jenis yang menjadi unggulan dalam PHA, dan tiga jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang harus diprioritaskan penerapannya karena telah memenuhi kelayakan kedua jenis analisis yaitu normatif dan PHA.
- 2) Adanya perkembangan yang positif atas variabel-variabel ekonomi makro, seperti pendapatan perkapita, tingkat inflasi, perkembangan aktivitas ekonomi dan perkembangan landuse.
- 3) Faktor keamanan cukup kondusif

**Ancaman (Threats)**

- 1) Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak / Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.
- 2) Penerapan kebijakan Pemerintah Kota yang kurang konsisten
- 3) Manipulasi data oleh wajib pajak/wajib retribusi
- 4) Stabilitas politik dan keamanan nasional yang tidak menentu

Berdasarkan identifikasi atas faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut, selanjutnya dapat disusun rencana strategi ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk lebih jelasnya, analisis SWOT dan rencana strategi ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disajikan pada Tabel IV.29.

**TABEL IV.29.**  
**ANALISIS SWOT PELAKSANAAN EKTENSIFIKASI**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MATARAM**

<div style="text-align: center;"> <b>Faktor-faktor Internal</b> </div> <div style="text-align: center;"> <b>Faktor-faktor Eksternal</b> </div>	<b><u>Kekuatan (Strenght) :</u></b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adanya potensi yang cukup besar yang belum digali dan dikembangkan, terutama berkaitan dengan letak geografis yang sangat strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa dan pendidikan.</li> <li>2) Adanya pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kota/Kabupaten dalam kerangka otonomi daerah.</li> <li>3) Adanya komitmen Pemerintah Kota untuk meningkatkan PAD.</li> <li>4) Tingkat pendidikan SDM dilingkungan dinas/instansi pengelola PAD cukup memadai.</li> </ol>	<b><u>Kelemahan (Weakness) :</u></b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kurang optimalnya penggalan sumber-sumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru.</li> <li>2) Kurangnya koordinasi antar dinas/instansi yang terkait dengan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>3) Terbatasnya jumlah juru pungut.</li> <li>4) Data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kurang akurat.</li> </ol>
	<b><u>Peluang (Opportunity)</u></b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adanya sebelas jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memenuhi kelayakan normatif, tiga jenis yang menjadi unggulan dalam PHA, dan tiga jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang harus diprioritaskan penerapannya karena telah memenuhi kelayakan kedua jenis analisis yaitu normatif dan PHA.</li> <li>2) Adanya perkembangan yang positif atas variabel-variabel ekonomi makro.</li> <li>3) Faktor keamanan cukup kondusif</li> </ol>	<b><u>Strategi SQ</u></b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menerapkan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memenuhi kelayakan analisis</li> </ol>
	<b><u>Ancaman (Threats)</u></b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak / Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.</li> <li>2) Penerapan kebijakan Pemerintah Kota yang kurang konsisten</li> <li>3) Manipulasi data oleh wajib pajak/wajib retribusi</li> <li>4) Stabilitas politik dan keamanan nasional yang tidak menentu</li> </ol>	<b><u>Strategi ST</u></b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan sosialisasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2) Meningkatkan konsistensi penerapan kebijakan pemerintah kota</li> <li>3) Meningkatkan pengawasan kepada wajib pajak / wajib retribusi</li> </ol>
		<b><u>Strategi WO</u></b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan koordinasi antar dinas/instansi yang terkait dengan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2) Meningkatkan akurasi data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ol>
		<b><u>Strategi WT</u></b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemberian insentif terhadap juru pungut dan wajib pajak dan wajib retribusi yang taat membayar.</li> <li>2) Menambah tenaga juru pungut</li> </ol>

*Sumber : Hasil Analisis, 2003.*

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut di atas, selanjutnya disusun suatu Program Rencana Tindak (*action plan*). Program rencana tindak (*Action Plan*) yang dimaksud disini adalah rencana tindak sebagai serangkaian tindakan

secara sistematis dan terencana untuk menyelesaikan permasalahan yang dapat diidentifikasi dan segera memerlukan pemecahan. Program rencana tindak ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Mataram disajikan dalam Tabel IV.30.

**TABEL IV.30.**  
**PROGRAM RENCANA TINDAK EKSTENSIFIKASI**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MATARAM**

NO.	PELUANG	PROGRAM RENCANA TINDAK
1.	Adanya usulan pemberlakuan dua jenis pajak daerah dan enam jenis retribusi daerah dari dinas / instansi terkait. Dan dari hasil analisis, ternyata Pajak Parkir, Retribusi Jasa Atas Pekerjaan dan Retribusi Izin Usaha Pariwisata harus diprioritaskan penerapannya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pembahasan dengan seluruh dinas / instansi terkait (Dispenda sebagai koordinator) untuk membahas adanya peluang bagi Kota Mataram dalam menerapkan beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah, terutama memprioritaskan pemberlakuan pajak daerah dan retribusi daerah yang berada pada kuadran I Matrik Silang Tipologi Kelayakan Normatif dan PHA (hasil studi ini), yaitu Pajak Parkir, Retribusi Jasa Atas Pekerjaan dan Retribusi Izin Usaha Pariwisata. Selanjutnya dilakukan juga penghitungan besaran tarif untuk masing-masing jenis pajak dan retribusi tersebut, menyusun Ranperda dengan koordinasi antara dinas/instansi terkait serta Bagian Hukum, melakukan pembahasan Ranperda dengan DPRD, pengesahan Perda, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, hingga pemberlakuan Perda tersebut.</li> <li>• Melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai arti pentingnya pajak / retribusi daerah yang mereka bayarkan bagi pembangunan Kota Mataram.</li> <li>• Meningkatkan kesadaran pengusaha akan pentingnya melaksanakan pembukuan atas kegiatan usahanya. Dengan adanya pembukuan yang baik, akan mempermudah perhitungan pengenaan pajak.</li> </ul>

*Sumber : Hasil Analisis, 2003.*

Dengan telah ditetapkan program rencana tindak tersebut, selanjutnya adalah melaksanakan apa yang telah digariskan dalam program rencana tindak tersebut, dengan tujuan akhir agar pelaksanaan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Mataram dapat terlaksana tanpa banyak mengalami hambatan, sehingga mampu meningkatkan penerimaan daerah dalam menunjang pembiayaan pembangunan Kota Mataram.

Mengingat rencana tindak (*action plan*) adalah suatu program jangka pendek yang harus dilakukan dengan cepat, maka demi efisiensi waktu dan mempermudah pelaksanaannya di lapangan, perlu disusun jadwal waktu pelaksanaan dari program rencana tindak tersebut. Jadwal Waktu Pelaksanaan Program Rencana Tindak Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditampilkan pada Tabel IV.31. Pada Tabel IV.31. terlihat bahwa waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh program Rencana Tindak tersebut adalah enam bulan.

**TABEL IV.31.**  
**JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PROGRAM RENCANA TINDAK EKSTENSIFIKASI**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MATARAM**

NO.	KEGIATAN	BULAN KE :																							
		I				II				III				IV				V				VI			
		MINGGU				MINGGU				MINGGU				MINGGU				MINGGU				MINGGU			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Mengadakan pembahasan tentang adanya peluang bagi Kota Mataram untuk menerapkan Pajak Parkir, Retribusi Jasa Atas Pekerjaan dan Retribusi Izin Usaha Pariwisata yang merupakan hasil dari studi ini, antara dinas/instansi pengelola PAD (dikoordinir oleh Dispenda).																								
2	Pembahasan antara dinas / instansi pengelola PAD (dikoordinir oleh Dispenda) tentang besaran tarif Pajak Parkir, Retribusi Jasa Atas Pekerjaan dan Retribusi Izin Usaha Pariwisata. Serta mengugaskan Dinas Perhubungan bersama Bagian Hukum untuk menyusun Ranperda Pajak Parkir, mengugaskan Dinas Pendapatan bersama Bagian Hukum untuk menyusun Ranperda Retribusi Jasa Atas Pekerjaan dan mengugaskan Dinas Pariwisata bersama Bagian Hukum untuk menyusun Ranperda Retribusi Izin Usaha Pariwisata.																								
3	Dinas Perhubungan bersama Bagian Hukum menyusun Ranperda Pajak Parkir, Dinas Pendapatan bersama Bagian Hukum menyusun Ranperda Retribusi Jasa Atas Pekerjaan dan Dinas Pariwisata bersama Bagian Hukum menyusun Ranperda Retribusi Izin Usaha Pariwisata.																								
4	Pembahasan Ranperda Pajak Parkir antara Dinas Perhubungan, Bagian Hukum dan Komisi C DPRD Kota Mataram.																								
5	Pembahasan Ranperda Retribusi Jasa Atas Pekerjaan antara Dinas Pendapatan, Bagian Hukum dan Komisi C DPRD Kota Mataram.																								
6	Pembahasan Ranperda Retribusi Izin Usaha Pariwisata antara Dinas Pariwisata, Bagian Hukum dan Komisi C DPRD Kota Mataram.																								
7	Revisi Ranperda (bila diperlukan) oleh masing-masing Dinas penyusun Ranperda bersama Bagian Hukum, sesuai hasil pembahasan dengan Komisi C DPRD.																								
8	Pengesahan ketiga Perda yang diusulkan tersebut.																								
9	Melakukan sosialisasi atas ketiga Perda tersebut oleh masing-masing dinas yang ditunjuk sebagai pelaksana masing-masing Perda.																								
10	Pemberlakuan ketiga Perda tersebut di Kota Mataram																								

Sumber : Hasil Analisis, 2003.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan serangkaian analisis yang telah dilakukan sehubungan dengan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam menunjang Pembiayaan Pembangunan Kota Mataram, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat tiga jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memenuhi kelayakan normatif dan juga menjadi unggulan para narasumber dalam PHA. Yaitu Pajak Parkir, Retribusi Jasa Atas Pekerjaan dan Retribusi Izin Usaha Pariwisata. Ketiga jenis pajak dan retribusi daerah tersebut harus diprioritaskan penerapannya sebagai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru di Kota Mataram. Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lainnya yang berhasil diidentifikasi dalam studi ini dapat diberlakukan pada prioritas berikutnya.
2. Analisis terhadap variabel-variabel ekonomi makro seperti pendapatan perkapita, tingkat inflasi, perkembangan aktivitas ekonomi dan perkembangan landuse menunjukkan adanya trend yang meningkat secara positif. Hal ini menunjukkan adanya kesiapan/kemampuan masyarakat Kota Mataram dalam menerima adanya beban tambahan berupa pemberlakuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru. Dengan demikian diharapkan penerapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru tidak akan menimbulkan pertentangan atau gejolak di kalangan masyarakat



3. Upaya ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah sebaiknya dilakukan sebagai pilihan kedua setelah upaya intensifikasi dilakukan secara optimal. Hal ini mengingat upaya ekstensifikasi dapat menimbulkan dampak yang sangat luas ditengah masyarakat. Termasuk dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian, seperti timbulnya ekonomi biaya tinggi yang dapat menurunkan efisiensi kegiatan usaha serta menurunkan minat investor untuk berinvestasi.

## **5.2. Rekomendasi**

Dari kesimpulan yang telah didapat, maka direkomendasikan kepada Pemerintah Kota Mataram dan pada penelitian – penelitian yang akan datang, hal-hal sebagai berikut :

### **a) Rekomendasi Kepada Pemerintah Kota Mataram**

Beberapa masukan yang dapat direkomendasikan kepada Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kota Mataram antara lain :

- 1) Memberlakukan Pajak Parkir, Retribusi Jasa Atas Pekerjaan dan Retribusi Izin Usaha Pariwisata sebagai jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru di Kota Mataram. Hal ini karena jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut telah memenuhi kelayakan dari serangkaian analisis yang telah dilakukan dalam studi ini serta memiliki potensi yang cukup besar.
- 2) Dalam pemberlakuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru tersebut, perlu melibatkan Tim Peningkatan PAD, yang selama ini hanya ditugaskan melakukan upaya intensifikasi.
- 3) Usaha intensifikasi PAD, khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu terus dilaksanakan dengan tetap melibatkan Tim Peningkatan PAD.

Dengan demikian usaha ekstensifikasi akan melengkapi usaha intensifikasi yang dilaksanakan selama ini.

- 4) Koordinasi antar dinas/instansi pengelola PAD harus ditingkatkan dalam kegiatan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan koordinasi yang baik, kegiatan ekstensifikasi akan dapat memberikan hasil yang lebih optimal.

**b) Rekomendasi Penelitian Lanjutan**

Beberapa masukan yang dapat direkomendasikan kepada para peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu :

- 1) Sejalan dengan semakin besarnya kewenangan daerah dalam era otonomi daerah dan adanya berbagai kendala dalam melakukan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan penelitian mengenai peluang dilakukannya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak Pemerintah Pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah. Hal ini sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah dimasa mendatang. Didorong pula oleh kenyataan bahwa saat ini peluang bagi daerah untuk melakukan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat terbatas, karena ketatnya kriteria yang harus dipenuhi.
- 2) Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan berbagai cara selain intensifikasi dan ekstensifikasi. Untuk itu kiranya perlu dilakukan penelitian tentang upaya pembiayaan pembangunan daerah melalui efisiensi anggaran dan revitalisasi perusahaan milik daerah serta penelitian tentang upaya

pembiayaan pembangunan daerah melalui sumber-sumber pembiayaan non konvensional.

### **5.3. Kelemahan Studi**

Kelemahan dari studi ini adalah belum disajikannya operasional planning sehubungan dengan rencana penerapan Pajak Parkir, Retribusi Jasa Atas Pekerjaan dan Retribusi Izin Usaha Pariwisata secara fisik spasial dengan detail pada peta yang memiliki skala lebih rinci.

Selain itu, dalam studi ini data perbandingan dengan daerah lain masih sangat terbatas, yaitu hanya menyangkut jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan di daerah lain, belum memuat tentang detail pelaksanaan (implementasi) masing-masing jenis pajak daerah dan retribusi daerah tersebut di masing-masing daerah. Hal ini disebabkan oleh adanya sikap tertutup yang dilakukan oleh berbagai daerah. Sehingga data yang diperlukan menjadi sangat sulit diperoleh.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Halim, 2002, *Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat.
- Ahmad Yani, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Badrul Munir, 2002, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Mataram, Badan Penerbit BAPPEDA Propinsi NTB.
- Bambang Kesit Prakosa, 2003, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta, UII Press.
- Bintoro Tjokroamidjojo, 2001, *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*, Jakarta, LAN RI.
- Davey, K.J., 1988, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah - Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, Terjemahan Amanullah, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Devas, Nick. et.all., 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Terjemahan Masri Maris, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Freddy Rangkuti, 2000, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Gray, Clive, et.all., 1993, *Pengantar Evaluasi Proyek*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Hamrolie Harun, 2003, *Menetapkan Program Sosialisasi untuk Peningkatan PAD*, (Edisi Pertama), Yogyakarta, BPFE.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*, (Edisi Pertama), Yogyakarta, BPFE.
- Jane, Orpha, et all, 2002, *Prosiding Workshop Internasional Implementasi Desentralisasi Fiskal sebagai Upaya Memberdayakan Daerah dalam Membiayai Pembangunan Daerah*, Bandung, Fisip Universitas Katolik Parahyangan.
- Kaho, Josef Riwu, 1995, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

- Krishna D. Darumurti, 2000, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, Bandung, Penerbit : Citra Aditya Bakti
- Kunarjo, 1996, *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*, Edisi ke-3, Jakarta, UI-Press
- M. Suparmoko, 2000, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Kelima, Yogyakarta, BPFE.
- Manggaukang Raba dan Asmawati, 2000, *Fakta-fakta Tentang Nusa Tenggara Barat (Lombok & Sumbawa)*, Yayasan Pembangunan Insan Cita.
- Muqodim, 1999, *Perpajakan* (Buku Satu), Edisi ke-2 (Revisi), Yogyakarta, UII Press dan Ekonisia.
- Osborne, David dan Ted Gaebler, 1997, *Mewiransahakan Birokrasi*, Terjemahan Abdul Rosyid, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo.
- Philip Yamin dan Rudi Hartono, 2002, *Permasalahan Walet dan Solusinya*, Jakarta, Penebar Swadaya.
- Prijono Tjiptoherijanto, 1997, *Prospek Perekonomian Indonesia dalam rangka Globalisasi*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Saaty, Thomas L., 1993, *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin -- Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks*, Terjemahan Liana Setiono, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo.
- Soetrisno, 1981, *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*, Yogyakarta, BPFE.
- Sugiarto, et.all., 2001, *Teknik Sampling*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.

#### **SKRIPSI/TESIS/PUBLIKASI TERBATAS**

- Bambang Brodjonegoro, 2000, *"Implikasi Desentralisasi Ekonomi Terhadap Manajemen Perkotaan"*, disampaikan pada Forum URDI, 13 September 2000. ([www.urdi.org/bulletin/volume-10b.asp](http://www.urdi.org/bulletin/volume-10b.asp)) 25/07/2003.
- Ibnu Hidayat, 2002, *"Studi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah di Kabupaten Grobogan"*, Tugas Akhir tidak diterbitkan, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.

- Machfud Sidik, 2002, "*Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*", Makalah Disampaikan dalam Acara Orasi Ilmiah dengan tema "*Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan daerah Melalui Penggalan Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah*" Acara Wisuda XXI STIA LAN, Bandung Tahun Akademik 2001/2002, Bandung, 10 April 2002.
- Mulyanto, 2002, "*Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kawasan Subosuka Wonosraten Propinsi Jawa Tengah*", disampaikan dalam Kegiatan: "*Regional University Consortium Conference on Progress in Fiscal Decentralization*" yang diadakan atas Kerjasama antara IRIS (*Institutional Reform and the Informal Sector*), *University of Maryland* dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (LPEM FEUI) di Hotel Borobudur, Jl. Lapangan Banteng, Jakarta, 2 Juli 2002.
- Murzani, 2002, "*Kajian Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Lhokseumawe*", Tesis tidak diterbitkan, Magister Teknik Pembangunan Kota Universitas Diponegoro, Semarang.
- Pemerintah Kota Mataram, 2001, *Delapan Tahun Kota Mataram*, Mataram, Kantor Informasi dan Komunikasi Kota Mataram.
- Pemerintah Kota Mataram, 2002, *Sembilan Tahun Kota Mataram*, Mataram, Kantor Informasi dan Komunikasi Kota Mataram.
- Samsul Ma'rif, 2002, *Pembiayaan Pembangunan*, Bahan Kuliah untuk Kalangan Sendiri, Semarang : Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik UNDIP.
- Syahrudin Yasin, 2002, "*Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Provinsi Nusa Tenggara Barat: Permasalahan Dan Upaya Pemecahan*", Makalah Falsafah Sains (PPs 702), Program Pasca Sarjana / S3, Institut Pertanian Bogor, December 2002, [www.rudycr.tripod.com/sem1\\_023/syahrudin\\_yasin.htm](http://www.rudycr.tripod.com/sem1_023/syahrudin_yasin.htm), 06/09/2003.

## PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram.
- Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah RI No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 Tanggal 16 Juli 2002 Tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kota Mataram Sebagai Daerah Otonom.

#### **DATA STATISTIK/LAPORAN INSTANSI**

*Data Pokok Pembangunan Kota Mataram, 2001, Bappeda Kota Mataram dan Badan Pertanahan Kota Mataram.*

*Mataram Dalam Angka Tahun 1998-2001, BPS Kota Mataram.*

*Memori 5 Tahun Pengelolaan APBD Kota Mataram TA. 1994 1995 1998 1999, 2001, Bagian Keuangan Setda Kota Mataram.*

*Nota Perhitungan APBD Kota Mataram TA. 1999 2000 2002, Bagian Keuangan Setda Kota Mataram.*

*PDRB Kota Mataram Tahun 1998-2002, BPS Kota Mataram dan Bappeda Kota Mataram.*

*Profil Kota Mataram, 2002, Pemerintah Kota Mataram.*

*Renstra Dinas Pendapatan Kota Mataram Tahun 2002, Dinas Pendapatan Kota Mataram.*

*Renstra Kota Mataram 2003-2007, Bappeda Kota Mataram.*

#### **SURAT KABAR/JURNAL/INTERNET**

Fuad Bawazier, 1998, *Dampak Pungutan Terhadap Dunia Usaha - Dampak Pungutan Terhadap Ekonomi Biaya Tinggi*, Seri Kajian Fiskal dan Moneter, Pusat Pengkajian Fiskal dan Moneter, Jakarta, CSIS.

InfoOtda.com, 24 Juni 2003, *Perda Bermasalah dan Perlunya Institusionalisasi Regulatory Review*, [www.infootda.com](http://www.infootda.com), 14/08/2003

- Ispen Safrel, 2001, *Aplikasi Analytical Hierarchy Proses (AHP) Untuk Penentuan Prioritas Pembangunan – contoh kasus imajiner Pembangunan Industri dan Transportasi di Pulau Sumatera*, Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan, No. 5 Volume 3, Juni 2001, Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UNNES.
- Kompas, *Burung Walet Pendukung PAID*, Rabu, 18 April 2001, [www.kompas.com](http://www.kompas.com), 20/08/2003
- Kompas, *Ribuan Perda Baru yang Bikin Pusing*, 14 Agustus 2003
- Mar,ie Muhammad, 2002, *Pajak dan Bisnis ibarat Ikan dan Air*, 23 Desember 2002, [www.klikpajak.com](http://www.klikpajak.com), 15/01/2003
- Maxensius Trisambodo, *Otonomi Daerah tanpa Kacamata Kuda*, 20 Desember 2002, [www.munindo.brd.de](http://www.munindo.brd.de), 15/01/2003.
- Pemerintah Kabupaten Kendal, *Produk Hukum Kabupaten Kendal*, [www.kabupaten-kendal.go.id/ind/hukum.htm](http://www.kabupaten-kendal.go.id/ind/hukum.htm), 21/08/2003
- Pemerintah Kota Makassar, *Peraturan Daerah Pemerintah Kota Makassar Tahun 1991 – 2002*, [www.makassar.go.id](http://www.makassar.go.id), 21/08/2003
- Prima Setiawan, 2000, *Pentingnya Alternatif Pendanaan Bagi Daerah*, Media BUILD Edisi 4, Oktober 2000.
- Situs Tentang Pembahasan Perda, *Daftar Peraturan Daerah*, [www.geocities.com](http://www.geocities.com), 21/08/2003.
- Suara Merdeka, Sabtu, 16 Agustus 2003, *Analisis Perda Bermasalah dan Efisiensi Ekonomi*, [www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com), 21/08/2003.
- [www.dprin.go.id/regulasi/2001/11/S-486.htm](http://www.dprin.go.id/regulasi/2001/11/S-486.htm), *Pertimbangan Menteri Keuangan Atas Perda Tentang Pajak Dan Retribusi (Surat Menteri Keuangan No.S-486/MK.07/2001 Tanggal 2 November 2001)*, 21/08/2003.
- [www.geocities.com/aripsda/makalah/wto\\_otda.htm](http://www.geocities.com/aripsda/makalah/wto_otda.htm), *Kesepakatan WTO Vs Peningkatan Pendapatan Asli Daerah : Tinjauan Perda tentang Pungutan terhadap Komoditi di Beberapa Daerah*, 21/08/2003.
- [www.kppod.org/perda/Perda/20Propinsi.htm](http://www.kppod.org/perda/Perda/20Propinsi.htm), *Dokumentasi Perda / Ranperda Pemda Dati I dan Pemda Dati II Milik KPPOD*, 21/08/2003.
- [www.ngo.or.id/lbhmedan/berita-05.htm](http://www.ngo.or.id/lbhmedan/berita-05.htm), *Hasil Poling tentang Penangkaran Burung Walet dan Aspek Negatifnya Terhadap Lingkungan Hidup*, 20/08/2003.